



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**RADIKALISME KELOMPOK ISLAM**

**(Analisis Stuktur-Agen Terhadap Wacana Radikalisme Kelompok Islam  
Pasca-Orde Baru)**

**TESIS**

**SAKTI WIRA YUDHA**

**1006745820**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA DEPARTEMEN SOSIOLOGI  
DEPOK, JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**RADIKALISME KELOMPOK ISLAM**

**(Analisis Struktur-Agen Terhadap Wacana Radikalisme Kelompok Islam  
Pasca-Orde Baru)**

**TESIS**

**(Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar  
Magister Sains (M.Si) dalam bidang Sosiologi)**

**SAKTI WIRA YUDHA**

**1006745820**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA DEPARTEMEN SOSIOLOGI  
DEPOK, JULI 2012**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN SOSIOLOGI  
PROGRAM PASCASARJANA SOSIOLOGI**

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini Saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia

Jika dikemudian hari ternyata Saya melakukan tindakan plagiarisme, Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada Saya.

Depok, 2 Juli 2012



Sakti Wira Yudha

UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN SOSIOLOGI  
PROGRAM PASCASARJANA SOSIOLOGI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya Saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah Saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sakti Wira Yudha

NPM : 1006745820

Tanda tangan :

Tanggal : 2 Juli 2012

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN SOSIOLOGI  
PROGRAM PASCASARJANA SOSIOLOGI**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Sakti Wira Yudha

NPM : 1006745820

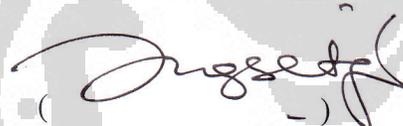
Program Studi : Sosiologi

Judul Tesis : **Radikalisme Kelompok Islam (Analisis Struktur-Agen Terhadap Wacana Radikalisme Kelompok Islam Pasca-Orde Baru)**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

**PANITIA PENGUJI**

Ketua Sidang : Lugina Setyawati, Ph.D

()

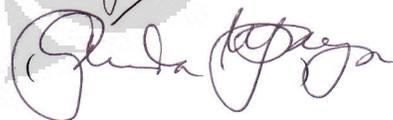
Sekretaris Sidang : Diana T. Pakasi, M.Si

()

Pembimbing : Iwan Gardono Sujatmiko, Ph.D

()

Penguji Ahli : Ganda Upaya, MA

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Tesis ini merupakan langkah pertama dari perjalanan intelektual penulis. Topik riset ini merupakan pengalaman dan nuansa baru bagi penulis selama belajar di sosiologi. Tidak mudah memang memulai sesuatu yang baru dalam sebuah karir intelektual. Oleh karena itu, wajar karya ini sebetulnya tidak layak dijadikan sebuah contoh dokumen akademis yang cukup mumpuni. Penulis masih membutuhkan proses yang cukup panjang untuk memahami topik mengenai radikalisme secara khusus dan Islam secara umum dalam konteks kerangka sosiologis. Pencapaian tertinggi karya penulis baru dapat diartikan baik jika suatu saat terdapat karya lain yang penulis lakukan guna menunjang kekurangan tulisan ini. Motivasi penulis untuk terus mengembangkan topik riset semacam ini semakin tinggi mengingat kekurangan yang terdapat dalam tesis ini. Kekurangan dari tesis ini juga menjadi pelajaran penting bagi penulis bahwa kerja keras yang selama ini penulis lakukan ternyata belum menghasilkan apa-apa secara akademis. Tesis ini juga memberikan pelajaran bagi penulis untuk selalu menjadi rendah hati. Entah apa jadinya jika tesis ini memiliki kelebihan, kemungkinan penulis justru terjebak dalam sifat yang tinggi hati (*astaghfirullah*).

Tesis ini penulis curahkan atas kontribusi beberapa pihak yang memiliki peran baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, penulis menyadari kontribusi berbagai pihak tidak akan berpengaruh jika Allah SWT tidak menghendaki. Tepian hidup, mungkin itulah yang diberikan oleh Allah SWT kepada penulis sebagai kawah candradimuka agar semakin kuat menjalani hidup dan penulis sangat bersyukur akan hal itu. Terima kasih ya Allah. Cobaan yang Engkau berikan justru menjadi pelajaran bagi penulis untuk bekerja lebih keras.

Takdir Allah SWT pula yang mempertemukan penulis dengan beberapa pihak yang berkontribusi atas tesis ini. Tidak semua kontributor penulis tuliskan namanya, namun nama yang tidak penulis cantumkan bukan berarti mereka tidak berkontributif. *Pertama*, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Iwan Gardono Sujatmiko Ph.D atas serangkaian inisiasi intelektual yang diberikan kepada penulis. Penulis juga banyak belajar atas kerendahan hati yang dimiliki beliau sebagai seorang intelektual—semoga suatu saat penulis bisa seperti itu. *Kedua*, penulis ucapkan terima kasih kepada Mas Ganda Upaya MA atas masukan dan motivasi yang diberikan selama ini. Penulis banyak belajar mengenai perjuangan hidup dari beliau—semoga penulis bisa berjuang terus selama hidup. *Ketiga*, penulis ucapkan terima kasih kepada Mbak

Lugina Setyawati Ph.D atas kritik, masukan, bahkan “celaan” yang diberikan bukan hanya sebagai Ketua Program Pascasarjana, melainkan juga sebagai orang tua, kakak, teman atau apapun yang terkadang saling tumpang tindih perannya—paling tidak itu berdasarkan definisi situasi penulis. *Keempat*, penulis ucapkan terima kasih kepada Mbak Lidya Triana M.Si dan seluruh staf Pasca mulai dari Pak Santoso, Mbak Rini, Mas Agus, dan Mbak Ilet atas kerjasama dan bantuannya selama penulis menempuh perkuliahan. *Kelima*, penulis jug atak lupa ucapkan terima kasih kepada Mbak Dr. Linda Darmajanti atas kepercayaan dan motivasi yang diberikan selama penulis kuliah serta menjadi pembimbing yang tidak hanya dalam perkuliahan, tetapi selama penulis bekerja. *Keenam*, penulis ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seangkatan Pasca Sosiologi 2010 (S2 Reguler, MMPS, dan S3) atas kebersamaan, canda, tawa, diskusi, serta kekompakannya selama kuliah. Semoga kebersamaan yang Kita miliki dapat berlanjut terus.

Ucapan terima kasih tidak hanya penulis sampaikan kepada keenam pihak di atas, namun penulis secara pribadi turut berterima kasih kepada pihak keluarga dalam mendukung perkuliahan. Pertama-tama penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Papi (Munadjat) dan Mama (Ulfah) atas semua dukungan sumber daya, kasih sayang, serta motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat melanjutkan perkuliahan. Entah bagaimana penulis harus timbal balik kepada Papi dan Mama, mungkin hanya menjadi anak berbakti yang sementara dapat penulis lakukan. Berikutnya, tak lupa penulis juga ucapkan banyak terima kasih kepada *My Mom* (Suyatmi) yang selalu setia memberikan dukungan dalam bentuk apapun bahkan ketika penulis berada di tepian hidup yang nyaris jatuh. *Thanks a lot Mom*, tesis ini wujud reinkarnasi cita-cita Bapak (Tatit Margono).

Terakhir, terima kasih untuk belahan hidupku Bunda (Nur Rahmah) dan Kia (Adzkia Putri Shabrina). Kesabaran, pengorbanan, keteguhan hati, dan dedikasi yang kalian berikan menjadi kekuatan buat penulis. Tepian hidup yang Kita jalani bersama semoga mencapai keberkahan dari Allah. Keberadaan kalian sebagai keluarga merupakan cikal bakal peradaban yang penulis impikan.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sakti Wira Yudha  
NPM : 1006745820  
Program studi : Sosiologi  
Departemen : Sosiologi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)  
Jenis karya : Tesis

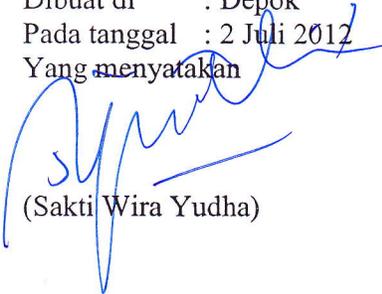
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah Saya yang berjudul :

“Radikalisme Kelompok Islam (Analisis Stuktur-Agen Terhadap Wacana Radikalisme  
Kelompok Islam Pasca-Orde Baru)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 2 Juli 2012  
Yang menyatakan

  
(Sakti Wira Yudha)

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN SOSIOLOGI  
PROGRAM PASCASARJANA SOSIOLOGI**

Nama : Sakti Wira Yudha

NPM : 1006745820

Judul : Radikalisme Kelompok Islam (Analisis Struktur-Agen Terhadap Wacana Radikalisme Kelompok Islam Pasca-Orde Baru)

Tesis ini terdiri atas tujuh bab, 140 halaman, 59 buku, 2 hasil penelitian, 2 dokumen, artikel koran, 4 artikel internet, 1 tesis, 1 disertasi.

**Abstrak**

Tesis ini adalah hasil penelitian kualitatif dengan studi dokumen sebagai teknik utamanya yang mengidentifikasi wacana radikalisme kelompok Islam, sekaligus melakukan kritik metodologis serta konstruksi model analisis dan skenario radikalisme. Gagasan mengenai konstruksi wacana radikalisme—secara implisit—melekat dengan Islam dan seolah-olah hal memiliki oposisi biner dengan barat. Konsepsi pengetahuan terkait gejala radikalisme yang diadopsi oleh setiap agen memungkinkan mereka untuk melakukan sebuah proses reproduksi pengetahuan mengenai wacana radikalisme. Setiap agen justru tidak sekedar melakukan upaya mereproduksi pengetahuan mengenai wacana radikalisme, melainkan melakukan elaborasi pengetahuan dengan berusaha mengkonstruksi indikator dan parameter radikalisme. Tipologi, model analisis, dan skenario tentang radikalisme kelompok Islam menjadi alternatif pilihan bagi deteksi dini radikalisme. Skenario radikalisme kelompok Islam dapat digunakan sebagai deteksi dini radikalisme dengan pengembangan tiga tipe skenario yakni harmonis dan teror.

**UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE  
DEPARTEMENT OF SOCIOLOGY  
POST GRADUATE PROGRAM OF SOCIOLOGY**

Name : Sakti Wira Yudha

NPM : 1006745820

Title : Islamic Group Radicalism (Structure-Agency Analysis of Islamic Group Radicalism Discourse in Post-New Order Era)

This Thesis consist of 7 chapters, 140 pages, 59 books, 2 research report, 2 documents, 3 newspaper articles, 4 internet articles, 1 thesis, 1 disertation

Abstract

This qualitative study identified Islamic group radicalism discourse, provide methodological critique, and construct scenario and model analysis or radicalism using documents studies. The idea of radicalism discourse construction implicitly embedded to Islam as if having binary opposition to the west. Conception of knowledge related to radicalism syptoms which were adopted by each agent enables them to perform a knowledge reproduction process about radicalism discourse. Each agent would not only make any effort to reproduce knowledge about radicalism discourse, but also elaborate the knowledge by constructing the radicalism parameters an indicators. Typology, analysis model, and scenario about Islamic group radicalism is alternative for early detection of radicalism. Islamic group radicalism scenario can be used as early detection of radicalism bay develop three types of scenario: harmonious and terror

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Halaman Pengesahan Tesis.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis.....	vii
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Bagan.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang.....	1
I.1.1. Radikalisme Pasca Peristiwa 11 September 2011.....	2
I.1.2. Radikalisme Di Indonesia.....	4
I.1.3. Radikalisme Dalam Angka.....	9
I.2. Permasalahan.....	13
I.3. Tujuan Penelitian.....	18
I.4. Signifikansi Penelitian.....	18
I.5. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
II.1. Telaah Studi Radikalisme Dari Berbagai Aspek Kajian.....	20
II.1.1. Sosio-Historis.....	20
II.1.2. Ekonomi-Politik.....	21
II.1.3. Gerakan Sosial.....	22
II.1.4. Penyusunan Indikator Demokrasi-Bappenas & LabSosio FISIP UI.....	24
II.2. Kerangka Teoretis.....	24
II.2.1. Discourse Sebagai Konsep Sosiologis.....	24
II.2.3. <i>Debunking Motif</i> -Peter L. Berger Serta Arkeologi Ilmu Pengetahuan & Genealogi Kekuasaan-Michele Foucault.....	26
II.2.4. Kerangka Analisis Margaret S. Archer- <i>Morphogenesis</i> .....	30
<i>Morphogenesis</i> -Margaret S. Archer.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
III.1. Prosedur Penelitian.....	38
III.1.1. Rancangan Penelitian.....	38
III.1.2. Peran Peneliti.....	38
III.2. Tahap pengumpulan dan Analisis Data.....	39
III.2.1. Subyek Penelitian.....	39

III.2.2. Tahap Pengumpulan Data .....	40
III.2.3 Tahap Analisis dan validasi Data.....	41
<b>BAB IV WACANA RADIKALISME PASCA-ORDE BARU .....</b>	<b>44</b>
IV.1. Para Agen Pengkonstruksi Wacana Radikalisme .....	44
Center for the Study of Religion and Culture (CSRC).....	45
Badan Nasional Penanggulangan terorisme (BNPT) .....	47
Lazuardi Birru .....	49
SETARA Institute .....	51
Tipologi Agen.....	52
IV.2. Konstruksi Wacana Radikalisme Para Agen .....	59
IV.2.1. Konstruksi Wacana Radikalisme CSRC.....	59
Pertanyaan Penelitian.....	60
Dasar Teori.....	61
Definisi Konseptual dan Operasional .....	61
Metode .....	69
Indikator.....	69
Formulasi Kebijakan.....	70
Simpulan .....	71
Catatan Kritis .....	72
IV.2.2. Konstruksi Wacana Radikalisme BNPT.....	77
Dasar Pertimbangan .....	78
Definisi Terkait Terorisme.....	68
IV.2.3. Konstruksi Wacana Radikalisme Lazuardi Birru .....	79
Pertanyaan Penelitian.....	79
Dasar Teori.....	80
Definisi Konseptual dan Operasional .....	80
Metode .....	80
Indikator.....	81
Formulasi Kebijakan.....	81
Simpulan .....	81
Catatan Kritis .....	81
IV.2.4. Konstruksi Wacana Radikalisme SETARA Institute.....	84
Pertanyaan Penelitian.....	84
Dasar Teori.....	85
Definisi Konseptual dan Operasional .....	85
Metode .....	93
Indikator.....	93
Formulasi Kebijakan.....	94
Simpulan .....	95
Catatan Kritis .....	96

<b>BAB V PRODUKSI &amp; REPRODUKSI WACANA RADIKALISME</b>	
<b>PASCA-ORDE BARU</b> .....	105
V.1. Produksi & Reproduksi Wacana Radikalisme .....	105
V.2. Pertarungan Wacana Radikalisme .....	109
V.3. Kritik Metodologis Terhadap Wacana Radikalisme .....	113
V.3.1. Konstruksi Wacana Radikalisme Gallup's Poll dan RAND Corporation.....	113
Gallup Poll .....	113
RAND Corporation .....	119
V.3.2. Kritik Metodologis terhadap Indikator Radikalisme Yang Dikembangkan	
CSRC, Lazuardi Birru, SETARA Institute .....	128
V.3.2.1. Pemetaan Konsepsi, Indikator, dan Kategori Radikalisme .....	123
V.3.2.2. Kritik Metodologis terhadap Definisi Konseptual, Definisi	
Operasional, Indikator, Skoring, Pembobotan, dan Kategori .....	115
<b>BAB VI KONSTRUKSI MODEL &amp; SKENARIO RADIKALISME</b> .....	132
VI.1. Konstruksi Model Radikalisme .....	132
VI.1.1. Tumpang Tindih Konsepsi Radikalisme & Tipologi Radikalisme Kelompok	
Islam .....	134
VI.1.2. Model Analisis Radikalisme .....	141
VI.2. Skenario Radikalisme Kelompok Islam.....	143
VI.2.1. Skenario Terbaik Radikalisme Kelompok Islam .....	144
VI.2.2. Skenario Terburuk Radikalisme Kelompok Islam .....	145
<b>BAB VII SIMPULAN</b> .....	146
VII.1. Ringkasan Temuan .....	146
VII.2. Implikasi Teoretis .....	147
VII.3. Implikasi Praksis .....	149
<b>DAFTAR TABEL</b>	
Tabel 1 Ikhtisar Survei Tentang Radikalisme.....	11
Tabel 2 Ikhtisar Pemetaan Studi Tentang Radikalisme .....	23
Tabel 3 Ikhtisar Proposisi Teoretis .....	36
Tabel 4 Ikhtisar Tahap Pengumpulan Data.....	43
Tabel 5 Ikhtisar Tipologi Agen Pengkonstruksi Wacana Radikalisme .....	58
Tabel 6 Ikhtisar Definisi Konseptual dan Operasional Mengenai Wacana	
Radikalisme yang Dikembangkan CSRC .....	67
Tabel 7 Ikhtisar Konstruksi Wacana Radikalisme yang Dikembangkan CSRC .....	74
Tabel 8 Ikhtisar Konstruksi Wacana Radikalisme yang Dikembangkan Lazuardi	
Birru.....	72
Tabel 9 Ikhtisar Definisi Konseptual dan Operasional Mengenai Wacana	
Radikalisme yang Dikembangkan SETARA Institute .....	90

Tabel 10	Ikhtisar Konstruksi Wacana Radikalisme yang Dikembangkan SETARA Institute	97
Tabel 11	Ikhtisar Temuan dan Simpulan Penelitian Beberapa Agen .....	100
Tabel 12	Analisis Wacana Radikalisme Berdasarkan Proposisi Teori Foucault dan Berger .....	104
Tabel 13	Analisis Produksi & Reproduksi Wacana Radikalisme Berdasarkan Proposisi Teori Archer .....	108
Tabel 14	Ikhtisar Konstruksi Wacana Radikalisme yang Dikembangkan Gallup Poll .....	117
Tabel 15	Pemetaan Indikator Radikalisme .....	126
Tabel 16	Ikhtisar Kritik Metodologis Terhadap Indikator Radikalisme .....	130
Tabel 17	Ikhtisar Tumpang Tindih Konsepsi Radikalisme Oleh Beberapa Agen.....	137
Tabel 18	Tipologi Radikalisme Kelompok Islam.....	140
Tabel 19	Ikhtisar Skenario Terbaik.....	144
Tabel 20	Ikhtisar Skenario Terburuk.....	145
Tabel 21	Implikasi Teoretis .....	148
Tabel 22	Implikasi Praksis.....	150

#### DAFTAR BAGAN

Bagan 1	The Basic Model of Morphogenesis Sequence.....	34
Bagan 2	Skema Teoretik M. Archer .....	35
Bagan 3	Tipologi Radikalisme Berdasarkan Level Komitmen .....	120
Bagan 4	Tahapan Individu Melepas Ikatan Dari Organisasi Radikal .....	121
Bagan 5	Model Analisis Radikalisme Kelompok Islam .....	143

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	151
-----------------------------	-----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Gejala radikalisme keagamaan yang muncul satu dekade terakhir—baik di aras global maupun nasional—sebetulnya bukanlah fokus perhatian baru bagi kalangan akademisi. Huntington (1996), salah satu profesor di Universitas Harvard, berpandangan bahwa pasca perang dingin identitas budaya dan agama akan menjadi sumber utama konflik di dunia yang ia sebut sebagai “benturan antarperadaban” (*the clash of civilization*). Kekuatan ekonomi, politik, dan militer yang dimiliki oleh peradaban Barat, menurut Huntington, akan mengalami pergeseran utama dengan munculnya “peradaban tandingan” lain yaitu: Islam (Muslim) dan Konfusius (Sino). Kedua peradaban ini, lanjut Huntington, akan menjadi ancaman bagi peradaban Barat di bawah komando Amerika Serikat. Pendapat Huntington ini tidak luput dari berbagai kritik yang diberikan oleh berbagai pihak.

Salah satu kritik disampaikan oleh Said (2002) yang memiliki pandangan khusus mengenai peradaban Islam terutama pasca peristiwa “krisis sandera” di Iran pada tanggal 4 November 1979 hingga 20 Januari 1981. Peran media pada peristiwa “krisis sandera” telah membuat “citra Islam” di mata Barat menjadi berita yang menakutkan (Said 2002: vi). Aktivitas media dalam peristiwa tersebut *meliput* namun sekaligus *menutupi* Islam secara obyektif. Islam oleh media dihadirkan dalam bentuk ancaman bagi Barat. Tidak hanya media, deskripsi akademis oleh para intelektual tentang Islam pun menghasilkan jurang pemisah dengan realitas yang ditemukan di dunia Islam (Said: xiii). Said berargumen bahwa apa yang telah dikatakan Barat tentang Islam dan apa yang secara reaktif telah dilakukan oleh berbagai masyarakat Islam harus dilihat dalam perspektif yang berbeda.

Selanjutnya Said (2002: xvi) melihat sesungguhnya situasi politik, ekonomi, dan intelektual—baik di Timur maupun Barat—telah mewarnai wacana tentang Islam. Semua wacana tentang Islam mengandung kepentingan terhadap kekuasaan atau otoritas. Oleh karena itu, pada hakikatnya Said berkesimpulan

bahwa pengetahuan dan liputan dunia Islam, di Amerika secara khusus dan di Barat secara umum, ditentukan oleh kepentingan geopolitik dan ekonomi serta dibantu dan didukung oleh sebuah struktur produksi pengetahuan pada skala yang besar. Tesis Said (2002: 222) adalah bahwa liputan kanonik dan ortodoks tentang Islam yang ditemukan di akademi, pemerintahan, dan media semuanya saling terkait dan *lebih* menyebar, *lebih* persuasif dan berpengaruh di Barat dibandingkan “liputan” atau interpretasi lain. Hasilnya bukan saja *pengetahuan* tertentu tentang Islam, melainkan lebih kepada dominasi *interpretasi* tertentu tentang Islam.

Lalu, bagaimana pesatnya perkembangan radikalisme keagamaan yang terjadi pasca-perang dingin? Salah satu momentum sejarah yang cukup penting terkait pesatnya perkembangan radikalisme keagamaan adalah peristiwa 11 September 2001. Berikut ini dipaparkan perkembangan radikalisme keagamaan pasca peristiwa 11 September 2001 yang turut menyebar hingga ke Indonesia.

### **I.1.1. Radikalisme Pasca Peristiwa 11 September 2011**

Bernard Lewis (2003: 137)—salah seorang orientalis sekaligus sejarawan Islam terkemuka—berpendapat sebetulnya wacana<sup>1</sup> radikalisme keagamaan dalam aras global mulai berkembang pesat pasca peristiwa 11 September 2001. Hal ini diungkapkan oleh Lewis melalui kutipan berikut:

*Most Muslims are not fundamentalists, and most fundamentalists are not terrorists, but most present-day terrorists are Muslims and proudly identify themselves as such. Understandably, Muslim complain when the media speak of terrorist movements and actions as “Islamic” and ask why the media do not similarly identify Irish and Basque terrorism as “Christian.” The answer is simple and obvious—they do not describe themselves as such.*

[Kebanyakan Muslim bukanlah fundamentalis, dan kebanyakan fundamentalis bukanlah teroris, akan tetapi kebanyakan teroris dewasa ini adalah Muslim dan mereka bangga mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim. Dapat dipahami, kaum Muslim mengeluh ketika media menyatakan bahwa gerakan-gerakan dan aksi-aksi teroris sebagai perbuatan “Islam” dan mempertanyakan mengapa media tidak dengan cara yang sama mengidentikkan terorisme di Irlandia dan Basque dengan “Kristen”. Jawabannya sederhana dan jelas—karena mereka tidak menggambarkan diri mereka demikian].

<sup>1</sup> Terminologi *wacana* peneliti gunakan merujuk pada pengertian *discourse* dalam sosiologi yang akan diulas pada bagian konseptual. Hal ini mengingat belum ada kesepakatan pada tingkat tata bahasa Indonesia di dalam menyerap istilah *discourse*. Sebab di sisi lain ada pihak yang menggunakan istilah *diskursus* untuk merujuk pengertian *discourse*.

Ungkapan tersebut disampaikan oleh Lewis dalam konteks korelasi antara munculnya gerakan keagamaan yang ditandai dengan aksi bom bunuh diri dengan wacana keagamaan yang bersifat fundamental. Lewis menganalisis fundamentalisme Islam sebagai sebuah sikap jahat dan berbahaya. Secara tegas ia mengatakan fundamentalisme adalah sikap anti barat yang ditujukan melalui tindakan ekstrem dan radikal—salah satunya dengan aksi bom bunuh diri. Doktrin jihad, menurut Lewis, merupakan pembenaran bagi pelebagaan perang suci untuk tujuan teror yang tidak suci (*holy war and unholy terror*). Konsep mengenai fundamentalisme, kebangkitan gerakan Islam, terorisme, dan jihad satu sama lain, menurut pendapat Lewis, seolah-olah memiliki keterkaitan.

Akan tetapi, pendapat Lewis mengenai apa yang dimaksud dengan fundamentalisme justru cenderung menimbulkan kerancuan. Sebab di sisi lain Lewis (Newsweek 2003 dalam Misrawi 2010) adalah salah satu orang yang merekomendasikan pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan invasi terhadap Irak dengan alasan untuk melakukan modernisasi dan demokratisasi Islam di negara pimpinan Saddam Husein tersebut. Doktrin modernisasi dan demokratisasi justru tidak ada bedanya dengan doktrin jihad yang digunakan sebagai pengabsahan untuk melakukan perang dan tindak kekerasan terhadap negara muslim. Invasi terhadap Irak layaknya bentuk sikap anti-Islam yang dikembangkan melalui cara yang ekstrem dan radikal—yaitu dengan peperangan.

Pandangan berbeda disampaikan oleh orientalis lain yaitu John L. Esposito (1992, 2002) yang berpendapat mengenai kebangkitan gerakan Islam di dunia pasca perang dingin serta peristiwa 11 September 2001. Esposito, dalam *The Islamic Threat: Myth or Reality* (1992), menganalisis kebangkitan gerakan Islam pasca perang dingin di dunia merupakan sebuah respon terhadap ideologi modernisasi dan westernisasi yang berhadapan dengan nilai Islam. Esposito melihat kebangkitan gerakan Islam sebagai tantangan peradaban dimana terdapat tawaran alternatif model dari paradigma sosial & politik, dan bukan ancaman bagi Barat.

Karya Esposito lain, yaitu *Unholy Wars: Terror in the Name of Islam* (2002), mendeskripsikan tindakan terorisme yang muncul pasca peristiwa 11 September 2001 dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang

Amerika Serikat (AS) dan sudut pandang Muslim. Pada sudut pandang pertama, Esposito memberikan peringatan keras terhadap pemerintah AS agar bersikap adil, demokratis, dan tidak pilih kasih dalam upaya mewujudkan perdamaian. Kebijakan AS yang keras terhadap Palestina, tetapi lunak terhadap agresi dan aksi brutal Israel menunjukkan ketidakadilan, tidak demokratis, dan berstandar ganda. Pada sudut pandang kedua, Esposito memberikan kritik terhadap pemakaian *jihad* yang dimiliki umat Muslim—yaitu dapat bermakna ganda. Esposito berkesimpulan bahwa *jihad* tidak semata dimaknai berdasarkan teks (Al Quran dan *Hadist*), melainkan dapat dimaknai berdasarkan konteks sejarah, ruang/tempat, dan waktu yang berbeda.

Pandangan beberapa intelektual (Huntington, Said, Lewis, dan Esposito) terkait gejala radikalisme keagamaan yang mencuat di tingkat global pasca perang dingin memunculkan beberapa konsep kunci tentang gerakan kebangkitan agama, fundamentalisme, radikalisme, jihad, dan terorisme. Konsepsi yang disampaikan oleh beberapa intelektual tersebut ada yang bersifat tumpang tindih, berkaitan satu sama lain, bahkan ada yang memandang berbeda. Ambiguitas serta belum adanya kesepakatan tentang beberapa konsepsi menyebabkan eksplanasi mengenai gejala radikalisme agama di tingkat global menjadi bersifat interpretatif—bergantung pada konteks mana seorang intelektual memaknainya. Begitu pula dengan gejala radikalisme keagamaan yang terjadi di tingkat nasional dimana terdapat beberapa penjelasan mengenai hal ini. Berikut pemaparan terkait gejala radikalisme keagamaan di tingkat nasional yang disampaikan oleh beberapa intelektual.

### **I.1.2. Radikalisme Di Indonesia**

Lain halnya dengan radikalisme keagamaan yang berkembang dalam aras global, di tingkat nasional radikalisme kembali mengemuka di Indonesia pasca-Orde Baru terutama dalam bentuk Islam politik (Fealy 2004; Hadiz 2008) dan juga kelompok gerakan Islam (Mubarak 2007; Nashir 2007; Rahmat 2005). Namun demikian, selain masa Pasca Orde Baru, sejarah panjang radikalisme keagamaan di Indonesia dapat pula ditemukan di masa pemerintahan Orde Lama dan juga Orde Baru (Solahudin 2011). Ada dua alasan yang bisa dikemukakan terkait relasi antara negara dengan kelompok gerakan Islam di Indonesia (Umar

2010). Pertama, warisan relasi yang bersifat fluktuatif antara umat Islam dengan negara pasca-kemerdekaan dalam bentuk penindasan politik kelompok Islam. Kedua, adanya penindasan ekonomi-politik dimana radikalisme mencuat atas dasar respon kelas untuk melawan dominasi modal yang bersifat oligarkis dengan negara.

Salah satu bentuk kelompok Islam radikal di masa Orde Lama yang cukup kuat adalah Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII) pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo. Gerakan yang memiliki basis di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan ini bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dan menganggap perang melawan pemerintah Indonesia sebagai bentuk jihad. Kelompok ini sempat melakukan pemberontakan di Jawa Barat pada kurun waktu 1950-an, tetapi berhasil ditumpas oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1962.

Penumpasan gerakan DI bukan berarti perjuangan kelompok ini berakhir. Keberadaan mereka justru mengalami metamorfosis dalam bentuk kelompok Islam radikal yang lain. Pada masa Orde Baru kelompok Islam radikal ini disebut sebagai kelompok ekstrem kanan yang dituduh melakukan gerakan subversif oleh aparat keamanan. Komando Jihad dan Jamaah Islamiah (JI) adalah contoh kelompok yang disebut ekstrem kanan ini. Salah satu peristiwa menggegerkan di masa Orde Baru adalah peristiwa peledakan candi Borobudur pada tanggal 21 Januari 1985 yang juga menjadi pusat perhatian internasional. Salah satu otak pengemboman tersebut ditangkap pada tahun 1990. Rangkaian peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal pada masa Orde Baru terbilang sedikit. Hal ini mengingat sistem pemerintahan otoritarian Orde Baru yang represif terhadap segala bentuk kegiatan masyarakat yang bersifat menentang pemerintahan.

Hal berbeda ditemukan pada masa pasca-Orde Baru dimana terjadi konflik komunal berbasis agama (Solahudin 2011: 251-252) seperti di Ambon dan Poso. Kondisi ini justru memicu munculnya berbagai kelompok Islam radikal (Hefner 2005) seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Kelompok Islam radikal ini diduga terlibat secara langsung dalam konflik Ambon dan Poso dengan mengirimkan laskar atau para-militer.

Selain itu, pada masa pasca-Orde Baru juga telah menghasilkan beberapa kajian mengenai wacana radikalisme. Salah satu hasil kajian yang membahas wacana radikalisme dilakukan oleh Mubarak (2007: viii-ix) dengan memetakan anatomi Gerakan Salafi Militan (GSM)<sup>2</sup> di Indonesia—terutama pada era kepolitikan Orde Baru dan era transisi demokrasi (pasca-Orde Baru). Hasil riset tersebut dipaparkan berikut ini.

*Pertama*, hasil riset ini menunjukkan bahwa berkembangnya ekstremisme dan radikalisasi kelompok Islam Pasca-Soeharto merupakan dampak dari ketidak-efektifan kinerja pemerintahan (*ungovernability*) dalam merespon isu sensitif terutama terkait kalangan umat Islam. Kondisi ini justru membuka peluang terbentuknya kelompok-kelompok keagamaan radikal seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan juga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). *Kedua*, riset ini juga melihat bahwa faktor lingkup dan batasan (*border*) demokrasi menjadi persoalan yang mengganjal. Hal ini ditunjukkan dengan menjamurnya tuntutan formalisasi *syariat* Islam di berbagai daerah yang mengatasnamakan demokrasi. *Ketiga*, gerakan radikalisme yang berkembang di Indonesia, terutama pada masa transisi reformasi, disebabkan oleh faktor eksternal dan internal (Mubarak 2007: 349). Faktor yang disebut pertama adalah perkembangan situasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya—baik dalam aras domestik maupun internasional—yang telah memberikan kontribusi bagi menguatnya ideologi radikalisme di kalangan Islam Indonesia. Faktor yang disebut kedua berupa doktrin keagamaan di kalangan kelompok-kelompok yang terlibat dalam gerakan radikal.

Pada bagian akhir, hasil riset ini menunjukkan prospek demokrasi di dunia Islam, terutama di Indonesia secara khusus, sesungguhnya masih sangat menjanjikan (Mubarak: 367). Kemunculan Gerakan Salafi Militan (GSM) dapat dilihat terkait relasi dengan negara. Persoalannya hanya terletak pada kemampuan untuk mengaktivasi secara optimal modal sosial para demokrat untuk melakukan dialog dengan pihak-pihak yang tergabung dalam Gerakan Salafi Militan (GSM).

<sup>2</sup> GSM merupakan istilah yang mengacu pada lembaga-lembaga baru yang muncul pada masa Pasca-Orde Baru yang berorientasi memperjuangkan Islam politik termasuk kelompok garis keras atau militan.

Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Nashir (2007: 614-617) mengenai gerakan Islam *syariat*<sup>3</sup> yang menjamur pada masa reformasi menunjukkan beberapa fenomena. *Pertama*, gerakan Islam *syariat* muncul karena fenomena siklus krisis. Kondisi ini ditandai antara lain oleh: 1) kondisi umat Islam yang dipandang berada dalam sistem *kufur*; 2) keadaan dunia global yang mengalami krisis (pervasif); 3) krisis multidimensional yang dialami kehidupan nasional. *Kedua*, gerakan Islam *syariat* juga muncul karena fenomena gerakan “revitalisasi agama” yaitu sebuah kondisi yang mewajibkan kebangkitan agama. Kondisi ini disebabkan oleh dua hal yaitu infiltrasi dan penetrasi budaya serta politik asing yang mengancam Islam serta situasi transisi peralihan pemerintahan yang otoriter sekaligus krisis kehidupan yang dihadapi bangsa Indonesia. *Ketiga*, gerakan Islam *syariat* muncul karena fenomena konflik. Hal ini disebabkan karena lahirnya gerakan Islam yang memperjuangkan formalisasi *syariat* Islam muncul dalam bentuk dua kondisi yaitu “ketegangan struktural” dan “ketegangan kultural”.

Kondisi ketegangan yang pertama merupakan bentuk gerakan perlawanan yang bersifat ideologis terhadap negara dan dunia internasional (baca: barat) yang bertentangan dengan Islam dan juga sebagai bentuk arus balik marjinalisasi Islam di era Orde baru. Kondisi ketegangan yang kedua merupakan sebuah bentuk semangat atau persaingan dengan kelompok lain yang membawa ideologi di luar Islam—seperti ateisme, kapitalisme, sekulerisme, zionisme, sinkretisme, dan lainnya. *Keempat*, gerakan Islam *syariat* muncul karena adanya respon dari sektarian. Kondisi dunia yang dianggap penuh ancaman bagi Islam dan umat Islam memberikan sebuah legitimasi—baik secara teologis, ideologis, dan sosiologis—bagi gerakan Islam *syariat* untuk muncul guna menyelamatkan umat dari musuh-musuh Islam. *Kelima*, gerakan Islam *syariat* muncul karena fenomena marjinalisasi sosial. Hal ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan penghapusan Piagam Jakarta tahun 1945. Simpulan utama riset ini berpandangan bahwa kemunculan gerakan Islam *syariat* menekankan pada revitalisasi agama terkait hubungannya dengan beberapa persoalan yang dihadapinya.

<sup>3</sup> Gerakan Islam *syariat* yang menjadi obyek penelitian ini adalah Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Selain itu, penelitian ini juga melihat gerakan Islam *syariat* yang dilakukan oleh partai politik seperti PPP, PBB, dan PKS

Berikutnya, hasil riset yang dilakukan oleh Afadlal et.al. (2005: 111-112), mengenai Islam dan radikalisme di Indonesia, menunjukkan bahwa munculnya gerakan-gerakan Islam<sup>4</sup> dalam masyarakat Indonesia kontemporer (Pasca-Orde Baru) secara umum ditandai beberapa alasan. *Pertama*, menemukan bentuk pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam yang perlu untuk dirumuskan dan disodorkan sebagai alternatif terhadap sistem yang berlaku sekarang—yaitu sistem demokrasi. *Kedua*, menerapkan ajaran Islam secara praktis—tidak hanya sebagai konsep-konsep yang abstrak. *Ketiga*, meningkatkan keberagaman masyarakat. Hal ini terkait kelemahan Islam dalam politik dan peminggirannya di masa Orde Baru berdampak pada umat Islam menjadi mayoritas yang diam (*silent majority*). *Keempat*, melakukan purifikasi agama. Kondisi ini terkait dugaan bahwa Islam telah terdistorsi serta dipahami dan ditafsirkan secara parsial.

Pandangan akhir dari hasil riset ini berargumen bahwa kalangan fundamentalisme Islam tidak perlu disikapi secara apriori atau bahkan dipandang sebagai sebuah ancaman dengan dua alasan (Afadlal et.al. 2005: 293-294). Alasan pertama kaum fundamentalisme Islam tidak bermaksud memaksa kaum minoritas nonmuslim manapun untuk menjadi Islam. Alasan kedua meskipun kaum fundamentalisme diasosiasikan dengan kelompok radikal, realitasnya hanya beberapa saja yang menunjukkan sifat radikal. Radikalisme sebenarnya tidak termanifestasi dalam tingkah laku, melainkan hanya berada di tataran pemikiran dimana adanya keinginan terjadinya perubahan mendasar atas sistem yang selama ini ada di masyarakat. Perubahan yang dimaksud dapat diperjuangkan tanpa kekerasan. Oleh karena itu, penyamarataan fundamentalisme dengan radikalisme dan mengidentikan dengan kekerasan merupakan penafsiran yang salah kaprah.

Peneliti berpendapat bahwa hasil riset ini memiliki simpulan yang cukup netral. Walaupun riset yang dihasilkan tidak mendefinisikan secara tegas perbedaan konsep fundamentalisme dan radikalisme, tetapi hasil riset ini menegaskan bahwa antara kedua konsep tidak serta merta memiliki keterkaitan

<sup>4</sup> Gerakan Islam yang dimaksud dalam riset ini antara lain Jamaah Salafi (Bandung), Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Selain gerakan Islam tersebut, riset ini juga melihat radikalisasi yang terjadi di kalangan pesantren yaitu Pesantren Al Mukmin di Solo dan Pesantren Al Islam di Lamongan.

satu sama lain. Pengembangan konsepsi radikalisme yang netral dan aplikatif menjadi salah satu tujuan peneliti dalam riset ini.

Pandangan beberapa intelektual mengenai gejala radikalisme keagamaan di atas memiliki beragam argumen dari berbagai perspektif berbeda. Penjelasan yang dihasilkan bersifat deskriptif dan eksplanatif dengan menggunakan perspektif dan konseptualisasi untuk menggambarkan gejala yang muncul. Penjelasan yang bersifat deskriptif dan eksplanatif—menurut peneliti—tidak cukup jika hasil kajian riset yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara praksis. Perlu dilakukan usaha untuk mengoperasionalisasi konsep-konsep yang sudah dikembangkan sebelumnya. Oleh karena itu, gagasan mengenai radikalisme keagamaan tidak hanya berkembang di tataran konseptual, melainkan berkembang di tataran operasional (praksis) dengan melakukan pengembangan indikator. Penjelasan berikut melihat beberapa kajian yang telah mengembangkan indikator terkait radikalisme.

### **I.1.3. Radikalisme Dalam Angka**

Kajian mengenai radikalisme tidak hanya memuat gagasan tentang kelompok gerakan Islam, melainkan telah menghasilkan beberapa kajian yang telah mengembangkan indikator radikalisme. Pertanyaannya kemudian, bagaimanakah kondisi radikalisme yang berkembang di Indonesia pasca-Orde Baru dari data yang ada? Deskripsi berikut akan memaparkan beberapa riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian yang mengeluarkan hasil berupa data survei. Indikator radikalisme yang dikembangkan oleh beberapa lembaga ini merupakan hasil dari proses konseptualisasi. Secara detail, konseptualisasi yang dilakukan oleh beberapa lembaga ini akan dijelaskan pada bab V.

Salah satunya adalah penelitian yang memuat beberapa komponen indeks kerentanan radikalisme yang dilakukan oleh Lazuardi Birru (2011). Hasil penelitian tersebut dipaparkan berikut ini (“Indeks Indonesia Mengkhawatirkan”, Kompas, 6/10/2011). Indeks kerentanan radikalisme di Indonesia pada tahun 2011 mencapai angka 43,6 atau turun 1,44 dibandingkan dengan indeks tahun 2010 sebesar 45,4. Namun demikian, indeks<sup>5</sup> kerentanan radikalisme ini dianggap

<sup>5</sup> Indeks 0 berarti anti-radikalisme sempurna dan indeks 100 berarti pro-radikalisme.

masih mengkhawatirkan karena masih berada di atas level aman yaitu pada indeks 33,3. Berdasarkan survei tersebut terdapat tiga daerah propinsi yang paling rentan atau rawan tindakan radikalisme yaitu Propinsi Aceh (56,8), Jawa Barat (46,6) dan Banten (46,6). Sejarah ketiga propinsi tersebut memang dilatarbelakangi keberadaan wacana pendirian negara Islam yaitu GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh serta DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) di Jawa Barat dan Banten (yang sebelum pemekaran propinsi merupakan bagian dari Jawa Barat). Indeks kerentanan radikalisme ini diperoleh berdasarkan persepsi masyarakat terhadap beberapa indikator radikalisme<sup>6</sup>.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh CSRC (“Suara Muslim Moderat Cenderung Lebih Lemah”, Kompas, 25/10/2011) justru menunjukkan fakta sebaliknya. Penelitian yang bertajuk “Islamisasi Ruang Publik: Identitas Muslim dan Menegosiasikan Masa Depan” ini menunjukkan bahwa 80,1% responden memiliki pandangan keagamaan moderat, sedangkan selebihnya sebesar 19,9% memiliki pandangan keagamaan radikal. Responden yang memiliki pandangan keagamaan moderat ini menyetujui demokrasi serta menerima Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negara dan sumber hukum. Mereka menolak kekerasan untuk memperjuangkan agama. Sedangkan responden yang memiliki pandangan keagamaan radikal mengidealkan negara Islam dan penerapan syariat oleh negara secara formal. Hasil penelitian CSRC (*Center for the Study of Religion and Culture*) menggambarkan bahwa masih ada modal yang baik untuk memperkuat Islam moderat di Indonesia.

Senada dengan CSRC, SETARA Institute (2010) yang melakukan penelitian mengenai “Persepsi Publik Tentang Islam Radikal” menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu 82%, resisten terhadap kelompok Islam radikal, sisanya menyatakan persetujuannya terhadap kelompok Islam radikal (“Masyarakat Resistan Islam Radikal”, Kompas, 22/11/2011). Masyarakat menilai keberadaan kelompok Islam radikal dengan berbagai aktivitasnya berdampak pada munculnya citra negatif terhadap agama dan umat Islam. Hasil

<sup>6</sup> Komponen indeks radikalisme yang digunakan antara lain: 1) Tindakan radikal, 2) Sikap radikal, 3) Jihadisme, 4) Agenda Islamis, 5) Dukungan terhadap organisasi radikal, 6) Keanggotaan organisasi radikal, 7) Alienasi, 8) Deprivasi, 9) Intoleransi terhadap non-muslim, 10) Perasaan tidak aman & terancam.

survei ini juga menunjukkan ada persamaan antara kelompok Islam radikal dan kelompok teroris, terutama dari segi tujuan serta ditambah kelompok Islam radikal tidak pernah secara terbuka menentang terorisme atas nama agama. Selain itu responden juga membedakan kelompok Islam radikal dengan kelompok teroris dimana kekerasan yang dilakukan kelompok radikal tidak mengakibatkan hilangnya nyawa seperti yang dilakukan teroris. Untuk lebih memudahkan berikut ikhtisar ketiga hasil survei tersebut:

**Tabel 1**  
**Ikhtisar Survei Tentang Radikalisme**

LEMBAGA	HASIL SURVEI TENTANG RADIKALISME
<b>Lazuardi-Birru (2011)</b>	1. Tingkat kerentanan radikalisme: Indonesia: indeks 43,6 2. Tiga propinsi tertinggi tingkat kerentanan radikalisme: Propinsi NAD: indeks 56,8 Jawa Barat & Banten: indeks 46,6 3. Kesimpulan: indeks kerentanan radikalisme di Indonesia mengkhawatirkan karena masih berada di atas level aman. (Catatan: Indeks 0 berarti antiradikalisme sempurna dan indeks 100 berarti proradikalisme, batas aman indeks radikalisme adalah 33,3)
<b>CSRC (2011)</b>	Pandangan keagamaan masyarakat: Moderat: 80,1% Radikal: 19,1% Kesimpulan: masih terdapat modal baik untuk memperkuat Islam moderat di Indonesia
<b>SETARA-Institute (2010)</b>	Persepsi tentang Islam radikal: Resisten terhadap Islam radikal: 82% Persetujuan terhadap Islam radikal: 18% Kesimpulan: resistensi mengenai Islam radikal terbilang cukup besar, kekhawatiran peningkatan paham radikal di masyarakat masih dalam kadar yang tidak mengkhawatirkan

Ada beberapa catatan penting dari ketiga hasil survei tersebut. *Pertama*, ketiganya sama-sama melihat persepsi atau pandangan masyarakat baik mengenai wacana radikalisme maupun pandangan keagamaan yang radikal. Ketiga lembaga survei tersebut tentu saja memiliki pandangan mengenai radikalisme yang berbeda secara definisi, konsepsi, tujuan, perspektif, serta *standpoint*-nya (pembahasan rinci disampaikan pada bab V). Ketiga hasil survei di atas menunjukkan persepsi masyarakat terhadap wacana radikalisme dari sudut pandang sosio-psikologis. Penelitian pertama menekankan pendapat individu terhadap beberapa indikator radikalisme. Hasil survei ini menyampaikan pesan bahwa kondisi masyarakat terdapat tindakan radikal belum sampai pada tahap aman. Untuk itu masih perlu usaha keras untuk membuat muslim Indonesia menolak ide dan gerakan sosial-keagamaan radikal. Penelitian kedua menekankan pendapat individu mengenai penerimaan atau penolakan terhadap penerapan demokrasi dan syariat Islam di

dalam konteks negara. Hasil survei ini mengisyaratkan bahwa meski dari segi angka jumlah masyarakat yang berorientasi radikal terbilang kecil, namun fakta ini memiliki kecenderungan Islamisme potensial untuk ditanami benih-benih Islam radikal. Hal ini tentu saja harus dianggap ancaman bagi karakter utama Islam di Indonesia yang selama ini dikenal sebagai muslim kultural yang moderat. Penelitian terakhir lebih melihat pendapat individu di dalam menilai keberadaan kelompok Islam radikal. Hasil riset ini mengindikasikan bahwa intoleransi masyarakat yang utama bukanlah pengaruh dari organisasi radikal. Yang utama justru frustrasi sosial dan alienasi akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan dan ekonomi. Kondisi inilah yang menyebabkan kehadiran organisasi Islam radikal menjadi salah satu faktor yang meradikalisasi masyarakat menjadi intoleran.

*Kedua*, ketiga hasil survei tidak dapat mendeteksi dan membedakan berbagai aktivitas yang terkait dengan kegiatan radikalisme. Wacana radikalisme (berupa indikator) yang dikembangkan oleh ketiga lembaga tersebut memiliki kelemahan di dalam melihat baik aktivitas, organisasi, dan institusi yang terkait radikalisme. Indikator yang ada tidak dapat mendeteksi apakah sebuah organisasi, institusi pendidikan, dan institusi lain dapat digolongkan sebagai sesuatu yang radikal atau tidak. Hal ini tentu saja akan berdampak pada penyusunan kebijakan yang akan diambil mengenai radikalisme.

*Ketiga*, analisis yang dihasilkan oleh ketiga hasil survei, secara akademik, menunjukkan kelemahan di dalam aspek metodologis dimana wacana, konsepsi, serta indikator radikalisme yang dikonstruksi menjadi samar dan tidak jelas terutama dalam konteks perkembangan sejarah radikalisme Indonesia. Kelemahan ini, secara metodologis, ditunjukkan dengan tidak dipaparkannya proses konseptualisasi dan operasionalisasi (Babbie 1995; Bernard 2000; Wysocki 2001) mengenai radikalisme secara spesifik serta proses pembobotan, skoring, dan juga kategori yang dibuat. Oleh karena itu, penyusunan indikator sosial (Cariey 1983: 22) mengenai radikalisme yang dikembangkan ketiga lembaga riset tersebut memiliki implikasi pada lemahnya pengukuran untuk rekomendasi kebijakan bagi program deradikalisasi yang ada di Indonesia serta kebutuhan akan indikator untuk deteksi dini atau prediksi (Cariey: 27) gejala radikalisme.

## I.2. Permasalahan

Berdasarkan paparan tersebut nampak bahwa radikalisme keagamaan tidak hanya muncul dalam tataran praktik, melainkan juga muncul dalam tataran wacana (*discourse*)—baik global maupun nasional. Aktivitas kelompok gerakan Islam telah memicu wacana mengenai Islam radikal oleh berbagai elemen masyarakat baik negara, intelektual/akademisi, NGO, maupun media. Oleh karena itu, muncul berbagai macam konstruksi wacana radikalisme terkait kelompok gerakan Islam yang diasosiasikan dengan berbagai terminologi.

Terminologi wacana radikalisme yang berkembang tidak lepas dari tumpang tindihnya konsepsi radikalisme dengan konsepsi lain seperti fundamentalisme<sup>7</sup> (Roy 1994, 2005), militansi<sup>8</sup> (Schward 1999), revivalisme<sup>9</sup> (Esposito 1992), antiliberal<sup>10</sup> (Hefner 2001), dan skripturalis<sup>11</sup> (Liddle 1999) yang dikembangkan oleh beberapa intelektual yang mempelajari Islam. Namun demikian, belum ada kesepakatan konsepsi mengenai radikalisme<sup>12</sup> itu sendiri. Peneliti dalam hal ini tidak ingin terjebak di dalam perdebatan mengenai penggunaan terminologi yang ada. Akan tetapi, peneliti justru memposisikan diri masuk ke dalam pertarungan wacana mengenai radikalisme untuk melakukan konstruksi pengetahuan secara sosiologis dengan cara memberikan kritik metodologis terhadap beberapa wacana radikalisme yang ada serta menyusun model dan skenario mengenai radikalisme.

<sup>7</sup> Cenderung menafsirkan Islam politik sebagai aktivitas agama dan sekaligus sebagai ideologi politik yang secara spesifik ia sebut dengan istilah neofundamentalisme dimana pemberlakuan syariat Islam dikehendaki. Islam dalam hal ini menjadi panduan utama kehidupan umat manusia.

<sup>8</sup> Menyebut dengan istilah Islam militan untuk menunjuk DDII dan sayap *mujahidnya*, KISDI, yang memiliki ciri: 1) menafsirkan hukum Islam secara kaku; 2) bersikap anti-Barat dan agama semitis; 3) kritis terhadap etnis Cina dan umat kristen yang secara ekonomi-politik relatif lebih mapan dibanding dengan kelompok Islam militan.

<sup>9</sup> Hal ini menunjuk pada kelompok yang mengacu pada literalis dan harapan untuk kembali pada kehidupan Islam di masa lalu.

<sup>10</sup> Memakai istilah Islam antiliberal untuk menunjuk DDII dan KISDI. Hefner melihat kedua organisasi ini untuk menunjuk organisasi Islam yang secara nyata menyerang liberalisme barat.

<sup>11</sup> Menggunakan istilah Islam skripturalis karena kelompok ini memandangi teks-teks Al-Quran maupun *hadis* telah jelas dengan sendirinya (*self evidence*) dan karenanya tidak membutuhkan interpretasi dan adaptasi untuk disesuaikan dengan dinamisme lokal.

<sup>12</sup> Vedi R. Hadiz (2008) berpendapat bahwa tidak ada konsensus yang nyata tentang yang dimaksud dengan istilah 'Islam radikal' atau radikalisme. Istilah itu bisa berarti sebagian mereka yang ingin mendirikan negara Islam atau negara kekhalifan, atau mereka yang ingin menjadikan syariah sebagai sumber hukum dengan atau tanpa menggunakan kekerasan terbuka. Istilah itu juga digunakan secara longgar dan saling dipertukarkan antara Islam fundamentalis dengan Islam militan, atau kadang-kadang dengan secara sederhana disebut 'Islamist'.

Alasan utama yang melatarbelakangi peneliti mengkonstruksi pengetahuan tentang wacana radikalisme antara lain masih terbatasnya hasil penelitian yang menjelaskan dalam perspektif sosiologi pengetahuan dan sekaligus melakukan penyusunan model dan skenario radikalisme. Bagaimana kedua hal tersebut dapat dilakukan? Caranya adalah dengan menempatkan wacana radikalisme dalam kerangka berpikir struktur-agen. Peneliti berpendapat bahwa dengan menggunakan kerangka berpikir struktur-agen dapat memberikan penjelasan yang bersifat komprehensif serta prediktif. Sebab, penjelasan mengenai gejala terkait radikalisme lebih banyak menggunakan kerangka berpikir struktur (makro), institusi, dan maupun agen (mikro).

Beberapa riset terkait gejala radikalisme keagamaan di tingkat global—yang dilakukan baik oleh Huntington, Said, Lewis, dan Esposito—semuanya melihat dengan menggunakan perspektif yang bersifat makro dengan menempatkan Islam sebagai salah satu artikulatur penyebab munculnya gejala. Di sisi lain, beberapa riset terkait gejala radikalisme keagamaan di tingkat nasional—yang dilakukan oleh Solahudin, Mubarak, Nashir, Afadlal—lebih menekankan penjelasan yang bersifat institusional dengan menempatkan kelompok gerakan Islam sebagai aktor utama munculnya gejala. Adapun riset yang dihasilkan oleh ketiga lembaga riset—CSRC, Lazuardi Birru, SETARA Institute—menggunakan opini publik sebagai dasar penjelasan munculnya gejala radikalisme di tingkat nasional.

Penjelasan gejala radikalisme oleh berbagai pihak lebih banyak bersandar pada perspektif struktur maupun agen yang nampak tidak cukup memadai dalam menjelaskan radikalisme. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya keluar dari masing-masing perspektif dalam melihat gejala radikalisme. Caranya adalah dengan menempatkan wacana radikalisme dalam kerangka struktur-agen. Penjelasan mengenai analisis dualisme (*analitical dualism*) struktur-agen dapat ditemukan dalam konsepsi Archer tentang morphogenesis yang di dalamnya terdapat proses kondisi struktural (*structural conditioning*), interaksi sosial (*social interaction*), serta reproduksi struktural (*structural reproduction*) dan elaborasi struktural (*structural elaboration*).

Beberapa agen yang menjadi subyek penelitian ini yaitu kalangan intelektual (CSRC), pemerintah (BNPT), dan NGO/*Non Government Organization* (Lazuardi-Birru dan SETARA Institute). Setiap lembaga ketika mengkonstruksi wacana radikalisme tidaklah terhubung secara dialektis dengan struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya, melainkan terdiri dari dua momen dalam proses yang sama (*analitical dualism*). Di satu sisi, wacana radikalisme berdiri pada sebuah realitas struktur pengetahuan yang telah hadir sebelumnya (*prior-outcomes*) dari hasil produksi pengetahuan terus-menerus oleh manusia (terutama intelektual) sebagai pelaku. Di sisi lain, wacana radikalisme merupakan hasil produksi dan reproduksi pengetahuan dari proses interaksi sosio-kultural oleh setiap agen. Kedua proses tersebut, menurut Archer, merupakan bentuk relasi dualisme yang ditentukan secara historis oleh variabel waktu (*time*).

Selanjutnya, proses produksi dan reproduksi wacana radikalisme yang dilakukan oleh setiap agen akan mengalami proses pengkondisian struktural (*structural conditioning*) secara berbeda ketika setiap agen menangkap gagasan mengenai radikalisme. Interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap agen—di dalam melihat wacana radikalisme yang telah berkembang sebelumnya dengan realitas empiris terkait munculnya radikalisme—akan menentukan apakah wacana radikalisme akan direproduksi (*morphostatis*) atau dielaborasi (*morphogenesis*) secara struktural guna menambah khasanah pengetahuan yang baru. Kelemahan pendekatan struktur maupun agen, seperti penjelasan sebelumnya, dalam memahami gejala radikalisme hanya memberikan penjelasan deskriptif. Kelemahan tersebut akan dilengkapi penelitian ini dengan menggunakan kerangka berpikir struktur-agen yang memberikan penjelasan yang bersifat komprehensif serta prediktif. Bagaimana kerangka berpikir struktur-agen dapat dilakukan dalam riset ini? Berikut pemaparan bagaimana kerangka berpikir struktur-agen bekerja dalam penelitian ini.

Pada bagian awal peneliti mencoba memetakan agen-agen mana saja yang menghasilkan produk wacana radikalisme. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder (*library research*) terkait buku, jurnal, hasil penelitian, kebijakan sebagai bentuk produk pengetahuan dari agen-agen yang mengkonstruksi wacana radikalisme. Peneliti berpendapat bahwa CSRC, Lazuardi

Birru, SETARA Institute, dan BNPT merupakan empat agen yang cukup signifikan didalam mewarnai wacana radikalisme di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hasil riset dan publikasi yang mereka lakukan. Kemudian, proses selanjutnya peneliti mencoba melihat bagaimana produk pengetahuan mengenai wacana radikalisme yang dikembangkan oleh setiap agen diproduksi dan direproduksi sekaligus melihat pergulatan yang terjadi. Pada tahap ini akan ditunjukkan bagaimana peran agen dalam mengelaborasi gagasan mengenai radikalisme menjadi sebuah produk pengetahuan yang baru. Pada bagian ini peneliti sekaligus melakukan kritik metodologis terhadap wacana radikalisme yang dikembangkan oleh setiap agen guna menunjang wacana radikalisme yang lebih netral dan prediktif. Posisi peneliti cukup penting pada bagian ini sebagai salah satu pihak yang turut melakukan konstruksi wacana radikalisme. Pada bagian ketiga, peneliti akan mengkonstruksi model dan skenario radikalisme yang menunjang deteksi dini untuk mencegah terjadinya radikalisme. Proses ini peneliti lakukan dengan melihat sejauh mana kritik metodologis terhadap wacana radikalisme yang dikembangkan oleh beberapa agen. Lalu, peneliti melihat kelemahan proses konstruksi wacana radikalisme sebagai dasar gagasan yang dapat dielaborasi dengan beberapa hasil riset lainnya. Hasilnya, peneliti berupaya membuat model dan skenario terkait deteksi dini radikalisme.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peneliti mengangkat permasalahan wacana radikalisme dalam perspektif sosiologi pengetahuan dan kerangka berpikir struktur-agen. Peneliti mencoba memetakan dan mengkonstruksi pengetahuan mengenai radikalisme dari produk (hasil) sekaligus pembuat produk (agen-agen) yang membentuk sebuah struktur pengetahuan. Peneliti berpendapat bahwa pengetahuan mengenai wacana radikalisme yang berkembang pasca-Orde Baru diproduksi oleh institusi atau aparatus yang memiliki otoritas tertentu. Selain itu, terdapat motif (*debunking*) tertentu dibalik munculnya wacana radikalisme para agen dimana terdapat keterkaitan dengan struktur pengetahuan pendahulunya. Wacana radikalisme yang berkembang selanjutnya bukan hanya membahas tentang Islam, melainkan lebih kepada dominasi interpretasi tertentu tentang Islam.

Selanjutnya, penelitian ini akan berupaya melakukan kajian terkait konstruksi wacana radikalisme dengan pertanyaan penelitian utama yaitu **bagaimana wacana radikalisme kelompok Islam yang berkembang pada masa pasca-Orde Baru?** Pertanyaan penelitian ini peneliti uraikan kembali menjadi beberapa pertanyaan penelitian lainnya yaitu:

1. Siapa saja agen-agen yang mengkonstruksi wacana radikalisme? Apa wacana radikalisme yang dihasilkan agen-agen tersebut dan bagaimana posisi wacana yang dikembangkan dalam struktur pengetahuan mengenai radikalisme yang sudah ada?
2. Bagaimana pengetahuan mengenai wacana radikalisme diproduksi dan direproduksi oleh agen-agen tersebut dan bagaimana pengaruh struktur pengetahuan terkait radikalisme dalam wacana yang dihasilkan? Apa kritik metodologis terhadap wacana radikalisme yang dihasilkan agen-agen tersebut?
3. Bagaimana bentuk kontribusi kebijakan untuk mendukung deteksi dini dan mencegah terjadinya radikalisme? Apa model analisis dan skenario yang dapat dikonstruksi untuk mendukung deteksi dini radikalisme?

Pertanyaan penelitian pertama yang diajukan peneliti dipaparkan pada bab IV, kemudian pertanyaan penelitian kedua dianalisis pada bab V, sedangkan pertanyaan penelitian ketiga dideskripsikan pada bab VI. Kerangka konsep Michele Foucault—tentang arkeologi ilmu pengetahuan dan genealogi kekuasaan—dan Berger tentang *debunking motif* menjadi alat analisis pada Bab IV, sedangkan pada Bab V peneliti menggunakan kerangka konsep Margareth Archer tentang *morphogenesis*. Secara teoretik pemikiran Foucault menjadi signifikan ketika melihat bagaimana sebuah produksi pengetahuan mengenai wacana radikalisme dihasilkan dari sebuah proses dominasi pengetahuan oleh para agen yang memiliki otoritas, sedangkan pemikiran Berger melihat bagaimana sebuah produksi pengetahuan tentang wacana radikalisme harus dibongkar motifnya dari struktur pengetahuan yang ada dibelakangnya. Adapun pemikiran Archer secara teoretik dapat memberikan gambaran bagaimana sebuah pengetahuan mengenai wacana radikalisme diproduksi dan dielaborasi melalui sebuah mekanisme yang berlangsung secara siklus dalam konteks waktu tertentu.

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tiga tujuan. *Pertama*, melakukan pemetaan wacana radikalisme—termasuk agen-agen yang mengkonstruksi—beserta produk yang dihasilkan serta posisi wacana yang dikembangkan dalam struktur pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. *Kedua*, memberikan pemahaman konstruksi pengetahuan mengenai bagaimana wacana radikalisme diproduksi dan direproduksi serta pengaruh struktur pengetahuan yang sudah ada terhadap wacana yang dihasilkan sekaligus kritik metodologis terhadap wacana radikalisme yang ada. *Ketiga*, memberikan kontribusi kebijakan untuk mendukung deteksi dini dan mencegah radikalisme dengan mengkonstruksi model dan skenario radikalisme.

### **I.4. Signifikansi Penelitian**

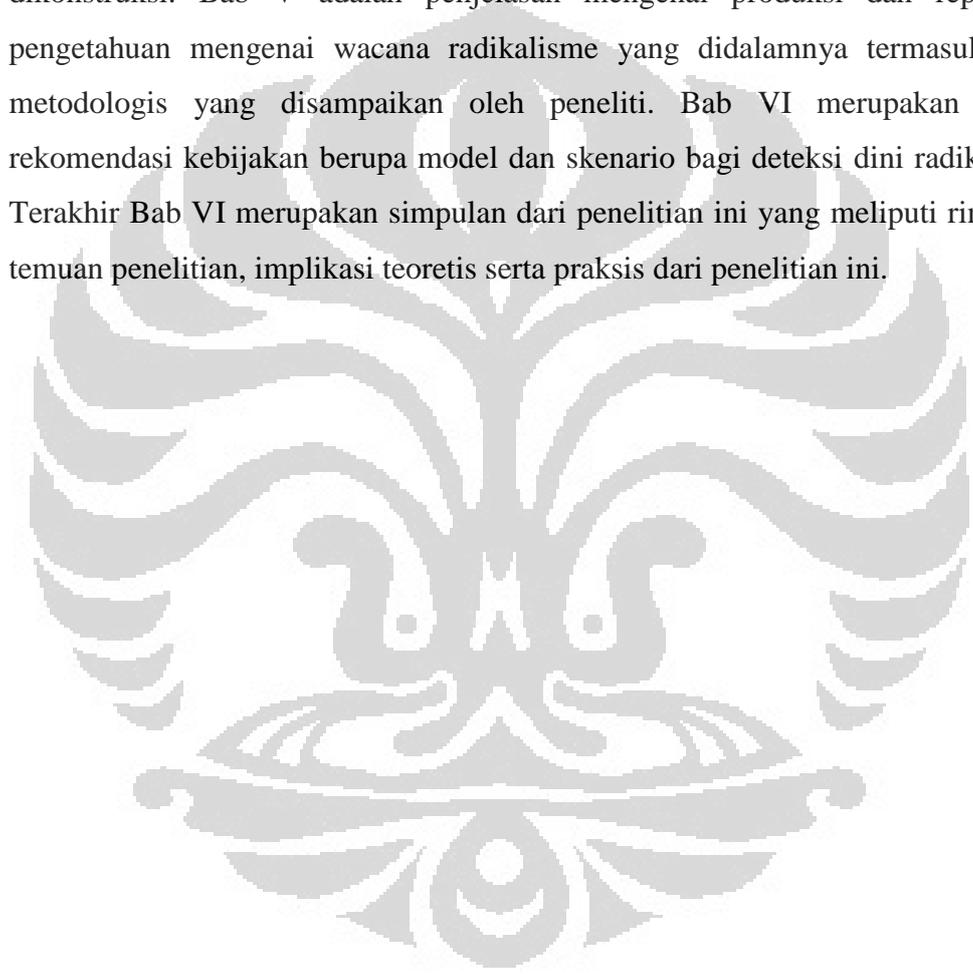
Secara teoretis, dalam perspektif sosiologi pengetahuan, kajian radikalisme belum banyak yang menyentuh dengan menggunakan kerangka struktur-agen. Studi radikalisme lebih banyak menyentuh dalam ranah yang bersifat abstrak (konseptual dan teoretis), atau yang lebih konkret lebih banyak menyentuh pada ranah subyektif persepsi masyarakat mengenai tindakan radikal yang dilakukan oleh seseorang atau pihak tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkonstruksi wacana radikalisme yang dapat melengkapi kerangka teoretis sosiologi pengetahuan yang sudah berkembang sebelumnya. Studi radikalisme ini kedepannya dapat dijadikan acuan bagi tahapan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan mengembangkan indikator sosial.

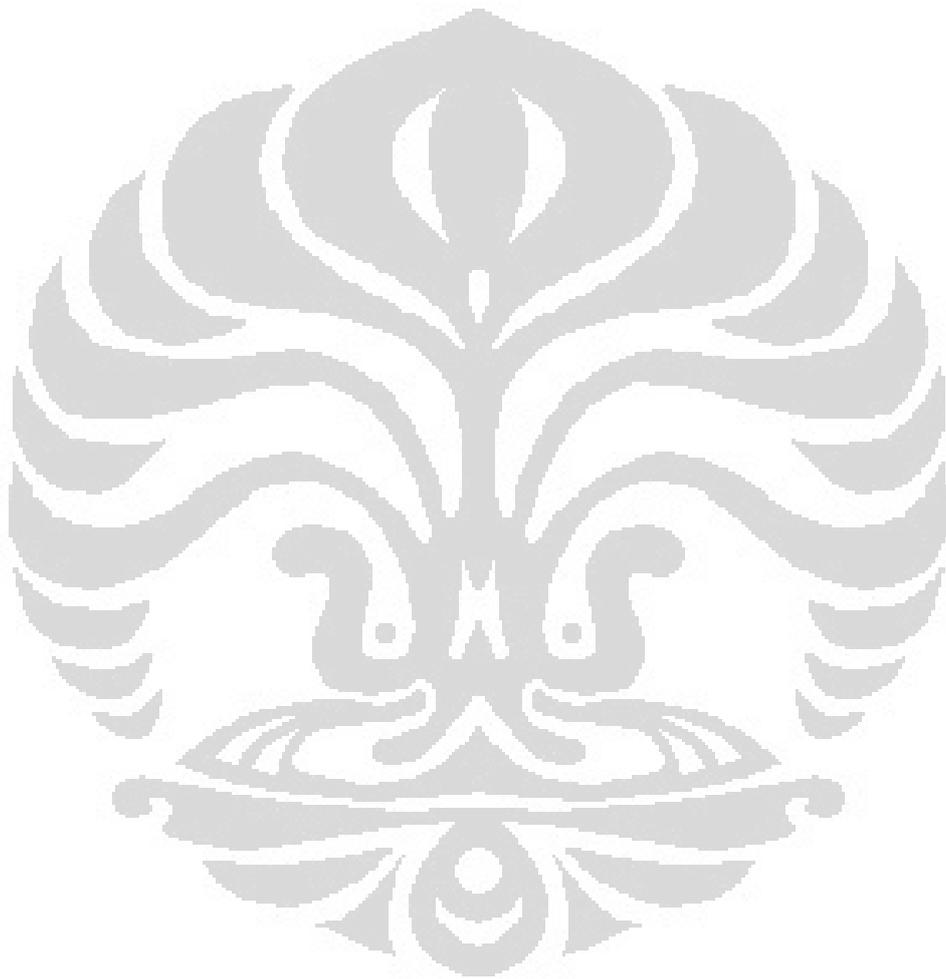
Selain itu pada tataran praktik, studi ini juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kebijakan pemerintah di dalam melakukan proses deradikalisasi. Penyusunan model dan skenario radikalisme dapat menjelaskan secara prediktif dan sensitif pada konteks sejarah dan kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga bermanfaat bagi kebijakan yang diambil pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan mengulang kesalahan di dalam melakukan deteksi dini terhadap aktivitas dan pihak-pihak yang dianggap terlibat radikalisme.

### **I.5. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi menjadi tujuh bab. Bab I hingga Bab III berisi pendahuluan, yang antara lain terdapat latar belakang, permasalahan dan pertanyaan penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian, telaah pustaka, prosedur pengumpulan dan analisis data serta sistematika penulisan.

Bab IV merupakan paparan mengenai para agen yang melakukan konstruksi wacana radikalisme sekaligus mencakup wacana radikalisme yang dikonstruksi. Bab V adalah penjelasan mengenai produksi dan reproduksi pengetahuan mengenai wacana radikalisme yang didalamnya termasuk kritik metodologis yang disampaikan oleh peneliti. Bab VI merupakan bentuk rekomendasi kebijakan berupa model dan skenario bagi deteksi dini radikalisme. Terakhir Bab VI merupakan simpulan dari penelitian ini yang meliputi ringkasan temuan penelitian, implikasi teoretis serta praksis dari penelitian ini.





## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **II.1. Telaah Studi Radikalisme Dari Berbagai Aspek Kajian**

Studi mengenai radikalisme di Indonesia telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari intelektual/akademisi, pemerintah, maupun elemen masyarakat seperti NGO. Secara umum, studi yang dihasilkan oleh beberapa intelektual lebih banyak menyentuh dalam ranah yang bersifat deskriptif serta menggunakan pendekatan tertentu—baik struktur maupun agen. Adapun kajian yang dihasilkan oleh beberapa lembaga NGO lebih banyak berfokus pada deskripsi data yang bersifat kuantitatif, tetapi belum dapat digunakan untuk prediksi. Berikut ini adalah beberapa hasil telaah penelitian mengenai radikalisme yang dapat dilihat dari berbagai aspek kajian.

##### **II.1.1. Sosio-Historis**

Penelitian Hadiz (2008) tentang radikalisme Islam di Indonesia. Hadiz melihat bahwa pemahaman atas Islam politik (termasuk Islam politik “radikal”<sup>13</sup>), harus dimaknai sebagai gejala sosial dan historis—seperti dikatakan Sidel (dalam Hadiz 2008)—yang membutuhkan perhatian lebih mendalam terhadap beberapa masalah yang kurang diangkat dalam analisis selama ini. Khususnya, perhatian terhadap aspek-aspek terorisme dan kekerasan.

Pada kasus Indonesia, masalah pertama adalah warisan hubungan yang naik-turun antara negara dan Islam politik setelah kemerdekaan, lebih khususnya selama masa Orde Baru yang panjang (1966-1998). Yang kedua, berkaitan dengan peran *de facto* Islam politik sebagai artikulator utama isu-isu keadilan sosial dalam hubungannya dengan kontradiksi yang bertalian dengan pembangunan kapitalis dan dalam konteks ketiadaan tantangan dari kelompok kiri, sosial-demokrasi, maupun kalangan liberal. Masalah ketiga, berkaitan dengan arah yang

<sup>13</sup> Tidak ada konsensus yang nyata tentang yang dimaksud dengan istilah “Islam radikal.” Istilah itu bisa berarti sebagai mereka yang ingin mendirikan negara Islam atau negara kekhalifan, atau mereka yang ingin menjadikan Syariah sebagai sumber hukum dengan atau tanpa menggunakan kekerasan terbuka. Istilah itu juga digunakan secara longgar dan saling dipertukarkan antara Islam fundamentalis dengan Islam militan, atau kadang-kadang dengan secara sederhana disebut “Islamist.”

ditempuh Islam politik sehubungan pergulatan-pergulatan politik yang terjadi di masa Perang Dingin. Dapat dikemukakan, apa yang saat ini dicap “Islamisme radikal” di Indonesia, pada intinya merupakan produk dari fase yang panjang pembangunan kapitalis otoritarian di bawah kekuasaan Orde Baru—sebagaimana pada level global ialah warisan era politik Perang Dingin, dan tidak sekadar dalam pengertian pengalaman mujahidin ketika Uni Soviet menduduki Afghanistan.

Pemahaman seperti ini sangat menyimpang jauh dari pandangan yang dipropagandakan oleh beberapa “ahli” terorisme, yang mengatakan bahwa Islam politik ‘radikal’ adalah produk dari berakhirnya Orde Baru yang kuat dan otoritarian, yang menyebabkan munculnya kekosongan yang kemudian dieksploitasi oleh eksponen-eksponen penggagas negara Islam. Para aktor tersebut secara tipikal digambarkan sebagai tidak bersahabat pada budaya Barat, pasar bebas, dan demokrasi. Ketakutan pun muncul bahwa versi-versi Islam politik ‘radikal’ akan semakin berkembang-biak dalam konteks lingkungan politik yang cair di era Indonesia pasca-otoritarianisme. Varian radikal Islam politik di masa pasca-otoritarianisme di Indonesia, bisa dengan jernih dipahami dalam hubungannya yang lebih luas dengan proses sosiologis dan sejarah pasang surutnya sejumlah gerakan berbasis Islam dalam konteks perubahan sosial secara global. Dalam kasus Indonesia, naik-turunnya Islam politik selama fase panjang penguasa otoritarian Orde Baru—yang jatuh hampir bersamaan dengan masa Perang Dingin – sangat penting untuk dipahami.

### **II.1.2. Ekonomi-Politik**

Penelitian yang dilakukan oleh Fananie (2002 dalam Sumbulah 2010) tentang perilaku sejumlah kelompok radikalisme keagamaan (KRK) di Surakarta, yakni Laskar Santri Hizbullah Sunan Bonang, Brigade Al-Islah, Gerakan Pemuda Ka’bah, Brigade Hizbullah, Laskar Mujahidin Surakarta, Laskar Jundullah, Laskar Jihad Ahlussunnah wa Al-Jama’ah, dan KAMMI. Penelitian ini memiliki fokus kajian pada visi dan misi gerakan, serta pengaruhnya terhadap transformasi sosial serta pandangan masyarakat terhadap KRK ini. Hasilnya, keberadaan KRK disebabkan merebaknya dekadensi moral dan isu ekonomi-politik. Sehingga, dakwah dilakukan secara lunak maupun kekerasan sehingga KRK Surakarta tidak

monolitik. Penyisiran (*sweeping*) tempat hiburan dan warga AS, pengiriman Laskar Jihad ke Ambon dan merespon keras isu kristenisasi adalah diantara perilaku radikal kelompok ini.

### **II.1.3. Gerakan Sosial**

- a. Penelitian Zada (2002 dalam Sumbulah 2010) mengenai Ormas Islam garis keras yang antara lain adalah FPI, Majelis Mujahidin, KISDI, dan Laskar Jihad Ahlussunnah wa Al-Jama'ah. Empat kelompok tersebut memiliki kemiripan antara lain: 1) memperjuangkan islam secara *kaffah* (total) ; 2) mendasarkan pemahaman dan praktik keagamaannya pada generasi *al-salaf al-salih* (generasi terbaik Islam awal); 3) memusuhi Barat dengan segala produknya; 4) memusuhi kelompok liberalisme yang marak di kalangan umat Islam. Barat tidak saja dinilai sebagai ikon sekularisme, namun juga dinilai sebagai agen salibisme yang berkolaborasi dengan zionisme untuk menghancurkan Islam. Sedangkan liberalisme Islam, dinilai sebagai adanya pengaruh orientalisme dan kristenisasi yang mengatasnamakan HAM, kebebasan, dan kemanusiaan.
- b. Penelitian yang dilakukan Tim Peneliti LIPI (2005 dalam Sumbulah 2010) mengenai gerakan radikalisme Islam di Indonesia yakni Jamaah Salafi bandung, Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Komite Persiapan Shari'at Islam (KPPSI), DI/NII, MM, dan HT. Penelitian ini fokus pada profil, visi dan misi gerakan, serta sikap politiknya. Disamping itu, penelitian juga diarahkan pada dua pesantren yang ditengarai melahirkan sejumlah teroris, yakni Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo dan Pesantren Al-Islam Solokuro, Lamongan.

**Tabel 2**  
**Ikhtisar Pemetaan Studi Tentang Radikalisme**

FOKUS KAJIAN RADIKALISME	STUDI TENTANG RADIKALISME
<b>SOSIO-HISTORIS</b>	<p>Studi yang dilakukan Hadiz (2008) menunjukkan bahwa gejala Islam politik (termasuk yang “radikal”) harus dimaknai dalam hubungannya yang lebih luas dengan proses sosiologis dan sejarah pasang surutnya sejumlah gerakan berbasis Islam dalam konteks perubahan sosial secara global</p> <p>Hubungan antara Islam politik “radikal” dengan negara, isu keadilan sosial, &amp; pergulatan politik di masa perang dingin merupakan beberapa dimensi munculnya radikalisme</p> <p><b>Catatan:</b> fokus kajian Hadiz lebih menekankan aspek sosio-historis Islam politik secara makro, adapun fokus kajian peneliti adalah penyusunan model dan skenario radikalisme yang terkait beberapa dimensi yang dikatakan Hadiz seperti keadilan sosial, pergulatan politik, dan relasinya dengan negara</p>
<b>EKONOMI-POLITIK</b>	<p>Studi yang dilakukan Fananie (2002) menunjukkan bahwa merebaknya Kelompok Radikalisme Keagamaan (KRK) disebabkan oleh isu ekonomi-politik dan juga dekadensi moral</p> <p>Bentuk dakwah yang dilakukan oleh KRK ini bisa muncul dalam bentuk yang lunak maupun keras</p> <p><b>Catatan:</b> fokus kajian lebih menekankan pada aspek ekonomi-politik terkait kelompok radikalisme keagamaan, adapun peneliti menyusun model dan skenario radikalisme yang dapat mendeteksi kemunculan kelompok radikal</p>
<b>GERAKAN SOSIAL</b>	<p>Studi yang dilakukan Zada (2002) dan LIPI (2005) menunjukkan bahwa tujuan utama berbagai Ormas Islam yang berlabel “radikal” merupakan bagian dari gerakan sosial untuk memperjuangkan Islam secara total (<i>kaffah</i>) berdasarkan praktik keagamaan generasi terbaik Islam awal</p> <p><b>Catatan:</b> fokus kajian lebih menekankan pada aspek gerakan sosial Ormas Islam, sedangkan peneliti menyusun model dan skenario radikalisme yang secara sensitif dapat memantau perkembangan gerakan sosial yang ada di dalam masyarakat</p>

Berdasarkan pemetaan di atas, peneliti memberikan beberapa catatan terkait konsepsi radikalisme. Catatan pertama, konsepsi radikalisme muncul dalam konteks hubungan antara Islam politik “radikal” dengan negara, isu keadilan sosial, dan pergulatan politik di masa perang dingin. Dimensi ketimpangan vertikal (keadilan sosial & politik), secara sosio-historis, menjadi pokok persoalan dalam merumuskan radikalisme. Catatan kedua, konsepsi radikalisme muncul seiring dengan problematika ekonomi dan politik yang menghimpit kelompok masyarakat marjinal sebagai akibat kebijakan pemerintah. Dimensi kesenjangan, baik secara ekonomi dan politik, menjadi potensi bagi munculnya gerakan Islam radikal. Catatan ketiga, konsepsi radikalisme muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem negara dengan memperjuangkan gagasan Islam secara total sebagai praktik keagamaan sekaligus politik yang dapat ditempuh dengan menggunakan cara kekerasan dan tidak. Dimensi kekerasan, menjadi salah satu isu penting bagi konsepsi radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk gerakan sosial. Kekerasan menjadi salah satu cara dalam memperjuangkan gagasan tentang Islam, sedangkan gerakan sosial menjadi salah satu bentuk wadah perjuangan.

Kelemahan penelitian yang telah dijelaskan lebih banyak menyentuh pada pendekatan tertentu, baik sosio-historis, ekonomi-politik, serta gerakan sosial. Basis dasar pendekatan yang digunakan oleh beberapa peneliti lebih banyak pada pendekatan struktur dan institusi. Oleh karena itu, wacana pengetahuan mengenai radikalisme yang dihasilkan hanya dapat menjelaskan gejala radikalisme dari perspektif tertentu yang bersifat deskriptif. Kelemahan inilah yang diisi oleh peneliti dengan mengembangkan gagasan radikalisme yang bersifat lebih prediktif. Gagasan mengenai munculnya radikalisme pada penelitian yang sudah ada menjadi landasan dasar bagi peneliti untuk membangun model dan skenario guna mendukung deteksi dini radikalisme.

## **II.2. Kerangka Teoretis**

Peneliti menggunakan beberapa konsep maupun teori sebagai kerangka berpikir maupun analisis untuk memahami wacana radikalisme yang berkembang pasca-Orde Baru. Pada bagian awal peneliti memaparkan konsepsi mengenai *discourse* (wacana) dalam konteks sosiologis. Lalu, peneliti menggunakan teori sosiologi pengetahuan yang disampaikan oleh Michele Foucault tentang teori arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaan untuk menganalisis pengetahuan mengenai wacana radikalisme. Pada bagian akhir, peneliti memakai teori morphogenesis Archer sebagai kerangka analisis.

### **II.2.1. Discourse Sebagai Konsep Sosiologis**

Pada bagian ini penting kiranya peneliti sedikit mengulas terminologi mengenai *discourse* (atau *wacana* yang peneliti gunakan dalam istilah Bahasa Indonesia) secara sosiologis yang tentu saja berbeda secara linguistik. Ulasan ini peneliti ringkas dari pendapat yang diberikan oleh Jean K. Chalaby (1996) dalam tulisannya mengenai *Beyond the Prison-House of Language: Discourse as a Sociological Concept*. Selain itu, peneliti juga menambahkan beberapa pendapat lain dari Fairclough (1997), Philips dan Jorgensen (2004), serta Wood dan Kroger (2000) sebagai perbandingan kerangka teoretis analisis wacana.

Secara sosiologis, terminologi *discourse* tidak mengacu pada bahasa (*language*) atau teks tertentu. Istilah *discourse* pada dasarnya mengacu pada

penggolongan teks (*a class of text*). Perspektif seperti ini menunjukkan bahwa teks adalah teks dan *discourse* adalah *discourse*, keduanya menunjukkan dua realitas yang berbeda. Yang pertama merujuk pada sesuatu yang bersifat tekstual, sedangkan yang kedua merujuk pada sesuatu yang bersifat lebih luas yaitu multitekstual dimana di dalamnya terdapat pemaknaan intertekstual.

Dengan cara pandang seperti ini, lalu apa yang dimaksud dengan teks? *Pertama*, teks adalah elemen dasar dari penggolongan tekstual (*a textual class*) yaitu bagian yang tidak berkesinambungan (*a discursive unit*). *Kedua*, teks adalah manifestasi material (*material manifestation*) dari *discourse*. Tidak seperti komponen individual, *discourse* bersifat konkret—karena terkait dengan realitas sejarah dan realitas sosial tertentu—, tetapi tidak memiliki entitas material.

Definisi *discourse* memiliki dua elemen yakni: pertama, terkait sifat dasar dari intertekstualitas secara sosiologis (*sociological intertextuality*); kedua, terkait relasi yang muncul antara teks (*text*), penggolongan teks (*a class of text*), dan pembuat teks (*producer*). Elemen pertama yaitu intertekstualitas secara sosiologis merujuk pada keberagaman dari teks (*multilocity of texts*). Dimensi supratekstual ini dapat dipahami dengan membandingkan definisi gagasan secara sosiologis antara *discourse* dan kelas sosial. Kedua konsep berusaha untuk mengelompokkan beberapa entitas (teks di satu sisi, individual di sisi lain) yang memiliki karakteristik sama. Kelas sosial tidak hanya dipahami sebagai sekelompok individual, sedangkan *discourse* tidak hanya dipahami sebagai sekelompok teks. Kelas sosial adalah sesuatu yang muncul dalam dirinya sendiri: ia memiliki asal-usul, sejarah, dan kepentingan sendiri. Di sisi lain *discourse* adalah sesuatu yang muncul sebagai entitas yang konkret yang tidak dapat direduksi dari komponen pembentuknya. *Discourse* merupakan realitas yang independen dan relatif otonom dari elemen pembentuknya.

Elemen kedua menunjukkan bahwa antara teks (*text*), penggolongan teks (*a class of text*), dan pembuat teks (*producer*) memiliki relasi satu sama lain yang membentuk sebuah *discourse*. Sebagai contoh, sebuah teks tidak akan dapat digolongkan sebagai *a class of text* tanpa adanya proses produksi teks yang dilakukan oleh agen di dalam suatu ranah produksi diskursif (*field of productive discursive*). Oleh karena itu, penggolongan teks (*a class of text*) muncul secara

independen dari teks yang membentuknya. Jadi *discourse*, sebagai kategori intertekstual, memiliki entitas yang independen dari material tekstualnya, dan menjadi sebuah konsep dalam dirinya sendiri. *Discourse*, yang didefinisikan sebagai penggolongan teks (*a class of text*), menunjuk sebuah realitas diskursif yang spesifik untuk kata ini. *Discourse* dalam hal ini membentuk sesuatu dalam dirinya sendiri.

Wacana radikalisme, sebagai sebuah *discourse*, dalam hal ini memiliki relasi dengan pembuat teks (agen) dan juga dapat digolongkan dalam beberapa jenjang. Oleh karena itu, penggunaan konsepsi *discourse* secara sosiologis dapat membantu mengaitkan relasi antara wacana radikalisme sebagai sebuah teks, penggolongan teks, dan juga pembuat teks dalam membentuk sebuah pengetahuan. Pemahaman tentang radikalisme sebagai sebuah *discourse* berkontribusi terhadap relasi wacana pengetahuan yang dihasilkan oleh setiap agen dengan struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya. *Discourse* mengenai radikalisme dapat menjadi sebuah hasil reproduksi wacana pengetahuan yang ada sebelumnya atau dapat menjadi sebuah elaborasi pengetahuan yang menambah khasanah radikalisme.

## **II.2.2. Debunking Motif-Peter L. Berger Serta Arkeologi Ilmu Pengetahuan & Genealogi Kekuasaan-Michele Foucault**

Sebelum membahas kerangka pemikiran Foucault tentang arkeologi ilmu Pengetahuan dan Genealogi kekuasaan, kurang lengkap jika Kita tidak mengetahui bagaimana teori sosiologi pengetahuan yang ada sebelumnya. Pandangan bertolak belakang mengenai sosiologi pengetahuan yang dikemukakan Foucault dapat dilihat dari pandangan Berger dan Luckman tentang bagaimana pengetahuan dihasilkan. Berangkat dari pandangan dan kritik atas Berger dan Luckman inilah Foucault mengemukakan pendapatnya tentang pengetahuan.

Berger & Luckman (1990:1-4) berargumen bahwa “kenyataan” dibangun secara sosial dan oleh karenanya sosiologi pengetahuan harus menganalisa proses terjadinya hal itu—atau dalam terminologi Berger disebut dengan *debunking*

*motif*<sup>14</sup> (Berger dan Kellner 1981: 4). Alih-alih memberikan pemahaman yang lebih bersifat dialektis, proposisi tersebut menunjukkan seolah-olah “kenyataan” dan “pengetahuan” dipahami sebagai dasar membedakan antara kehidupan sehari-hari dengan sesuatu yang lebih bersifat filosofis.<sup>15</sup> Oleh karena itu, kedua hal tersebut memiliki relevansi secara dialektis bagi orang biasa (awam) maupun bagi filsuf.

Sosiologi berperan dalam ranah intelektual memberikan penjelasan mengenai apa yang disebut dengan kenyataan dan apa yang disebut dengan pengetahuan. Pemahaman sosiologis terletak di tengah-tengah antara pemahaman orang awam dan pemahaman filsuf. Perhatian sosiologi mengenai “kenyataan” dan “pengetahuan” pada awalnya dibenarkan oleh fakta relativitas sosialnya. Kumpulan-kumpulan “kenyataan” dan “pengetahuan” berkaitan dengan konteks-konteks sosial yang spesifik dan hubungan-hubungan itu harus dimasukkan ke dalam suatu analisis sosiologis yang memadai mengenai konteks-konteks itu.

Dengan demikian, kebutuhan akan “sosiologi pengetahuan” muncul bersama adanya perbedaan-perbedaan yang bisa diamati diantara berbagai masyarakat dari segi apa yang sudah diterima begitu saja sebagai “pengetahuan” dalam masyarakat-masyarakat itu. Sosiologi pengetahuan menekankan tidak hanya variasi dari “pengetahuan” dalam masyarakat-masyarakat manusia, melainkan juga proses-proses dimana setiap “perangkat pengetahuan” (*body of knowledge*) pada akhirnya diterapkan secara sosial sebagai “kenyataan”.

Sosiologi pengetahuan harus menekuni apa saja yang dianggap sebagai “pengetahuan” dalam suatu masyarakat, terlepas dari persoalan, kesahihan atau ketidaksahihan yang paling dasar dari “pengetahuan” itu. Sejauh semua “pengetahuan” manusia dikembangkan, didistribusikan, dan dipelihara dalam berbagai situasi sosial, maka sosiologi pengetahuan harus memahami bagaimana proses-proses itu dilakukan sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu

<sup>14</sup> Berger berpendapat bahwa dibalik bangunan kehidupan dunia manusia masih banyak yang tersembunyi, yakni struktur yang tidak dapat terlihat yang penuh dengan kepentingan dan kekuatan dan hal ini perlu dibongkar oleh para sosiolog untuk melihat kepalsuan (*debunk*) yang ada di dalamnya dibaliknya.

<sup>15</sup> Berger & Luckman berpendapat bahwa “kenyataan” didefinisikan sebagai sesuatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang kita akui memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri, sedangkan “pengetahuan” didefinisikan sebagai kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik-karakteristik yang spesifik.

“kenyataan” yang dianggap sewajarnya oleh orang awam. Dengan kata lain, sosiologi pengetahuan menekuni analisa pembentukan kenyataan oleh masyarakat (*social construction of reality*). Rumusan proposisi koseptual yang dapat diambil dari pemikiran Berger dan Luckman yakni bahwa pengetahuan atas realitas dibangun atau dibentuk oleh masyarakat melalui proses internalisasi, eksternalisasi, dan obyektivasi dalam konteks sosial yang bersifat relatif. Kemudian, pengetahuan yang dibentuk oleh masyarakat harus dibongkar motifnya untuk mengetahui kepentingan dan kekuasaan yang ada dibalik pengetahuan yang dikonstruksi sebagai sebuah realitas oleh masyarakat. Wacana pengetahuan terkait radikalisme yang telah dihasilkan oleh setiap agen harus dipahami bahwa terdapat motif kepentingan dan kekuasaan tertentu dibalik kemunculan wacana radikalisme yang dihasilkan beberapa agen.

Rumusan proposisi Berger dan Luckman mengenai pengetahuan yang dibangun atas konteks sosial yang bersifat relatif ini dikritik oleh Foucault. Pembahasan mengenai pengetahuan, menurut Foucault, tidak lepas dari keterkaitan antara arkeologi pengetahuan dengan genealogi kekuasaan. Pembahasan mengenai arkeologi ilmu pengetahuan, menurut Foucault (Foucault, 1980, 2004; Ritzer, 2003: 67-78), memiliki penekanan pada penyelidikan peristiwa-peristiwa diskursif serta pernyataan-pernyataan yang dibicarakan dan dituliskan. Rumusan dasar dari arkeologi ilmu pengetahuan merupakan sebuah upaya penelitian untuk menemukan seperangkat aturan yang menentukan kondisi kemungkinan keseluruhan yang dapat dikatakan dalam wacana khusus pada waktu tertentu. Dengan kata lain, arkeologi adalah sistem umum dari informasi dan transformasi pernyataan (Ritzer, 2004: 610-622). Di dalam memahami praktik wacana, Foucault memulai dengan kesatuan-kesatuan yang ada, kemudian “membongkarnya” yang dilanjutkan dengan “mendekonstruksikan” dalam bagian-bagian tertentu. Foucault tertarik pada kontradiksi yang terdapat dalam formasi diskursif kemudian merumuskan melalui analisis arkeologis—yang mendeskripsikan perbedaan *ruang-ruang perselisihan* (Rizer, 2003: 72).

Akan tetapi, analisis wacana arkeologis Foucault (dalam Ritzer, 2003: 78-81) disadari mulai ditinggalkan karena pendekatan poststrukturalis. Penyebabnya adalah konsepsi ini tidak dapat menjawab persoalan kekuasaan dan keterkaitan

antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Gugatan atas konsepsi yang ditawarkan dijawab Foucault dengan mengatakan bahwa kekuasaan dan cara kekuasaan diterapkan atas diskursus berlangsung sebagai berikut:

*Saya berharap bahwa di setiap masyarakat produksi wacana segera dikontrol, diseleksi, diatur, dan didistribusi berdasarkan sejumlah prosedur yang pasti, dan perannya adalah untuk mencegah kekuasaan dan bahayanya, untuk mengatasi peristiwa-peristiwa yang berubah, untuk menyingkirkan hal yang memberatkan, menyingkirkan hal materialitas yang mempesona.*  
(Foucault, 1969, 1971/1976 dalam Ritzer, 2003)

Fokus utamanya adalah wacana itu berbahaya, dan kekuasaan berusaha menggunakan kontrol atas bentuk-bentuk wacana yang dianggap potensial melemahkannya. Foucault mengidentifikasi empat domain dimana diskursus dianggap membahayakan: politik (kekuasaan), seksualitas, kegilaan, dan apa yang dianggap benar atau palsu.

Jadi, genealogi adalah analisis hubungan historis antara kekuasaan dan wacana, meskipun kritisisme diarahkan pada proses yang terdapat pada kontrol wacana. Foucault disibukkan dengan pertanyaan bagaimana manusia meregulasi dirinya sendiri dan yang lain melalui produksi dan kontrol ilmu pengetahuan. Disamping itu, ia menyelidiki ilmu pengetahuan yang membentuk kekuasaan melalui pembentukan manusia sebagai subjek dan ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk mengatur subjek. Rumusan proposisi konseptual yang dapat diajukan berdasarkan pemikiran Foucault ialah produksi atas bentuk-bentuk wacana ilmu pengetahuan menciptakan sebuah sistem dominasi kekuasaan atas ilmu pengetahuan. Pengetahuan mengenai wacana radikalisme diproduksi oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan otoritas tertentu seperti negara, intelektual, lembaga riset, maupun NGO.

Posisi penting konsepsi Foucault dalam studi ini terletak pada penguasaan wacana radikalisme oleh agen atau kelompok masyarakat tertentu justru digunakan untuk mengontrol atau mengurangi berkembangnya kelompok gerakan Islam. Wacana radikalisme justru digunakan sebagai alat dominasi kekuasaan dalam domain tertentu—terutama politik (salah satunya negara)—salah satunya untuk mengurangi bahaya radikalisme. Dominasi interpretasi wacana radikalisme yang berkembang justru perlu dikontrol, terutama oleh negara, agar tidak

mengancam stabilitas. Penelitian ini melihat bagaimana wacana pengetahuan mengenai radikalisme yang dihasilkan oleh setiap agen merupakan bagian dari proses dominasi wacana yang dikembangkan oleh Barat. Wacana radikalisme yang dikembangkan oleh setiap agen tidak lepas dari pengaruh gagasan beberapa intelektual Barat yang menempatkan Islam sebagai salah satu artikulator munculnya radikalisme.

#### **II.2.4. Kerangka Analisis Margaret Archer: Morphogenesis**

Studi ini secara umum menggunakan kerangka berpikir sekaligus analisis struktur-agen yang disampaikan Margaret Archer mengenai *morphogenesis*. Uraian teoretis yang disampaikan peneliti tetap menjelaskan bagaimana posisi kerangka pemikiran Bhaskar sebagai landasan dasar teoretis yang dibangun oleh Archer. Oleh karena itu, peneliti merasa cukup penting untuk menguraikan rumusan gagasan utama Bhaskar terlebih dahulu sebelum memaparkan gagasan Archer sebagai sebuah kesatuan teoretis yang bersifat genealogis.

Gagasan Bhaskar (1986, 1989, 2005, 2008) mengenai model transformasi sebetulnya muncul atas dasar kritik terhadap filsafat pengetahuan yang kemudian ia kembangkan ke dalam pendekatan realisme kritis. Pemikiran Bhaskar mengkritik filsafat pengetahuan Weber, Durkheim, dan juga Berger yang dianggap terjebak ke dalam kesalahan reifikasi dan voluntarisme. Akan tetapi, perkembangan selanjutnya pemikiran Bhaskar juga menuai kritik yang salah satunya disampaikan oleh Margaret Archer. Archer melihat bahwa kerangka berpikir Bhaskar mengenai model transformasi tidak secara jelas dapat menganalisis bagaimana model tersebut menjelaskan perbedaan antara proses reproduksi dan transformasi. Archer berpendapat bahwa reproduksi merupakan sebuah hasil dari reproduksi struktural yang bersifat *morphostatis*<sup>16</sup>, sedangkan transformasi merupakan hasil dari elaborasi struktural yang bersifat *morphogenesis*<sup>17</sup>. Konsepsi inilah yang digunakan oleh Archer sebagai alat analisis pengetahuan yang dihasilkan masyarakat dalam kerangka berpikir

<sup>16</sup> Sebuah proses dalam sistem yang kompleks yang berupaya/cenderung untuk mempertahankan bentuk sistem yang sudah ada.

<sup>17</sup> Sebuah proses yang berupaya/cenderung untuk mengelaborasi atau merubah bentuk sistem yang ada, dibuat oleh struktur atau "state."

struktur-agen. Berikut pemaparan secara rinci mengenai kerangka berpikir dan kerangka analisis yang disampaikan oleh Archer.

**Morphogenesis.** Salah satu teoretisi yang membahas mengenai struktur-agen adalah Margaret S. Archer (2004, 1995, 2010) dengan memperkenalkan konsep kunci yang cukup unik yaitu tentang *morphogenesis*—sebagai sebuah bentuk analisis teoretik sekaligus metodologi. Kerangka analisis struktur dan agen, Archer berargumen, harus dipahami dalam konteks analisis dualisme (*analytical dualism*)<sup>18</sup>. Pertama, struktur dan agen adalah dua entitas yang muncul secara berbeda. Kedua, struktur dan agen beroperasi berdasarkan konteks sejarah yang berbeda waktunya karena dua alasan. Alasan pertama, struktur ada mendahului tindakan yang nantinya menghasilkan reproduksi dan transformasi struktur. Alasan kedua, elaborasi struktural ada setelah munculnya tindakan. Hubungan antara struktur-agen satu sama lain saling mempengaruhi sepanjang waktu. Di sini terlihat bahwa waktu menjadi sebuah variabel yang menentukan relasi struktur-agen. Antara struktur-agen keduanya muncul, saling terkait, dan mendefinisikan kembali satu sama lainnya.

Konsepsi tersebut dikembangkan oleh Archer berdasarkan pandangan realisme kritis yang disampaikan Bhaskar. Konsepsi ini terkait dengan tiga konsep lain yaitu mengenai *downward conflation*, *upward conflation*, dan *central conflation*. Penjelasan berikut akan memaparkan proposisi terkait konsep yang diperkenalkan oleh Archer.

Konsepsi mengenai morfogenesis (Sibeon 2004: 97) terdiri dari dua elemen yaitu “morfo” dan “genesis”. Elemen pertama dari konsep ini menyiratkan bahwa yang disebut dengan masyarakat bukanlah bentuk pengakuan yang telah dibuat oleh negara, sehingga masyarakat bersifat dinamis atau mengalami perubahan. Adapun elemen kedua menyiratkan bahwa masyarakat merupakan pengakuan yang dibentuk dari dan oleh agen yang berasal dari konsekuensi, baik yang diinginkan maupun tidak, aktivitas mereka. Selama ini hubungan antara agen-struktur dimaknai dalam pengertian arah tertentu—baik

<sup>18</sup> Analisis dualisme memiliki dua sisi pemahaman. Pertama, analisis dualisme melihat bahwa secara ontologis pandangan dunia sosial tentang struktur-agen adalah berjenjang (*stratified*). Kedua, secara metodologis antara struktur-agen keduanya dapat dibedakan secara temporal dengan memeriksa hubungan antara keduanya dan menjelaskan perubahan yang terjadi antara keduanya.

struktur yang mendominasi agen maupun agen yang membentuk struktur. Archer berpendapat bahwa proses interaksi antara struktur-agen tidak hanya menciptakan sebuah perubahan struktur dari suatu sistem, melainkan menghasilkan perluasan struktural baik secara teoretik maupun metodologis.

Pada konsepsi mengenai *downward conflation*, Archer (2004: 25-45) melihat bahwa agensi dijelaskan dalam konteks struktur. Sehingga konsepsi ini bersandar pada gagasan determinisme struktural yang bertolak belakang dengan pengkondisian struktural (*structural conditioning*-lihat gambar di bawah)<sup>19</sup>. Archer berpendapat bahwa masyarakat dalam konteks ini adalah *outcome* tidak terencana dari konflik, negosiasi, dan kompromi antar kelompok. Sebaliknya pada konsepsi mengenai *upward conflation*, Archer (2004: 46-71) melihat bahwa sistem sosial yang lebih besar (masyarakat) digambarkan sebagai agregasi dari interaksi yang bersifat tatap muka (mikro). Sehingga konsepsi ini bersandar pada ide mengenai sosiologi interaksionis yang melihat struktur sebagai produk dari agensi. Padahal pengertian struktur lebih dari itu dimana struktur dapat dengan mudah diubah oleh aktor, asalkan mereka memiliki motivasi yang diperlukan dan informasi untuk mempromosikan perubahan sosial. Antara *downward* dan *upward conflation* pada dasarnya relatif otonom antara agen dan struktur. Kekeliruan muncul ketika memahami bahwa agensi atau struktur merupakan konstituen utama dari masyarakat, bukannya interaksi antara keduanya.

Adapun konsepsi mengenai *central conflation*, Archer (2004: 72-96) secara gamblang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap dualitas Giddens yang menyebabkan kaburnya pengamatan secara komprehensif mengenai bagaimana agen dan struktur saling mempengaruhi. Seakan-akan ada unsur yang hilang dari analisis konvensional mengenai agen-struktur. Dan bagian yang hilang itulah yang kemudian dimunculkan dalam konsep hubungan agen dan kultur untuk lebih memperlihatkan aspek kontekstualitasnya. Analisis dualisme yang

<sup>19</sup> Analisis morphogenesis Archer bekerja melalui tiga tahap: 1) *Structural conditioning*, yang merujuk pada struktur sebelumnya (*pre-existing*) yang mengkondisikan sesuatu namun tidak menentukan (*to condition but not determine*); 2) *Socio-cultural interaction*, yang muncul dari tindakan yang berorientasi pada realisasi keinginan (*interests*) dan kebutuhan (*needs*) yang berasal dari sang agen dan mengarah pada; 3) *Structural elaboration or modification*, yaitu sebuah perubahan dalam hubungan antara bagian-bagian dalam sebuah sistem sosial.

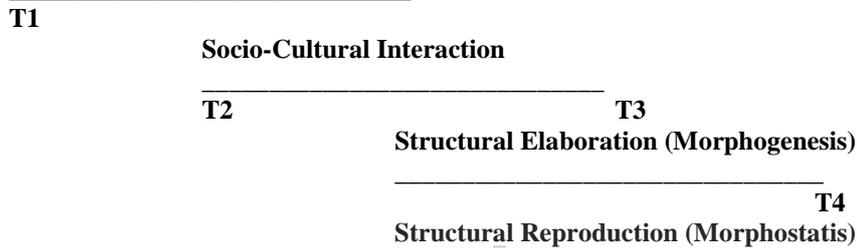
Archer tawarkan melihat bahwa antara struktur dan agen beda, sebuah fenomena terpisah, temporalitas dipandang sebagai aspek utama dari hubungan timbal balik antara struktur dan agen, struktur mendahului tindakan yang pada gilirannya menyebabkan reproduksi struktural atau elaborasi, dan siklus ini berulang secara terus-menerus.

Kultur menjadi kata kunci bagi hubungan agen-kultur menurut pendapat Archer. Hal ini merupakan konsep yang dinamis dan secara implisit menyebutkan bahwa ini adalah faktor inheren dari relasi struktur-agen. Interaksi dan tindakan agen memunculkan struktur yang juga bereaksi dan berubah seiring tindakan dan interaksi para agennya. Dan perubahan itu senantiasa akan menciptakan perluasan struktural. Terdapat dua level analisis kultural yang Archer tawarkan (Waters 2000: 204-205)<sup>20</sup>. Pertama, pada level sistem kultural (*Cultural System/CS*) hal-hal terkait ide/gagasan dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat dapat ditegaskan kebenarannya dan kesalahannya dan masih terbuka untuk dipertentangkan. Kedua, pada level interaksi sosio-kultural (*Socio-Cultural interaction/S-C*) hal-hal terkait ide/gagasan dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat masih dapat disetujui atau ditolak bergantung pada pilihan, selera, atau daya tarik yang dimiliki oleh setiap agen. Atau dengan kata lain CS sekaligus dapat menjadi pedoman yang menentukan bagi tindakan setiap agen atau hanya bersifat mengkondisikan agen sebelum melakukan tindakan. Untuk lebih jelasnya berikut bagan model morphogenesis yang disampaikan Archer (Archer 1995: 76, 2010: 275; Archer et.al. 1998: 375):

<sup>20</sup> Archer menawarkan empat proposisi terkait analisis antara CS dan S-C. Pertama, terdapat relasi yang bersifat logis antara setiap komponen CS. Kedua, terdapat pengaruh sebab-akibat yang ditekankan oleh CS terhadap setiap level S-C. Ketiga, terdapat relasi sebab-akibat antara individu dan kelompok pada level S-C. Keempat, terdapat elaborasi CS yang disebabkan oleh modifikasi di level S-C yang berelasi secara logis dan memunculkan SC yang baru.

**Bagan 1**  
**The Basic Model of Morphogenesis Sequence**

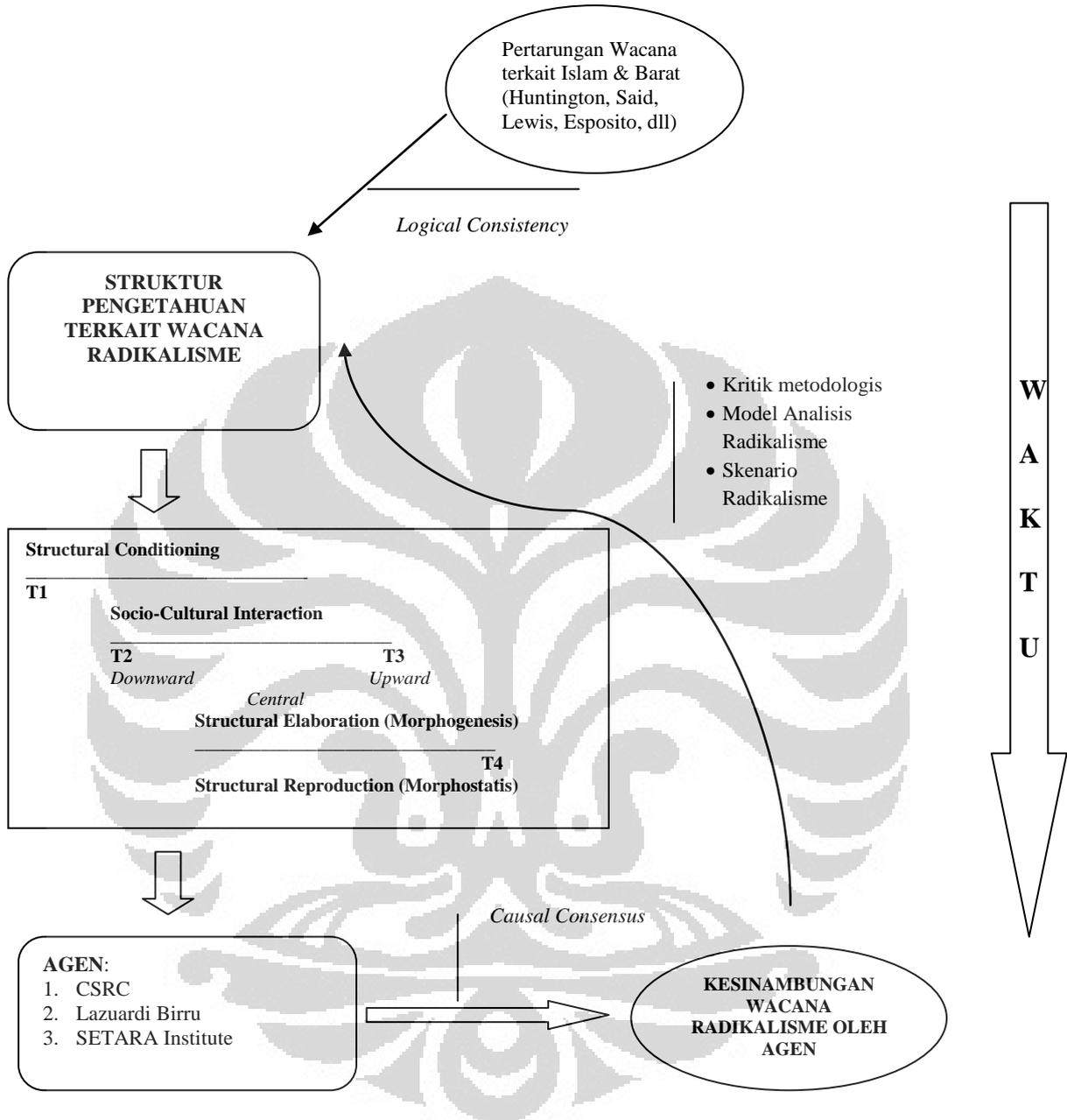
**Structural Conditioning**



Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan dua proposisi teoretis yang disampaikan oleh Archer. *Pertama*, proses interaksi antara struktur-agen tidak hanya menciptakan sebuah perubahan struktur dari suatu sistem, melainkan menghasilkan perluasan struktural baik secara teoretik maupun metodologis. *Kedua*, analisis dualisme yang Archer tawarkan melihat bahwa antara struktur dan agen beda, sebuah fenomena terpisah, temporalitas dipandang sebagai aspek utama dari hubungan timbal balik antara struktur dan agen, struktur mendahului tindakan yang pada gilirannya menyebabkan reproduksi struktural (*morphostatis*) atau elaborasi struktural (*morphogenesis*), dan siklus ini berulang secara terus-menerus.

Posisi kerangka teoretis Archer di dalam penelitian ini terletak pada proses interaksi antara struktur pengetahuan mengenai wacana radikalisme dengan agen-agen yang mereproduksinya telah menghasilkan perluasan struktural yang bersifat teoretik dan metodologis. Hasil reproduksi pengetahuan tersebut dapat berupa reproduksi struktural (*morphostatis*) atau elaborasi struktural (*morphogenesis*). Struktur pengetahuan mengenai wacana radikalisme merupakan sebuah keadaan yang telah ada sebelumnya. Pengetahuan inilah yang diadopsi oleh setiap agen dengan menjalankan proses pengkondisian struktural (*structural conditioning*), interaksi sosio-kultural (*socio-cultural interaction*), dan perluasan struktural. Relasi antara struktur pengetahuan mengenai wacana radikalisme dengan setiap agen akan menghasilkan kesinambungan wacana radikalisme yang baru. Berikut skema teoretik Archer yang digunakan peneliti dalam melihat wacana radikalisme:

**Bagan 2**  
**Skema Teoretik M. Archer**


 W  
A  
K  
T  
U

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pada bagian ini peneliti berupaya merumuskan beberapa proposisi teoretis yang disampaikan oleh Berger, Foucault, dan Archer. Proposisi teoretis Berger, Foucault, dan Archer di dalam penelitian ini peneliti ringkas dalam ikhtisar berikut ini:

**Tabel 3**  
**Ikhtisar Proposisi Teoretis**

Teori	Proposisi
<b>Berger:</b> <i>debunking motif</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dibangun atau dibentuk oleh masyarakat melalui proses internalisasi, eksternalisasi, dan obyektivasi dalam konteks sosial yang bersifat relatif</li> <li>• Pengetahuan yang dibentuk oleh masyarakat harus dibongkar motifnya untuk mengetahui kepentingan dan kekuasaan yang ada dibalik pengetahuan yang dikonstruksi sebagai sebuah realitas oleh masyarakat</li> </ul>
<b>Foucault:</b> <i>arkeologi ilmu pengetahuan dan genealogi kekuasaan</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi atas bentuk-bentuk wacana ilmu pengetahuan menciptakan sebuah sistem dominasi kekuasaan atas ilmu pengetahuan</li> <li>• Pengetahuan diproduksi dan dikontrol oleh institusi atau aparatus yang memiliki otoritas yang bersifat dominatif</li> </ul>
<b>Archer:</b> <i>morphogenesis</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur pengetahuan telah ada sebelumnya (<i>pre-existing</i>) dan bersifat mengkondisikan sesuatu namun tidak menentukan pengetahuan yang akan diadopsi oleh setiap agen</li> <li>• Terdapat interaksi sosio-kultural antara struktur pengetahuan dengan agen yang muncul dari tindakan yang berorientasi pada realisasi keinginan (<i>interests</i>) dan kebutuhan (<i>needs</i>) yang berasal dari sang agen dan mengarah pada perluasan struktural</li> <li>• Proses interaksi antara struktur-agen tidak hanya menciptakan sebuah perubahan struktur dari suatu sistem, melainkan menghasilkan perluasan struktural—baik secara teoretik maupun metodologis—berupa reproduksi struktural (<i>morphostatis</i>) atau elaborasi struktural (<i>morphogenesis</i>)</li> </ul>

Proposisi teoretis Berger dapat memberikan analisis pada bab IV dengan menjelaskan bahwa pengetahuan mengenai wacana radikalisme yang terbentuk sebelumnya memiliki konteks yang bersifat relatif. Ketika gagasan mengenai wacana radikalisme ini diadopsi oleh setiap agen, maka perlu kiranya dibongkar motif kepentingan dan kekuasaan yang ada dibalik pengetahuan tersebut. Pengetahuan yang diproduksi dan direproduksi oleh setiap agen karenanya tidak murni hasil dari konstruksi pengetahuan yang bersifat relatif, melainkan syarat dengan muatan kepentingan dan kekuasaan agen-agen lainnya.

Berikutnya, proposisi Foucault juga memberikan analisis pada bab IV dimana produksi dan reproduksi bentuk-bentuk wacana pengetahuan mengenai radikalisme sebenarnya merupakan sebuah penciptaan sistem dominasi kekuasaan atas pengetahuan tentang radikalisme. Dominasi pengetahuan mengenai radikalisme ini diproduksi dan dikontrol oleh aparatus atau institusi yang memiliki

otoritas secara dominatif. Pada konteks penelitian ini agen-agen yang melakukan produksi dan reproduksi pengetahuan tentang radikalisme dapat menjadi salah satu bentuk institusi yang memiliki otoritas tersebut. Perlu dilihat pengetahuan mengenai radikalisme seperti apa yang mendominasi wacana pengetahuan di setiap agen.

Selanjutnya, proposisi teoretis Archer memberikan analisis pada bab IV dan V. Pada bab IV proposisi Archer dapat melihat bagaimana struktur pengetahuan mengenai radikalisme yang telah ada sebelumnya mempengaruhi konstruksi wacana pengetahuan yang diadopsi oleh setiap agen yang menjadi subyek dalam penelitian ini. Pengetahuan mengenai radikalisme yang dikonstruksi oleh setiap agen sebetulnya bukan sebuah gagasan baru, melainkan hasil adopsi dari gagasan terkait radikalisme yang muncul sebelumnya. Posisi pengetahuan yang sudah ada ini hanya bersifat mengkondisikan, tetapi tidak menentukan setiap agen untuk mengadopsi secara sepenuhnya. Hal ini bergantung pada interaksi sosio-kultural yang dilakukan setiap agen terhadap struktur pengetahuan yang ada sebelumnya (pada bab V analisis ini dilakukan). Struktur pengetahuan yang sudah ada dapat menjadi faktor penyebab yang mengkondisikan produksi dan reproduksi pengetahuan oleh setiap agen. Relasi individu dan kelompok di dalam setiap agen akan menentukan sejauh mana modifikasi pengetahuan dilakukan di dalamnya. Pada akhirnya akan dihasilkan sebuah bentuk perluasan struktural dari pengetahuan mengenai radikalisme yang bersifat reproduksi dan elaborasi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **III.1. Prosedur Penelitian**

##### **III.1.1. Rancangan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (Bernard 2000; Bogdan & Taylor 1992; Bryman 2004; Creswell 2003; Neuman 2003). Pendekatan kualitatif digunakan dalam studi ini agar dapat memberikan gambaran komprehensif yang cukup mendalam dan detail mengenai produksi dan reproduksi wacana radikalisme kelompok Islam yang terjadi sekaligus sebagai rekomendasi kebijakan.

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif (Neuman 1991), yakni menggambarkan proses produksi dan reproduksi wacana radikalisme kelompok Islam yang dikembangkan oleh berbagai agen serta menghasilkan model dan skenario radikalisme. Penelitian ini melihat bagaimana wacana radikalisme dikembangkan dan direproduksi oleh setiap agen mulai dari negara (BNPT), intelektual, dan juga NGO. Deskripsi produk dan produser mengenai wacana radikalisme kelompok Islam dipaparkan berdasarkan proses, latar belakang atau konteks gejala sehingga mampu memberikan informasi berupa kategori atau klasifikasi yang dihasilkan oleh setiap agen. Berdasarkan tipe penelitian ini, maka membuka ruang bagi peneliti untuk memperoleh data yang memadai mengenai wacana radikalisme kelompok Islam. Wacana radikalisme kelompok Islam yang dilihat dalam penelitian ini diambil dari beberapa hasil riset dan publikasi yang dilakukan oleh beberapa agen.

##### **III.1.2. Peran Peneliti**

Wacana radikalisme & studi tentang Islam bagi peneliti merupakan sebuah ranah baru yang cukup menantang untuk dikaji. Oleh karena itu, keterbatasan pengetahuan peneliti mengenai subyek kajian mengenai studi tentang Islam peneliti kerucutkan dengan membahas isu mengenai radikalisme agar lebih fokus.

Ada beberapa langkah yang peneliti ambil untuk mempermudah agar penelitian ini dapat menghasilkan *output* sesuai dengan pertanyaan penelitian

yang diajukan. *Pertama*, sejak awal proses penyusunan proposal peneliti sudah mengumpulkan dan mengidentifikasi beberapa buku, jurnal, artikel, maupun hasil penelitian yang terkait dengan wacana radikalisme—terutama yang dikembangkan oleh beberapa intelektual/akademisi dan beberapa NGO. Semua sumber referensi tertulis peneliti dapatkan dengan berbagai cara antara lain mendapatkan langsung secara gratis maupun membeli dari agen yang bersangkutan, kemudian dengan mengakses data digital dari website resmi setiap agen maupun data digital yang dikirimkan oleh informan. Sumber referensi tertulis ini bisa dalam bentuk cetak dan juga file digital. *Kedua*, peneliti mulai melakukan pemetaan dokumen mengenai radikalisme yang kemudian dilanjutkan dengan menyusunnya dalam bentuk yang deskriptif dan komparatif. *Terakhir* peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang menyusun atau menulis buku, jurnal, artikel, maupun hasil penelitian untuk mendapatkan gambaran mengenai proses produksi dan reproduksi pengetahuan tentang wacana radikalisme.

## **III.2. Tahap Pengumpulan dan Analisis Data**

### **III.2.1. Subyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan melihat beberapa agen yang menghasilkan wacana radikalisme kelompok Islam antara lain CSRC, Lazuardi Birru, BNPT, dan juga SETARA Institute. Latar belakang pemilihan agen-agen tersebut terdiri dari beberapa alasan. *Pertama*, agen-agen tersebut apabila diperhatikan turut mewarnai wacana radikalisme dengan mengungkapkan hasil risetnya di media massa. Hal ini tentu saja mempengaruhi arus informasi mengenai wacana radikalisme yang berkembang. *Kedua*, agen-agen yang ada satu sama lain seringkali muncul dalam berbagai forum yang membahas gagasan mengenai wacana radikalisme. *Ketiga*, agen-agen tersebut juga melakukan kerjasama dengan lembaga negara yaitu BNPT sebagai salah satu artikulator kebijakan negara terkait radikalisme. Oleh karena itu, sudah sewajarnya beberapa kebijakan yang diambil oleh BNPT mengacu pada hasil kajian yang dilakukan oleh agen-agen yang ada.

Agen yang ada masing-masing sebetulnya mewakili kategori yang berbeda. CSRC dapat dikatakan mewakili intelektual, Lazuardi Birru dan

SETARA Institute mewakili NGO, sedangkan BNPT mewakili negara. Subyek penelitian ini sebetulnya adalah para agen yang menjadi produser sekaligus menghasilkan produk wacana radikalisme. Oleh karena itu, obyek penelitian ini adalah produk wacana radikalisme dan juga produsernya. Produk yang dimaksud dapat berupa hasil riset, buku, jurnal, maupun dokumen yang bersifat tertulis—baik cetak maupun digital, sedangkan produsernya adalah peneliti atau penulis produknya.

Setiap agen dalam penelitian ini memiliki hasil riset maupun kebijakan dengan tujuan dan target yang berbeda. CSRC misalnya merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk melakukan kajian dengan menempatkan agama, terutama Islam, dalam kerangka demokrasi. Lazuardi Birru merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk melakukan kampanye damai di kalangan pemuda. BNPT merupakan lembaga negara yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian bagi setiap warga negara. SETARA Institute merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang setara dalam kerangka pluralisme dan demokrasi. Meskipun setiap agen memiliki tujuan yang berbeda, tetapi pada dasarnya masing-masing agen memproduksi gagasan yang mempromosikan wacana terkait radikalisme—baik secara eksplisit maupun implisit. Hal ini bergantung pada gagasan subyektif dan obyektif masing-masing agen yang secara detail akan dibahas pada bab selanjutnya.

### **III.2.2. Tahap Pengumpulan Data**

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti di dalam melakukan penelitian. *Pertama*, peneliti melakukan pemetaan dokumen hasil studi tentang radikalisme yang dikembangkan oleh beberapa agen baik kalangan intelektual (CSRC), pemerintah (BNPT/Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), maupun NGO (Lazuardi Birru, SETARA Institute). Dokumen hasil penelitian yang dikembangkan berbagi pihak tersebut dijadikan salah satu sumber data utama di dalam studi ini.

Setelah pemetaan dokumen selesai dilakukan, peneliti mengecek kedalaman informasi mengenai bagaimana hasil studi ini dilakukan. Oleh karena itu, teknik penelitian *kedua* yang peneliti lakukan adalah dengan melakukan

wawancara dengan agensi atau para penulis/peneliti (produser atau pembuat produk) yang menyusun berbagai dokumen tersebut. Dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang menyusun dokumen tentang radikalisme tersebut, peneliti dapat melihat bagaimana para penulis/peneliti di setiap agen mengkonstruksi ide atau gagasan mengenai radikalisme. Hal ini akan menunjukkan bagaimana produksi pengetahuan di dalam berbagai agen juga mengalami pertarungan di dalamnya. Ide atau gagasan yang berkembang tentu saja akan dipengaruhi oleh seberapa besar kepentingan yang termuat di dalam hasil studi yang diharapkan. Sehingga peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konstruksi pengetahuan mengenai wacana radikalisme dari produk dan pembuat produknya.

### **III.2.3. Tahap Analisis dan Validasi Data**

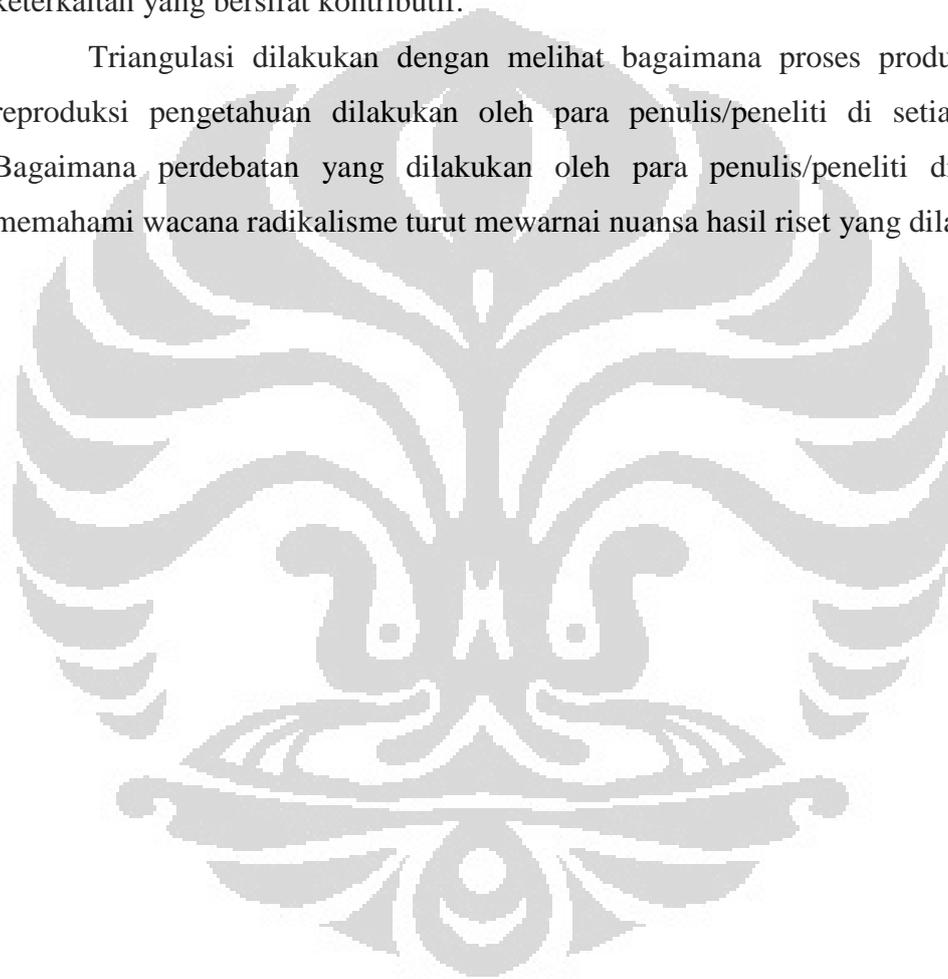
Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari dua hal, yakni melakukan kategorisasi data dan analisis data. Kategorisasi data mencakup klasifikasi data per tema berdasarkan konteks penelitian, *framing*, kritik metodologis (definisi konseptual dan operasional, skoring, pembobotan, serta skala) mengenai wacana radikalisme yang dikonstruksi setiap agen. Komparasi antar agen berdasarkan tema klasifikasi menjadi acuan utama bagi peneliti untuk melakukan kritik metodologis. Struktur pengetahuan mengenai wacana radikalisme yang diproduksi dan direproduksi oleh setiap agen mengalami proses interaksi sosial di dalamnya yang kemudian akan memunculkan perluasan struktur pengetahuan yang baru mengenai wacana radikalisme. Perluasan struktur pengetahuan yang baru dapat berupa reproduksi maupun elaborasi struktural.

Setelah melakukan proses kategorisasi, tahap berikutnya adalah melakukan analisis data. Pada tahap ini peneliti berusaha melihat keterkaitan antara pertanyaan penelitian dengan data mengenai wacana radikalsime yang dikonstruksi setiap agen. Aktivitas ini dilakukan beberapa kali secara dialektis dengan melihat pertanyaan penelitian, konsep yang digunakan, dan data yang diperoleh hingga mendapat simpulan akhir penelitian. Simpulan akhir penelitian dapat merepresentasikan bagaimana implikasi pertanyaan penelitian dan kerangka konsep memiliki keterkaitan dengan data yang diperoleh. Data ini bisa

berimplikasi memperkuat atau memperkaya teori, atau data yang ada justru bertentangan dengan teori, yang kemudian dapat mengelaborasi teori yang ada.

Strategi validasi penelitian ini menggunakan teknik triangulasi (Neuman 2003: 137-138). Strategi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan teknik yang berbeda yakni dengan wawancara mendalam terhadap beberapa agensi (produser) di setiap agen yang menjadi penulis/peneliti. Teknik triangulasi membantu penulis untuk mendapatkan data yang lebih valid dan memiliki keterkaitan yang bersifat kontributif.

Triangulasi dilakukan dengan melihat bagaimana proses produksi dan reproduksi pengetahuan dilakukan oleh para penulis/peneliti di setiap agen. Bagaimana perdebatan yang dilakukan oleh para penulis/peneliti di dalam memahami wacana radikalisme turut mewarnai nuansa hasil riset yang dilakukan.



**Tabel 4**  
**Ikhtisar Tahap Pengumpulan Data**

<b>KONSTRUKSI RADIKALISME</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>TEKNIK PENGUMPULAN DATA</b>	<b>OUTPUT DATA</b>
Pertanyaan penelitian Dasar Teori Definisi Konseptual Definisi Operasional Metode Penelitian Indikator Hasil Riset Formulasi Kebijakan	a. Buku <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia</i></li> <li>2. <i>Benih-Benih Islam Radikal di Masjid: Studi Kasus Jakarta dan Solo</i></li> <li>3. <i>Masjid dan Pembangunan Perdamaian</i></li> <li>4. <i>Wajah Pembela Islam: Radikalisme Agama dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berkeyakinan</i></li> <li>5. <i>Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat</i></li> <li>6. <i>Dari Radikalisme Menuju Terorisme</i></li> <li>7. <i>Who Speaks for Islam?</i></li> <li>8. <i>Deradicalizing Islamist Extremists?</i></li> </ol> b. Hasil penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indeks Kerentanan Radikalisme Sosial Keagamaan di Indonesia</i></li> </ul> c. Peraturan <ul style="list-style-type: none"> <li>• PP Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme</li> <li>• UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PP Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme</li> </ul>	Studi Dokumen	Pemetaan dokumen studi tentang wacana radikalisme
Agensi /Aktor yang terlibat Posisi teoretis agensi/aktor Gagasan/ide radikalisme yang ditawarkan setiap agensi/aktor Substansi perdebatan gagasan/ ide radikalisme yang menonjol Hasil gagasan/ide radikalisme yang dipakai dalam penelitian Sumbangan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intelektual CSRC: Peneliti &amp; Peneliti Radikalisme</li> <li>2. NGO                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lazuardi Birru: Peneliti &amp; peneliti radikalisme</li> <li>b. Setara Institut: Peneliti &amp; peneliti radikalisme</li> </ol> </li> </ol>	Wawancara mendalam	Konstruksi ide/gagasan tentang radikalisme yang dibuat oleh penulis/peneliti

## BAB IV

### WACANA RADIKALISME PASCA-ORDE BARU

Wacana radikalisme yang berkembang Pasca-Orde Baru tidak lepas dari peran beberapa agen yang mengkonstruksi wacana tersebut. Penelitian ini melihat beberapa agen yang mengkonstruksi wacana radikalisme mulai dari pihak intelektual/akademisi (CSRC), negara (BNPT), serta NGO (Lazuardi Birru & SETARA Institute). Deskripsi wacana radikalisme yang dikonstruksi oleh beberapa agen beserta latar belakang kelembagaannya akan menjadi fokus utama tulisan di bagian ini. Selain itu, penjelasan mengenai bagaimana wacana radikalisme menjadi sebuah topik utama dalam pemikiran beberapa agen juga digambarkan pada bagian ini. Penjelasan bagian ini juga menganalisis bagaimana posisi wacana yang dikembangkan oleh setiap agen dalam struktur pengetahuan mengenai radikalisme yang sudah ada sebelumnya.

#### **IV.1. Para Agen Pengkonstruksi Wacana Radikalisme**

Ada beberapa agen yang melakukan konstruksi wacana radikalisme pasca-Orde Baru. Setiap agen memiliki gagasan subyektif dan obyektif yang berbeda. Hal ini bergantung pada bagaimana setiap agen menangkap perkembangan fenomena sosial yang ada dalam masyarakat, terutama terkait radikalisme, sebagai gagasan obyektif yang kemudian dijadikan landasan dasar untuk melakukan konstruksi wacana yang bersifat subyektif. Sebelum dipaparkan konstruksi wacana radikalisme yang dilakukan oleh setiap agen, berikut ini akan dideskripsikan profil setiap agen dalam kaitannya dengan wacana radikalisme yang dikembangkan. Meskipun hanya sebuah profil yang menguraikan cakupan tujuan dan agenda setiap agen, bagian ini juga menjelaskan bagaimana wacana yang direproduksi oleh masing-masing agen memiliki *causal consensus*<sup>21</sup> (konsepsi Archer) yang dibangun berdasarkan *logical consistency*<sup>22</sup> posisi pengetahuan yang telah ada sebelumnya.

<sup>21</sup> Derajat keseragaman bagaimana sebuah budaya diproduksi oleh setiap agen.

<sup>22</sup> Derajat kesesuaian internal antara komponen budaya (*culture*) yang telah ada di dalam struktur sebelumnya.

**Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)**<sup>23</sup>. Lembaga ini merupakan salah satu pusat kajian dan riset di bidang agama dan sosial-budaya di bawah naungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. CSRC sebetulnya adalah pengembangan dari bidang budaya Pusat Bahasa dan Budaya (PPB) UIN Syarif Hidayatullah yang berdiri pada tahun 1999. Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan untuk melakukan kajian dan penelitian agama (terutama Islam) dalam relasi sosial-budaya dan politik, maka pada tahun 28 April 2006 CSRC berdiri.

Tujuan utama berdirinya CSRC adalah untuk mengetahui dan memahami peran penting agama di dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, kuat, demokratis, dan damai. Tujuan lembaga ini tidak lepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang menunjukkan semakin meningkatnya peran dan pengaruh agama di ruang publik. Salah satu contoh menguatnya agama di ruang publik dapat dilihat dari mencuatnya identitas, simbol, dan pranata sosial yang memiliki ciri keagamaan. Agama tidak hanya menjadi bahan pembicaraan berbagai lapisan masyarakat baik di tingkat nasional dan global, tetapi juga berdampak pada semakin menguat pengaruhnya di ruang publik—terutama di tengah arus deras modernisasi dan sekularisasi.

Ekspresi Islam harus diakui mendapat tempat cukup dominan dalam ruang publik di nusantara. Akan tetapi, Islam bukanlah satu-satunya entitas yang monolitik dalam ruang tersebut. Ada pula identitas lain yang turut menyemarakkan sosok ruang publik kita. Sebagai sebuah ajaran, sumber etik, dan inspirasi bagi pembentukan pranata sosial, Islam acapkali tampil dalam ekspresi yang heterogen. Islam diyakini dan dipraktikkan berdasarkan interpretasi berbagai komunitas muslim yang heterogen sesuai pemahaman dan konteks sosial-budaya mereka.

Sementara itu, heterogenitas persepsi mengenai Islam disertai konteks sosial-kultural dan politik yang rumit, membuat ajaran dan nilai agama yang luhur seringkali diamalkan dalam corak dan nuansa yang khas. Sesekali Islam tampak dalam berbagai potret eksklusivisme, namun Islam juga acapkali hadir secara

<sup>23</sup> Sumber tulisan ini berdasarkan situs resmi CSRC (<http://www.csrc.or.id>) dan juga hasil wawancara terhadap direktornya yang dielaborasi kembali oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan tesis.

konstruktif sebagai sumber etika sosial, inspirasi bagi pengembangan IPTEK, mediator bagi integrasi sosial dalam wajah yang plural, toleran, dan damai serta secara kuat berfungsi sebagai motivator pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat madani. Islam juga turut mempengaruhi pembentukan prana sosial-politik, ekonomi, dan pendidikan serta turut andil dalam pembangunan nasional. Kehadiran Islam di ruang publik, dalam konteks ini, tidak perlu dirisaukan. Akan tetapi, etika dan etos agama seperti itu sebaliknya perlu diapresiasi oleh masyarakat luas dan didukung semua pihak. Kehadiran CSRC bertujuan untuk melakukan revitalisasi peran agama dalam konteks seperti itu.

Karena arus perubahan bergerak begitu cepat dari kemampuan umat untuk meng-*upgrade* kapasitasnya, maka perlu strategi yang tepat untuk menghadapinya. CSRC, sesuai dengan tugas dan perannya, berusaha memberi kontribusi pada sektor riset, informasi, dan pelatihan serta memfasilitasi berbagai inisiatif yang dapat memperkuat masyarakat Islam secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum—terutama dalam melakukan pengembangan kebijakan (*policy development*) di bidang sosial-keagamaan dan kebudayaan. CSRC melihat kedepannya institusi Islam akan berkembang menjadi pusat produktivitas umat (*production center*) dan bukan malah menjadi beban sosial (*social liability*) agar umat Islam dapat mengembangkan perannya dalam kehidupan sosial-budaya secara konstruktif. Oleh karena itu, CSRC memiliki visi membangun perspektif Islam yang berakar pada tradisi Islam, kemodernan, dan keindonesiaan serta mencoba mengaktualkan ajaran, nilai, dan etika Islam dalam kehidupan komunitas muslim secara positif, agar mereka dapat meningkatkan perannya dalam kehidupan sosial-budaya secara konstruktif. CSRC memiliki misi yang berkomitmen untuk dapat menghasilkan karya ilmiah yang bermutu sehingga dapat memberi manfaat dan arti penting bagi upaya perwujudan umat Islam Indonesia yang damai, demokratis, adil, sejahtera, dan mandiri.

Peneliti berpendapat bahwa gagasan subyektif CSRC untuk melakukan revitalisasi peran agama (Islam) di ruang publik menjadi salah satu gagasan yang memiliki relasi logis (*logical relationship*) dengan struktur pengetahuan terkait wacana Islam—baik di tingkat nasional maupun global—yang berkembang belakangan ini sebagai gagasan yang bersifat obyektif. Gagasan ini berkembang

berdasarkan relasi sebab akibat (*causal relationship*) dengan fenomena menguatnya pengaruh dan peran agama (Islam) dalam ruang publik, secara khusus, di Indonesia. Kesenambungan gagasan yang bersifat logis dan kausal terkait gagasan tentang revitalisasi agama (Islam) inilah yang menjadi ide untuk melahirkan sebuah struktur baru tentang wacana radikalisme. Wacana radikalisme yang dikembangkan oleh CSRC berlanjut dengan melakukan beberapa riset terkait tema Islam di ruang publik dan juga benih Islam radikal di masjid. Riset ini dikembangkan berdasarkan kerangka demokrasi yang mempromosikan gagasan tentang Islam moderat.

**Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)**<sup>24</sup>. Institusi ini lahir pasca peristiwa bom Bali tahun 2002 yang direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2002 dalam rangka menanggulangi tindakan terorisme. Presiden Megawati pada waktu itu memberikan mandat kepada Menkopolkam untuk membuat kebijakan dan strategi nasional penanganan terorisme. Berdasarkan Keputusan Menkopolkam Nomor: Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 dibentuklah Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). Tugas dari DKPT adalah membantu Menkopolkam dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian, dan segala tindakan hukum yang diperlukan.

Selanjutnya—setelah tujuh tahun—terjadi perkembangan pada saat rapat kerja antara Komisi I DPR dan Menkopolkam tanggal 31 Agustus tahun 2009 dimana DPR memutuskan beberapa rekomendasi. *Pertama*, mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas terorisme. *Kedua*, menyepakati bahwa terorisme adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa yang harus dijadikan musuh bersama. *Ketiga*, meningkatkan upaya kapasitas dan keterpaduan penanggulangan terorisme agar meningkatkan peran masyarakat. *Keempat*, merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk sebuah badan yang berwenang secara operasional melakukan tugas pemberantasan/ penanggulangan terorisme. *Terakhir*, menerbitkan regulasi sebagai elaborasi UU

<sup>24</sup> Sumber tulisan ini berdasarkan situs resmi BNPT (<http://www.bnpt.go.id>) yang dielaborasi kembali oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan tesis.

Nomor 34/2004 tentang TNI, UU Nomor 2/2002 tentang Polri, untuk mengatur ketentuan yang lebih rinci tentang aturan pelibatan (*rule of engagement*) TNI terkait tugas Operasi Militer Selain Perang, termasuk aturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap Polri.

Berdasarkan rekomendasi DPR dan penilaian (*assessment*) terhadap dinamika terorisme, maka pada tanggal 16 Juli 2010 Presiden menerbitkan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ada tiga tugas pokok BNPT yaitu: pertama, menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; kedua, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; ketiga, membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari unsur instansi pemerintah terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.

Pembentukan BNPT bertujuan melindungi warga negara dan kepentingan nasional serta menciptakan lingkungan nasional dan internasional yang aman dan damai dengan tidak menyuburkan radikalisme dan menghentikan aksi terorisme. Sebagai sebuah badan, BNPT memiliki visi untuk melakukan upaya penanganan terorisme secara komprehensif yang mencakup upaya penindakan (secara operasional), proteksi (perlindungan), pencegahan dan penangkalan, penanganan permasalahan hulu (akar masalah), dan upaya deradikalisasi.

Peneliti melihat bahwa pembentukan BNPT tidak semata terbatas pada konteks keamanan dan perdamaian, tetapi terdapat sebuah relasi logis (*logical relationship*) antara pembentukan BNPT dengan agenda internasional di dalam melakukan perang terhadap terorisme yang dikumandangkan oleh negara adikuasa. Pembentukan BNPT dilakukan seiring dengan relasi sebab akibat (*causal relationship*) dari pesatnya peristiwa terorisme di beberapa negara di dunia yang muncul satu dekade belakangan. Kesenambungan struktur gagasan tentang penanggulangan terorisme di tingkat internasional dan nasional inilah yang menjadi relasi logis dan kausal dibentuknya BNPT. Tidak hanya melakukan tindakan penanggulangan, BNPT juga melakukan upaya deradikalisasi terhadap beberapa pelaku terorisme. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi dampak terorisme terutama di tingkat nasional.

**Lazuardi Birru**<sup>25</sup>. Latar belakang pendirian organisasi ini lahir atas bentuk keprihatinan akan fenomena kekerasan yang terjadi dengan mengatasnamakan agama yang turut melibatkan anak-anak muda negeri ini. Berbagai aksi bom bunuh diri telah memicu dampak berupa kerugian materi, korban jiwa, hingga mengganggu rasa aman dan tentram di Indonesia. Aksi kekerasan yang terjadi telah menciptakan suasana batin masyarakat terbelenggu dalam rasa takut, waswas serta terjebak dalam sikap saling mencurigai, tidak percaya dengan pihak lain bahkan saling menuding. Hak asasi masyarakat, sebagai manusia dan warga negara, untuk terbebas dari rasa takut (*freedom from fear*) telah direnggut secara paksa.

Kekerasan atas nama agama merupakan puncak dari gunung es atas permasalahan yang fundamental dan rumit. Berbagai persoalan yang diasumsikan sebagai penyebab gerakan radikal antara lain kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan yang menciptakan generasi dengan pola pikir yang sempit, apatisme terhadap pembangunan, kurangnya kesadaran berpolitik, pencarian jati diri, keterasingan, dan penyelewengan terhadap ajaran agama. Disamping itu ada pula propaganda dan publikasi yang begitu marak melalui berbagai kegiatan dan perkumpulan berkamufase keagamaan dan maraknya media bermaterikan paham radikal seperti tabloid, pamflet, buku, majalah dan situs internet.

Melihat peliknya fenomena ini, Lazuardi Birru dengan segala keterbatasannya tergerak untuk turut menciptakan masyarakat berbhinneka yang harmonis, hidup aman, tentram dan damai. Lazuardi Birru merupakan organisasi sosial, non profit dan independen, tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Lazuardi Birru lebih memfokuskan diri untuk melaksanakan kampanye sosial agar generasi muda menghargai hakekat perdamaian, menjauhi kekerasan dan menghindari arus gerakan radikal melalui berbagai program preventif dan edukatif.

Atas dasar pertimbangan tersebut Lazuardi Birru memiliki visi mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, berbhineka tanpa

<sup>25</sup> Sumber tulisan ini berdasarkan situs resmi Lazuardi Birru (<http://www.lazuardi-birru.org>) dan juga hasil wawancara terhadap direktornya yang dielaborasi kembali oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan tesis.

kekerasan sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Lazuardi Birru memiliki kegiatan di bidang sosial yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengemban beberapa misi. *Pertama*, menjalankan kegiatan-kegiatan yang dapat merangsang dan mendorong anggota masyarakat untuk dapat berpikir kritis dan logis sehingga memiliki kemampuan untuk menolak dan tidak melibatkan diri dalam berbagai bentuk perilaku kekerasan dan radikal. *Kedua*, melakukan berbagai kegiatan yang memberikan pemahaman kepada anggota masyarakat bahwa setiap agama dan budaya selalu mengajarkan kehidupan damai dan tentram serta pentingnya menjaga hubungan yang serasi antar sesama manusia. *Ketiga*, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat menyadarkan masyarakat untuk meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum, sosial, kemanusiaan, agama dan budaya yang mengutamakan toleransi antara multi etnis, multi kultural dan antar umat beragama. *Keempat*, melakukan kajian, penelitian, diskusi, seminar mengenai tindak kekerasan dan radikal termasuk dan tidak terbatas pada melakukan pengkajian terhadap efektivitas dan efisiensi pemberlakuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan tindak kekerasan dan radikal. *Kelima*, memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat jika dianggap baik dan perlu, baik diminta atau tidak kepada instansi yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dan radikal. *Keenam*, menghimpun masyarakat pemerhati, peneliti dan peduli akan permasalahan sosial sehubungan dengan adanya tindak kekerasan dan radikal untuk secara bersama-sama memberikan sumbangsih terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dan radikal. *Ketujuh*, mempublikasikan berbagai hasil penelitian, diskusi dan seminar mengenai permasalahan maupun solusi terkait dengan tindak kekerasan dan radikal dalam berbagai media. *Terakhir*, turut serta membantu pemerintah untuk memasyarakatkan undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dan radikal.

Peneliti memandang bahwa peristiwa kekerasan atas nama agama menjadi gagasan obyektif yang dilihat oleh Lazuardi Birru untuk mengembangkan gagasan subyektif tentang perdamaian. Relasi sebab akibat (*causal relationsip*) antara peristiwa kekerasan atas nama agama dengan gagasan tentang kehidupan yang

damai memiliki relasi logis (*logical relationship*). Ujung dari gagasan ini memunculkan ide untuk melakukan kajian dengan mengembangkan indeks tentang radikalisme keagamaan di Indonesia sebagai alternatif sebuah struktur pengetahuan yang baru. Indeks ini dibuat untuk melakukan langkah antisipasi dari kondisi kerentanan radikalisme keagamaan yang merasuk dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

**SETARA Institute**<sup>26</sup>. Lembaga ini berdiri atas dasar perhimpunan individu/perorangan yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita dimana setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia. Organisasi ini didirikan oleh orang-orang yang peduli pada penghapusan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya serta peningkatan solidaritas atas mereka yang lemah dan dirugikan.

SETARA Institute memiliki keyakinan bahwa suatu masyarakat demokratis akan mengalami kemajuan apabila tumbuh saling pengertian, penghormatan, dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun demikian, diskriminasi dan intoleransi yang mengarah pada tindak kekerasan masih terus terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah untuk memupuk rasa hormat atas keberagaman dan hak-hak manusia dengan membuka partisipasi lebih luas untuk dapat memajukan demokrasi dan perdamaian. Organisasi ini turut andil di dalam upaya mendorong terciptanya kondisi politik yang terbuka berdasarkan penghormatan atas keberagaman, pembelaan hak-hak manusia, penghapusan sikap intoleran, dan xenophobia.

Kondisi tersebut menjadi landasan dasar bagi terbentuknya SETARA Institute. Visi organisasi ini adalah mewujudkan perlakuan setara, plural, dan bermartabat atas semua orang dalam tata sosial politik demokratis. Nilai yang dianut oleh organisasi ini antara lain kesetaraan, kemanusiaan, pluralisme, dan demokrasi. Ada empat misi organisasi ini yaitu: pertama, mempromosikan pluralisme, humanitarian, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); kedua, melakukan studi dan advokasi kebijakan publik bidang pluralisme, humanitarian,

<sup>26</sup> Sumber tulisan ini berdasarkan situs resmi SETARA Institute (<http://www.setara-institute.org>) dan juga hasil wawancara terhadap ketuanya yang dielaborasi kembali oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan tesis.

demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); ketiga, melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik; keempat, melakukan pendidikan publik. Keanggotaan organisasi ini bersifat perorangan dan sukarela yang terdiri dari individu yang memiliki gagasan pluralisme, humanitarian, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Peneliti memiliki argumen bahwa gagasan mengenai kesetaraan yang dipromosikan oleh SETARA Institute memiliki relasi kausal (*causal relationship*) dengan tindakan diskriminasi dan intoleransi yang mengarah pada kekerasan yang kerap terjadi belakangan. Berdasarkan relasi kausal tersebut, lembaga ini menyusun strategi sebagai bagian dari relasi logis (*logical relationship*) untuk melakukan kegiatan riset dan advokasi terkait dengan tindakan intoleran. Gagasan subyektif lembaga ini kemudian berkembang dengan menyusun sebuah riset yang memetakan sekaligus melihat transformasi kelompok Islam menjadi sebuah kelompok radikal. Struktur pengetahuan baru mengenai radikalisme menjadi gagasan subyektif yang dihasilkan lembaga ini. Tawaran gagasan mengenai kesetaraan dalam bingkai pluralisme menjadi sebuah alternatif ide untuk mengurangi tindakan intoleran. Lembaga ini menempatkan struktur gagasan mengenai kelompok Islam radikal sebagai pihak yang melakukan tindakan intoleransi atas nama agama. Pemutusan tindakan diskriminasi ini perlu dihentikan dengan mempromosikan nilai kesetaraan dalam masyarakat.

**Tipologi Agen.** Berdasarkan penjelasan profil beberapa agen yang melakukan konstruksi wacana radikalisme, peneliti mencoba membuat beberapa tipologi. Hal ini ini peneliti lakukan guna mempermudah proses analisis pada sub bab selanjutnya terutama dalam memaparkan wacana radikalisme yang dikonstruksi. Ada beberapa aspek yang peneliti lihat di dalam membuat tipologi yaitu konteks, *framing*, tujuan, aktor, dan strategi yang berbeda didalam mengkonstruksi wacana radikalisme. Akan tetapi, kesemuanya berusaha untuk memberikan pemaparan dan sudut pandang lain dari gejala radikalisme dengan berusaha melakukan konstruksi indikator atau parameter radikalisme. Konteks yang dimaksud dalam pembahasan berikut bukanlah sekedar latar belakang agen dalam mengkonstruksi wacana radikalisme, melainkan bagaimana gagasan wacana radikalisme bisa diangkat berdasarkan situasi sosial yang ada dalam

masyarakat seperti meningkatnya fenomena kekerasan di dalam masyarakat. Adapun *framing* sendiri merupakan kerangka berpikir yang dipakai oleh setiap agen di dalam membingkai wacana radikalisme seperti pluralisme dan demokrasi. Berikutnya, tujuan dalam pemaparan ini adalah visi dan misi yang dimiliki oleh setiap agen dalam mencapai tujuan organisasi/lembaga. Lalu, habitus aktor merupakan gambaran pihak-pihak yang menjadi pelaku di dalam setiap agen yang terdiri dari latar belakang tertentu seperti dosen dan aktivis. Terakhir, strategi yang dimaksud pada deskripsi pada bagian ini merupakan cara yang ditempuh oleh agen di dalam kegiatan organisasi/lembaganya seperti penelitian dan advokasi.

Konteks pendirian setiap agen (organisasi, lembaga, atau birokrasi) pada dasarnya dipengaruhi sebuah faktor yang relatif sama yakni terbukanya sebuah era (reformasi atau pasca-Orde Baru) yang cenderung lebih demokratis di dalam masyarakat. Momen sejarah pasca-Orde Baru menjadi penting bagi meningkatnya proses demokratisasi dan juga beberapa implikasi yang mengikutinya. *Pertama*, meningkatnya peran dan pengaruh agama di ruang publik. Implikasi ini menjadi salah satu latar belakang berdirinya CSRC. *Kedua*, maraknya peristiwa pengeboman dan tindakan terorisme. Implikasi ini menjadi landasan terbentuknya BNPT. *Ketiga*, munculnya beberapa peristiwa kekerasan dan konflik yang kerap mengatasnamakan agama. Implikasi ini yang memicu organisasi Lazuardi Birru hadir di tengah masyarakat. *Keempat*, terjadinya tindakan intoleran dan diskriminatif di kalangan kelompok masyarakat atas dasar agama, etnis, suku, ras, gender, dan strata sosial. Implikasi ini yang menuntut berdirinya SETARA Institute.

Terbentuknya beberapa agen dengan konteks yang berbeda menjadi landasan bagi pemilihan *framing* yang digunakan. Ada agen yang bergerak dengan menggunakan pendekatan demokrasi, pluralisme, kebudayaan dan agama (CSRC dan SETARA Institute). Adapula agen yang menggunakan pendekatan keamanan seperti BNPT. Selain itu ada agen yang menekankan pada isu perdamaian yakni Lazuardi Birru.

Oleh karenanya, penempatan *framing* yang digunakan setiap agen untuk mencapai tujuan sedikit banyak memiliki variasi yang beragam. CSRC lebih

menempatkan peran agama (dalam hal ini Islam) sebagai sebuah perspektif untuk menghasilkan karya ilmiah bermutu untuk mewujudkan masyarakat ayang adil, sejahtera, kuat, demokratis dan damai. Di lain pihak, BNPT memiliki visi dan misi melindungi warga negara dan kepentingan nasional dari bahaya terorisme dengan upaya yang komprehensif. Di sisi lain, Lazuardi Birru melakukan kampanye sosial bagi generasi muda untuk mewujudkan kehidupan yang damai sebagai tujuan organisasinya. Dan terakhir, SETARA Institute berusaha untuk mewujudkan perlakuan setara, plural, dan bermartabat di dalam kehidupan masyarakat yang lebih demokratis.

Demi mencapai tujuannya, setiap agen memiliki aktor yang relatif bervariasi dengan habitus yang berbeda. CSRC sebagai salah satu lembaga yang terbentuk di bawah naungan sebuah universitas keanggotaannya lebih banyak dari kalangan dosen, peneliti, dan mahasiswa. BNPT sebagai salah satu badan di bawah koordinasi Menkopolkam maka keanggotaannya lebih banyak diisi oleh polisi, tentara, dan birokrat. Lazuardi Birru yang dianggap sebagai salah satu organisasi yang mengangkat isu kepemudaan maka lebih banyak didikuti oleh mahasiswa dan beberapa pengacara serta aktivis yang peduli akan isu ini. Dan SETARA Institute yang berdiri dalam kerangka isu kesetaraan lebih banyak memiliki anggota dari kalangan aktivis.

Bentuk keanggotaan yang beragam tidak serta merta membuat setiap agen menempuh strategi yang berbeda di dalam mencapai tujuannya. Aktivitas riset, publikasi, advokasi, dan pelatihan menjadi beberapa strategi yang dilakukan oleh CSRC, Lazuardi Birru, dan SETARA Institute untuk mencapai tujuannya. Adapun BNPT lebih banyak melakukan aktivitas penyusunan kebijakan demi pencapaian sasarannya. Berdasarkan catatan dan hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa satu sama lain kesemua agen seringkali dipertemukan dalam sebuah forum yang sama yaitu ketika ada pembahasan mengenai isu radikalisme. Satu sama lain bahkan pernah melakukan kerjasama di dalam melakukan kegiatan riset maupun advokasi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti mencoba membuat tipologi setiap agen. Tipologi agen ini peneliti bentuk berdasarkan kerangka pemikiran Archer (2010: 272-301) tentang tindakan rutin (*routine*) dan reflektivitas

(*reflexivity*). Pertama, CSRC peneliti kategorikan sebagai tipologi institusi berbasis penelitian akademis & fokus pada kajian agama, demokrasi, pluralisme, dan kebudayaan. Aktivitas akademis menjadi wadah bagi pengembangan wacana radikalisme oleh CSRC sehingga wajar kebanyakan aktor yang terlibat memiliki rutinitas intelektual yang relatif baik. Kedua, BNPT peneliti kategorikan sebagai sebuah institusi birokrasi yang berbasis pendekatan keamanan & fokus pada tindakan terorisme. Aktivitas politik (terkait kebijakan pemerintah) menjadi arena bagi BNPT untuk memantau perkembangan wacana radikalisme, sehingga rutinitas birokrasi melekat di setiap aktor yang ada di dalamnya. Ketiga, Lazuardi Birru peneliti kategorikan sebagai institusi berbasis kampanye sosial & fokus pada kajian generasi muda. Aktivitas sosial menjadi tempat kampanye sosial bagi Lazuardi untuk melakukan kegiatan bagi anak muda, sehingga rutinitas kepemudaan dengan dinamika yang tinggi menjadi sasaran kampanyenya. Keempat, SETARA Institute peneliti kategorikan sebagai sebuah institusi berbasis advokasi & fokus pada kajian HAM, pluralisme, kesetaraan, dan demokrasi. Rutinitas para aktivis yang melekat pada organisasi ini membuat kegiatannya meliputi berbagai aktivitas terkait program advokasi bagi masyarakat yang mengalami diskriminasi. Tipologi yang dibuat selanjutnya akan mempermudah peneliti terutama ketika melihat bagaimana keterkaitan posisi setiap agen dengan konstruksi wacana radikalisme yang dihasilkan. Untuk memudahkan berikut ikhtisar tipologi agen yang melakukan konstruksi wacana radikalisme.

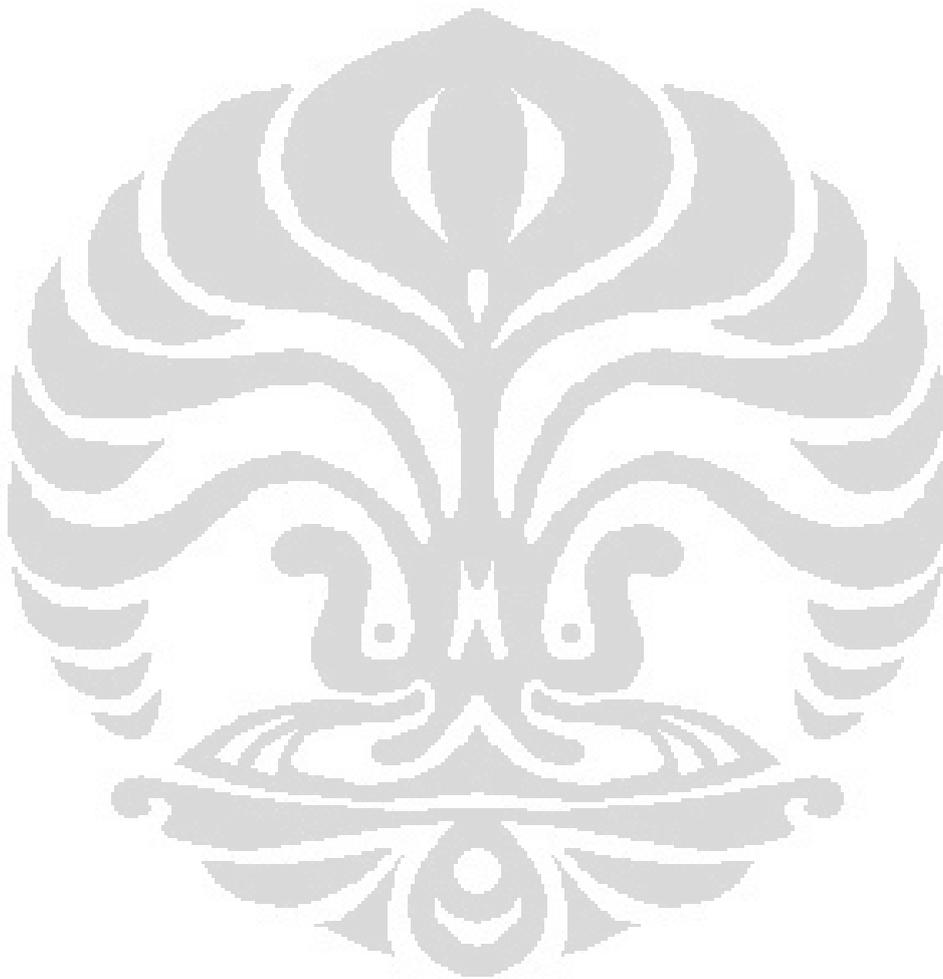
Setiap lembaga memiliki reflektivitas yang berbeda terhadap struktur gagasan mengenai radikalisme yang berkembang dalam masyarakat. CSRC lebih melihat bahwa struktur gagasan tentang Islam radikal yang berkembang di ruang publik perlu diantisipasi dengan memunculkan gagasan alternatif tentang Islam yang bersifat moderat. BNPT menekankan bahwa struktur gagasan tentang terorisme yang berkembang dalam masyarakat perlu dilakukan upaya penindakan dan deradikalisasi untuk mewujudkan gagasan tentang perdamaian. Lazuardi Birru memandang bahwa struktur gagasan mengenai tindakan kekerasan atas nama agama harus diminimalisasi dengan mempromosikan ide tentang perdamaian. SETARA Institute berpendapat bahwa struktur gagasan tentang

intoleransi yang berkembang dalam masyarakat perlu diimbangi dengan ide tentang kesetaraan dan pluralisme.

Peneliti dapat memberikan argumentasi bahwa struktur gagasan mengenai wacana radikalisme yang dikembangkan oleh setiap agen muncul terkait persoalan tentang wacana Islam radikal, terorisme, kekerasan atas nama agama, dan juga tindakan intoleran yang terjadi dalam masyarakat. Namun demikian, peneliti berpendapat bahwa struktur gagasan yang dikembangkan oleh setiap agen tidak serta merta selalu terkait gagasan mengenai wacana radikalisme. Berdasarkan reflektivitas setiap agen, rumusan mengenai wacana radikalisme muncul sesuai dengan agenda yang ada dibalik setiap agen. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang dipromosikan oleh setiap agen terkait Islam moderat, demokrasi, pluralisme, perdamaian, toleransi, dan juga kesetaraan. Perlu dilihat pula bahwa nilai-nilai yang dipromosikan oleh setiap agen sebetulnya juga merepresentasikan struktur kepentingan dan kekuasaan tertentu. Peneliti berpendapat bahwa gagasan yang ditawarkan setiap agen tidak lepas dari kepentingan dan kekuasaan negara adikuasa di dalam melanggengkan ide tentang demokrasi yang didalamnya terkandung nilai-nilai pembentuknya seperti pluralisme, toleransi, kesetaraan, dan perdamaian. Peneliti berpandangan seperti ini terkait bahwa struktur gagasan yang lebih besar yang ada dibalik semua ini tidak lain seolah-olah hendak mempromosikan nilai demokrasi yang lebih dominan dibanding nilai lain, yakni radikalisme Islam. Kondisi inilah apa yang disebut Berger sebagai *debunking motif*, yakni kepentingan dan kekuasaan terkait struktur wacana tentang demokrasi dibalik gagasan wacana radikalisme yang ditawarkan setiap agen.

Penjelasan lain juga dapat diberikan dengan menggunakan kerangka berpikir Foucault bahwa produksi atas bentuk pengetahuan mengenai wacana radikalisme telah menciptakan sebuah dominasi kekuasaan atas ilmu pengetahuan. Pada konteks ini, wacana radikalisme yang dikembangkan oleh setiap agen tidak lepas dari sebuah bentuk dominasi pengetahuan bahwa gagasan tentang wacana radikalisme tidak sejalan dengan demokrasi. Oleh karena itu, pengetahuan terkait wacana radikalisme perlu diproduksi dan dikontrol oleh setiap agen yang melakukan dominasi wacana. Otoritas dominatif yang dimiliki setiap agen di dalam mengontrol wacana radikalisme dilakukan untuk tetap mempromosikan

demokrasi sebagai satu-satunya gagasan yang harus diterima oleh setiap masyarakat. Peneliti memiliki pendapat seperti ini terkait dengan gagasan besar yang disampaikan oleh setiap agen tidak lepas dari dominasi gagasan tentang demokrasi yang berdiri dengan gagasan lain sebagai penunjangnya seperti toleransi, perdamaian, pluralisme, dan kesetaraan. Tabel berikut memberikan ikhtisar penjelasan mengenai profil dan tipologi setiap agen terkait wacana radikalisme yang dikembangkan.



**Tabel 5**  
**Ikhtisar Tipologi Agen Pengkonstruksi Wacana Radikalisme**

ASPEK	AGEN			
	CSRC	BNPT	Lazuardi Birru	SETARA Institute
<b>Konteks munculnya gagasan radikalisme</b>	Meningkatnya peran & pengaruh agama di ruang publik	Maraknya peristiwa pengeboman dan tindakan terorisme	Keprihatinan akan fenomena kekerasan yang terjadi dengan mengatasnamakan agama	Kondisi masyarakat yang tidak setara, intoleran, diskriminatif atas dasar agama, etnis, suku, ras, gender, dan strata sosial
<b>Framing</b>	Demokrasi, pluralisme, kebudayaan, agama	Keamanan	Perdamaian	Pluralisme & kesetaraan, HAM, humanitarian, demokrasi
<b>Tujuan (visi/misi)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menempatkan peran penting agama untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, kuat, demokratis, dan damai</li> <li>• Membangun perspektif Islam yang berakar pada tradisi, kemodernan, &amp; keindonesiaan</li> <li>• Menghasilkan karya ilmiah yang bermutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi warga negara &amp; kepentingan nasional demi keamanan dan kedamaian dari aksi terorisme</li> <li>• Melakukan upaya penanganan terorisme secara komprehensif</li> </ul>	Melakukan kampanye sosial bagi generasi muda untuk mewujudkan kehidupan yang damai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan perlakuan setara, plural, dan bermartabat dalam tata sosial politik demokratis</li> </ul>
<b>Aktor</b>	Dosen, peneliti, dan mahasiswa	Polisi, Tentara, Birokrat	Pengacara, mahasiswa, aktivis	Aktivis pro demokrasi
<b>Strategi</b>	Melakukan riset, advokasi, pemberian informasi, serta pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun kebijakan, startegi, dan program penanggulangan terorisme</li> <li>• Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait penanggulangan terorisme</li> <li>• Membentuk Satgas penanggulangan terorisme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kajian, penelitian, diskusi, seminar mengenai tindak kekerasan &amp; radikal serta publikasi mengenai masalah dan solusi terkait</li> <li>• Memberikan masukan dan informasi bagi instansi terkait pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dan radikal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan studi, advokasi, promosi bidang pluralisme, humanitarian, HAM, dan demokrasi</li> <li>• Melakukan dialog dalam menyelesaikan konflik</li> <li>• Melakukan pendidikan publik</li> </ul>
<b>Tipologi</b>	<i>Institusi yang berbasis penelitian akademis &amp; fokus pada kajian agama, demokrasi, pluralisme, dan kebudayaan</i>	<i>Institusi birokrasi yang berbasis pendekatan keamanan &amp; fokus pada tindakan terorisme</i>	<i>Institusi yang berbasis kampanye sosial &amp; fokus pada kajian generasi muda</i>	<i>Institusi yang berbasis advokasi &amp; fokus pada kajian HAM, pluralisme, kesetaraan, dan demokrasi</i>

## IV.2. Konstruksi Wacana Radikalisme Para Agen

Setelah dipaparkan profil dan tipologi para agen yang melakukan konstruksi wacana radikalisme, penjelasan berikut memaparkan apa bentuk wacana radikalisme yang telah dikembangkan oleh setiap agen. Setiap agen mengembangkan sebuah ide/gagasan dasar mengenai wacana radikalisme yang kemudian dihasilkan dalam bentuk beberapa kajian dan kebijakan. CSRC menghasilkan tiga hasil riset mengenai wacana radikalisme yang selanjutnya diterbitkan dalam bentuk tiga buku yang berbeda. BNPT memiliki acuan kebijakan wacana radikalisme yang bersumber pada Peraturan Pemerintah (PP) dan juga Undang-undang (UU). Lazuardi Birru memiliki sebuah hasil riset yang bersifat *time-series* dengan melakukan survei beberapa tahun secara berurutan. Dan SETARA Institute mengembangkan sebuah hasil riset dalam bentuk tiga buku yang berbeda.

Riset maupun kebijakan yang dihasilkan oleh setiap agen peneliti lihat sebagai sebuah bentuk *output* bagi konstruksi pengetahuan yang nantinya mengindikasikan *outcome* terbangunnya wacana radikalisme. Riset dan kebijakan yang ada peneliti lihat sebagai elemen pembentuk wacana radikalisme yang berkembang—terutama pasca-Orde Baru.

Agar lebih terstruktur, peneliti menurunkan beberapa aspek untuk mempermudah pemaparan wacana radikalisme yang dikembangkan oleh setiap agen. Beberapa aspek yang peneliti lihat antara lain pertanyaan penelitian, dasar teori, definisi konseptual dan operasional, indikator, metode riset, formulasi kebijakan, simpulan riset, serta catatan kritis. Berikut penjelasan mengenai konstruksi wacana radikalisme oleh setiap agen.

### IV.2.1. Konstruksi Wacana Radikalisme CSRC

Terdapat tiga tema besar riset terkait wacana radikalisme yang dilakukan oleh CSRC yaitu: *pertama*, mengenai Islam di ruang publik (2010); dan *kedua*, mengenai benih-benih Islam radikal di masjid (2010); *ketiga*, mengenai masjid dan pembangunan perdamaian (20011). Ketiga tema riset tersebut dituangkan dalam tiga buah judul buku yang berbeda yakni:

1. Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia.
2. a. Benih-Benih Islam Radikal di Masjid: Studi Kasus Jakarta dan Solo.  
b. Masjid dan Pembangunan Perdamaian.

Ketiga buku tersebut pada dasarnya menggunakan beberapa pendekatan yang bersifat demokratis, pluralisme, budaya, dan agama. Berikut gambaran hasil riset yang dilakukan CSRC.

**Pertanyaan penelitian.** Pada buku yang disebut pertama, CSRC mengemukakan tiga pertanyaan penelitian. Pertama, terkait pertanyaan apa dan bagaimana konstruksi Islam di ruang publik di Indonesia? Kedua, terkait pertanyaan seberapa dominankah Islamisme menguasai wacana dan simbol di ruang publik dan seberapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat muslim yang terpapar olehnya. Ketiga, terkait pertanyaan sejauh mana kehadiran Islam di ruang publik dewasa ini berpengaruh terhadap masa depan demokrasi di Indonesia? Hipotesis yang diangkat dalam riset ini mengungkapkan bahwa penetrasi simbol-simbol Islam yang melahirkan berbagai ekspresi, identitas, organisasi dan institusi berlabel Islam dalam ruang publik yang semakin demokratis justru berlangsung semakin luas dan dalam.

Pada buku yang disebut kedua, CSRC mengemukakan dua pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama memuat persoalan bagaimana fenomena infiltrasi Islam radikal ke masjid-masjid dan pengaruhnya dengan ormas-ormas yang mengelola masjid seperti NU dan Muhammadiyah? Pertanyaan kedua memuat persoalan bagaimana orientasi ideologis takmir masjid terkait lima isu yakni sistem pemerintahan, formalisasi syariah Islam, jihad, kesetaraan gender, dan pluralisme? Hipotesis yang diangkat dalam riset ini mengatakan bahwa ruang demokrasi telah membuka kesempatan bagi kelompok-kelompok Islam untuk mengartikulasikan aspirasi politik dan ideologi keagamaan secara agresif dan demonstratif.

Pada buku yang disebut terakhir terdapat dua pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian pertama adalah bagaimana penetrasi gerakan Islam radikal memanfaatkan situasi konflik sebagai arena perluasan pengaruh melalui masjid. Pertanyaan penelitian kedua adalah bagaimana masjid memainkan peran penting

dalam pembangunan perdamaian di wilayah pasca dan sedang mengalami konflik. Hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini memiliki argumen bahwa radikalisme Islam di wilayah pasca dan potensial konflik dapat menghambat pembangunan perdamaian yang dilaksanakan baik oleh negara maupun masyarakat sipil.

**Dasar teori.** Ketiga hasil riset CSRC menggunakan beberapa landasan teori dari beberapa intelektual yang dijadikan acuan. Riset pertama paling tidak menggunakan dua landasan teori yakni mengenai Islam kultural dan Islam politik (Islamisme). Konsepsi Islam kultural dalam riset ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Greg Fealy, sedangkan konsepsi Islam politik (Islamisme) banyak dipengaruhi pemikiran Gilles Kepel, Emmanuel Sivan, Oliver Roy, dan ICG (*International Crisis Group*). Riset kedua menggunakan beberapa landasan teori seperti identitas politik (pro demokrasi dan kontra demokrasi) dan gerakan Islam radikal yang diambil dari pemikiran Gilles Kepel dan Emmanuel Sivan. Riset ketiga menggunakan landasan teori mengenai kekerasan dan perdamaian, radikalisme, konflik, serta Islamisme. Teori kekerasan dan perdamaian banyak dipengaruhi oleh pemikiran Johan Galtung, teori konflik dipengaruhi oleh pemikiran Ted R. Gurr dan Peter Wallensteen, serta teori radikalisme dan Islamisme dipengaruhi Mark Jurgensmeyer, Oliver Roy, Greg Fealy, ICG (*International Crisis Group*), serta Charles Ellen.

**Definisi konseptual dan operasional.** Landasan teori yang digunakan pada riset pertama, CSRC mengupas konsepsi mengenai Islam kultural dan Islam politik. Definisi Islam kultural yang dimaksud di sini mengacu pada tiga pengertian yakni 1) *muslimness* yang dikemukakan oleh Greg Fealy, 2) desakralisasi yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid, serta 3) pribumisasi Islam yang dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid. Istilah *muslimness* diartikan sebagai seorang muslim (orang yang beragama Islam) yang memiliki ciri antara lain cenderung modern, multikultural, pluralis, dan bukan radikal. Istilah desakralisasi diartikan sebagai pembebasan diri dari kecenderungan mentransendenkan hal-hal yang bersifat profan. Bagi Cak Nur persoalan negara, partai, dan ideologi tidaklah sakral, dan Al Quran tidak memberikan panduan kehidupan secara detail. Oleh karenanya, Cak Nur terkenal dengan ungkapannya

mengenai “Islam Yes Partai Islam No.” Di lain pihak Gus Dur memiliki pandangan bahwa Islam merupakan faktor komplementer kehidupan sosial, budaya, dan politik Indonesia. Oleh karena itu, usaha menempatkan Islam sebagai pemberi warna tunggal hanya akan mengantarkan Islam sebagai faktor pemecah belah (*divisive*). Gus Dur mengajak untuk mempertimbangkan situasi lokal dalam memahami ajaran Islam tidak tercerabut dari akar budaya, tetapi mempertahankan ciri Islam dalam bentuknya yang asli yang disebut dengan istilah pribumisasi Islam.

Selain konsepsi mengenai Islam kultural, terdapat pula konsepsi mengenai Islam politik. Landasan konsepsi mengenai Islam politik mengacu pada pemikiran Islamisme yang dikemukakan oleh Gilles Kepel, Emmanuel Sivan, Oliver Roy, dan ICG. Penting ditekankan disini bahwa konsepsi mengenai Islamisme disimpulkan oleh CSRC sebagai Islam politik yang pengertiannya satu sama lain tumpang tindih dengan konsepsi Islam radikal, ekstrimisme muslim, dan gerakan Islam. Konsepsi Islamisme yang dikemukakan oleh Gilles Kepel mengacu pada pengertian infiltrasi dan perluasan pengaruh Islam sebagai sebuah gerakan ke dalam sendi kehidupan masyarakat mulai dari kampus-kampus universitas, wilayah pedesaan, kaum miskin, hingga pemuda kota dengan mengusung ideologi militan. Kepel secara definitif menyebut bahwa yang dimaksud dengan Islamisme merujuk pada sebuah gejala bersifat keagamaan yang kekuatannya terkandung dalam bentuk ekspresi pelbagai tujuan politik dan ketegangan sosial yang dirasakan oleh semua. Akan tetapi, patut dicatat bahwa Kepel tidak menggunakan konsepsi Islamisme secara konsisten dimana pada lain waktu ia menggunakan istilah re-Islamisasi dan ekstrimisme muslim (*muslim extrimisme*). Definisi yang dijelaskan oleh Kepel tentang Islamisme paling tidak memiliki kesamaan dengan apa yang disebut dengan Islam radikal yang disampaikan oleh Emmanuel Sivan.

Sedikit berbeda dengan pengertian Kepel, Oliver Roy mendefinisikan Islamisme sebagai sebuah gerakan kontemporer yang mengkonseptualisasikan Islam terutama sebagai ideologi politik yang mengatur segala aspek kehidupan mulai dari negara, pendidikan, sistem hukum, budaya, dan ekonomi sebagai sebuah bentuk perjuangan para Islamis yang menekankan terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan kuat di bawah sebuah negara Islam. Konsepsi Islamisme

yang dimaksud Roy dapat dikategorikan menjadi dua yaitu Islamis moderat dan Islamis radikal. Islamis moderat merupakan sebuah upaya proyek reislamisasi dari bawah (*bottom up*) terutama melalui dakwah dengan memapankan gerakan sosial untuk mendorong Islamisasi dari atas dengan cara mendesakkan pemberlakuan syariah Islam melalui legislasi. Di sisi lain, terdapat spektrum Islam radikal yang menegaskan pentingnya cara-cara non kompromi atau revolusi untuk mencapai tujuan pembentukan negara Islam.

Selaras dengan pemikiran Oliver Roy, ICG memandang Islamisme sepadan dengan pengertian aktivisme Islam yaitu “the active assertion and promotion of beliefs, prescriptions, law, or policies that are held to be Islamic in character.”<sup>27</sup> Konsepsi mengenai aktivisme Islam ini dikategorikan kembali oleh ICG menjadi tiga arus utama yaitu 1) Islamisme politik, 2) Islamisme dakwahis, dan 3) Islamisme jihadis yang ketiganya bersifat dinamis. Arus utama Islamisme yang disebut pertama mengacu pada gerakan dengan tujuan akhir untuk meraih kekuasaan politik. Arus utama Islamisme yang disebut kedua pada dasarnya menghindari aktivisme politik, baik untuk tujuan kekuasaan politik maupun mendeskripsikan diri sebagai partai politik, melainkan konsentrasi untuk dakwah. Arus utama Islamisme yang disebut ketiga memiliki ciri utama penggunaan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini dengan mengkonsepsikan situasi masyarakat Islam kini berada dalam peperangan melawan kaum kafir dan umat muslim harus bangkit mengawal eksistensi *Dar Al-Islam*. Terdapat dua kategori kelompok Islamisme jihadis yaitu: 1) kelompok Jihadi Salafi dan 2) kelompok pengikut Qutbis.

Selanjutnya landasan teori yang digunakan pada riset kedua, CSRC menggunakan terminologi terkait identitas politik<sup>28</sup> yang terdiri atas identitas politik pro demokrasi dan identitas politik kontra demokrasi serta gerakan Islam radikal yang dikemukakan oleh Gilles Kepel dan Immanuel Sivan. Definisi penegasan identitas politik yang pro demokrasi terdiri atas para politikus yang menyalurkan hasrat politiknya dengan membentuk partai dan kalangan *civil*

<sup>27</sup> Secara subyektif peneliti mengartikan aktivisme Islam sebagai pernyataan dan promosi aktif mengenai keyakinan/kepercayaan, rumusan rekomendasi, hukum, dan kebijakan yang dianggap memiliki karakter Islami.

<sup>28</sup> Penelitian ini mendefinisikan identitas politik terkait munculnya kekuatan-kekuatan politik laten yang menyeruak ke permukaan untuk menegaskan identitasnya pasca ambruknya masa Orde Baru.

*society* yang memilih berada di luar jalur politik praktis namun bekerja memperkuat basis demokrasi di kalangan akar rumput (*grass root*). Kedua kelompok ini meyakini demokrasi sebagai sistem terbaik untuk menata kehidupan berbangsa termasuk kekuatan Islam sebagai penerima manfaat (*beneficiary*). Berbeda dengan identitas politik pro demokrasi, penegasan identitas politik kontra demokrasi tidak sudi menundukkan kepala di depan aturan main (*rule of the game*) demokrasi. Sebagian dari mereka menjadikan demokrasi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan demokrasi seperti merampas kebebasan, sebagian lagi menentang demokrasi dengan sarana-sarana yang justru disediakan demokrasi seperti ruang publik yang bebas.

Identitas politik yang terbentuk tersebut memungkinkan munculnya berbagai jenis gerakan Islam radikal. Paling tidak terdapat dua kategori yang dapat dilihat mengenai gerakan Islam radikal berdasarkan pengembangan pemikiran Kepel dan Sivan. *Pertama*, gerakan Islam yang bersifat terbuka dan cair (*loosely organization*). Gerakan ini memiliki ciri keanggotaan, pemimpin, dan pusat kegiatan yang jelas serta sistem rekrutmen anggota yang bersifat terbuka. Gerakan ini dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu kelompok Islam yang lahir di tanah air (seperti Front Pembela Islam/FPI dan Majelis Mujahidin Indonesia/MMI) dan kelompok Islam yang berafiliasi dengan jaringan Islam di Timur Tengah (seperti Hizbut Tahrir Indonesia/HTI). *Kedua*, gerakan Islam yang bersifat tertutup, yang kerap disebut sebagai organisasi bawah tanah (*underground organization*). Gerakan ini sulit teridentifikasi, proses rekrutmen keanggotaan dilakukan secara rahasia (seperti Jamaah Islamiyah/JI).

Pada bagian riset ketiga berikutnya, CSRC menggunakan beberapa variasi teori mulai dari kekerasan dan perdamaian, radikalisme, konflik, serta Islamisme. Penjelasan mengenai konsepsi mengenai kekerasan dan perdamaian diambil berdasarkan pemikiran Johan Galtung mengenai damai negatif (*negative peace*) yang memiliki arti absennya perang (*the absence of war*) atau penghentian kekerasan langsung (*the cessation of direct violence*). Ketiadaan konflik kekerasan terbuka tidak berarti perdamaian sejati sudah tercipta. Galtung berpendapat bahwa masih ada perjuangan yang harus dilakukan untuk mewujudkan perdamaian positif (*positive peace*) dalam bentuk penuntasan atas

kekerasan struktural dan kekerasan budaya. Kekerasan budaya, menurut Galtung, berarti aspek-aspek budaya (yaitu ruang simbolik diantara Kita seperti agama dan ideologi, bahasa, dan seni) dapat digunakan untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan langsung atau kekerasan struktural.

Dasar pemikiran Johan Galtung inilah yang menjadi salah satu momen teoretis yang cukup penting bagi perkembangan konsepsi radikalisme. CSRC pada riset yang ketiga ini memiliki pandangan bahwa salah satu karakter radikalisme Islam yang bisa disepakati adalah penerimaan kelompok Islam tentang keabsahan penggunaan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Pandangan mengenai radikalisme Islam ini tidak lepas dari pemikiran Mark Jurgensmeyer yang melihat bahwa kaitan antara radikalisme dengan terorisme. Terorisme memiliki dua karakteristik utama yaitu penggunaan kekerasan dan bermotif agama. Akan demikian, perlu dicermati bahwa radikalisme tidak serta merta dimaknai menjadi terorisme. Namun, radikalisme harus dipahami sebagai pra kondisi menuju terorisme. Salah satu konsep yang erat kaitannya dengan radikalisme adalah radikalisasi. Charles E. Allen mendefinisikan radikalisasi sebagai proses mengadopsi sistem kepercayaan yang ekstrem, termasuk keinginan untuk menggunakan, mendukung dan memfasilitasi kekerasan sebagai sebuah metode untuk mempengaruhi perubahan masyarakat.

Konsepsi radikalisme Islam juga memiliki kaitan erat dengan Islamisme. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pengaruh pemikiran Oliver Roy cukup besar di dalam riset yang ketiga. Tambahan penjelasan definisi Islamisme menurut Roy dapat dilihat menurut pengertian bahwa Islam dikonsepsikan sebagai sebuah ideologi yang ajaran tradisionalnya telah diperluas oleh kelompok Islamis menjadi sebuah agama yang sempurna di dunia modern. Islamisme oleh Oliver Roy dapat dilihat bergerak melalui dua kutub: revolusi dan reformasi<sup>29</sup>. Sementara itu, Anthony Bubalo, Greg Fealy, dan Whit Mason berargumen bahwa Islamisme memiliki empat indikator utama yakni: 1) menganjurkan kebangkitan Islam sebagai dasar reformasi kemasyarakatan; 2) mempersepsikan Islam sebagai satu

<sup>29</sup> Islamisme revolusi berpandangan bahwa Islamisasi masyarakat mesti dilakukan melalui tangan kekuasaan, sedangkan Islamisme reformasi berpandangan bahwa reislamisasi dimulai dari masyarakat yang bergerak dari bawah ke atas yang dengan sendirinya akan mewujudkan negara Islam.

ideologi; 3) tujuannya adalah pemapanan negara atau sistem Islam; 4) mengimplementasikan syariat Islam sebagai hukum negara. Secara khusus, Greg Fealy menuliskan bahwa kelompok Islam radikal di Indonesia dapat digolongkan menjadi empat kategori: 1) politik, pendidikan, dan intelektual; 2) *vigilante*; 3) paramiliter; 4) teroris<sup>30</sup>.

Landasan teori selanjutnya pada riset ketiga, CSRC juga mengelaborasi teori konflik yang disampaikan oleh Peter Wallensteen terutama model analisis kebutuhan dasar (*basic needs conflict origins*). Termasuk di dalam pemikiran ini adalah Ted R. Gurr yang berpandangan bahwa pengingkaran terhadap kebutuhan dasar manusia akan menimbulkan konflik. Secara spesifik, frustrasi adalah akar konflik yang berangkat dari pelbagai kebutuhan dasar yang tidak terpuaskan. Pada konteks ini pengembangan konsep mengenai deprivasi relatif (*relative deprivation*) menjadi penting. Ketika seorang individu atau kelompok secara subyektif mempersepsikan sebagai kelompok marjinal, maka ketidakpuasan akan timbul dari deprivasi yang dapat digunakan sebagai penjelas bagi timbulnya gerakan sosial termasuk kelompok Islam radikal. Ted R. Gurr menyatakan bahwa deprivasi relatif adalah sebuah cara sistematis bagi konflik untuk menjadi kekerasan. Peneliti—untuk lebih memudahkan pemetaan teoretis—mendeskripsikan definisi konseptual dan definisi operasional setiap landasan teori yang digunakan dalam penelitian dengan penjabaran tabel berikut ini:

<sup>30</sup> Kategori pertama adalah kelompok yang tidak menggunakan kekerasan dalam mengupayakan perubahan Islam yang radikal (contoh HTI). Kategori kedua adalah kelompok masyarakat yang berupaya mencegah kejahatan dan kemaksiatan secara khusus karena aparat keamanan tidak sungguh-sungguh menanganinya (contoh: FPI). Kategori ketiga adalah kelompok yang muncul dalam jumlah kecil terutama selama konflik komunal masih terjadi (contoh: Laskar Jihad). Kategori keempat adalah kelompok teroris yang menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan misalnya dengan aksi bom bunuh diri (contoh Jamaah Islamiyah).

**Tabel 6**  
**Ikhtisar Definisi Konseptual dan Operasional Mengenai Wacana Radikalisme Yang Dikembangkan CSRC**

TEORI	TOKOH	DEFINISI KONSEPTUAL & OPERASIONAL
<b>Islam Kultural</b>	1. Nurcholis Madjid	1. <b>Desakralisasi</b> : pembebasan diri dari kecenderungan mentransendenkan hal-hal yang bersifat profan
	2. Abdurrahman Wahid	2. <b>Pribumisasi Islam</b> : mempertimbangkan situasi lokal dalam memahami ajaran Islam agar tidak tercerabut dari akar budaya, tetapi mempertahankan ciri Islam dalam bentuknya yang asli
	3. Greg Fealy	3. <b>Muslimness</b> : seorang muslim yang memiliki ciri antara lain cenderung modern, multikultural, pluralis, dan bukan radikal
<b>Islam Politik</b>	1. Gilles Kepel	1. <b>Islamisme</b> : infiltrasi dan perluasan pengaruh Islam sebagai sebuah gerakan keagamaan yang kekuatannya terkandung dalam bentuk ekspresi pelbagai tujuan politik dan ketegangan sosial yang dirasakan oleh semua
	2. Oliver Roy	2. <b>Islamisme</b> : sebagai sebuah gerakan kontemporer yang mengkonseptualisasikan Islam terutama sebagai ideologi politik yang mengatur segala aspek kehidupan mulai dari negara, pendidikan, sistem hukum, budaya, dan ekonomi sebagai sebuah bentuk perjuangan para Islamis yang menekankan terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan kuat di bawah sebuah negara Islam, terdiri dari dua kategori: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Islamisme moderat</b>: upaya proyek reislamisasi dari bawah (<i>bottom up</i>) terutama melalui dakwah dengan memapankan gerakan sosial untuk mendorong Islamisasi dari atas dengan cara mendesakkan pemberlakuan syariah Islam melalui legislasi</li> <li>b. <b>Islamisme radikal</b>: menegaskan pentingnya cara-cara non kompromi atau revolusi untuk mencapai tujuan pembentukan negara Islam.</li> </ul>
	3. ICG	3. <b>Aktivisme Islam</b> : pernyataan dan promosi aktif mengenai keyakinan/kepercayaan, rumusan rekomendasi, hukum, dan kebijakan yang dianggap memiliki karakter Islami, terdiri dari tiga kategori: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Islamisme politik</b>: gerakan dengan tujuan akhir untuk meraih kekuasaan politik</li> <li>b. <b>Islamisme dakwahis</b>: menghindari aktivisme politik, baik untuk tujuan kekuasaan politik maupun mendeskripsikan diri sebagai partai politik, melainkan konsentrasi untuk dakwah</li> <li>c. <b>Islamisme jihadis</b>: penggunaan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini dengan mengkonsepsikan situasi masyarakat Islam kini berada dalam peperangan melawan kaum kafir dan umat muslim harus bangkit mengawal eksistensi <i>Dar Al-Islam</i> → 1) <b>Jihadi Salafi</b> dan 2) kelompok pengikut Qutbis</li> </ul>
<b>Identitas Politik</b>	Immanuel Sivan & Gilles Kepel	1. <b>Pro demokrasi</b> : kelompok ini meyakini demokrasi sebagai sistem terbaik untuk menata kehidupan berbangsa termasuk kekuatan Islam sebagai penerima manfaat ( <i>beneficiary</i> ) 2. <b>Kontra demokrasi</b> : kelompok ini menjadikan demokrasi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan demokrasi seperti merampas kebebasan, sebagian lagi menentang demokrasi dengan sarana-sarana yang justru disediakan demokrasi seperti ruang publik yang bebas
<b>Gerakan Islam Radikal</b>	Immanuel Sivan & Gilles Kepel	1. <i>Loosely organization</i> : gerakan Islam yang bersifat terbuka dan cair, ciri keanggotaan, pemimpin, dan pusat kegiatan yang jelas serta sistem rekrutmen anggota yang bersifat terbuka 2. <i>Underground organization</i> : gerakan Islam yang bersifat tertutup, sulit teridentifikasi, proses rekrutmen keanggotaan dilakukan

TEORI	TOKOH	DEFINISI KONSEPTUAL & OPERASIONAL
		secara rahasia
<b>Kekerasan &amp; Perdamaian</b>	Johan Galtung	1. Damai negatif ( <i>negative peace</i> ): absennya perang ( <i>the absence of war</i> ) atau penghentian kekerasan langsung ( <i>the cessation of direct violence</i> ) dalam masyarakat 2. Damai positif ( <i>positive peace</i> ): ketiadaan kondisi atas kekerasan struktural dan kekerasan budaya
<b>Radikalisme</b>	1. Mark Jurgensmeyer 2. Charles E. Allen	1. <b>Radikalisme</b> : merupakan sebuah pra kondisi menuju terorisme yang memiliki dua karakteristik utama yaitu penggunaan kekerasan dan bermotif agama 2. <b>Radikalisasi</b> : proses mengadopsi sistem kepercayaan yang ekstrem, termasuk keinginan untuk menggunakan, mendukung dan memfasilitasi kekerasan sebagai sebuah metode untuk mempengaruhi perubahan masyarakat
<b>Islamisme</b>	1. Oliver Roy  2. Anthony Bubalo, Greg Fealy, Whit Mason  3. Greg Fealy	1. <b>Islamisme</b> : Islam dikonsepsikan sebagai sebuah ideologi yang ajaran tradisionalnya telah diperluas oleh kelompok Islamis menjadi sebuah agama yang sempurna di dunia modern yang bergerak melalui dua kutub: 1. <b>Revolusi</b> : Islamisasi masyarakat mesti dilakukan melalui tangan kekuasaan 2. <b>Reformasi</b> : reislamisasi dimulai dari masyarakat yang bergerak dari bawah ke atas yang dengan sendirinya akan mewujudkan negara Islam 2. <b>Islamisme</b> memiliki empat indikator utama: a. Menganjurkan kebangkitan Islam sebagai dasar reformasi kemasyarakatan b. Mempersepsikan Islam sebagai satu ideologi c. Tujuannya adalah pemaparan negara atau sistem Islam d. Mengimplementasikan syariat Islam 3. <b>Kelompok Islam radikal</b> dapat digolongkan menjadi empat kategori: 1. <b>Politik, pendidikan, dan intelektual</b> : kelompok yang tidak menggunakan kekerasan dalam mengupayakan perubahan Islam yang radikal 2. <b>Vigilante</b> : kelompok masyarakat yang berupaya mencegah kejahatan dan kemaksiatan secara khusus karena aparat keamanan tidak sungguh-sungguh menanganinya 3. <b>Paramiliter</b> : kelompok yang muncul dalam jumlah kecil terutama selama konflik komunal masih terjadi 4. <b>Teroris</b> : kelompok yang menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan misalnya dengan aksi bom bunuh diri
<b>Konflik</b>	1. Peter Wallensteen 2. Ted R. Gurr	1. Model analisis kebutuhan dasar ( <i>basic needs conflict origins</i> ): pengingkaran terhadap kebutuhan dasar manusia akan menimbulkan konflik 2. <b>Deprivasi relatif</b> : sebuah cara sistematis bagi konflik untuk menjadi kekerasan

**Metode.** Penelitian pertama dan kedua yang dilakukan oleh CSRC mengombinasikan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif sekaligus. Teknik pengumpulan data metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan survei. Riset pertama melakukan survei opini publik di sepuluh propinsi yang dipilih berdasarkan stratifikasi utama propinsi dengan mayoritas berpenduduk Islam dengan propinsi mayoritas berpenduduk non Islam, sedangkan riset kedua melakukan survei terhadap 250 masjid. Adapun teknik pengumpulan data kualitatif pada riset pertama menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam, sedangkan riset kedua menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Sedikit berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, riset ketiga yang dilakukan oleh CSRC menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatoris, sert *Focus Group Discussion* (FGD).

**Indikator.** Dua penelitian yang dikembangkan oleh CSRC memiliki beberapa indikator yang variasinya beragam kecuali penelitian ketiga yang tidak mengembangkan indikator, melainkan deskripsi analitik terhadap kasus yang ada. Penelitian pertama, lebih menekankan pengembangan indikator untuk membuat karakteristik antara spektrum Islam kultural dengan Islam politik (Islamisme). Ada tiga indikator yang dikembangkan dalam penelitian pertama yaitu:

1. Persepsi tentang kewajiban menggunakan cadar bagi muslimah
2. Dukungan terhadap gerakan penegakan khilafah Islamiyah atau negara Islam di Indonesia.
3. Persepsi tentang boleh atau tidaknya penggunaan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan Islam.

Penggunaan tiga indikator di atas dapat membedakan kecenderungan pengelompokan karakteristik responden sebagai Islamis (radikal) atau Islam kultural (moderat)—bukan menggunakan istilah fundamental atau modern. Karakteristik kelompok Islamis diberikan nilai 1 (lebih setuju), sedangkan karakteristik kelompok Islam kultural diberikan nilai 2 (tidak setuju). Oleh karenanya, apabila rata-rata nilai dari setiap indikator cenderung mendekati nilai 1 maka karakteristik kelompok responden mayoritas Islamis. Sebaliknya apabila rata-rata nilai dari setiap indikator cenderung mendekati nilai 2 maka karakteristik kelompok responden mayoritas Islam kultural.

Lain halnya dengan penelitian kedua, elaborasi indikator yang dikembangkan oleh CSRC dilihat berdasarkan persepsi *takmir* masjid terhadap lima isu utama yakni:

1. Sistem pemerintahan, yang dikategorikan menjadi tiga kelompok:
  - a. Kelompok yang tegas mendukung penegakan Khilafah Islamiyah dan menolak demokrasi
  - b. Kelompok yang setuju dan sebagian menolak penegakan sistem Khilafah Islamiyah
  - c. Kelompok yang menolak penegakan sistem Khilafah Islamiyah dan menerima demokrasi
2. Formulasi syariah
3. Jihad, kekerasan, dan terorisme
4. Kesetaraan gender
5. Pluralisme agama, yang dikembangkan dari tiga hal:
  - a. Toleransi beragama yang diukur berdasarkan penghormatan terhadap keyakinan agama lain.
  - b. Pengakuan terhadap hak kesetaraan non muslim sebagai warga negara.
  - c. Pandangan ada tidaknya kebenaran dalam agama lain dan pengakuan ada tidaknya keselamatan dalam agama lain

**Formulasi kebijakan.** Pada bagian formulasi kebijakan riset pertama CSRC menyampaikan lima rekomendasi. *Pertama*, CSRC melihat perlunya upaya penyadaran lewat kampanye bahwa berkembangnya arus Islamisme saat ini, jika tidak direspon secara tepat dapat menjadi ancaman bagi karakter Islam kultural (moderat). *Kedua*, aksi-aksi Islamisme seperti pemasangan spanduk dan unjuk rasa menuntut pendirian negara Islam perlu dilawan dengan aktivitas sebanding, sehingga masyarakat mendapatkan informasi alternatif. *Ketiga*, perlu dilakukan peningkatan pelatihan untuk mendesimenasi gagasan Islam sebagai agama damai dan NKRI sebagai bentuk negara yang final berdasarkan perspektif Islam. *Keempat*, pemerintah perlu melakukan upaya agar praktik-praktik demokrasi yang kontra produktif dengan demokrasi tereliminasi. *Kelima*, perlu dilakukan upaya internalisasi nilai-nilai demokrasi di kalangan masyarakat maupun penyelenggara negara.

Riset kedua yang dilakukan CSRC tidak mengemukakan rekomendasi kebijakan. Akan tetapi, riset ketiga memiliki beberapa catatan rekomendasi. Catatan pertama, pengurus masjid harus mempertimbangkan perspektif selain Islam sebagai acuan untuk menyusun kebijakan ibadah, dakwah, dan pendidikan di masjid—misalnya perspektif pluralisme, perdamaian, dan anti kekerasan. Catatan kedua, program-program seperti workshop dan pelatihan untuk khatib jumat, penceramah, pengurus masjid, harus dilakukan untuk menyatakan visi manajemen tentang Islam yang damai dan anti kekerasan.

**Simpulan.** Riset pertama yang dilakukan CSRC memiliki simpulan utama bahwa simbol-simbol Islam hadir semakin mencolok di ruang publik Indonesia yang sedang mengalami euforia demokrasi. Temuan riset menunjukkan bahwa jumlah muslim yang memiliki orientasi Islam kultural (80,1%) lebih besar daripada muslim yang memiliki orientasi Islamisme (19,9%). Namun demikian, walaupun jumlah muslim berorientasi Islamisme angkanya kecil, tetapi hal ini menunjukkan fakta bahwa paling tidak dua dari sepuluh orang Indonesia memiliki kecenderungan Islamisme yang potensial untuk berkembang menjadi Islamisme jihadis.

Hal ini apabila menggunakan konsepsi Archer dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk *downward conflation* dimana orientasi Islam kultural yang dihasilkan oleh penelitian secara mayoritas menjadi sebuah struktur pengetahuan yang menggambarkan wacana radikalisme yang bersifat minor. Artinya, gagasan mengenai radikalisme hanya meliputi sedikit minoritas masyarakat. Gagasan tentang wacana radikalisme (Islamisme) secara struktural mendominasi dan mendeterminasi gagasan tentang Islam kultural. Namun demikian, perlu menjadi catatan bahwa meskipun gagasan tentang Islamisme berdasarkan data terbilang lebih sedikit, tetapi simpulan yang diambil riset ini justru menggambarkan bahwa kecenderungan Islamisme berpotensi untuk berkembang menjadi Islamisme jihadis. Atau dengan konsepsi Archer dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk *upward conflation* dimana orientasi Islamisme dapat merubah struktur orientasi Islam kultural menjadi Islamisme. Analisis ini menunjukkan bagaimana konsepsi Archer dapat menjelaskan dua arah bagaimana relasi antara struktur pengetahuan yang bersifat dominan kemungkinannya juga dapat tergerus oleh struktur

pengetahuan yang bersifat minor. Hal ini memunculkan gagasan pengetahuan baru yang dikembangkan CSRC mengalami perluasan yang bersifat reproduktif (*morphostatis*) sekaligus elaboratif (*morphogenesis*). Secara reproduktif wacana mengenai Islam kultural menjadi wacana yang menjadi struktur utama pengetahuan mengenai orientasi keislaman yang kompatibel dengan demokrasi. Adapun secara elaboratif wacana radikalisme mengenai orientasi Islamisme (radikal) meskipun terbilang kecil dapat mempengaruhi perubahan struktur orientasi keislaman kultural bertransformasi menjadi radikal. Terlihat bahwa antara struktur pengetahuan yang dominan senantiasa mengalami perubahan yang bersifat reproduktif sekaligus elaboratif.

Tidak jauh berbeda dengan riset pertama, hasil riset kedua CSRC mengambil simpulan utama bahwa mayoritas masjid di Jakarta masih menyuarakan gagasan dan pemikiran Islam moderat, sedangkan untuk masjid-masjid di Solo untuk beberapa derajat tertentu telah dan sedang digunakan sebagai kendaraan dalam menyuarakan gagasan Islam radikal. Namun demikian, temuan riset ini menunjukkan sebuah fakta bahwa mayoritas persepsi *takmir* masjid terhadap lima isu ideologis utama cenderung moderat.

Terakhir, hasil riset ketiga CSRC memiliki simpulan utama bahwa peran masjid dalam pembangunan perdamaian dan pencegahan konflik belum nampak maksimal dan berorientasi jangka panjang. Hal ini disebabkan karena belum kelihatannya peran masjid didalam menyusun program terencana untuk menginisiasi pendidikan damai. Masjid dianggap belum mampu keluar dari peran tradisionalnya sebagai sarana ibadah dan penjaga solidaritas, moralitas, dan tradisi keagamaan dalam komunitas muslim.

**Catatan kritis.** Peneliti memiliki beberapa catatan kritis mengenai konstruksi wacana radikalisme yang dilakukan oleh CSRC. *Pertama*, terkait pembahasan mengenai dasar teori dari riset yang telah dilakukan. Pengetahuan mengenai wacana radikalisme yang dikembangkan oleh CSRC memiliki kerangka dasar teoretis cukup luas. Landasan teori mulai dari konsepsi Islam politik, Islam kultural, identitas politik, kekerasan dan perdamaian, gerakan Islam radikal, radikalisme, Islamisme, dan konflik saling mengisi untuk memberikan gambaran pengetahuan mengenai wacana radikalisme yang berkembang. Landasan teoretis

ini banyak dipengaruhi oleh para intelektual dari luar Indonesia—salah satunya Indonesianis (Greg Fealy). Namun demikian, terdapat pula pengaruh pemikiran intelektual Indonesia seperti Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid. Luasnya spektrum pemikiran yang diadopsi oleh CSRC membuat proses konstruksi wacana radikalisme mengalami kerumitan terutama ketika melakukan proses konseptualisasi dan operasionalisasi pada bagian selanjutnya. Bahkan peneliti berpandangan bahwa CSRC tidak mengembangkan wacana radikalisme sebagai fokus kajiannya, melainkan berupaya untuk mempromosikan nilai-nilai Islam yang bersifat moderat (kultural). Hal ini dapat dilihat dari spektrum Islam kultural atau moderat yang dikembangkan oleh CSRC dalam kategori indikator yang memiliki nilai positif dibandingkan dengan spektrum Islamisme (radikal).

*Kedua*, terkait definisi konseptual serta operasional yang dimiliki CSRC. Peneliti melihat bahwa CSRC di ketiga risetnya memiliki keterkaitan yang saling berkesinambungan. Namun demikian, konstruksi pengetahuan mengenai wacana radikalisme lebih banyak penekanannya pada riset yang kedua. Isu utama mengenai radikalisme dapat dilihat dari benih-benih Islam radikal yang tumbuh di masjid.. Namun demikian, di sisi lain catatan kritis *ketiga* peneliti menunjukkan bahwa hasil riset pertama sedikit banyak memberikan kontribusi terutama mengenai elaborasi tiga indikator untuk mengukur derajat keislaman antara yang kultural dan politik (Islamis). Untuk mempermudah pemahaman, tabel berikut peneliti susun sebagai bentuk ikhtisar dari proses konstruksi wacana radikalisme yang dilakukan CSRC:

**Tabel 7**  
**Ikhtisar Konstruksi Wacana Radikalisme Yang Dikembangkan CSRC**

KONSTRUKSI RADIKALISME	DESKRIPSI		
	RISET PERTAMA	RISET KEDUA	RISET KETIGA
<b>Pertanyaan Penelitian</b>	<p>a. Apa dan bagaimana konstruksi Islam di ruang publik di Indonesia?</p> <p>b. Seberapa dominankah Islamisme menguasai wacana dan simbol di ruang publik serta terhadap masyarakat muslim?</p> <p>c. Sejauh mana kehadiran Islam di ruang publik dewasa ini berpengaruh terhadap masa depan demokrasi di Indonesia?</p> <p><b>Hipotesis:</b> penetrasi simbol-simbol Islam yang melahirkan berbagai ekspresi, identitas, organisasi dan institusi berlabel Islam dalam ruang publik yang semakin demokratis justru berlangsung semakin luas dan dalam</p>	<p>a. Bagaimana fenomena infiltrasi Islam radikal ke masjid-masjid dan pengaruhnya dengan ormas-ormas yang mengelola masjid seperti NU dan Muhammadiyah?</p> <p>b. Bagaimana orientasi ideologis takmir masjid terkait lima isu yakni sistem pemerintahan, formalisasi syariah Islam, jihad, kesetaraan gender, dan pluralisme?</p> <p><b>Hipotesis:</b> ruang demokrasi telah membuka kesempatan bagi kelompok-kelompok Islam untuk mengartikulasikan aspirasi politik dan ideologi keagamaan secara agresif dan demonstratif</p>	<p>a. Bagaimana penetrasi gerakan Islam radikal memanfaatkan situasi konflik sebagai arena perluasan pengaruh melalui masjid?</p> <p>b. Bagaimana masjid memainkan peran penting dalam pembangunan perdamaian di wilayah pasca dan sedang mengalami konflik?</p> <p><b>Hipotesis:</b> radikalisme Islam di wilayah paska dan potensial konflik dapat menghambat pembangunan perdamaian yang dilaksanakan baik oleh negara maupun masyarakat sipil</p>
<b>Dasar Teori</b>	<p>a. Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Greg Fealy konsepsi mengenai Islam kultural</p> <p>b. Gilles Kepel, Emmanuel Sivan, Oliver Roy, dan ICG konsepsi mengenai Islam politik (Islamisme)</p>	Gilles Kepel dan Emmanuel Sivan konsepsi mengenai identitas politik (pro demokrasi & kontra demokrasi)	<p>a. Johan Galtung konsepsi mengenai kekerasan dan perdamaian</p> <p>b. Mark Jurgensmeyer, Oliver Roy, Greg Fealy, ICG konsepsi mengenai radikalisme &amp; Islamisme</p> <p>c. Ted R. Gurr dan Peter Wallensteen konsepsi mengenai konflik</p>
<b>Definisi Konseptual &amp; Operasional</b>	Lihat penjelasan tabel sebelumnya	Lihat penjelasan tabel sebelumnya	Lihat penjelasan tabel sebelumnya
<b>Metode Penelitian</b>	Kombinasi metode kuantitatif (survei) dan kualitatif (studi literatur & wawancara mendalam)	Kombinasi metode kuantitatif (survei) dan kualitatif (wawancara mendalam & observasi)	Metode kualitatif (wawancara mendalam, observasi partisipatoris, & FGD)
<b>Indikator</b>	<p>Penekanan pada spektrum <b>Islam kultural</b> dengan <b>Islam politik</b> (Islamisme) dengan indikator:</p> <p>1. Persepsi tentang kewajiban</p>	<p>Persepsi <i>takmir</i> masjid terhadap lima isu utama yakni:</p> <p>1. Sistem pemerintahan</p> <p>2. Formulasi syariah</p>	Tidak memuat indikator

KONSTRUKSI RADIKALISME	DESKRIPSI		
	RISET PERTAMA	RISET KEDUA	RISET KETIGA
	<p>menggunakan cadar bagi muslimah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dukungan terhadap gerakan penegakan khilafah Islamiyah atau negara Islam di Indonesia.</li> <li>Persepsi tentang boleh atau tidaknya penggunaan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan Islam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jihad, kekerasan, dan terorisme</li> <li>Kesetaraan gender</li> <li>Pluralisme agama</li> </ol>	
<b>Simpulan Riset</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Temuan utama:</b> jumlah muslim yang memiliki orientasi Islam kultural (80,1%) lebih besar daripada muslim yang memiliki orientasi Islamisme (19,9%)</li> <li><b>Simpulan:</b> simbol-simbol Islam hadir semakin mencolok di ruang publik Indonesia yang sedang mengalami euforia demokrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Temuan utama:</b> mayoritas persepsi <i>takmir</i> masjid terhadap lima isu ideologis utama cenderung moderat</li> <li><b>Simpulan:</b> mayoritas masjid di Jakarta masih menyuarakan gagasan dan pemikiran Islam moderat, sedangkan untuk masjid-masjid di Solo untuk beberapa derajat tertentu telah dan sedang digunakan sebagai kendaraan dalam menyuarakan gagasan Islam radikal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Temuan utama:</b> peran masjid dalam pembangunan perdamaian dan pencegahan konflik belum nampak maksimal dan berorientasi jangka panjang</li> <li><b>Simpulan:</b> masjid dianggap belum mampu keluar dari peran tradisionalnya sebagai sarana ibadah dan penjaga solidaritas, moralitas, dan tradisi keagamaan dalam komunitas muslim</li> </ol>
<b>Formulasi Kebijakan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perlunya upaya penyadaran lewat kampanye bahwa berkembangnya arus Islamisme saat ini, jika tidak direspon secara tepat dapat menjadi ancaman bagi karakter Islam kultural (moderat)</li> <li>Aksi-aksi Islamisme seperti pemasangan spanduk dan unjuk rasa menuntut pendirian negara Islam perlu dilawan dengan aktivitas sebanding, sehingga masyarakat mendapatkan informasi alternatif</li> <li>Perlu dilakukan peningkatan pelatihan untuk mendesimenasi gagasan Islam sebagai agama damai dan NKRI sebagai bentuk negara yang final berdasarkan perspektif Islam</li> </ol>	Tidak memuat formulasi kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengurus masjid harus mempertimbangkan perspektif selain Islam sebagai acuan untuk menyusun kebijakan ibadah, dakwah, dan pendidikan di masjid</li> <li>, program-program seperti workshop dan pelatihan untuk khatib jumat, penceramah, pengurus masjid, harus dilakukan untuk menyatukan visi manajemen tentang Islam yang damai dan anti kekerasan</li> </ol>

KONSTRUKSI RADIKALISME	DESKRIPSI		
	RISET PERTAMA	RISET KEDUA	RISET KETIGA
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. pemerintah perlu melakukan upaya agar praktik-praktik demokrasi yang kontra produktif dengan demokrasi tereliminasi</li> <li>5. perlu dilakukan upaya internalisasi nilai-nilai demokrasi di kalangan masyarakat maupun penyelenggara negara</li> </ol>		
<b>Catatan Kritis Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan mengenai wacana radikalisme yang dikembangkan oleh CSRC memiliki kerangka dasar teoretis cukup luas.</li> <li>2. Kontribusi landasan teoretis cukup rumit untuk dikonstruksikan secara konseptual dan operasional serta dilakukan pengembangan indikator</li> </ol>		



#### IV.2.2. Konstruksi Wacana Radikalisme BNPT

Berbeda dengan agen lainnya, konstruksi wacana radikalisme yang dikembangkan oleh BNPT lebih banyak mengacu pada aspek legal dibandingkan dengan aspek akademis. Acuan BNPT—sebagai bagian dari aparatus negara—untuk melakukan penanggulangan terorisme adalah peraturan. Peneliti dalam hal ini sangat terbatas akses data tentang BNPT. Hal ini mengingat, badan ini relatif baru berdiri dua tahun. Tidak banyak informasi yang peneliti dapat dari pihak BNPT. Oleh karena itu, wajar konstruksi wacana radikalisme yang dibangun BNPT lebih bersifat statis dibanding agen lainnya yang lebih dinamis. Ada dua acuan peraturan yang menaungi kinerja BNPT yakni:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Pemaparan konstruksi wacana radikalisme berikut ini akan disampaikan dengan menggunakan aspek yang berbeda dengan agen lainnya.

**Dasar Pertimbangan.** BNPT dalam konteks pemberantasan terorisme memiliki dasar pertimbangan yang bersumber dari UUD 1945 yang mengatakan bahwa peran negara adalah untuk melindungi, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan setiap warga negara serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Berlandaskan pernyataan tersebut maka diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten guna mencapai cita-cita bangsa. Hal ini memang terlihat klise, namun penting dilihat bahwa pendekatan keamanan dan hukum menjadi tolak ukur utama kinerja BNPT.

Pertimbangan lain BNPT dalam konteks pemberantasan terorisme adalah maraknya aksi terorisme yang telah menghilangkan nyawa dan menimbulkan ketakutan masyarakat. Terorisme telah menyebar di berbagai belahan dunia dengan membuat jaringan yang luas sehingga menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Dan sebelum adanya peraturan

tentang tindakan pemberantasan terorisme, belum ada peraturan yang secara komprehensif memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme. Pertimbangan tersebut menggugah pemerintah untuk membuat dan memberlakukan segera peraturan terkait pemberantasan terorisme.

**Definisi terkait terorisme.** Definisi terorisme yang dikembangkan oleh BNPT memang tidak secara eksplisit mengindikasikan memiliki pertautan dengan definisi wacana radikalisme. Namun demikian, peneliti berpandangan bahwa antara definisi terorisme yang dikembangkan oleh BNPT memiliki irisan definisi mengenai radikalisme terutama terkait persoalan tentang penggunaan cara kekerasan yang dilakukan oleh para teroris. Hal inilah yang menghubungkan wacana radikalisme dengan definisi terorisme yang dikembangkan oleh BNPT

Peraturan tentang tindak pidana terorisme memiliki beberapa ketentuan definisi. *Pertama*, pengertian tentang tindak pidana terorisme yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-undang. *Kedua*, pengertian tentang kekerasan yakni setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. *Ketiga*, pengertian mengenai ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan takut terhadap orang atau masyarakat secara luas. *Keempat*, pengertian tentang pemberantasan tindak pidana terorisme adalah kebijakan dan langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan. *Kelima*, pengertian tentang tindak pidana terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau

fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dasar pertimbangan kebijakan yang dilakukan oleh BNPT memang lebih banyak mengacu pada pendekatan keamanan dan fokus pada definisi terorisme. Oleh karena itu, nampaknya cukup sulit untuk memposisikan HTI sebagai sebuah embrio terorisme atau hanya bagian dari kelompok/organisasi yang berasaskan Islam.

#### **IV.2.3. Konstruksi Wacana Radikalisme Lazuardi Birru**

Topik riset yang dilakukan oleh Lazuardi Birru mengupas tema radikalisme sosial keagamaan. Riset ini dilaksanakan pada tahun 2011 dengan judul “Indeks Kerentanan Radikalisme Sosial Keagamaan di Indonesia. Riset yang melakukan survei di sembilan propinsi di Indonesia ini menunjukkan sebuah hasil yang patut disimak. Penggunaan kerangka berpikir perdamaian yang termuat di dalam riset ini turut mewarnai analisisnya. Berikut pemaparan riset yang dilakukan.

**Pertanyaan penelitian.** Riset ini dimulai dengan mengajukan enam pertanyaan penelitian. *Pertama*, pertanyaan penelitian yang diangkat adalah bagaimana eksplorasi radikalisme sosial-keagamaan di tingkat massa muslim dewasa secara nasional? *Kedua*, penelitian ini menanyakan bagaimana tingkat kerentanan terhadap radikalisme sosial-keagamaan di tanah air? *Ketiga*, penelitian ini menggambarkan bagaimana kecenderungan (*trend*) kerentanan terhadap radikalisme sosial-keagamaan selama satu tahun terakhir? *Keempat*, penelitian ini juga menanyakan bagaimana perbandingan tingkat kerentanan terhadap radikalisme sosial-keagamaan di beberapa propinsi Jawa dan Sumatera? *Kelima*, penelitian ini mengajukan pertanyaan bagaimana penjelasan faktor-faktor terkait bagi penguatan atau pengurangan terhadap radikalisme sosial-keagamaan? *Terakhir*, pertanyaan penelitiannya adalah apa saran yang harus dilakukan untuk mengurangi radikalisme sosial-keagamaan di tingkat massa umat Islam? Hipotesis penelitian ini melihat bahwa aktivitas terorisme yang dilakukan secara tersembunyi saat ini telah mengalami pergeseran menjadi tindakan radikal

berbasis agama dengan penggunaan tindak kekerasan atas nama agama yang dilakukan secara terang-terangan.

**Dasar teori**<sup>31</sup>. Setelah dicermati, ada beberapa landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain konsepsi mengenai radikalisme, serta prinsip-prinsip toleransi kemanusiaan. Berdasarkan kerangka tersebut riset ini mengembangkan indeks radikalisme sosial-keagamaan.

**Definisi konseptual dan operasional.** Riset ini memahami radikalisme sebagai tindakan dan atau sikap atas faham yang tidak sejalan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa yang menjunjung tinggi toleransi dan terbuka terhadap sesama warga yang majemuk dari latar belakang primordialnya yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi, atau bertumpu pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Riset ini meninjau radikalisme sosial-keagamaan melalui dua dimensi. Pertama, tindakan radikalisme sosial-keagamaan yang merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang beradab atas dasar keyakinan agama. Kedua, sikap radikalisme sosial-keagamaan merupakan kecenderungan untuk membenarkan, mendukung atau mentoleransi faham atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang beradab atas dasar klaim faham keagamaan.

Kerentanan terhadap radikalisme sosial-keagamaan merupakan potensi masyarakat untuk mendukung atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan atas nama keyakinan agama. Potensi tersebut diukur melalui sebuah indeks yang dikonstruksi dari sejumlah faktor dan indikator yang menunjukkan tingkat partisipasi, dukungan, dan penerimaan terhadap radikalisme sosial-keagamaan.

**Metode.** Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei. Sembilan propinsi yang menjadi target survei berada di pulau Sumatera (Nagroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, dan Lampung) dan Jawa (DKI Jakarta, banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur).

<sup>31</sup> Dasar teori yang menjadi landasan penelitian ini tidak dapat peneliti identifikasi siapa tokoh yang menjadi sumber acuannya. Hal ini mengingat peneliti tidak mendapatkan hasil penelitian secara lengkap, melainkan hanya memperoleh berupa resume riset saja dari Lazuardi Birru.

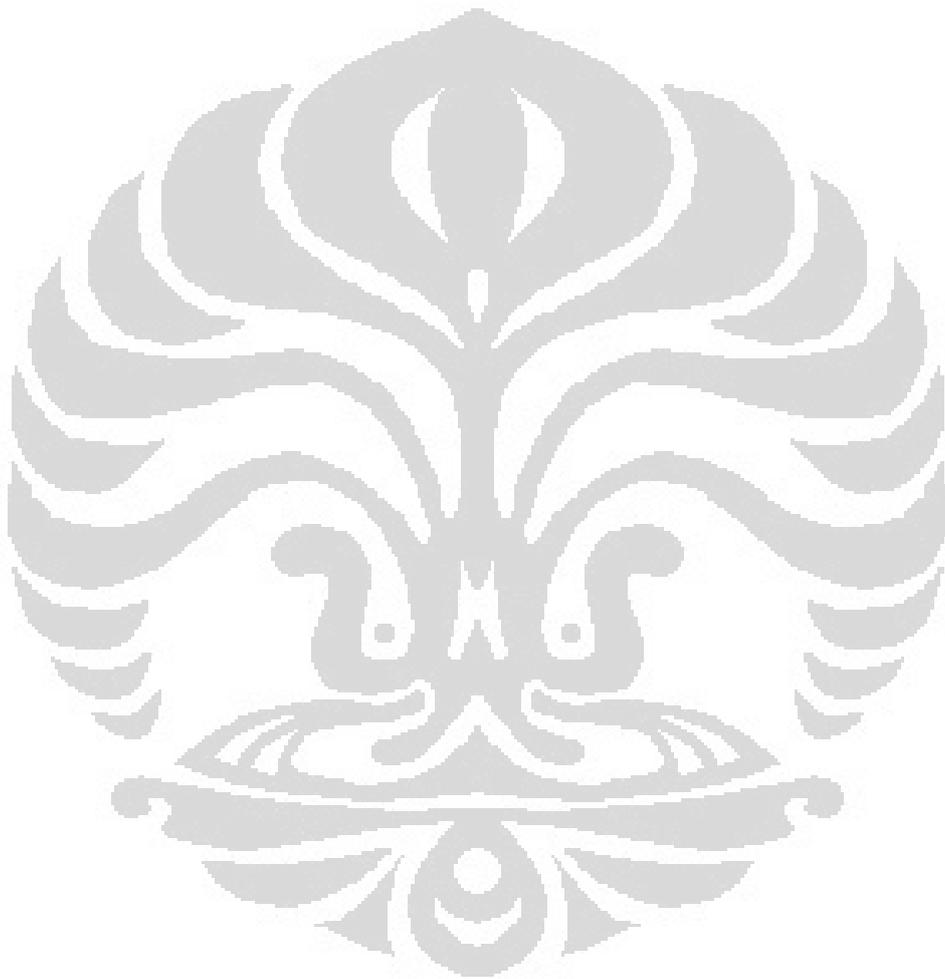
**Indikator.** Riset ini mengembangkan konsepsi mengenai kerentanan terhadap radikalisme sosial-keagamaan dimana komponen-komponen di dalamnya mencakup dua faktor utama. Pertama, tindakan, sikap, dan dukungan terhadap fenomena radikalisme sosial-keagamaan. Kedua, beberapa faktor yang dianggap berhubungan langsung dengan fenomena radikalisme sosial-keagamaan seperti: pemahaman arti jihad, agenda Islamis, keanggotaan dalam organisasi keagamaan radikal, sikap intoleran, dan perasaan terancam, tidak aman atau teralienasi. Berdasarkan dua faktor utama tersebut, Lazuardi Birru menjabarkan sepuluh indikator radikalisme sosial-keagamaan yakni: 1) tindakan radikalisme; 2) sikap radikalisme; 3) jihadisme; 4) agenda Islamis; 5) dukungan terhadap organisasi Islamis; 6) keanggotaan terhadap organisasi Islamis; 7) alienasi dan deprivasi; 8) intoleransi terhadap non muslim; 9) perasaan tidak aman; 10) perasaan terancam. Masing-masing indikator akan dikembangkan sebuah indeks tersendiri.

**Formulasi kebijakan.** Secara eksplisit Lazuardi Birru dalam risetnya tidak memuat formulasi kebijakan. Akan tetapi, hasil risetnya menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah cukup kuat. Bahkan dukungan masyarakat memperbolehkan pemerintah mengintervensi pengajaran agama, mengawasi pesantren radikal dan kelompok pengajian radikal, serta ulama yang menyerukan radikalisme.

**Simpulan.** Lazuardi Birru melalui riset yang dilakukan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa secara umum Indonesia masih rentan terhadap tindakan radikal. Hal ini dapat dilihat dari temuan utama riset dimana indeks kerentanan terhadap tindakan radikal masih berada pada level rentan (43,6 dari indeks 100 dimana tahap amannya maksimal 33,3). Situasi ini menunjukkan bahwa tingkat resistensi terhadap tindakan radikal belum kuat.

**Catatan kritis.** Peneliti berpendapat bahwa usaha Lazuardi Birru di dalam mengkonstruksi wacana radikalisme cukup dalam hingga melakukan pengembangan indeks. Namun demikian, peneliti melihat proses konseptualisasi dan operasionalisasi indikator radikalisme perlu ditinjau ulang mekanismenya. Hal ini barangkali tidak menjadi persoalan prinsip bagi Lazuardi Birru yang bukan merupakan lembaga riset akademis, melainkan lembaga advokasi. Oleh karena

itu, wajar saja kebutuhan akan manfaat risetnya akan lebih diutamakan dibanding proses akademis atau intelektual. Berikut ini peneliti sajikan ikhtisar konstruksi wacana radikalisme yang dikembangkan oleh Lazuardi Birru:



**Tabel 8**  
**Ikhtisar Konstruksi Wacana Radikalisme Yang Dikembangkan Lazuardi Birru**  
**DESKRIPSI RISET**

KONSTRUKSI RADIKALISME	DESKRIPSI RISET
<b>Pertanyaan Penelitian</b>	<p>a. Bagaimana eksplorasi radikalisme sosial-keagamaan di tingkat massa muslim dewasa secara nasional?</p> <p>b. Bagaimana tingkat kerentanan terhadap radikalisme sosial-keagamaan di tanah air?</p> <p>c. Bagaimana kecenderungan (<i>trend</i>) kerentanan terhadap radikalisme sosial-keagamaan selama satu tahun terakhir?</p> <p>d. Bagaimana perbandingan tingkat kerentanan terhadap radikalisme sosial-keagamaan di beberapa propinsi Jawa dan Sumatera?</p> <p>e. Bagaimana penjelasan faktor-faktor terkait bagi penguatan atau pengurangan terhadap radikalisme sosial-keagamaan?</p> <p>f. Apa saran yang harus dilakukan untuk mengurangi radikalisme sosial-keagamaan di tingkat massa umat Islam?</p> <p><b>Hipotesis:</b> aktivitas terorisme yang dilakukan secara tersembunyi saat ini telah mengalami pergeseran menjadi tindakan radikal berbasis agama dengan penggunaan tindak kekerasan atas nama agama yang dilakukan secara terang-terangan.</p>
<b>Dasar Teori</b>	Konsepsi mengenai radikalisme sosial-keagamaan dalam konteks serta prinsip-prinsip toleransi kemanusiaan. Berdasarkan kerangka tersebut riset ini mengembangkan indeks radikalisme sosial-keagamaan.
<b>Definisi Konseptual &amp; Operasional</b>	<b>Radikalisme:</b> tindakan dan atau sikap atas faham yang tidak sejalan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa yang menjunjung tinggi toleransi dan terbuka terhadap sesama warga yang majemuk dari latar belakang primordialnya yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi, atau bertumpu pada prinsip-prinsip kemanusiaan.
<b>Metode Penelitian</b>	Metode kuantitatif (survei)
<b>Indikator</b>	Sepuluh indikator radikalisme sosial-keagamaan yakni: (1) tindakan radikalisme; (2) sikap radikalisme; (3) jihadisme; (4) agenda Islamis; (5) dukungan terhadap organisasi Islamis; (6) keanggotaan terhadap organisasi Islamis; (7) alienasi dan deprivasi; (8) intoleransi terhadap non muslim; (9) perasaan tidak aman; (10) perasaan terancam
<b>Simpulan Riset</b>	<p>a. <b>Temuan utama:</b> indeks kerentanan terhadap tindakan radikal masih berada pada level rentan (43,6 dari indeks 100 dimana tahap amannya maksimal 33,3).</p> <p>b. <b>Simpulan:</b> secara umum Indonesia masih rentan terhadap tindakan radikal. Situasi ini menunjukkan bahwa tingkat resistensi terhadap tindakan radikal belum kuat.</p>
<b>Formulasi Kebijakan</b>	<p>a. Dukungan masyarakat terhadap program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah cukup kuat.</p> <p>b. Dukungan masyarakat memperbolehkan pemerintah mengintervensi pengajaran agama, mengawasi pesantren radikal dan kelompok pengajian radikal, serta ulama yang menyerukan radikalisme.</p>
<b>Catatan Kritis Peneliti</b>	<p>a. Peneliti berpendapat bahwa usaha Lazuardi Birru di dalam mengkonstruksi wacana radikalisme cukup dalam hingga melakukan pengembangan indeks.</p> <p>b. Peneliti melihat proses konseptualisasi dan operasionalisasi indikator radikalisme perlu ditinjau ulang mekanismenya. Hal ini barangkali tidak menjadi persoalan prinsip bagi Lazuardi Birru yang bukan merupakan lembaga riset akademis, melainkan lembaga advokasi. Oleh karena itu, wajar saja kebutuhan akan manfaat risetnya akan lebih diutamakan dibanding proses akademis atau intelektual.</p>

#### IV.2.4. Konstruksi Wacana Radikalisme SETARA Institute

Tema besar riset yang dilakukan SETARA Institute terkait wacana radikalisme mengusung dua hal yaitu: *pertama*, radikalisme agama dan kebebasan berkeyakinan (2010); *kedua*, radikalisme dan terorisme (2012). Kedua tema besar ini dihasilkan dalam bentuk tiga buah buku dimana buku yang pertama dan kedua pada dasarnya memuat substansi yang sama hanya dengan judul yang berbeda. Berikut tiga judul buku yang diterbitkan:

1. Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan/Berkeyakinan
2. Wajah Para ‘Pembela’ Islam: Radikalisme Agama Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan/Berkeyakinan di Jabodetabek dan Jawa Barat
3. Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

Ketiga buku tersebut menggunakan kerangka berpikir yang bersifat pluralis, demokratis, dan humanitarian. Gambaran dua hasil riset SETARA Institute dapat dipaparkan sebagai berikut.

**Pertanyaan penelitian.** Riset pertama yang diulas oleh SETARA Institute mengangkat empat pertanyaan utama. *Pertama*, memuat pertanyaan bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan organisasi Islam radikal? *Kedua*, memuat pertanyaan mengapa organisasi-organisasi Islam radikal tumbuh subur di Jabodetabek dan Jawa Barat? *Ketiga*, memuat pertanyaan bagaimana profil organisasi Islam radikal, genealogi, doktrin ajaran, aktor-aktor, isu sentral, termasuk pola rekrutmen dan pendanaannya? *Keempat*, memuat pertanyaan bagaimana implikasi keberadaan organisasi radikal terhadap jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan? Hipotesis yang dikembangkan dalam riset ini paling tidak melihat bahwa frustrasi yang melanda kaum marjinal di perkotaan merupakan calon ‘mitra’ potensial bagi gerakan-gerakan fundamentalisme yang mengatasnamakan Islam. Oleh karena itu, Islam bukan faktor utama yang menyebabkan terjadinya sikap intoleran, Islam justru berfungsi sebagai katalisator yang suatu saat dapat menjadi kanal bagi frustrasi yang dialami masyarakat.

Riset kedua yang diulas oleh SETARA Institute juga mengangkat empat pertanyaan utama. Pertanyaan pertama mengangkat persoalan bagaimana

dinamika mutakhir organisasi-organisasi radikal di Jawa tengah dan Yogyakarta? Pertanyaan kedua mengangkat persoalan bagaimana relasi dan transformasi kelompok radikal menjadi kelompok teroris? Pertanyaan ketiga mengangkat persoalan mengenai bagaimana persepsi publik tentang organisasi radikal di Jawa tengah dan Yogyakarta? Pertanyaan keempat mengangkat persoalan mengenai apa dan bagaimana kebijakan deradikalisasi yang diterapkan di Indonesia? Hipotesis yang diangkat dalam riset ini memiliki asumsi dasar bahwa intoleransi adalah titik awal dari terorisme, dan terorisme adalah puncak dari intoleransi.

**Dasar teori.** Berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada, kajian riset SETARA Institute mengadopsi beberapa landasan teori sebagai alat analisis sekaligus menjadi dasar bagi definisi konseptual dan operasional dalam survei yang dilakukan. Riset pertama yang dilakukan SETARA Institute menggunakan landasan teori sosiologi perkotaan dan teori keterbelakangan yang disampaikan oleh Ian Roxborough sebagai kerangka berpikir. Namun demikian, riset ini juga menggunakan beberapa terminologi terkait pengertian yang saling tumpang tindih mengenai mengenai fundamentalisme, Islam radikal, Islam militan, Islam skripturalis, yang dikemukakan beberapa pihak. Selain itu terdapat konsepsi mengenai intoleransi aktif dan intoleransi pasif, organisasi Islam radikal, puritanisme, radikalisme, dan kebebasan beragama dikembangkan SETARA Institute dari berbagai pihak. Pada riset kedua, landasan teori yang digunakan lebih banyak menyangkut konsepsi mengenai tipologi kelompok gerakan Islam.

**Definisi konseptual dan operasional.** Fondasi teori yang dipakai dalam riset pertama melihat dalam perspektif sosiologi perkotaan di negara dunia ketiga. Urbanisasi yang terjadi di Jabodetabek dan Jawa Barat menunjukkan sebuah proses yang masih terus berlangsung. Pandangan dan sikap politik yang muncul di kalangan marjinal perkotaan dideskripsikan sebagai sosok “ganas” dan “reaksioner.” Kondisi ini muncul sebagai akibat dari perasaan tertinggal (*sense of deprivation*), frustrasi, dan alienasi. Hal ini berdampak pada situasi yang dapat memicu timbulnya ideologi berbasis identitas dan anti demokrasi dalam bentuk sikap ‘keras’. Salah satu identitas yang mungkin sebagai katalisator bagi ekspresi frustrasi kaum marjinal perkotaan adalah agama. Kecenderungan orang kembali ke agama meningkat ketika mengalami krisis. Oleh karenanya, frustrasi yang melanda

kaum marjinal perkotaan memiliki potensi bagi tumbuh kembangnya gerakan fundamentalisme berbasis identitas keagamaan.

Selain teori sosiologi perkotaan dan keterbelakangan, riset ini juga merangkum terminologi fundamentalisme yang dikemukakan oleh ICG. Karakteristik dasar fundamentalisme, menurut ICG, dapat dilihat dari beberapa hal yakni:

1. Tafsir literer terhadap teks Al-Quran dan Hadist dimana kaum Islam fundamentalis memandang realitas dunia dewasa ini 'tidak Islami'.
2. Tidak ada pemisahan antara domain agama (privat) dan domain negara (publik) dimana kaum fundamentalis tidak dapat menerima prinsip demokrasi yang sekular.
3. Bagi kalangan kaum muslim sendiri tidak ada tempat untuk kebebasan beragama.
4. Segala sesuatu yang 'tidak Islami' perlu digantikan oleh sistem yang 'lebih Islami'.

Deskripsi kategori tersebut tidak hanya menggambarkan bahwa yang disebut kaum fundamentalis pasti menggunakan kekerasan, namun yang termasuk tidak menggunakan kekerasan fisik sekalipun memiliki tendensi intoleran dan eksklusifisme yang cukup kuat. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kalangan fundamentalis Islam di dalamnya terdapat elemen yang tidak mendukung kekerasan.

Konsepsi fundamentalisme satu sama lain, seperti penjelasan sebelumnya, juga mengalami pengertian yang tumpang tindih. Khamami Zada mengambil pendapat Lee Kuan Yew dengan menggunakan istilah gerakan militan Islam ketika melihat gejala militansi Islam secara global yang berasal dari negara-negara seperti Afghanistan dan Pakistan. Adam Schwarz menggunakan istilah Islam militan ketika menyebut DDII dan KISDI sebagai bagian dari gerakan Islam yang mendukung rezim Soeharto di awal 1990-an. Ciri-ciri gerakan ini antara lain: 1) menafsirkan hukum Islam secara kaku; 2) bersikap anti barat dan agama semit; 3) kritis terhadap etnis China dan umat Kristen yang secara ekonomi dan politik lebih mapan ketimbang kelompok Islam militan. William R. Liddle menggunakan istilah Islam skripturalis untuk menunjuk kelompok Islam yang memandang diri

mereka terlibat terutama dalam kegiatan intelektual yang mencoba melakukan pemurnian ajaran Islam. Istilah Islam fundamentalis oleh Oliver Roy dimaksudkan untuk menyebut gerakan Islam yang berorientasi pada pemberlakuan syariat, sedangkan John L. Esposito menambahkan bahwa fundamentalisme dicirikan dengan sifat kembali kepada kepercayaan fundamental agama. Posisi SETARA Institute lebih condong menggunakan terminologi Islam radikal dengan alasan bahwa gagasan dan aksi utama yang mengancam dan menghendaki perubahan empat pilar dasar hidup berbangsa seperti Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI

Penjelasan di atas membuat SETARA Institute menggunakan terminologi intoleransi pasif dan intoleransi aktif untuk menggambarkan spektrum Islam radikal. Istilah toleransi pasif (*passive intolerance*) menunjuk pada kombinasi gagasan fundamental, eksklusivisme, dan intoleransi yang tidak memanifestasi menjadi kekerasan. Intoleransi pasif adalah residu dari keyakinan beragama secara utuh dan interpretasi terhadap ajaran agama sebagai satu-satunya kebenaran bagi dirinya sebagai individu dan makhluk sosial. Sebaliknya, istilah intoleransi aktif (*active intolerance*) adalah jenjang (*grade*) untuk menunjuk gagasan dan cara pandang yang intoleran menjadi kekerasan. Intoleransi aktif bukan saja melihat ajaran agama sebagai satu-satunya kebenaran, melainkan cenderung melihat mereka yang berbeda interpretasi terhadap agama yang sama dan apalagi yang berbeda agama sebagai salah dan sesat. Konsepsi intoleransi pasif hanyalah pada tingkat gagasan, sedangkan intoleransi aktif dapat diterjemahkan menjadi tindakan dan aksi. Jenjang (*grade*) perubahan perilaku keagamaan ini dapat digambarkan mulai dari yang terendah yaitu puritanisme menuju pada fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme.

Konsepsi puritanisme dalam hal ini adalah pandangan yang melihat bahwa ajaran agama yang dianut mencakup ruang dan waktu serta berlaku sepanjang masa dengan mengabaikan konteks, struktur sosial, dan kultur masyarakat dimana ia berada. Agama, dalam pandangan puritanisme, adalah sebuah totalitas yang mengatur segala aspek kehidupan. Lain hal dengan puritanisme, konsepsi radikalisme dalam studi ilmu sosial diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi terhadap realitas sosial

atau ideologi yang dianut. Terminologi radikal dan radikalisme sebenarnya merupakan konsep yang netral dan tidak bersifat *pejorative* (merendahkan). Perubahan radikal bisa dicapai melalui cara damai dan persuasif, tetapi bisa juga dengan kekerasan. Penting dibedakan antara kekerasan fisik dengan kekerasan simbolik atau wacana. Banyak pihak menekankan kekerasan hanya dalam bentuk fisik seperti penyerangan, perusakan, pemukulan, dan sebagainya tetapi mengabaikan kekerasan simbolik. Provokasi, pelabelan, stigmatisasi, orasi agitatif, dan sebagainya cenderung disepelekan dan tidak dilihat sebagai kondisi yang memungkinkan eskalasi menuju kekerasan fisik. Selain itu, ada pula terminologi mengenai terorisme yang acapkali pengertiannya masih diperdebatkan. Paling tidak dapat diambil definisi dasarnya bahwa penggunaan kekerasan fisik secara luas dan massif untuk mencapai tujuan adalah salah satu kategori terorisme. Kekerasan yang dimaksud adalah untuk menciptakan teror dan rasa takut pada lawan politik dan lingkungan sosial di sekitarnya agar tidak berdaya dan tunduk.

Konsepsi terakhir yang digunakan pada riset pertama adalah mengenai kebebasan beragama. Konsepsi ini diambil dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) pasal 18 yang mencakup:

1. Kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan mengejewantahkan agama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadah, penaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tanpa pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama/kepercayaan sesuai pilihannya.
3. Kebebasan untuk mengejewantahkan agama/kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum.
4. Negara-negara pihak kovenan berjanji menghormati kebebasan orang tua dan bila diakui wali hukum yang sah untuk memastikan bahwa agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Fondasi teoretis lain dari riset kedua penekanannya pada tipologi kelompok gerakan Islam. Ada empat tipologi kelompok gerakan Islam yang dielaborasi SETARA Institute. *Pertama*, kelompok Islam moderat yang memiliki tiga ciri yaitu: 1) tidak menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangan Islam; 2)

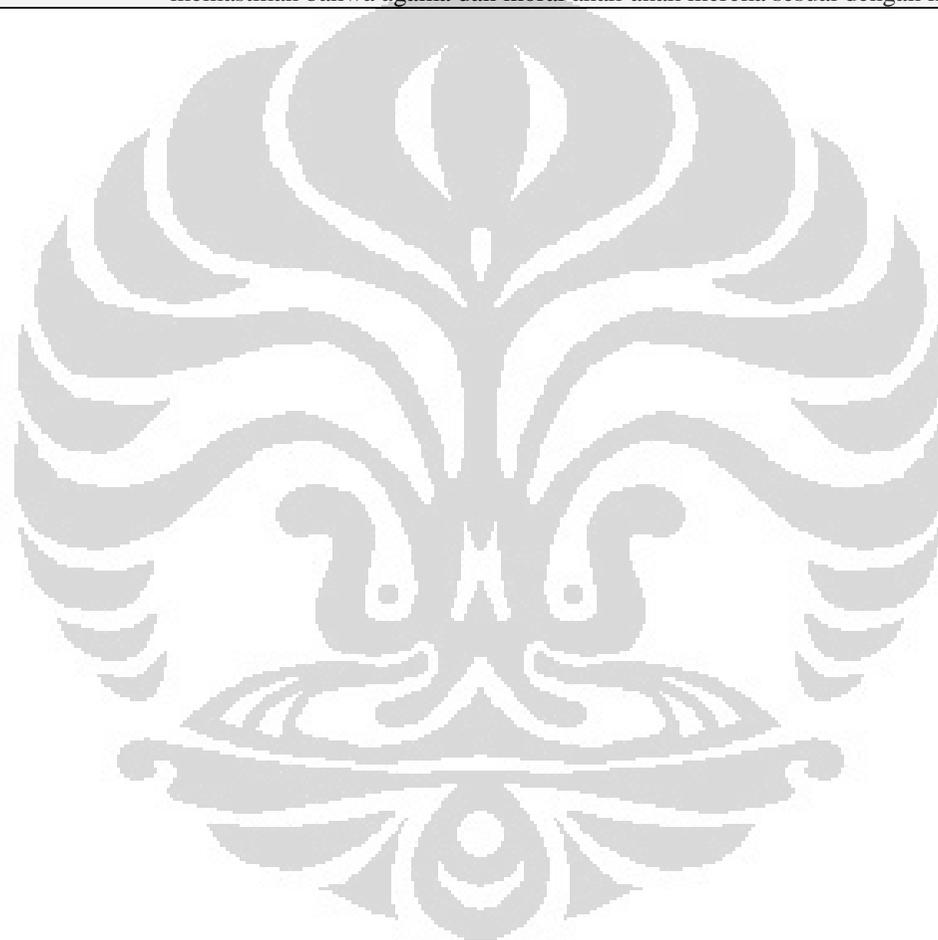
akomodatif terhadap konsep negara-bangsa modern; 3) organisasi bersifat terbuka (contohnya NU dan Muhammadiyah). *Kedua*, kelompok Islam radikal transnasional yang memiliki empat ciri yaitu: 1) berjuang melakukan perubahan sistem sosial dan politik; 2) tidak menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangan Islam; 3) perjuangannya bersifat ideologis; 4) organisasi bersifat terbuka dan lintas batas negara (contohnya HTI). *Ketiga*, kelompok Islam radikal lokal yang memiliki empat ciri yaitu: 1) menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangannya jika tidak terjadi perubahan di masyarakat; 2) tidak merencanakan pembunuhan; 3) perjuangannya ada yang bersifat pragmatis dan ideologis; 4) organisasi bersifat terbuka dan hanya ada di Indonesia (contohnya FPI). *Keempat*, kelompok Islam jihadis yang memiliki empat ciri yaitu: 1) menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangannya akibat ketidakadilan penguasa terhadap umat Islam; 2) menggunakan pengeboman sebagai strategi penyerangan, bahkan dalam bentuk bom bunuh diri; 3) organisasi bersifat tertutup (bawah tanah); 4) melakukan penyerangan terhadap aparatus negara (contohnya Jamaah Islamiyah). Gambaran ringkas definisi konseptual dan operasional dari konstruksi wacana radikalisme yang dikembangkan SETARA Institute dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Ikhtisar Definisi Konseptual dan Operasional Mengenai Wacana Radikalisme Yang Dikembangkan SETARA Institute**

TEORI	TOKOH	DEFINISI KONSEPTUAL & OPERASIONAL
<b>Sosiologi perkotaan &amp; keterbelangan</b>	Ian Roxborough	Urbanisasi di negara dunia ketiga berdampak pada munculnya kelompok marjinal perkotaan yang memiliki pandangan dan sikap politik “ganas” dan “reaksioner”. Kondisi ini muncul sebagai akibat dari perasaan tertinggal ( <i>sense of deprivation</i> ), frustrasi, dan alienasi. Frustrasi yang melanda kaum marjinal perkotaan memiliki potensi bagi tumbuh kembangnya gerakan fundamentalisme berbasis identitas keagamaan
<b>Fundamentalisme</b>	1. ICG  2. Oliver Roy 3. John L. Esposito	1. <b>Fundamentalisme</b> memiliki empat karakteristik dasar: a. Tafsir literer terhadap teks Al-Quran & Hadist dimana kaum Islam fundamentalis memandang realitas dunia dewasa ini ‘tidak Islami’. b. Tidak ada pemisahan antara domain agama (privat) dan domain negara (publik) dimana kaum fundamentalis tidak dapat menerima prinsip demokrasi yang sekular. c. Bagi kalangan kaum muslim sendiri tidak ada tempat untuk kebebasan beragama. d. Segala sesuatu yang ‘tidak Islami’ perlu digantikan oleh sistem yang ‘lebih Islami’. Catatan: yang disebut kaum fundamentalis bukan berarti hanya yang menggunakan kekerasan, namun yang termasuk tidak menggunakan kekerasan fisik sekalipun memiliki tendensi intoleran dan eksklusifisme yang cukup kuat 2. <b>Fundamentalisme</b> : gerakan Islam yang berorientasi pada pemberlakuan syariat 3. <b>Fundamentalisme</b> : dicirikan dengan sifat kembali kepada kepercayaan fundamental agama
<b>Islam Militan</b>	1. Khamami Zada 2. Adam Schwarz	1. <b>Islam militan</b> : gejala militansi Islam secara global yang berasal dari negara-negara seperti Afghanistan dan Pakistan 2. <b>Islam militan</b> : menyebut DDII dan KISDI sebagai bagian dari gerakan Islam yang mendukung rezim Soeharto di awal 1990-an, cirinya: a. Menafsirkan hukum Islam secara kaku b. Bersikap anti barat dan agama semit c. Kritis terhadap etnis China dan umat Kristen yang secara ekonomi dan politik lebih mapan ketimbang kelompok Islam militan
<b>Islam Skripturalis</b>	William R. Liddle	<b>Islam skripturalis</b> : menunjuk kelompok Islam yang memandang diri mereka terlibat terutama dalam kegiatan intelektual yang mencoba melakukan pemurnian ajaran Islam
<b>Islam radikal</b>	SETARA Institute	<b>Islam radikal</b> : gagasan dan aksi utama yang mengancam dan menghendaki perubahan empat pilar dasar hidup berbangsa seperti Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI
<b>Intoleransi</b>	SETARA Institute	1. <b>Intoleransi pasif</b> ( <i>passive intolerance</i> ): menunjuk pada kombinasi gagasan fundamental, eksklusivisme, dan intoleransi yang tidak memanifestasi menjadi kekerasan 2. <b>Intoleransi aktif</b> ( <i>active intolerance</i> ): jenjang ( <i>grade</i> ) untuk menunjuk gagasan dan cara pandang yang intoleran menjadi kekerasan <b>Catatan</b> : Konsepsi intoleransi pasif hanyalah pada tingkat gagasan, sedangkan intoleransi aktif dapat diterjemahkan menjadi tindakan dan aksi. Jenjang ( <i>grade</i> ) perubahan perilaku keagamaan ini dapat digambarkan mulai dari yang

TEORI	TOKOH	DEFINISI KONSEPTUAL & OPERASIONAL
		terendah yaitu puritanisme menuju pada fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme
<b>Puritanisme</b>	SETARA Institute	<b>Puritanisme:</b> pandangan yang melihat bahwa ajaran agama yang dianut mencakup ruang dan waktu serta berlaku sepanjang masa dengan mengabaikan konteks, struktur sosial, dan kultur masyarakat dimana ia berada. Agama, dalam pandangan puritanisme, adalah sebuah totalitas yang mengatur segala aspek kehidupan.
<b>Radikalisme</b>	SETARA Institute	<b>Radikalisme:</b> dalam studi ilmu sosial diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianut. Perubahan radikal bisa dicapai melalui cara damai dan persuasif, tetapi bisa juga dengan kekerasan.
<b>Terorisme</b>	SETARA Institute	<b>Terorisme:</b> penggunaan kekerasan fisik secara luas dan massif untuk mencapai tujuan adalah salah satu kategori terorisme. Kekerasan yang dimaksud adalah untuk menciptakan teror dan rasa takut pada lawan politik dan lingkungan sosial di sekitarnya agar tidak berdaya dan tunduk.
<b>Tipologi kelompok gerakan Islam</b>	SETARA Institute	<p><b>Kelompok gerakan Islam</b> terdiri dari empat macam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kelompok Islam moderat</b>, cirinya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangan Islam</li> <li>b. akomodatif terhadap konsep negara-bangsa modern</li> <li>c. organisasi bersifat terbuka</li> </ol> </li> <li>2. <b>Kelompok Islam radikal transnasional</b>, cirinya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berjuang melakukan perubahan sistem sosial dan politik</li> <li>b. tidak menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangan Islam</li> <li>c. perjuangannya bersifat ideologis</li> <li>d. organisasi bersifat terbuka dan lintas batas negara</li> </ol> </li> <li>3. <b>Kelompok Islam radikal lokal</b>, cirinya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangannya jika tidak terjadi perubahan di masyarakat</li> <li>b. tidak merencanakan pembunuhan</li> <li>c. perjuangannya ada yang bersifat pragmatis dan ideologis</li> <li>d. organisasi bersifat terbuka dan hanya ada di Indonesia</li> </ol> </li> <li>4. <b>Kelompok Islam jihadis</b>, cirinya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangannya akibat ketidakadilan penguasa terhadap umat Islam</li> <li>b. menggunakan pengeboman sebagai strategi penyerangan, bahkan dalam bentuk bom bunuh diri</li> <li>c. organisasi bersifat tertutup (bawah tanah)</li> <li>d. melakukan penyerangan terhadap aparatus negara</li> </ol> </li> </ol>
<b>Kebebasan beragama</b>	Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) pasal 18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan mengejewantahkan agama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadah, penaatan, pengamalan, dan pengajaran.</li> <li>2. Tanpa pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama/kepercayaan sesuai pilihannya.</li> <li>3. Kebebasan untuk mengejewantahkan agama/kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan</li> </ol>

TEORI	TOKOH	DEFINISI KONSEPTUAL & OPERASIONAL
		<p>hukum.</p> <p>4. Negara-negara pihak kovenan berjanji menghormati kebebasan orang tua dan bila diakui wali hukum yang sah untuk memastikan bahwa agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.</p>



**Metode.** SETARA Institute di dalam melakukan kedua kajian memadukan dua metode sekaligus yakni kuantitatif dan kualitatif. Riset pertama mengembangkan teknik pengumpulan data survei di dalam metode kuantitatifnya, sedangkan untuk metode kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD). Riset kedua mengembangkan teknik pengumpulan data survei untuk metode kuantitatif dan teknik wawancara mendalam ke beberapa narasumber relevan. Salah satu catatan menarik adalah penggunaan *covert in-depth interview* pada riset pertama untuk menggali informasi dari informan yang memiliki pandangan atau sikap yang sensitif terkait posisi informan di dalam isu mengenai radikalisme. Beberapa informan memiliki keterkaitan dengan beberapa kelompok gerakan Islam radikal, sehingga pemilihan teknik pengumpulan data cukup penting dalam memperoleh informasi.

**Indikator.** Konstruksi wacana radikalisme yang dikembangkan oleh SETARA Institute di kedua riset memiliki elemen indikator yang berbeda. Riset pertama mengelaborasi indikator dari dimensi isu mengenai intoleransi (pasif dan aktif), konflik dan kekerasan, Pancasila, terorisme, hukum sekuler dan syariat Islam, serta demokrasi dan khilafah. Berbagai konsep dan isu tersebut akan menggambarkan radikalisme agama yang muncul di kalangan masyarakat. Berikut beberapa indikator radikalisme agama berdasarkan beberapa dimensi isu:

1. Intoleransi (pasif dan aktif), indikatornya:
  - a. Bertetangga dengan orang yang berbeda suku dan agama
  - b. Memasuki perkumpulan berbeda suku dan agama
  - c. Pertimbangan suku dan agama dalam memilih teman
  - d. Menikah beda suku dan agama
  - e. Sikap terhadap anggota keluarga yang berpindah agama
  - f. Pandangan terhadap orang yang tidak beragama
  - g. Persetujuan terhadap rumah ibadah agama lain
  - h. Pandangan terhadap adanya agama lain di luar enam agama
  - i. Pandangan terhadap Ahmadiyah
2. Konflik dan kekerasan, indikatornya:
  - a. Persetujuan terhadap organisasi radikal yang menggunakan kekerasan

- b. Penilaian terhadap organisasi radikal yang menggunakan kekerasan
  - c. Persetujuan terhadap aksi memberantas aliran sesat dan maksiat
3. Pancasila, indikatornya:
- a. Urgensi pancasila
  - b. Kesungguhan penyelenggara negara dalam menjalankan Pancasila
4. Terorisme, indikatornya:
- a. Hubungan antara organisasi radikal dan terorisme
  - b. Bentuk hubungan antara organisasi radikal dan terorisme
5. Hukum sekuler dan syariat Islam
- a. Syariat Islam dijadikan dasar penyelenggaraan negara
  - b. Persetujuan pemberlakuan hukum rajam di Indonesia.
6. Demokrasi dan khilafah, indikatornya:
- a. Persetujuan terhadap sistem khilafah
  - b. Persetujuan demokrasi produk barat

Sedikit berbeda dengan riset pertama, riset kedua lebih memberikan tekanan pada akseptabilitas dan respon terhadap gerakan Islam radikal. Berikut ini beberapa indikator terkait gerakan Islam radikal:

1. Ekspresi terhadap keberadaan kelompok Islam radikal
2. Kelompok Islam radikal menimbulkan ketidaktertaman warga
3. Sikap kelompok Islam radikal terhadap non muslim
4. Keberadaan kelompok Islam radikal bagi kalangan non muslim
5. Tingkat dukungan menjadi anggota kelompok Islam radikal
6. Bentuk dukungan (memberikan sumbangan) terhadap kelompok Islam radikal
7. Tingkat dukungan terhadap keluarga atau teman dekat yang menjadi anggota/pengikut kelompok Islam radikal
8. Tingkat dukungan terhadap kemungkinan diterapkannya Perda Syariah
9. Kelompok Islam radikal membuat citra agama Islam menjadi negatif

**Formulasi kebijakan.** Riset yang dilakukan SETARA Institute keduanya memberikan formulasi kebijakan yang bervariasi. Riset pertama merekomendasikan delapan langkah yang harus dilakukan negara untuk mengurangi pengaruh organisasi Islam radikal terutama terkait program

deradikalisasi. *Pertama*, melakukan penegakan hukum terhadap setiap tindak kekerasan atas nama agama. *Kedua*, menyusun strategi komprehensif deradikalisasi dengan membentuk kanal politik bagi elit dan kanal ekonomi bagi anggota organisasi Islam radikal. *Ketiga*, meningkatkan pendidikan kewarganegaraan dan pluralisme. *Keempat*, melakukan review dan atau pencabutan terhadap peraturan perundangan yang diskriminatif. *Kelima*, membentuk UU yang menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan. *Keenam*, menghentikan akomodasi politik terhadap kelompok Islam radikal. *Ketujuh*, memberikan perlindungan holistik kepada kelompok minoritas. *Kedelapan*, menegaskan kembali empat pilar hidup berbangsa dalam berbagai peraturan perundangan, kebijakan, dan perilaku bangsa.

Riset kedua mengusulkan formulasi kebijakan terkait program deradikalisasi. Ada tiga poin rekomendasi terkait program deradikalisasi. Poin pertama, deradikalisasi harus memperhatikan konteks keindonesiaan. Maksudnya program deradikalisasi harus dilihat dalam konteks perspektif Indonesia sebagai korban terorisme dan perspektif Indonesia sebagai negara majemuk. Poin kedua, memperhatikan tiga anasir deradikalisasi yaitu: 1) masyarakat umum, khususnya umat Islam; 2) kelompok radikal; 3) kelompok jihadis atau teroris. Poin ketiga, memfokuskan arah deradikalisasi.

**Simpulan.** Riset pertama SETARA Institute sampai pada simpulan bahwa pandangan keagamaan masyarakat di Jabodetabek memperlihatkan intoleransi yang cukup tinggi. Namun demikian, sikap atau pandangan ini tidak dapat dikatakan sebagai fundamentalis/radikal, melainkan hanya berpotensi untuk meningkat ekskalasinya menjadi radikal. Simpulan ini didukung dari temuan utama bahwa hanya 8,5% masyarakat yang setuju terhadap organisasi radikal yang menggunakan kekerasan, sedangkan mayoritas sebanyak 87,4% tidak setuju. Selain itu, jejaring organisasi radikal berhasil memanfaatkan kondisi alienasi dan frustrasi sosial masyarakat urban untuk berhimpun dalam wadah identitas agama: Islam.

Riset kedua SETARA Institute memiliki simpulan bahwa organisasi radikal dan teroris menunjukkan relasi yang cukup dekat. Namun demikian, tidak ditemukan terjadinya transformasi institusional organisasi Islam radikal menjadi

teroris. Akan tetapi, beberapa individu yang sebelumnya menjadi bagian dari organisasi radikal pada tahap berikutnya bertransformasi secara individual menjadi teroris. Temuan utama riset ini menggambarkan fakta bahwa tingkat dukungan terhadap kelompok Islam radikal cukup rendah yakni hanya 4%, mayoritas yang tidak mendukung sebanyak 78,7%.

**Catatan kritis.** Ada beberapa catatan kritis yang peneliti lihat dari konstruksi wacana radikalisme yang dikembangkan SETARA Institute. *Pertama*, lembaga ini cukup berani, atau bisa dibilang provokatif, di dalam mengkonstruksi wacana radikalisme. Derajat radikalisme yang dikonstruksi lembaga ini seolah-olah memberikan sebuah justifikasi bahwa antara intoleransi pasif dan aktif di dalamnya terdapat kategori yang menunjukkan tahapan menuju terorisme mulai dari puritanisme, fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme. Tahapan ini seperti hendak mengambil sebuah kesimpulan bahwa aksi terorisme sebetulnya memiliki akar dari sikap intoleran.

*Kedua*, peneliti melihat lembaga ini di dalam mengkonstruksi wacana radikalisme tidak terlalu ketat terutama mengelaborasi beragam definisi konseptual menjadi definisi operasional dan menyusun indikator yang tepat. Oleh karena itu, wajar dari beberapa pertanyaan hasil survei masih banyak ditemukan jawaban responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur instrumen penelitian belum diuji validitas dan realibilitasnya. Sebagai penutup, deskripsi konstruksi wacana radikalisme yang dilakukan SETARA Institute peneliti ringkas dalam bentuk tabel berikut:

**Tabel 10**  
**Ikhtisar Konstruksi Wacana Radikalisme Yang Dikembangkan SETARA Institute**

KONSTRUKSI RADIKALISME	DESKRIPSI	
	RISET PERTAMA	RISET KEDUA
<b>Pertanyaan Penelitian</b>	<p>a. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan organisasi Islam radikal?</p> <p>b. Mengapa organisasi-organisasi Islam radikal tumbuh subur di Jabodetabek dan Jawa Barat?</p> <p>c. Bagaimana profil organisasi Islam radikal, genealogi, doktrin ajaran, aktor-aktor, isu sentral, termasuk pola rekrutmen dan pendanaannya?</p> <p>d. Bagaimana implikasi keberadaan organisasi radikal terhadap jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan?</p> <p><b>Hipotesis:</b> frustrasi yang melanda kaum marjinal di perkotaan merupakan calon 'mitra' potensial bagi gerakan-gerakan fundamentalisme yang mengatasnamakan Islam</p>	<p>a. Bagaimana dinamika mutakhir organisasi-organisasi radikal di Jawa tengah dan Yogyakarta?</p> <p>b. Bagaimana relasi dan transformasi kelompok radikal menjadi kelompok teroris?</p> <p>c. Persepsi publik tentang organisasi radikal di Jawa tengah dan Yogyakarta?</p> <p>d. Apa dan bagaimana kebijakan deradikalisasi yang diterapkan di Indonesia?</p> <p><b>Hipotesis:</b> intoleransi adalah titik awal dari terorisme, dan terorisme adalah puncak dari intoleransi</p>
<b>Dasar Teori</b>	<p>1. Ian Roxborough tentang teori keterbelakangan dan sosiologi perkotaan</p> <p>2. Oliver Roy, John L. Esposito, &amp; ICG tentang fundamentalisme Islam</p> <p>3. Khamami Zada &amp; Adam Schwarz tentang Islam militan</p> <p>4. William R. Liddle tentang Islam skripturalis</p>	<p>Pengembangan tipologi gerakan Islam yang dilakukan oleh SETARA Institute</p>
<b>Definisi Konseptual &amp; Operasional</b>	<p>Lihat penjelasan tabel sebelumnya</p>	<p>Lihat penjelasan tabel sebelumnya</p>
<b>Metode Penelitian</b>	<p>Perpaduan metode kuantitatif (survei) dan kualitatif (wawancara mendalam dan FGD)</p>	<p>Perpaduan metode kuantitatif (survei) dan kualitatif (wawancara mendalam dan <i>covert in-depth interview</i>)</p>
<b>Indikator</b>	<p>Elaborasi kosepsi mengenai <b>radikalisme agama</b> yang terdiri atas dimensi isu:</p> <p>1. <b>Intoleransi</b>, indikatornya:</p> <p>a. Bertetangga dengan orang yang berbeda suku dan agama</p> <p>b. Memasuki perkumpulan berbeda suku dan agama</p> <p>c. Pertimbangan suku dan agama dalam memilih teman</p> <p>d. Menikah beda suku dan agama</p> <p>e. Sikap terhadap anggota keluarga yang berpindah agama</p>	<p>Penekanan pada konsepsi <b>gerakan Islam radikal</b> dengan indikator:</p> <p>1. Ekspresi terhadap keberadaan kelompok Islam radikal</p> <p>2. Kelompok Islam radikal menimbulkan ketidaktenteraman warga</p> <p>3. Sikap kelompok Islam radikal terhadap non muslim</p> <p>4. Keberadaan kelompok Islam radikal bagi kalangan non muslim</p> <p>5. Tingkat dukungan menjadi anggota kelompok Islam radikal</p> <p>6. Bentuk dukungan (memberikan sumbangan) terhadap kelompok</p>

KONSTRUKSI RADIKALISME	DESKRIPSI	
	RISET PERTAMA	RISET KEDUA
	f. Pandangan terhadap orang yang tidak beragama g. Persetujuan terhadap rumah ibadah agama lain h. Pandangan terhadap adanya agama lain di luar enam agama i. Pandangan terhadap Ahmadiyah 2. <b>Konflik &amp; kekerasan</b> , indikatornya: a. Persetujuan terhadap organisasi radikal yang menggunakan kekerasan b. Penilaian terhadap organisasi radikal yang menggunakan kekerasan c. Persetujuan terhadap aksi memberantas aliran sesat dan maksiat 3. <b>Pancasila</b> , indikatornya: a. Urgensi pancasila b. Kesungguhan penyelenggara negara dalam menjalankan Pancasila 4. <b>Terorisme</b> , indikatornya: a. Hubungan antara organisasi radikal dan terorisme b. Bentuk hubungan antara organisasi radikal dan terorisme 5. <b>Hukum sekuler &amp; syariat Islam</b> , indikatornya: a. Syariat Islam dijadikan dasar penyelenggaraan negara b. Persetujuan pemberlakuan hukum rajam di Indonesia 6. <b>Demokrasi &amp; khilafah</b> , indikatornya: a. Persetujuan terhadap sistem khilafah b. Persetujuan demokrasi produk barat	Islam radikal 7. Tingkat dukungan terhadap keluarga atau teman dekat yang menjadi anggota/pengikut kelompok Islam radikal 8. Tingkat dukungan terhadap kemungkinan diterapkannya Perda Syariah 9. Kelompok Islam radikal membuat citra agama Islam menjadi negatif
<b>Simpulan Riset</b>	a. <b>Temuan utama:</b> hanya 8,5% masyarakat yang setuju terhadap organisasi radikal yang menggunakan kekerasan, sedangkan mayoritas sebanyak 87,4% tidak setuju. Selain itu, jejaring organisasi radikal berhasil memanfaatkan kondisi alienasi dan frustrasi sosial masyarakat urban untuk berhimpun dalam wadah identitas agama: Islam. b. <b>Simpulan:</b> pandangan keagamaan masyarakat di Jabodetabek memperlihatkan intoleransi yang cukup tinggi. Namun demikian, sikap atau pandangan ini tidak dapat dikatakan sebagai fundamentalis/radikal, melainkan hanya berpotensi	a. <b>Temuan utama:</b> tingkat dukungan terhadap kelompok Islam radikal cukup rendah yakni hanya 4%, mayoritas yang tidak mendukung sebanyak 78,7%. b. <b>Simpulan:</b> organisasi radikal dan teroris menunjukkan relasi yang cukup dekat. Namun demikian, tidak ditemukan terjadinya transformasi institusional organisasi Islam radikal menjadi teroris. Akan tetapi, beberapa individu yang sebelumnya menjadi bagian dari organisasi radikal pada tahap berikutnya bertransformasi secara individual menjadi teroris

KONSTRUKSI RADIKALISME	DESKRIPSI	
	RISET PERTAMA	RISET KEDUA
	untuk meningkat ekskalasinya menjadi radikal	
<b>Formulasi Kebijakan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penegakan hukum terhadap setiap tindak kekerasan atas nama agama.</li> <li>2. Menyusun strategi komprehensif deradikalisasi dengan membentuk kanal politik bagi elit dan kanal ekonomi bagi anggota organisasi Islam radikal.</li> <li>3. Meningkatkan pendidikan kewarganegaraan dan pluralisme.</li> <li>4. Melakukan review dan atau pencabutan terhadap peraturan perundangan yang diskriminatif.</li> <li>5. Membentuk UU yang menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan.</li> <li>6. Menghentikan akomodasi politik terhadap kelompok Islam radikal.</li> <li>7. Memberikan perlindungan holistik kepada kelompok minoritas.</li> <li>8. Menegaskan kembali empat pilar hidup berbangsa dalam berbagai peraturan perundangan, kebijakan, dan perilaku bangsa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program deradikalisasi harus memperhatikan konteks keindonesiaan. Maksudnya program deradikalisasi harus dilihat dalam konteks perspektif Indonesia sebagai korban terorisme dan perspektif Indonesia sebagai negara majemuk.</li> <li>2. Memperhatikan tiga anasir deradikalisasi yaitu: 1) masyarakat umum, khususnya umat Islam; 2) kelompok radikal; 3) kelompok jihadis atau teroris.</li> <li>3. Memfokuskan arah deradikalisasi.</li> </ol>
<b>Catatan kritis peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga ini cukup berani, atau bisa dibilang provokatif, di dalam mengkonstruksi wacana radikalisme. Derajat radikalisme yang dikonstruksi lembaga ini seolah-olah memberikan sebuah justifikasi bahwa antara intoleransi pasif dan aktif di dalamnya terdapat kategori yang menunjukkan tahapan menuju terorisme mulai dari puritanisme, fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme. Tahapan ini seperti hendak mengambil sebuah kesimpulan bahwa aksi terorisme sebetulnya memiliki akar dari sikap intoleran.</li> <li>2. Lembaga ini di dalam mengkonstruksi wacana radikalisme tidak terlalu ketat terutama mengelaborasi beragam definisi konseptual menjadi definisi operasional dan menyusun indikator yang tepat. Oleh karena itu, wajar dari beberapa pertanyaan hasil survei masih banyak ditemukan jawaban responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur instrumen penelitian belum diuji validitas dan realibilitasnya.</li> </ol>	

Wacana radikalisme yang dikembangkan oleh beberapa agen di atas menunjukkan fakta yang menarik terkait temuan utama dan simpulan penelitian yang diambil. Peneliti melihat antara temuan dan simpulan penelitian satu sama lain tidak hanya menggambarkan konstruksi pengetahuan mengenai wacana radikalisme, melainkan menempatkan Islam sebagai sebuah variabel yang berdiri berhadapan dengan nilai-nilai lain seperti demokrasi dan toleransi—yang secara implisit merupakan nilai-nilai yang dianut barat. Sebelum peneliti melakukan analisis, tabel berikut menggambarkan ikhtisar temuan dan simpulan penelitian dari beberapa agen:

**Tabel 11**  
**Ikhtisar Temuan dan Simpulan Penelitian Beberapa Agen**

Agen	Temuan	Simpulan
<b>CSRC</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah muslim yang memiliki orientasi Islam kultural (80,1%) lebih besar daripada muslim yang memiliki orientasi Islamisme (19,9%)</li> <li>2. Mayoritas persepsi <i>takmir</i> masjid terhadap lima isu ideologis utama cenderung moderat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simbol-simbol Islam hadir semakin mencolok di ruang publik Indonesia yang sedang mengalami euforia demokrasi</li> <li>2. Beberapa masjid di Solo untuk derajat tertentu telah dan sedang digunakan sebagai kendaraan dalam menyuarakan gagasan Islam radikal</li> </ol>
<b>Lazuardi Birru</b>	Indeks kerentanan terhadap tindakan radikalisme keagamaan masih berada pada level rentan (43,6 dari indeks 100 dimana tahap amannya maksimal 33,3)	Secara umum Indonesia masih rentan terhadap tindakan radikalisme keagamaan. Situasi ini menunjukkan bahwa tingkat resistensi terhadap tindakan radikal belum kuat.
<b>SETARA Institute</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanya 8,5% masyarakat yang setuju terhadap organisasi radikal yang menggunakan kekerasan, sedangkan mayoritas sebanyak 87,4% tidak setuju</li> <li>2. Tingkat dukungan terhadap kelompok Islam radikal cukup rendah yakni hanya 4%, mayoritas yang tidak mendukung sebanyak 78,7%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pandangan keagamaan masyarakat di Jabodetabek memperlihatkan intoleransi yang cukup tinggi</li> <li>2. Organisasi radikal dan teroris menunjukkan relasi yang cukup dekat. Namun demikian, tidak ditemukan terjadinya transformasi institusional organisasi Islam radikal menjadi teroris. Akan tetapi, beberapa individu yang sebelumnya menjadi bagian dari organisasi radikal pada tahap berikutnya bertransformasi secara individual menjadi teroris</li> </ol>

Tabel simpulan di atas menunjukkan bahwa gagasan mengenai konstruksi wacana radikalisme—secara implisit—melekat dengan Islam dan seolah-olah hal ini memiliki oposisi biner dengan nilai demokrasi (yang diusung oleh barat). Walaupun hasil temuan utama riset CSRC dan SETARA Institute menemukan

bahwa masyarakat masih memiliki orientasi yang bersifat kultural (moderat) dan jauh dari pandangan radikal, tetapi simpulan yang diambil justru menunjukkan bahwa Islam menjadi artikulator utama dalam menyumbang orientasi masyarakat yang bersifat radikal. Lazuardi Birru pun tidak jauh berbeda hasil risetnya walaupun tidak secara eksplisit menjadikan variabel Islam menjadi pokok simpulannya. Namun, apabila diperhatikan lebih cermat, indikator yang digunakan oleh Lazuardi Birru untuk mengukur radikalisme keagamaan justru memasukan paling tidak tiga gagasan tentang Islam di dalamnya (agenda Islamis, dukungan dan keanggotaan organisasi Islamis).

Peneliti melihat gagasan mengenai wacana radikalisme yang dibangun oleh ketiga agen seolah-olah mengamini gagasan Huntington (1996) tentang benturan peradaban—antara Islam dan Barat—meskipun secara implisit. Islam memiliki porsi penting di dalam simpulan di setiap hasil riset. Oleh karena itu, pembahasan mengenai wacana radikalisme tidak bisa lepas dari gagasan tentang Islam. Mengapa hal ini dimungkinkan? Peneliti berpendapat hal ini terkait genealogi gagasan mengenai wacana radikalisme keagamaan yang dapat ditelusuri secara historis. Namun demikian, seperti peneliti sampaikan pada bagian latar belakang, pasca perang dingin merupakan momentum sejarah yang menentukan berkembangnya wacana radikalisme Islam. Kondisi ini yang membuat Huntington mengemukakan tesisnya mengenai benturan peradaban. Pasca argumentasi Huntington, muncul karya lain—baik yang memberikan kritik maupun menyetujui pendapatnya—yang disampaikan oleh berbagai intelektual mulai dari Edward said, Bernard Lewis, Gilles Kepel, John L. Esposito, Oliver Roy, Mark Jurgensmeyer, Immanuel Sivan, Adam Schwarz dan lainnya. Gagasan yang dikembangkan oleh beberapa intelektual inilah yang diadopsi oleh beberapa agen untuk mengkonstruksi wacana radikalisme di Indonesia—terutama pasca-Orde Baru.

Implikasi adopsi gagasan para intelektual (yang semuanya dari barat) mengenai wacana radikalisme inilah yang membuat agen-agen di Indonesia berani mengemukakan wacananya secara otoritatif. Agen-agen yang ada dianalogikan sebagai perpanjangan tangan dari gagasan wacana radikalisme yang berkembang

di Barat. Peneliti berpendapat, pada konteks inilah analisis Foucault bisa lebih kontributif di dalam menjelaskan wacana radikalisme (kelompok Islam).

Proposisi Foucault tentang arkeologi ilmu pengetahuan dan genealogi kekuasaan menyatakan bahwa pengetahuan diproduksi dan dikontrol oleh institusi atau aparatus yang memiliki otoritas yang bersifat dominatif. Produksi atas bentuk-bentuk wacana pengetahuan tentang radikalisme telah menciptakan sebuah sistem dominasi kekuasaan atas ilmu pengetahuan yang dimiliki institusi atau aparatus tertentu—dalam hal ini para agen.

Pada konteks ketiga agen, otoritas yang bersifat dominatif ini diperoleh tidak hanya dengan mengadopsi gagasan intelektual dari barat, melainkan secara finansial ketiga agen juga mendapatkan sokongan dana dari lembaga donor internasional yang berasal dari Barat.<sup>32</sup> Pengetahuan mengenai wacana radikalisme yang dikonstruksi oleh setiap agen sebetulnya bukan sebuah gagasan yang bersifat orisinal, melainkan hasil dari reproduksi struktur pengetahuan terkait radikalisme yang telah dikembangkan oleh beberapa intelektual sebelumnya, terutama di negara-negara Barat. Oleh karena itu, seolah-oleh setiap agen yang ada terkesan sebagai perpanjangan tangan gagasan mengenai wacana radikalisme yang telah berkembang sebelumnya. Belum lagi terdapat bentuk bantuan dana yang mendukung riset yang dilakukan oleh agen yang ada. Kondisi ini semakin menunjukkan bahwa agen yang ada merupakan bagian dari institusi yang terbentuk untuk mendominasi wacana radikalisme yang ada di Indonesia.

Dominasi ketiga agen sebagai institusi yang memproduksi dan mengontrol wacana radikalisme lainnya dapat dilihat dari digunakannya hasil riset mereka dalam berbagai forum yang diadakan baik oleh BNPT maupun beberapa NGO. Belum lagi media massa (baik cetak maupun elektronik) seringkali mengutip hasil penelitian ketiga agen untuk memperoleh data faktual dalam pemberitaannya. Hal ini semakin menegaskan bahwa posisi agen dalam mengkonstruksi pengetahuan tentang wacana radikalisme memiliki sifat yang otoritatif. Berita dan sumber informasi di berbagai kegiatan seminar seringkali mengundang agen-agen yang

<sup>32</sup> Salah satu hasil obrolan penulis dengan salah satu direktur dari ketiga agen mengungkapkan bahwa tidak bisa dipungkiri sumber dana riset mereka juga didukung oleh beberapa lembaga donor internasional di Amerika dan Jerman. Namun, di dalam wawancara informan tidak mengungkapkan apa nama lembaga donornya.

ada untuk memaparkan hasil riset yang dimiliki. Peneliti melihat peran setiap agen sebagai sumber informasi menjadi penting ketika wacana radikalisme yang disampaikan tidak hanya menjadi alternatif penjelasan, tetapi menjadi patokan untuk berbagai informasi yang disampaikan setelahnya.

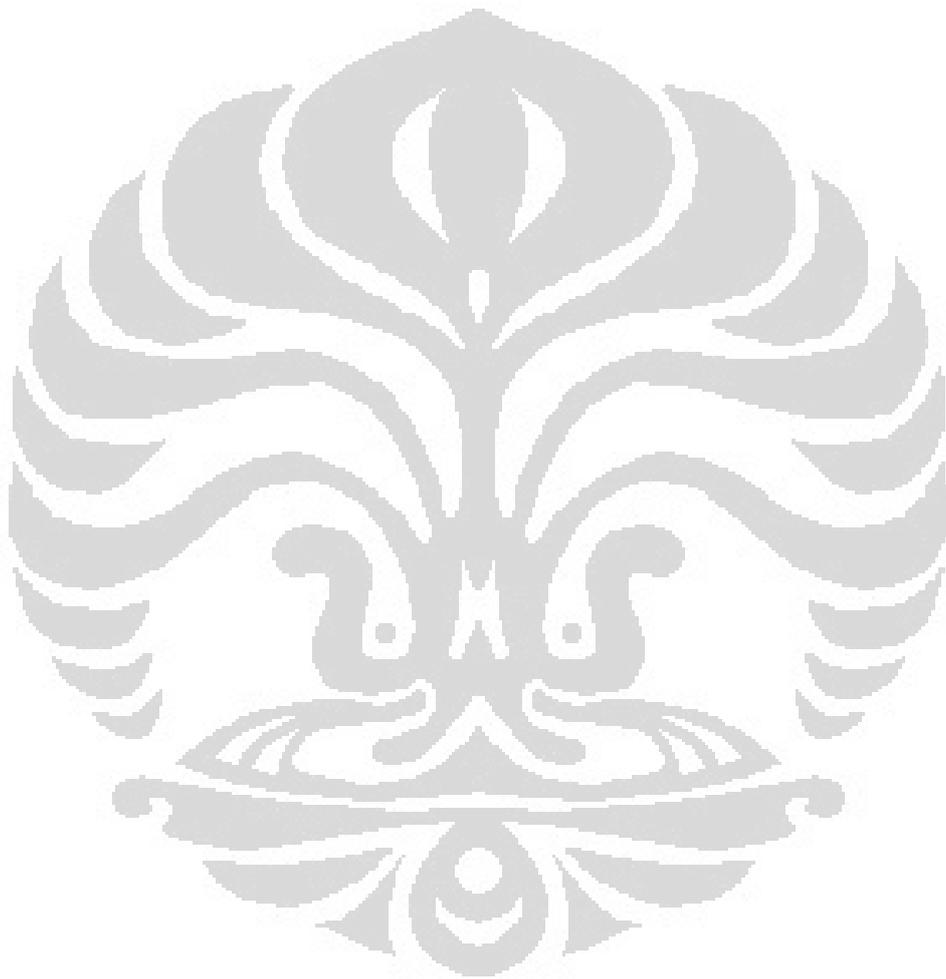
Selain proposisi Foucault, peneliti juga menggunakan kerangka analisis Berger dalam melihat wacana radikalisme. Berger berpandangan bahwa meskipun pengetahuan terkait wacana radikalisme yang dibangun oleh setiap agen memiliki konteks sosial yang bersifat relatif, perlu diselidiki dan dibongkar motif kepentingan dan kekuasaan (*debunking motif*) yang ada dibalik konstruksi wacana radikalisme yang telah dianggap sebagai sebuah realitas. Wacana radikalisme yang dikembangkan oleh setiap agen sebetulnya tidak murni merupakan pengembangan wacana agen secara mandiri. Berdasarkan kerangka teoretis yang digunakan dapat ditelisik bahwa peran intelektual Barat banyak mempengaruhi gagasan tentang wacana radikalisme yang dielaborasi oleh setiap agen. Perlu dicermati pula bahwa gagasan wacana radikalisme yang berkembang di Barat selalu dikaitkan dengan agama tertentu yakni Islam. Oleh karena itu, wajar hasil simpulan riset setiap agen memunculkan Islam sebagai artikulator utama dalam wacana radikalisme yang berkembang. Wacana radikalisme muncul sebagai sebuah realitas yang bersifat relatif, namun selalu dikaitkan Islam yang dianggap mengancam keberadaan wacana tentang demokrasi. Untuk lebih jelasnya, berikut ikhtisar analisis Foucault dan Berger yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

**Tabel 12**

**Analisis Wacana Radikalisme Berdasarkan Proposisi Teori Foucault dan Berger**

Proposisi	Dukungan Temuan
<p><b>Foucault</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi atas bentuk-bentuk wacana ilmu pengetahuan menciptakan sebuah sistem dominasi kekuasaan atas ilmu pengetahuan</li> <li>• Pengetahuan diproduksi dan dikontrol oleh institusi atau aparatus yang memiliki otoritas yang bersifat dominatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gagasan wacana radikalisme banyak diambil dari intelektual barat yang menempatkan Islam dengan Barat berdasarkan oposisi biner</li> <li>• Hasil riset ketiga agen dijadikan acuan bagi media massa dan juga beberapa forum seminar yang diadakan oleh pemerintah maupun NGO</li> </ul>
<p><b>Berger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dibangun atau dibentuk oleh masyarakat melalui proses internalisasi, eksternalisasi, dan obyektivasi dalam konteks sosial yang bersifat relatif</li> <li>• Pengetahuan yang dibentuk oleh masyarakat harus dibongkar motifnya untuk mengetahui kepentingan dan kekuasaan yang ada dibalik pengetahuan yang dikonstruksi sebagai sebuah realitas oleh masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber pendanaan agen ada yang bersumber dari lembaga donor internasional, terutama di negara barat</li> </ul>





**BAB V**  
**PRODUKSI & REPRODUKSI WACANA RADIKALISME**  
**PASCA-ORDE BARU**

Wacana radikalisme yang dikonstruksi oleh beberapa agen pasca-Orde Baru terkait erat dengan peran dari beberapa aktor (agensi) yang ada di dalamnya. Intelektual/akademisi, aktivis, jurnalis, maupun birokrat termasuk bagian dari aktor (agensi) yang ada di setiap agen. Masing-masing aktor (agensi) memiliki latar belakang pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman yang berbeda. Oleh karena itu, wacana radikalisme yang dikonstruksi di setiap agen sebetulnya bukanlah sebuah proses yang mudah untuk diwujudkan. Perdebatan dan pertarungan ide/gagasan mengenai radikalisme kerap muncul cukup sengit di setiap agen. Fokus utama tulisan pada bagian ini menekankan bagaimana pengetahuan wacana radikalisme diproduksi dan direproduksi oleh setiap aktor (agensi) dalam agen-agen yang ada. Pertarungan/perdebatan utama yang menjadi persoalan di dalam mengkonstruksi wacana radikalisme juga akan dijelaskan pada bagian ini. Di bagian akhir bab, akan dipaparkan kritik metodologis terhadap wacana radikalisme yang dikembangkan oleh beberapa agen—termasuk tambahan dua agen di tingkat global sebagai komparasi wacana radikalisme.

**V.1. Produksi & Reproduksi Wacana Radikalisme**

Perkembangan wacana radikalisme pasca-Orde Baru tidak lepas dari peran berbagai analisis yang dilakukan oleh kalangan intelektual. Penjelasan dan argumentasi dari kalangan intelektual—baik dari dalam dan luar negeri—telah memberikan kontribusi bagi ranah ilmu pengetahuan mengenai faktor penyebab dan dampak yang timbul sebagai akibat dari gejala radikalisme. Wacana radikalisme sendiri telah mengalami proses produksi dan reproduksi pengetahuan yang satu sama lain saling mengisi. Oleh karena itu, sudah sewajarnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan intelektual di dalam menjelaskan fenomena radikalisme. Ada kalangan intelektual yang menjelaskan gejala radikalisme berdasarkan penjelasan sosio-historis, ekonomi-politik, gerakan sosial, atau bahkan pendekatan keagamaan. Penjelasan inilah yang diadopsi oleh beberapa

agen yang melakukan konstruksi wacana radikalisme di Indonesia seperti CSRC, Lazuardi Birru, dan juga SETARA Institute. Lebih dari itu beberapa kebijakan terkait pemberantasan terorisme pun kerap dilakukan oleh BNPT dengan mempertimbangkan beberapa hasil riset yang dilakukan beberapa agen tersebut.

Berlandaskan kerangka berpikir Margareth Archer mengenai *morphogenesis*, Kita dapat menganalisis bagaimana setiap agen yang mengkonstruksi wacana radikalisme melakukan produksi dan reproduksi pengetahuan dalam interaksi sosialnya. Perlu diberikan penekanan kembali disini bahwa pelaku (agensi), didalam setiap agen, dalam interaksi sosialnya memunculkan struktur yang juga bereaksi dan berubah seiring tindakan dan interaksi para agennya. Perubahan yang terjadi senantiasa menciptakan perluasan yang bersifat struktural.

Berdasarkan penjelasan Archer tersebut dapat dilihat bagaimana CSRC, Lazuardi Birru, dan juga SETARA Institute melakukan perluasan struktural dalam mereproduksi atau mengelaborasi wacana radikalisme. Penjelasan awal dapat diberikan dengan melihat kemunculan gejala radikalisme ditangkap dalam konteks berbeda oleh setiap agen. Namun demikian, setiap agen memiliki pandangan yang kurang lebih sama, terutama ketika melihat momen sejarah runtuhnya Orde Baru menjadi salah satu faktor penting mencuatnya radikalisme di Indonesia. Hal ini membuat momentum pasca-Orde Baru menjadi sebuah struktur yang telah ada sebelumnya (*pre-existing structure*) bersifat mengkondisikan munculnya gagasan mengenai radikalisme dan berpengaruh terhadap produksi dan reproduksi pengetahuan yang dibuat oleh setiap agen. Interaksi dan tindakan agen dalam melihat struktur pengetahuan pasca-Orde Baru yang lebih terbuka (baca: demokratis) memudahkan para agen dan agensi mengadopsi berbagai pemikiran mengenai wacana radikalisme dari kalangan intelektual—terutama dari barat yang sebelumnya akses tersebut dibatasi oleh pemerintahan Orde Baru. CSRC melihat keberadaan momen pasca-Orde Baru telah meningkatkan peran dan pengaruh agama di ruang publik sebagai sebuah konteks yang muncul di masyarakat. Lazuardi Birru berargumen bahwa pasca-Orde Baru konteks fenomena kekerasan mengatasnamakan agama kerap kali muncul. SETARA Institute memandang pasca-Orde Baru konteks masyarakat justru banyak melakukan tindakan yang

intoleran dan diskriminatif. Dan juga kemunculan BNPT pasca-Orde Baru pun tidak lepas dari maraknya peristiwa pengeboman dan aksi terorisme.

Keberadaan era pasca-Orde Baru telah menciptakan sebuah reaksi bagi setiap agen untuk memberikan sebuah wacana baru mengenai gejala radikalisme yang lebih elaboratif dan tidak sekedar reproduktif. Namun demikian, di sisi lain telah ada berbagai analisis dari kalangan intelektual mengenai gejala ini. Oleh karena itu, wacana radikalisme yang dikembangkan oleh setiap agen sebenarnya bukan benar-benar baru sebab gagasannya tidak lepas dari proses reproduksi pengetahuan mengenai wacana radikalisme yang telah berkembang sebelumnya di kalangan intelektual. CSRC misalnya banyak mengadopsi gagasan dari beberapa intelektual seperti Gilles Kepel dan Oliver Roy mengenai konsepsi Islamisme dan Islam politik, Greg Fealy mengenai konsep *muslimness*, Mark Jurgensmeyer tentang konsep radikalisme, serta Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang konsep Islam kultural dan beberapa konsep lainnya. Sedikit berbeda dengan CSRC, SETARA Institute juga mengambil beberapa ide terkait gejala radikalisme dari beberapa intelektual seperti Oliver Roy dan John L. Esposito mengenai konsep fundamentalisme serta William R. Liddle tentang konsep Islam skriptualis.

Konsepsi pengetahuan terkait gejala radikalisme yang diadopsi oleh setiap agen tersebut memungkinkan mereka untuk melakukan sebuah proses reproduksi pengetahuan mengenai wacana radikalisme. Apa yang menarik dari proses reproduksi pengetahuan yang dihasilkan oleh setiap agen yang ada? Peneliti berpendapat bahwa setiap agen tidak mereproduksi ulang wacana radikalisme dari beberapa intelektual dengan menghasilkan sebuah pengetahuan baru yang dapat menjelaskan kembali tentang faktor yang menjadi latar belakang kemunculan gejala radikalisme. Kalau hal ini yang dilakukan, peran setiap agen justru hanya sebagai pihak yang melakukan reproduksi pengetahuan semata yang bersifat statis—Archer menyebut dengan istilah *morphostatis*. Namun, lebih dari itu peneliti berpandangan bahwa setiap agen yang ada justru tidak sekedar melakukan upaya mereproduksi pengetahuan mengenai wacana radikalisme, melainkan juga melakukan elaborasi pengetahuan dengan berusaha mengkonstruksi indikator dan parameter radikalisme. Upaya ini dalam konteks pemikiran Archer termasuk

sebuah bentuk perluasan pengetahuan struktural yang bersifat elaboratif—atau disebut dengan *morphogenesis*—yang dapat menjadi landasan bagi perubahan sosial dalam konteks perkembangan pengetahuan mengenai wacana radikalisme.

Wacana radikalisme pada tahap ini telah berkembang dari sebuah gejala yang dapat dijelaskan secara eksplanatif menuju sebuah tahap yang lebih bersifat praksis. Indeks kerentanan radikalisme sosial-keagamaan yang dikembangkan Lazuardi Birru dapat menjadi salah satu pijakan untuk melihat kondisi derajat radikalisme yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Spektrum Islam kultural dan Islam politik (Islamisme radikal) yang diungkapkan oleh CSRC dapat memberikan gambaran bagaimana sebetulnya karakter keislaman yang ada di Indonesia. Derajat intoleransi pasif dan aktif yang disusun oleh SETARA Institute memberikan pemahaman sejauh mana posisi masyarakat di dalam tahapan menuju radikalisme. Analisis teori *morphogenesis* yang dikemukakan oleh Archer dapat diringkas melalui tabel berikut:

**Tabel 13**  
**Analisis Produksi & Reproduksi Wacana Radikalisme Berdasarkan**  
**Proposisi Teori Archer**

Proposisi	Dukungan Temuan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur pengetahuan telah ada sebelumnya (<i>pre-existing</i>) dan bersifat mengkondisikan sesuatu namun tidak menentukan pengetahuan yang akan diadopsi oleh setiap agen</li> <li>• Terdapat interaksi sosio-kultural antara struktur pengetahuan dengan agen yang muncul dari tindakan yang berorientasi pada realisasi keinginan (<i>interests</i>) dan kebutuhan (<i>needs</i>) yang berasal dari sang agen dan mengarah pada perluasan struktural</li> <li>• Proses interaksi antara struktur-agen tidak hanya menciptakan sebuah perubahan struktur dari suatu sistem, melainkan menghasilkan perluasan struktural—baik secara teoretik maupun metodologis—berupa reproduksi struktural (<i>morphostatis</i>) atau elaborasi struktural (<i>morphogenesis</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur pengetahuan tentang wacana radikalisme merupakan adopsi gagasan dari beberapa intelektual Barat yang telah mengembangkan wacana ini jauh sebelum para agen mengembangkannya</li> <li>• Momen pasca-Orde Baru menjadi struktur yang mengkondisikan munculnya gagasan mengenai radikalisme di Indonesia (<i>structural conditioning</i>)</li> <li>• Interaksi dan tindakan agen memicu reaksi dengan upaya untuk mereproduksi gagasan tentang wacana radikalisme yang ada (<i>social interaction</i>)</li> <li>• Gagasan wacana radikalisme yang dikembangkan oleh setiap agen mengadopsi pemikiran beberapa intelektual barat yang kemudian direproduksi menjadi sebuah produksi pengetahuan yang bersifat reproduktif (<i>morphostatis</i>) sekaligus elaboratif (<i>morphogenesis</i>)</li> </ul>

Analisis tersebut paling tidak menggambarkan bagaimana kerangka teoretis Archer memberikan kontribusi di dalam memberikan penjelasan mengenai proses reproduksi dan elaborasi pengetahuan dapat dilakukan dalam kerangka struktur-agen. Namun demikian, perlu menjadi catatan pula bahwa

proses elaborasi pengetahuan yang terjadi di dalam setiap agen tidak serta merta mudah yang dibayangkan. Setiap pelaku/aktor/agensi di setiap agen justru mengalami pertarungan yang cukup sengit di dalam upaya melakukan elaborasi pengetahuan mengenai wacana radikalisme. Deskripsi berikut merupakan tambahan paparan mengenai dinamika pertarungan wacana radikalisme yang terjadi antar pelaku di setiap agen.

## **V.2. Pertarungan Wacana Radikalisme**

Transformasi wacana radikalisme yang terjadi pasca-Orde Baru di setiap agen mengalami proses yang variatif. Namun demikian, setiap pelaku/aktor/agensi di dalam setiap agen satu sama lain menghadapi pertarungan yang kurang lebih sama. Isu utama yang menjadi perdebatan oleh setiap pelaku lebih banyak berfokus pada persoalan apakah wacana radikalisme yang dikonstruksi harus ditekankan dalam kerangka akademis yang lebih abstrak atau dalam kerangka tujuan praksis yang lebih konkret.

CSRC misalnya sebagai sebuah lembaga riset di bawah naungan universitas menjadi salah satu agen yang mengalami perdebatan sengit. Para peneliti di CSRC ketika mengembangkan wacana radikalisme terbentur pada persoalan apakah hasil riset yang dilakukan memiliki tujuan murni akademis atau strategis. Apabila riset dikembangkan untuk tujuan murni akademis, maka kerangka konseptual dan operasional dari landasan teori yang dikembangkan harus mempertimbangkan teknik metodologi yang tepat dan ketat. Namun, apabila riset dikembangkan untuk tujuan kebutuhan strategis seperti advokasi, maka pertimbangan metodologi yang ketat tidak menjadi hambatan. Keterlibatan beberapa akademisi (dosen), mahasiswa, dan aktivis di dalam lembaga riset ini menjadikan dinamika perdebatan yang terjadi kian rumit. Kubu akademisi menekankan bahwa sebagai sebuah lembaga riset di bawah universitas, maka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan perlu lebih ditekankan. Akan tetapi, kubu aktivis memiliki pandangan sebaliknya dimana mereka menganggap bahwa lembaga riset universitas harus memberikan kontribusi bagi pembangunan kemasyarakatan. Pertarungan ini dapat dilihat dari kutipan wawancara direktur CSRC berikut ini:

*Posisi kita itu kan lembaga riset ya di bawah rektorat UIN. Tetapi ini bukan riset murni. Ini kita menjalankan riset strategis. Disamping itu juga kita punya misi untuk menjalankan advokasi, kampanye-kampanye ke publik. Jadi, antara gaya dengan penekanan pada riset yang dibuat advokasi itu kemudian menciptakan semacam dinamika dalam aktivis yang ada disini. Mereka ada yang menekankan pentingnya terma-terma [teori dan konsep] itu kan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan lain-lain. Dan menganggap sebaiknya kita menempatkan diri sebagai lembaga riset yang netral dan mempertanggungjawabkan riset kita di kalangan akademis yang menggunakan standar-standar tertentu. Jadi ada, terutama kawan-kawan yang lagi semangat melakukan riset, studi lanjut atau pulang baru Ph.D atau pulang menempuh Ph.D ini mendorong supaya kita memilih istilah-istilah, terma-terma itu yang bisa kita pertanggungjawabkan secara akademis. Mereka yang memang melihat penelitian dan publikasi ini sebagai suatu strategi kampanye untuk mempengaruhi kebijakan baru opini publik. Karena itu kita harus menggunakan bahasa yang kuat yang itu mudah menggugah. Karena bahasa-bahasa akademik yang itu terlalu eksklusif. Kita kan membutuhkan media yang mem-blow up dan mengangkat isu ini, karena itu kita perlu membuat pernyataan-pernyataan yang kuat disitu. Ya mungkin saja debatable di kalangan akademik. Gak usah terlalu akademik.*

[Wawancara dengan Direktur CSRC, Kamis/ 24 Mei 2012, tanda kurung tambahan peneliti]

Perdebatan yang terjadi di CSRC salah satunya adalah mengenai penggunaan istilah-istilah ilmiah di dalam hasil risetnya. Kalangan aktivis tidak menyetujui penggunaan istilah akademis yang justru menimbulkan perdebatan yang tidak akan dimengerti oleh publik dan berpotensi memicu perbedaan interpretasi hasil riset. Hal ini diungkapkan oleh pendapat informan di bawah ini:

*Jalan tengahnya ya kita harus bisa menjelaskan terma-terma itu seilmiah mungkin, tapi disisi lain kita juga menyediakan ruang untuk menampilkan data-data atau kesimpulan kita itu bisa memancing diskusi atau debat. Misalnya ketika kita membuat penelitian mesjid. Itu Islamisme kita gunakan. Awalnya kita menggunakan radikalisme, tapi temen-temen tadi itu bilang bahwa istilah ini itu tidak lazim digunakan akademisi di kampus-kampus barat. Ada temen, [berpendapat] buat apa juga. Sampe sebegitu. Kita itu mau pake Islamisme itu juga terlalu populer, terlalu dimengerti publik. Itu bisa salah paham publik terhadap hal itu. Walaupun di level akademik itu biasa, tapi ya gak usah terlalu exaggerating lah. Ini sebagai suatu yang harus mutlak sekali. Ini kan kita punya tujuan. Akhirnya kita ambil jalan tengah. Kita tetap gunakan radikal, tapi Islamisme kita jelaskan untuk mengakomodasi.*

[Wawancara dengan Direktur CSRC, Kamis/ 24 Mei 2012, tanda kurung tambahan peneliti]

Tidak jauh berbeda dengan CSRC, SETARA Institute juga mengalami pertarungan yang cukup alot mengenai penentuan tujuan riset yang dilakukan. Akan tetapi, karena lembaga ini lebih banyak beranggotakan para aktivis, maka tujuan riset lebih ditujukan untuk kepentingan advokasi. Berikut pendapat yang diberikan direktur SETARA Institute mengenai perdebatan yang terjadi:

*Iya. Jadi awalnya kenapa kemudian kita ingin mengetahui siapa pelakunya, [dilakukan] sebuah political-social mapping sebenarnya terhadap pelaku-pelaku pelanggaran. Jadi Buku "Perwajahan Islam Indonesia" itu dilatarbelakangi semacam itu. Kemudian membangun sebuah konsep tadi. Kita kan harus kompak. Ini kunci kita. Jadi kita di sini juga dalam soal metodologi sosial, satu, kita juga harus menggunakan metode-metode akademis. Artinya kita kan bukan seperti sekolah. Riset kita adalah riset untuk advokasi. Bukan semata-mata riset untuk kemudian social explanation. Kemudian riset kita adalah mendidik kritis masyarakat dan mem-provoce masyarakat untuk kemudian bagaimana terlibat dalam pemecahan sosial, problem solving. Karena itu memang harus ada sebuah keinginan provokatif untuk membuat masyarakat terbeliak matanya karena Indonesia ini juga masyarakat yang cenderung juga tidak melek atau tidak terganggu kalo tidak ada rangsangan yang lebih kuat. Terkait juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang memang sedikit provokatif. Makanya kita bangun pendapat-pendapat yang kontroversial dan untungnya karena bukan sebuah universitas. Sebuah lembaga riset yang dibawah universitas, di penelitian kita murni, jadi [kita] tidak harus mem-push beban seperti yang ada di universitas. Dan disini sebetulnya pemikirannya relatif sama, karena latar belakangnya sebagai aktivis. Perdebatan-perdebatan itu tidak seperti lembaga-lembaga penelitian di kampus yang penuh dengan konsep-konsep. Tapi di kita lebih pada apa yang bisa kita lakukan. Karena itu, riset untuk advokasi.*

[Wawancara dengan Direktur SETARA Institute, Senin/ 28 Mei 2012, tanda kurung tambahan peneliti]

Proses yang sama dialami oleh Lazuardi Birru dimana perdebatan terjadi ketika menentukan bagaimana menurunkan kerangka konsep radikalisme menjadi sebuah indeks. Persoalan seputar bagaimana sebuah konsep bisa diukur ternyata menjadi problematis bagi sebagian anggota lembaga ini yang kebanyakan berlatar belakang pengacara. Akhirnya, demi memuluskan untuk tetap dapat melakukan pengukuran tentang indeks radikalisme lembaga ini sampai melibatkan Syaiful Mujani, Hamdi Muluk, dan Burhanudin Muhtadi yang notabennya orang yang terbiasa untuk mengembangkan indeks. Hal ini dapat disimak melalui hasil wawancara dengan direktur Lazuardi Birru berikut:

*Susah. Gimana ngukurnya. Terus dia kan lawyer. Gak akan ngerti yang kaya beginian. Tapi ini harus bisa. mungkin bisa. Aku ribut sama Saiful. Burhan. Dari 2010. Lama itu. pas dari 2009 ke 2010 ributnya itu lebih ke aku tahunya prakteknya maunya begini, karena butuhnya ini, itu mereka gak mau. Ppokoknya banyak yang gak mungkin-gak mungkin deh. Sampe akhirnya. Ya itu ribut. Tapi seru sih. Kita memadukan antara asumsi sama praktek. Saya maunya begini, begini, begini. Gue butuhnya yang kaya gini. Ternyata kan kajian-kajian itunya gak ada gunanya kalo tidak bisa diaplikasikan. Lo tahu sesuatu dari situ untuk apa? Cuma sekedar kajian ya dapet Ph.D doang orang-orang mungkin banyak. Tapi kan disini gitu kan. yang susah itu. wah panjang. Tapi akhirnya pemenangnya Balance. Keinginan kita terakomodir, harus bisa dipublikasikan, dibaca. Tidak menyalahi aturan. Tapi itu ya ahlinya keluar semua.*

[Wawancara dengan Direktur Lazuardi Birru, Jumat/ 25 Mei 2012]

Salah satu perhatian yang perlu ditekankan di sini adalah proses elaborasi pengetahuan yang terjadi di setiap agen ternyata di dalamnya juga terjadi pertarungan dan perdebatan wacana. Hal ini menjadi salah satu proses dimana produksi pengetahuan tidak hanya didominasi oleh struktur pengetahuan yang ada sebelumnya. Struktur pengetahuan ternyata juga mengalami proses interaksi dengan para pelaku di dalamnya berupa bentuk perdebatan. Oleh karena itu, dapat dilihat pembentukan struktur pengetahuan mengenai wacana radikalisme mengalami proses dialektika yang dinamis antara struktur pengetahuan dengan agen yang mereproduksi pengetahuan.

Namun demikian, perlu dikritisi pula bahwa wacana radikalisme yang bersifat elaboratif tersebut juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan konstruksi indikator radikalisme yang dikembangkan oleh setiap agen terletak pada pengembangan indikator yang bersifat deskriptif. Hal ini tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur yang bersifat prediktif. Oleh karenanya, peneliti berargumen bahwa perlu adanya kritik secara metodologis terhadap indikator radikalisme yang sudah dikembangkan oleh ketiga agen. Hal ini untuk menunjukkan bahwa elaborasi pengetahuan yang bersifat aplikatif juga membutuhkan sebuah justifikasi yang memenuhi standar secara akademis yang ketat. Bagian selanjutnya dari tesis ini menjelaskan apa saja kritik metodologis yang dapat disampaikan guna menyusun model, skenario, maupun indikator tentang radikalisme.

### **V.3. Kritik Metodologis Terhadap Wacana Radikalisme**

Sebelum melakukan kritik terhadap wacana radikalisme, peneliti menambahkan dua agen yang juga melakukan konstruksi wacana radikalisme yakni Gallup Poll dan RAND Corporation. Hal ini sebagai bentuk komparasi antara konstruksi wacana radikalisme di tingkat lokal dengan konstruksi wacana radikalisme di tingkat global. Berikut pemaparan dua lembaga internasional tersebut;

#### **V.3.1. Konstruksi Wacana Radikalisme Gallup's Poll dan RAND Corporation**

Selain konstruksi wacana radikalisme dari beberapa agen yang ada di Indonesia, peneliti tambahkan dua lembaga internasional yang juga melakukan konstruksi wacana radikalisme di tingkat global yaitu Gallup Poll dan RAND Corporation. Gallup Poll merupakan salah satu organisasi di Amerika yang melakukan jajak pendapat terhadap permasalahan politik, sosial, dan ekonomi serta termasuk persoalan yang bersifat kontroversial. Adapun RAND Corporation merupakan salah satu organisasi non profit di Amerika yang melakukan riset dan analisis mengenai pengembangan kebijakan. Terlepas dari keterikatan dua lembaga tersebut dengan pemerintah Amerika, kiranya peneliti menganggap penting untuk mempelajari bagaimana kedua lembaga itu dapat melakukan riset yang mengembangkan indikator untuk keperluan kebijakan pembangunan negara.

**Gallup Poll.** Pasca peristiwa 11 September 2001, banyak orang Amerika yang percaya bahwa agama Islam telah menghasilkan teroris yang memiliki budaya anti barat. Namun demikian, bagaimana dengan pendapat mayoritas 1,3 milyar umat muslim di dunia mengenai pendapat tersebut? Pendapat umat muslim di dunia mengenai agama Islam sebagai penghasil teroris belum tentu sama dengan pendapat orang Amerika. Hal inilah yang melatarbelakangi Gallup Poll (Esposito dan Mogahed 2007) untuk melakukan sebuah riset mengenai pendapat umat muslim di dunia tentang Islam (*Who Speaks for Islam?*). Riset ini melibatkan salah seorang intelektual terkenal Amerika yang memiliki fokus kajian tentang Islam yaitu John L. Esposito.

Gallup Poll melakukan sebuah survei komprehensif mengenai kebenaran tentang pendapat dan pandangan umat muslim di dunia yang tidak berdasarkan

keterangan media, pemerintah, dan juga kebijakan negara-negara barat. Pendapat umat muslim di dunia selama ini belum ada yang merepresentasikan dalam bentuk survei opini publik. Kesalahpahaman mengaitkan terorisme dengan Islam secara monolitik tidak hanya terjadi di kalangan warga dan pemerintahan Amerika dan Eropa, namun juga terjadi dalam bentuk pemberitaan media massa. Persepsi tentang Islam yang salah dan bersifat simplifikasi inilah yang berusaha dilihat oleh Gallup Poll. Ada tujuh pertanyaan besar yang disampaikan oleh Gallup Poll di dalam jajak pendapat yang dilakukan.

*Pertama*, apakah akar dari sikap anti Amerika yang terjadi di dunia umat muslim? *Kedua*, apa yang bisa menjelaskan kesan orang Barat tentang Islam dan umat muslim? *Ketiga*, apakah tipe pemerintahan yang umat muslim inginkan—teokrasi atau demokrasi—dan bagaimana dengan pilihan penerapan syariat Islam di dalam hukum? *Keempat*, apakah muslim perempuan secara keseluruhan merasa tertindas? *Kelima*, bagaimana membedakan antara muslim *mainstream* dengan muslim radikal ekstrem, dan mana yang lebih mayoritas? *Keenam*, siapa yang disebut muslim? *Ketujuh*, apa solusi untuk merubah persepsi yang salah mengenai Islam?

Berdasarkan tujuh pertanyaan besar tersebut, Gallup Poll melakukan survei mulai tahun 2001-2007 dengan mengambil sampel yang merepresentasikan 90% dari 1,3 milyar umat muslim di 35 negara mayoritas di dunia. Gallup Poll melakukan wawancara lebih dari seribu (1000) orang di setiap negara. Wawancara tatap muka memerlukan waktu satu jam dan wawancara dengan menggunakan telepon memerlukan waktu setengah jam. Responden di setiap negara dipilih secara random berdasarkan karakteristik kota dan desa, kelompok umur, latar belakang, dan tingkat buta huruf.

Hasil penelitian Gallup Poll terbagi dalam lima bagian. Bagian pertama, adalah menjawab pertanyaan siapa yang disebut muslim. Ada enam hal yang dijawab dari hasil riset bagian pertama ini: 1) muslim dunia (*the world's muslims*): hasil survei menunjukkan 85% umat muslim dunia adalah penganut Sunni dan 15% diantaranya adalah Si'ah; 2) pentingnya keyakinan agama (*the importance of faith*): hasilnya 90% muslim mengatakan bahwa agama merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan penanda identitas seorang muslim;

3) keyakinan dasar dan praktik (*basic beliefs and practices*): hasilnya muslim dunia menganggap Al Quran dan Muhammad merupakan sumber wahyu yang sempurna dan lengkap; 4) pondasi Islam (*pillars of Islam*): hasilnya terdapat enam pilar dalam Islam yakni a) syahadat, b) shalat, c) puasa, d) zakat, e) haji, dan f) jihad yang dimaknai responden di Timur Tengah dan negara non Arab sebagai menjalankan kewajiban kepada tuhan, komitmen untuk bekerja keras, mempromosikan perdamaian, harmoni, kerjasama, dan membantu orang lain, sedangkan minoritas di Pakistan, Iran, Turki, serta mayoritas di Indonesia menjawab sebagai perjuangan untuk melawan musuh-musuh Islam dalam konteks pertahanan diri atau bekerja melawan sikap anti Islam; 5) keluarga dan kebudayaan (*family and culture*): hasilnya mayoritas muslim di sembilan negara berpendapat menikah dan memiliki anak merupakan syarat untuk menjadi muslim yang lengkap, penerapan hukum keluarga menjadi landasan dasar bagi penerapan hukum syariah, status dan peran ibu dalam keluarga sangat penting bagi penjaga moral dan juga menanamkan nilai budaya dalam keluarga; 6) masa lalu Islam yang agung (*Islam's glorious past*): hasilnya umat muslim berharap situasi dimana agama, masyarakat, dan negara hidup berdampingan secara harmonis layaknya peradaban Islam di masa abad 7-8 masehi.

Bagian kedua, adalah menjawab pertanyaan mengenai demokrasi atau teokrasi? Ada dua jawaban atas bagian ini: 1) apa yang sebenarnya diinginkan oleh umat muslim: hasilnya umat muslim menginginkan penerapan demokrasi dan syariah Islam secara berdampingan; 2) peran barat: hasilnya umat muslim dunia merefleksikan skeptisisme dan kritisisme terhadap kebijakan luar negeri Amerika terhadap negara yang memiliki mayoritas muslim. Mayoritas muslim tidak setuju terhadap kebijakan luar negeri Amerika yang menggunakan standar ganda di dalam mengembangkan demokrasi. Namun, sebaliknya pendapat orang Amerika terhadap orang Islam 44% mengatakan muslim terlalu ekstrem dalam kehidupan agama mereka.

Bagian ketiga, adalah menjawab pertanyaan apa yang menyebabkan radikal? Ada tiga hal yang menjadi hasil pada bagian ini: 1) siapa yang disebut radikal yaitu: a) minoritas dan tidak terwakili kepentingannya di kalangan muslim mainstream, b) mereka datang dari berbagai latar belakang yang berbeda dan

kebanyakan tidak religius, c) tidak semua orang radikal menganut ideologi teroris; 2) kaitan antara kemiskinan dan terorisme: persoalan ekonomi bukan yang utama melainkan politik, 62% muslim yang memiliki orientasi politik radikal rata-rata berpendidikan tinggi dan berpenghasilan di atas rata-rata; 3) agama dan radikal: Islam dan radikalisme tidak selalu memiliki keterkaitan dengan agama dan fanatisme. Radikalisme muncul dan membayangi dunia muslim. Sebagian besar muslim yang memiliki pandangan politik radikal memiliki hasrat untuk mengimplementasikan hukum Islam. Namun, muslim radikal tidak selalu membenci barat. Muslim *mainstream* tidak menggunakan agama sebagai pembenaran untuk militansi dan radikalisme agama. Sebanyak 50% muslim radikal berpendapat bahwa perkembangan demokrasi telah memberikan keuntungan bagi dunia muslim. Lebih jauh, 58% muslim yang memiliki pandangan politik radikal berkeinginan memiliki relasi yang lebih baik dengan barat, sedangkan untuk muslim yang memiliki pandangan politik moderat hanya 44%. Sebanyak 82% muslim radikal melihat Amerika memiliki kebijakan luar negeri yang agresif, sedangkan muslim moderat hanya 67%.

Bagian keempat, adalah menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya perempuan muslim inginkan? Jawabannya adalah kesetaraan, pekerjaan, kondisi ekonomi dan sosial, pemberdayaan. Bagian kelima, adalah menjawab pertanyaan apakah antara Islam dan barat saling berbenturan atau berdampingan (*clash or coexistence*)? Penjelasannya secara umum muslim di dunia tidak membenci barat karena perbedaan kebebasan yang dipahami bersifat relatif. Perlu dilakukan sosialisasi pemahaman akan nilai dan budaya yang dianut oleh orang Islam agar tidak menempatkan mereka sebagai bagian dari terorisme dan menyebabkan Islamophobia.

**Tabel 14**  
**Ikhtisar Konstruksi Wacana Radikalisme Yang Dikembangkan Gallup Poll**

KONSTRUKSI RADIKALISME	DESKRIPSI RISET
<b>Pertanyaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah akar dari sikap anti Amerika yang terjadi di dunia umat muslim?</li> <li>2. Apa yang bisa menjelaskan kesan orang Barat tentang Islam dan umat muslim?</li> <li>3. Apakah tipe pemerintahan yang umat muslim inginkan (teokrasi atau demokrasi), dan bagaimana dengan pilihan penerapan syariat Islam?</li> <li>4. Apakah muslim perempuan secara keseluruhan merasa tertindas?</li> <li>5. Bagaimana membedakan antara muslim <i>mainstream</i> dengan muslim radikal ekstrem, dan mana yang lebih mayoritas?</li> <li>6. Siapa yang disebut muslim?</li> <li>7. Apa solusi untuk merubah persepsi yang salah mengenai Islam?</li> </ol>
<b>Metode Penelitian</b>	Survei opini publik di 35 negara muslim
<b>Persepsi Muslim Dunia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I. <b>Siapa yang disebut muslim?</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muslim dunia (<i>the world's muslims</i>): hasil survei menunjukkan 85% umat muslim dunia adalah penganut Sunni dan 15% diantaranya adalah Si'ah</li> <li>2. Pentingnya keyakinan agama (<i>the importance of faith</i>): hasilnya 90% muslim mengatakan bahwa agama merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan penanda identitas seorang muslim</li> <li>3. Keyakinan dasar dan praktik (<i>basic beliefs and practices</i>): hasilnya muslim dunia menganggap Al Quran dan Muhammad merupakan sumber wahyu yang sempurna dan lengkap</li> <li>4. Pondasi Islam (<i>pillars of Islam</i>): hasilnya terdapat enam pilar dalam Islam yakni a) syahadat, b) shalat, c) puasa, d) zakat, e) haji, dan f) jihad yang dimaknai responden di Timur Tengah dan negara non Arab sebagai menjalankan kewajiban kepada tuhan, komitmen untuk bekerja keras, mempromosikan perdamaian, harmoni, kerjasama, dan membantu orang lain, sedangkan minoritas di Pakistan, Iran, Turki, serta mayoritas di Indonesia menjawab sebagai perjuangan untuk melawan musuh-musuh Islam dalam konteks pertahanan diri atau bekerja melawan sikap anti Islam</li> <li>5. Keluarga dan kebudayaan (<i>family and culture</i>): hasilnya mayoritas muslim di sembilan negara berpendapat menikah dan memiliki anak merupakan syarat untuk menjadi muslim yang lengkap, penerapan hukum keluarga menjadi landasan dasar bagi penerapan hukum syariah, status dan peran ibu dalam keluarga sangat penting bagi penjaga moral dan juga menanamkan nilai budaya dalam keluarga</li> <li>6. Masa lalu Islam yang agung (<i>Islam's glorious past</i>): hasilnya umat muslim berharap situasi dimana agama, masyarakat, dan negara hidup berdampingan secara harmonis layaknya peradaban Islam di masa abad 7-8 masehi</li> </ol> </li> <li>II. <b>Demokrasi atau teokrasi?</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh umat muslim: hasilnya umat muslim menginginkan penerapan demokrasi dan syariah Islam secara berdampingan</li> <li>2. Peran barat: hasilnya umat muslim dunia merefleksikan skeptisisme dan kritisisme terhadap kebijakan luar negeri Amerika terhadap negara yang memiliki mayoritas muslim. Mayoritas muslim tidak setuju terhadap kebijakan luar negeri Amerika yang</li> </ol> </li> </ol>

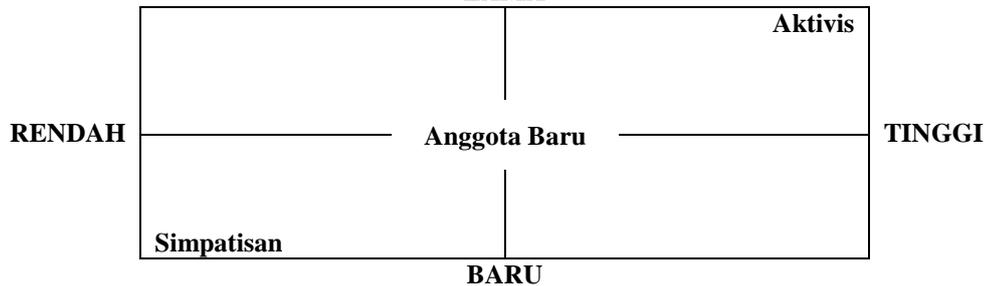
KONSTRUKSI RADIKALISME	DESKRIPSI RISET
	<p>menggunakan standar ganda di dalam mengembangkan demokrasi. Namun, sebaliknya pendapat orang Amerika terhadap orang Islam 44% mengatakan muslim terlalu ekstrem dalam kehidupan agama mereka.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Apa yang menyebabkan radikal? <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Siapa yang disebut radikal yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minoritas dan tidak terwakili kepentingannya di kalangan muslim mainstream</li> <li>2. Mereka datang dari berbagai latar belakang yang berbeda dan kebanyakan tidak religius</li> <li>3. Tidak semua orang radikal menganut ideologi teroris</li> </ol> </li> <li>b. Kaitan antara kemiskinan dan terorisme: persoalan ekonomi bukan yang utama melainkan politik, 62% muslim yang memiliki orientasi politik radikal rata-rata berpendidikan tinggi dan berpenghasilan di atas rata-rata;</li> <li>c. Agama dan radikal: Islam dan radikalisme tidak selalu memiliki keterkaitan dengan agama dan fanatisme. Radikalisme muncul dan membayangi dunia muslim. Sebagian besar muslim yang memiliki pandangan politik radikal memiliki hasrat untuk mengimplementasikan hukum Islam. Namun, muslim radikal tidak selalu membenci barat. Muslim <i>mainstream</i> tidak menggunakan agama sebagai pembenaran untuk militansi dan radikalisme agama. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% muslim radikal berpendapat bahwa perkembangan demokrasi telah memberikan keuntungan bagi dunia muslim.</li> <li>2. 58% muslim yang memiliki pandangan politik radikal berkeinginan memiliki relasi yang lebih baik dengan barat, sedangkan untuk muslim yang memiliki pandangan politik moderat hanya 44%.</li> <li>3. 82% muslim radikal melihat Amerika memiliki kebijakan luar negeri yang agresif, sedangkan muslim moderat hanya 67%.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>4. Apa yang sebenarnya perempuan muslim inginkan? Jawabannya adalah kesetaraan, pekerjaan, kondisi ekonomi dan sosial, pemberdayaan.</li> <li>5. Apakah antara Islam dan barat saling berbenturan atau berdampingan (<i>clash or coexistence</i>)? Penjelasan secara umum muslim di dunia tidak membenci barat karena perbedaan kebebasan yang dipahami bersifat relatif. Perlu dilakukan sosialisasi pemahaman akan nilai dan budaya yang dianut oleh orang Islam agar tidak menempatkan mereka sebagai bagian dari terorisme dan menyebabkan Islamophobia.</li> </ol>
<b>Simpulan Riset</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cara langsung yang efektif untuk menyelesaikan miskomunikasi antara Islam dan Barat adalah memenangkan pikiran dan hati via diplomasi publik</li> <li>2. Agama bukan persoalan utama, dan membuat agama menjadi persoalan adalah sebuah kesalahan yang melemahkan kekuasaan positif agama dan kebudayaan masyarakat</li> <li>3. Islam sudah semestinya untuk dipahami sebagai elemen penting yang meresap ke dalam kehidupan masyarakat sebagai pembentuk identitas nasional</li> <li>4. Islam bukan untuk ditakuti, tetapi dipahami</li> </ol>
<b>Catatan Kritis Peneliti</b>	Lembaga ini memotret persepsi masyarakat muslim dunia berdasarkan relasinya dengan barat sebagai dua entitas yang saling berseberangan dan ternyata Islam dipersepsikan secara positif oleh mayoritas muslim dunia

**RAND Corporation.** Usaha untuk memahami peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal telah banyak dilakukan, namun masih jauh dari cukup untuk memberikan kontribusi penting bagi kebijakan deradikalisasi—dimana individu atau kelompok melepaskan diri dari kelompok ekstrem dan ideologinya. Kondisi tersebut melatarbelakangi RAND Corporation (Rabasa 2010) melakukan sebuah riset untuk membentuk program deradikalisasi bagi kelompok ekstrem Islam. Penting perlu ditekankan bahwa sebelum membentuk sebuah program deradikalisasi, RAND Corporation justru berusaha memberikan definisi dan membuat tipologi mengenai level komitmen anggota kelompok radikal. Oleh karena itu, peneliti mengambil gagasan yang dikembangkan RAND Corporation sebagai salah satu agen di tingkat internasional yang melakukan konstruksi wacana radikalisme.

Walaupun belum ada kesepakatan mengenai definisi tunggal mengenai radikalisme, lembaga ini memilih untuk menggunakan salah satu konsep kunci radikalisme agar terhindar dari kerancuan. Lembaga ini memiliki terminologi radikalisme sebagai sebuah proses mengadopsi sistem kepercayaan yang ekstrem, termasuk keinginan untuk menggunakan, mendukung, atau memfasilitasi kekerasan, sebagai metode untuk memberikan perubahan yang bersifat *societal*. Konsepsi radikalisme ini dikaitkan dengan konsep Islamisme yang mendefinisikan bahwa umat muslim menjadikan Islam sebagai agenda politik atau mereka menolak pemisahan antara kewenangan agama dengan kekuasaan negara. Pengertian ini mencakup cara-cara kekerasan sekaligus nonkekerasan. RAND Corporation mengambil tipe Islamisme yang bersifat ekstrem, meskipun tidak semua kalangan Islamisme menempuh cara-cara yang ekstrem.

RAND Corporation juga mengembangkan tipologi mengenai kelompok Islam radikal berdasarkan level komitmennya. Ada tiga level keanggotaan kelompok radikal yaitu simpatisan, anggota baru, dan aktivis. Ketiganya dibedakan berdasarkan derajat keterlibatan di dalam kelompok radikal dan lamanya keanggotaan. Bagan berikut memberikan gambaran mengenai tipologi tersebut.

**Bagan 3**  
**Tipologi Radikalisme Berdasarkan Level Komitmen**  
**LAMA**



Sumber: Rabasa 2007: 23-26

Keterangan:

X-aksis adalah derajat dimana kehidupan individu menjadi bagian dari organisasi radikal

Y-aksis adalah lamanya keanggotaan di dalam organisasi radikal

Hipotesis yang dikembangkan RAND Corporation di dalam membuat tipologi keterlibatan individu dalam kelompok radikal dapat dilihat dari dua hal. *Pertama*, derajat keterlibatan individu di dalam aktivitas kelompok radikal. *Kedua*, lamanya keanggotaan di dalam kelompok radikal. Dua hal tersebut dikembangkan RAND Corporation dengan mengajukan dua hipotesis yaitu:

1. semakin tinggi tingkat keterlibatan individu di dalam aktivitas kelompok radikal, maka semakin sulit kemungkinan individu tersebut keluar dari kelompok radikal
2. semakin lama individu terlibat di dalam aktivitas kelompok radikal, maka semakin sedikit kemungkinan individu tersebut keluar dari kelompok radikal.

Berdasarkan dua hipotesis tersebut, maka terdapat tiga tipologi radikalisme berdasarkan level komitmen keanggotaannya yakni: 1) simpatisan; 2) anggota baru; 3) aktivis. Simpatisan merupakan tipologi keanggotaan yang memiliki keterlibatan dalam organisasi radikal dalam skala yang rendah serta belum menjadi bagian dari organisasi radikal. Anggota baru merupakan tipologi keanggotaan yang memiliki keterlibatan dan lama keanggotaan dalam organisasi radikal dalam skala sedang. Aktivis (anggota garis keras) merupakan tipologi keanggotaan yang memiliki keterlibatan dalam skala yang tinggi serta menjadi sudah lama bagian dari keanggotaan organisasi radikal.

Tipologi keanggotaan organisasi radikal yang dibuat RAND Corporation ini dijadikan dasar untuk membuat program deradikalisasi bagi anggota organisasi radikal. Terminologi deradikalisasi sendiri didefinisikan sebagai sebuah proses

untuk menunda pandangan para ekstremis dan menyimpulkan bahwa penggunaan cara-cara kekerasan tidak dapat diterima sebagai upaya untuk memberikan dampak bagi perubahan sosial. Sebagai bagian dari proses deradikalisasi, terdapat pengenalan bahwa transformasi sosial, politik, dan ekonomi akan dapat muncul secara perlahan dalam lingkungan yang bersifat pluralistik. Berdasarkan definisi tersebut, dilakukan beberapa tahapan proses deradikalisasi antara lain: *pertama*, pemicu (*trigger*); *kedua*, pertimbangan untung-rugi meninggalkan atau tetap menjadi anggota organisasi radikal; *ketiga*, saat yang menentukan (*turning point*), *keempat*, melepas ikatan (*disengagement*); *kelima*, mengembangkan identitas baru dan reintegrasi ke dalam masyarakat; *keenam*, kemungkinan bagi residivis (*likelihood recidivism*). Berikut tahapan deradikalisasi seorang individu untuk keluar dari organisasi radikal:



Sumber: Rabasa 2007: 12

Pada tahap pertama, proses deradikalisasi dimulai dengan sebuah pemicu yang membuat komitmen seseorang bergabung ke dalam organisasi radikal menjadi kabur. Misalnya, aksi bom Bali tahun 2002 yang merenggut ratusan nyawa orang sipil membuat Nasir Abas salah satu petinggi JI (Jamaah Islamiyah) mempertimbangkan kembali keterlibatannya di dalam kelompok militan. Tahap kedua, anggota organisasi radikal masuk ke dalam sebuah pertimbangan untung-rugi dimana terjadi pro-kontra keberadaan organisasi ekstrem memiliki dampak

negatif dibanding positif bagi masyarakat secara luas. Tahap ketiga, adalah penentuan bagi individu untuk mengambil keputusan keluar atau tidak dari organisasi radikal. Apabila individu menganggap bahwa bergabung dengan organisasi radikal tidak memiliki kegunaan, maka terdapat harapan besar untuk keluar dari organisasi tersebut dimana ia telah mencapai tahapan keempat yakni melepas ikatan dengan organisasi radikal. Tahap kelima, setelah melepas ikatan dari keanggotaan organisasi radikal maka individu memerlukan sebuah identitas baru dan melakukan reintegrasi ke dalam masyarakat yang bersifat *mainstream*. Hal ini diibaratkan seperti seorang residivis yang baru keluar dari penjara juga membutuhkan sebuah identitas baru. Tahap terakhir, apabila individu telah mengalami proses deradikalisasi secara total, maka diperlukan beberapa kemungkinan agar ia kembali diterima oleh masyarakat. Beberapa cara dapat ditempuh dengan memperoleh pekerjaan baru, memiliki jejaring sosial, serta diterima oleh masyarakat yang dapat memahami perubahan yang dialaminya.

RAND Corporation melihat bahwa terdapat kesulitan di dalam menjalankan program deradikalisasi. Persoalan muncul ketika terdapat jurang pemisah yang cukup tajam di dalam literatur dimana terdapat pengabaian dalam membedakan dan menyamakan antara konsepsi militan Islamis dan tipe lain dari ekstremis serta menentukan implikasi dari proses deradikalisasi dan *disengagement*. Beberapa studi secara sederhana mengasumsikan tidak ada perbedaan antara militan Islamis dengan tipe ekstremisme lain, sedangkan studi lain menegaskan bahwa ekstremis Islam memiliki sifat yang berbahaya, unik, dan tidak dapat didamaikan dengan oponennya. Islamis radikal lebih memiliki komitmen dibanding ekstremis non religius lain dan untuk itu dimungkinkan untuk dideradikalisasi. Hal ini disebabkan oleh ideologi Islamis yang memiliki peran utama dalam kelompok ini. Oleh karena itu, efektivitas program deradikalisasi bergantung pada konteks waktu (*timing*), tindakan pemerintah dalam mengatasi tindak kekerasan, serta kontinuitas program setelah para ekstremis dibebaskan.

### **V.3.2. Kritik Metodologis Terhadap Indikator Radikalisme Yang Dikembangkan CSRC, Lazuardi Birru, & SETARA Institute**

Kritik metodologis yang peneliti kembangkan dalam melihat indikator radikalisme dilakukan melalui dua tahap. Pertama, peneliti memetakan konsepsi, indikator, dan kategori yang telah disusun oleh ketiga agen. Kedua, peneliti melakukan kritik berdasarkan beberapa aspek metodologis (Babbie 1990: 118-122; Wysocki 2001: 108) yakni: 1) definisi konseptual<sup>33</sup>; 2) definisi operasional<sup>34</sup>; 3) indikator pembentuk<sup>35</sup>; 4) skoring; 5) pembobotan; dan 6) derajat atau kategori yang dipakai.

#### **V.3.2.1. Pemetaan Konsepsi, Indikator, dan Kategori Radikalisme**

Ketiga agen yang mengkonstruksi indikator radikalisme satu sama lain memiliki cara yang berbeda di dalam mengembangkan konsep maupun indikator yang ada. CSRC memiliki konsepsi radikalisme dan radikalisasi. Konsepsi yang disebut pertama mengacu pada sebuah pra kondisi menuju terorisme yang memiliki dua karakteristik utama yaitu penggunaan kekerasan dan bermotif agama. Ada dua dimensi yang dikembangkan dalam dimensi ini yakni motif agama dan tindak kekerasan. Konsepsi yang disebut kedua mengacu pada proses mengadopsi sistem kepercayaan yang ekstrem, termasuk keinginan untuk menggunakan, mendukung dan memfasilitasi kekerasan sebagai sebuah metode untuk mempengaruhi perubahan masyarakat. Dimensi yang dikembangkan definisi ini juga menggunakan dua dimensi yaitu sistem kepercayaan dan cara kekerasan. Secara konseptual sebenarnya kedua konsepsi ini cukup baik karena memiliki elemen dimensi konsep. Namun, perlu dilihat pula ketika mengembangkan dalam bentuk indikator, konsepsi yang dirumuskan tidak secara jelas membedakan mana indikator yang dikembangkan dari dimensi yang ada.

<sup>33</sup> Proses dimana kita menetapkan secara tepat apa yang kita maksud ketika kita menggunakan terminologi tertentu (Babbie 1990). Kita mengidentifikasi dan mendefinisikan konsep yang akan digunakan dalam studi (Wysocki 2001).

<sup>34</sup> Definisi yang menggantikan secara tepat tentang bagaimana konsep yang akan diukur atau deskripsi yang mengoperasikan bagaimana cara melakukan pengukuran sebuah konsep (Babbie 1990).

<sup>35</sup> Komponen yang mengindikasikan kehadiran atau ketiadaan konsep kita pelajari baik (Babbie 1990). Apa yang kita pilih sebagai refleksi dari variabel yang dipelajari (Wysocki 2001).

Rumusan definisi dan indikator yang dibentuk disimpulkan dalam bentuk dua kategori yakni Islam kultural (nilai 2) dengan Islam politik (nilai 1).

Berikutnya konsepsi radikalisme yang dikembangkan Lazuardi Birru mengacu pada tindakan dan atau sikap atas paham yang tidak sejalan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa yang menjunjung tinggi toleransi dan terbuka terhadap sesama warga yang majemuk dari latar belakang primordialnya yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi, atau bertumpu pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Cakupan definisi yang dirumuskan cukup luas hingga meliputi beberapa aspek. Oleh karena itu, tidak terlihat secara jelas dimensi yang terkandung di dalam konsepsinya. Hal ini pula yang mempengaruhi banyaknya indikator yang membentuk konsepsi radikalisme. Satu hal menarik, lembaga ini melakukan penyusunan indeks dari indikator yang membentuknya dari rentang 1-100 yang terbagi menjadi tiga kategori yakni rendah, sedang (rentan), dan tinggi. Elaborasi indeks ini perlu menjadi salah satu contoh bagi pengembangan indeks radikalisme.

Selanjutnya, SETARA Institute memiliki konsepsi radikalisme yang diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianut. Perubahan radikal bisa dicapai melalui cara damai dan persuasif (toleransi), tetapi bisa juga dengan kekerasan (intoleransi pasif dan aktif). Dimensi toleransi dan intoleransi (pasif dan aktif) menjadi pembentuk konsepsi radikalisme. Definisi konseptual yang dibentuk lembaga ini cukup baik dengan memperjelas dimensi dan subdimensi. Kategori yang dibentuk pun konsisten dengan dimensinya yakni antara intoleransi aktif dan pasif. Bahkan indikator yang dirumuskan sangat banyak dan cukup luas cakupannya. Namun, perlu dilihat validitasnya apakah indikator yang dibuat mengukur konsepsinya atau tidak. Lembaga ini juga memiliki parameter lain untuk mengukur gerakan Islam radikal yang ingin merubah tatanan kehidupan masyarakat di dalam agenda perjuangan Islam. Indikator pembentuknya pun cukup banyak terkait dukungan, sikap, dan ekspresi terhadap kelompok gerakan Islam radikal. Kategori pembentuknya pun terdiri atas empat kategori mulai dari kelompok Islam moderat, radikal transnasional, radikal

lokal, dan jihadis. Komposisi kategori ini disusun atas dasar level kekerasan yang digunakan dalam kelompok.

Satu catatan penting dari pemaparan mengenai pemetaan indikator radikalisme adalah ketidakjelasan definisi operasional yang dirumuskan oleh konsepsinya. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan terhadap indikator yang disusun. Konsepsi radikalisme dapat dibangun secara metodologis jika memenuhi definisi konseptual serta definisi operasional yang jelas. Selain itu, konsepsi radikalisme menjadi lebih konkret apabila memiliki indikator yang menjadi parameter konsepsinya. Namun demikian, konsepsi dan indikator radikalisme yang dikembangkan oleh beberapa pihak memiliki kelemahan dan kekurangan secara metodologis. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal. *Pertama*, definisi radikalisme yang digunakan oleh beberapa agen tidak memiliki definisi konseptual dan definisi operasional yang jelas. *Kedua*, indikator radikalisme yang dikembangkan terkadang tidak relevan dengan definisi konseptualnya. *Ketiga*, kategori radikalisme yang dibuat terkadang tidak konsisten dengan definisi konseptualnya. Tabel berikut akan meringkas pemaparan deskripsi pemetaan indikator radikalisme:

**Tabel 15**  
**Pemetaan Indikator Radikalisme**

RADIKALISME	DESKRIPSI		
	DEFINISI KONSEPTUAL	INDIKATOR	KATEGORI
<b>CSRC</b>	<p>1. <b>Radikalisme:</b> merupakan sebuah pra kondisi menuju terorisme yang memiliki dua karakteristik utama yaitu penggunaan kekerasan dan bermotif agama</p> <p>2. <b>Radikalisasi:</b> proses mengadopsi sistem kepercayaan yang ekstrem, termasuk keinginan untuk menggunakan, mendukung dan memfasilitasi kekerasan sebagai sebuah metode untuk mempengaruhi perubahan masyarakat</p>	<p>Penekanan pada spektrum <b>Islam kultural</b> dengan <b>Islam politik</b> (Islamisme) dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi tentang kewajiban menggunakan cadar bagi muslimah</li> <li>2. Dukungan terhadap gerakan penegakan khilafah Islamiyah atau negara Islam di Indonesia.</li> <li>3. Persepsi tentang boleh atau tidaknya penggunaan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan Islam.</li> <li>4. Sistem pemerintahan</li> <li>5. Formulasi syariah</li> <li>6. Jihad, kekerasan, dan terorisme</li> <li>7. Kesetaraan gender</li> <li>8. Pluralisme agama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Islam Politik</li> <li>2. Islam Kultural</li> </ol>
<b>Lazuardi Birru</b>	<p><b>Radikalisme:</b> tindakan dan atau sikap atas faham yang tidak sejalan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa yang menjunjung tinggi toleransi dan terbuka terhadap sesama warga yang majemuk dari latar belakang primordialnya yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi, atau bertumpu pada prinsip-prinsip kemanusiaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan radikalisme;</li> <li>2. Sikap radikalisme;</li> <li>3. Jihadisme;</li> <li>4. Agenda Islamis;</li> <li>5. Dukungan terhadap organisasi Islamis;</li> <li>6. Keanggotaan terhadap organisasi Islamis;</li> <li>7. Alienasi dan deprivasi;</li> <li>8. Intoleransi terhadap non muslim;</li> <li>9. Perasaan tidak aman;</li> <li>10. Perasaan terancam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendah</li> <li>2. Sedang</li> <li>3. Tinggi (rentan)</li> </ol>
<b>SETARA Institute</b>	<p><b>Radikalisme:</b> pandangan yang ingin melakukan perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianut. Perubahan radikal bisa dicapai melalui cara damai dan persuasif (toleransi), tetapi bisa juga dengan kekerasan (intoleransi pasif dan aktif).</p> <p>1. <b>Intoleransi pasif</b> (<i>passive intolerance</i>): menunjuk pada</p>	<p>Elaborasi kosepsi mengenai <b>radikalisme</b> yang terdiri atas dimensi isu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Intoleransi</b>, indikatornya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bertetangga dengan orang yang berbeda suku dan agama</li> <li>b. Memasuki perkumpulan berbeda suku dan agama</li> <li>c. Pertimbangan suku dan agama dalam memilih teman</li> <li>d. Menikah beda suku dan agama</li> <li>e. Sikap terhadap anggota keluarga yang berpindah agama</li> <li>f. Pandangan terhadap orang yang tidak beragama</li> <li>g. Persetujuan terhadap rumah ibadah agama lain</li> <li>h. Pandangan terhadap adanya agama lain di luar enam agama</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toleransi pasif</li> <li>2. Toleransi Aktif</li> </ol>

RADIKALISME	DESKRIPSI		KATEGORI
	DEFINISI KONSEPTUAL	INDIKATOR	
	<p>kombinasi gagasan fundamental, eksklusivisme, dan intoleransi yang tidak memanifestasikan menjadi kekerasan</p> <p>2. <b>Intoleransi aktif</b> (<i>active intolerance</i>): jenjang (<i>grade</i>) untuk menunjuk gagasan dan cara pandang yang intoleran menjadi kekerasan</p>	<p>i. Pandangan terhadap Ahmadiyah</p> <p>2. <b>Konflik &amp; kekerasan</b>, indikatornya:</p> <p>a. Persetujuan terhadap organisasi radikal yang menggunakan kekerasan</p> <p>b. Penilaian terhadap organisasi radikal yang menggunakan kekerasan</p> <p>c. Persetujuan terhadap aksi memberantas aliran sesat dan maksiat</p> <p>3. <b>Pancasila</b>, indikatornya:</p> <p>a. Urgensi pancasila</p> <p>b. Kesungguhan penyelenggara negara dalam menjalankan Pancasila</p> <p>4. <b>Terorisme</b>, indikatornya:</p> <p>a. Hubungan antara organisasi radikal dan terorisme</p> <p>b. Bentuk hubungan antara organisasi radikal dan terorisme</p> <p>5. <b>Hukum sekuler &amp; syariat Islam</b>, indikatornya:</p> <p>a. Syariat Islam dijadikan dasar penyelenggaraan negara</p> <p>b. Persetujuan pemberlakuan hukum rajam di Indonesia</p> <p>6. <b>Demokrasi &amp; khilafah</b>, indikatornya:</p> <p>a. Persetujuan terhadap sistem khilafah</p> <p>b. Persetujuan demokrasi produk barat</p>	
	<p><b>Gerakan Islam radikal:</b> gerakan yang merubah tatanan kehidupan masyarakat di dalam agenda perjuangan Islam</p>	<p>1. Ekspresi terhadap keberadaan kelompok Islam radikal</p> <p>2. Kelompok Islam radikal menimbulkan ketidaktertaman warga</p> <p>3. Sikap kelompok Islam radikal terhadap non muslim</p> <p>4. Keberadaan kelompok Islam radikal bagi kalangan non muslim</p> <p>5. Tingkat dukungan menjadi anggota kelompok Islam radikal</p> <p>6. Bentuk dukungan (memberikan sumbangan) terhadap kelompok Islam radikal</p> <p>7. Tingkat dukungan terhadap keluarga atau teman dekat yang menjadi anggota/pengikut kelompok Islam radikal</p> <p>8. Tingkat dukungan terhadap kemungkinan diterapkannya Perda Syariah</p> <p>9. Kelompok Islam radikal membuat citra agama Islam menjadi negatif</p>	<p>1. Kelompok Islam moderat</p> <p>2. Kelompok Islam radikal transnasional</p> <p>3. Kelompok Islam radikal lokal</p> <p>4. Kelompok Islam jihadis</p>

### **V.3.2.2. Kritik Metodologis Terhadap Definisi Konseptual, Definisi Operasional, Indikator, Skoring, Pembobotan, dan Kategori**

Kritik metodologis pertama peneliti sampaikan berdasarkan aspek definisi konseptual yang dirumuskan oleh masing-masing agen. Secara umum, ketiga agen memiliki dasar definisi konseptual yang cukup jelas. Bahkan, ketiga lembaga membangun definisi berdasarkan serangkaian dimensi yang membentuk konsepnya. Dimensi yang disusun akan memudahkan untuk melakukan pengelompokan konsep dari indikator yang ada. Namun, terdapat kelemahan ketika rumusan definisi konseptual pada bagian dimensi tidak dipaparkan definisi operasionalnya. Kondisi ini menjadi kritik metodologis kedua yang dilakukan peneliti. Hanya SETARA Institute yang melakukan rumusan definisi operasional dari dimensi yang konsep yang ada. Ketiadaan definisi operasional membuat tahap untuk merefleksikan tolak ukur konsep menjadi luas cakupannya, sehingga berpotensi untuk mengembangkan beragam indikator yang secara bebas tetapi tidak berkaitan dengan definisi konseptual yang digunakan.

Kritik metodologis ketiga mencakup indikator yang dikembangkan oleh setiap agen. Ketiga agen memiliki indikator yang menggambarkan sejauh mana konsepsi yang ada dapat direfleksikan oleh beberapa parameter. Catatan yang perlu ditekankan pada kritik ketiga adalah indikator yang dikembangkan oleh masing-masing agen dilekatkan dengan konsepsi lain yakni persepsi maupun sikap mengenai konsepsi radikalisme yang dibangun. Oleh karena itu, indikator yang ada semuanya diukur berdasarkan pandangan atau persepsi responden secara subyektif. Hal ini berhubungan dengan kritik metodologis keempat dan kelima yang peneliti sampaikan mengenai skoring dan pembobotan. Persepsi mengenai indikator radikalisme yang dirumuskan oleh setiap agen diberikan skoring berupa pernyataan dengan skala Likert. Bobot pernyataan yang dihasilkan bergantung dari rata-rata jawaban responden yang kemudian akan menggambarkan angka presentasi jawaban secara univariat. Cara ini digunakan oleh CSRC Institute, sedangkan Lazuardi Birru melakukan pengukuran indeks dengan rentang nilai 0-100. Adapun SETARA Institute hanya mengeluarkan tabel frekuensi univariat sederhana untuk memaparkan pertanyaan terkait.

Skoring yang dilakukan oleh CSRC hanya memiliki rentang 1 sampai 2 yang artinya skor 1 menunjukkan persepsi setuju terhadap Islamisme, sedangkan skor 2 menunjukkan persepsi setuju terhadap Islam moderat. Indeks 0-100 yang disusun oleh Lazuardi Birru mengandung arti bahwa skor 0 menunjukkan sikap dan tindakan anti-radikalisme, sedangkan skor 100 menunjukkan sikap dan tindakan pro-radikalisme. Kelemahan dari penentuan skoring dengan mekanisme pembobotan seperti ini sangat rentan dengan subyektivitas responden. Sebab, penelitian yang diangkat oleh ketiga agen lebih menekankan pada teknik survei sebagai satu-satunya instrumen yang menjadi parameter pembobotan skor. Padahal, pembobotan juga bisa dilakukan dengan membagi bobot konseptual baik berdasarkan dimensi maupun indikator dengan mengembangkan instrumen selain teknik survei misalkan dengan wawancara mendalam atau FGD oleh para ahli (*expert judgement*). Teknik ini digunakan sebagai bentuk keseimbangan pembobotan skor sekaligus kontrol instrumen yang digunakan.

Berdasarkan skoring dan pembobotan tersebut barulah dapat dilakukan proses kategorisasi. CSRC menggunakan kategorisasi Islam politik (Islamisme) dan Islam kultural (moderat) untuk memberikan derajat mengenai radikalisme. Lazuardi Birru memberikan kategorisasi rendah untuk level “aman” radikalisme, sedang untuk level “rentan” radikalisme, dan tinggi untuk level “bahaya” radikalisme. Kategori yang dibuat oleh CSRC dan SETARA Institute keduanya dapat dikatakan bersifat deskriptif dengan hanya mengemukakan data yang bersifat univariat berupa frekuensi. Namun, Lazuardi Birru cukup menarik di dalam membuat kategori dimana dapat dikatakan bersifat eksplanatif dan juga prediktif. Ketiga kategori yakni aman, rentan, dan bahaya dapat memberikan indikasi terhadap radikalisme. Hal ini dapat dijadikan contoh bagi pengembangan indikator radikalisme selanjutnya. Berikut ikhtisar kritik metodologis terhadap indikator radikalisme:

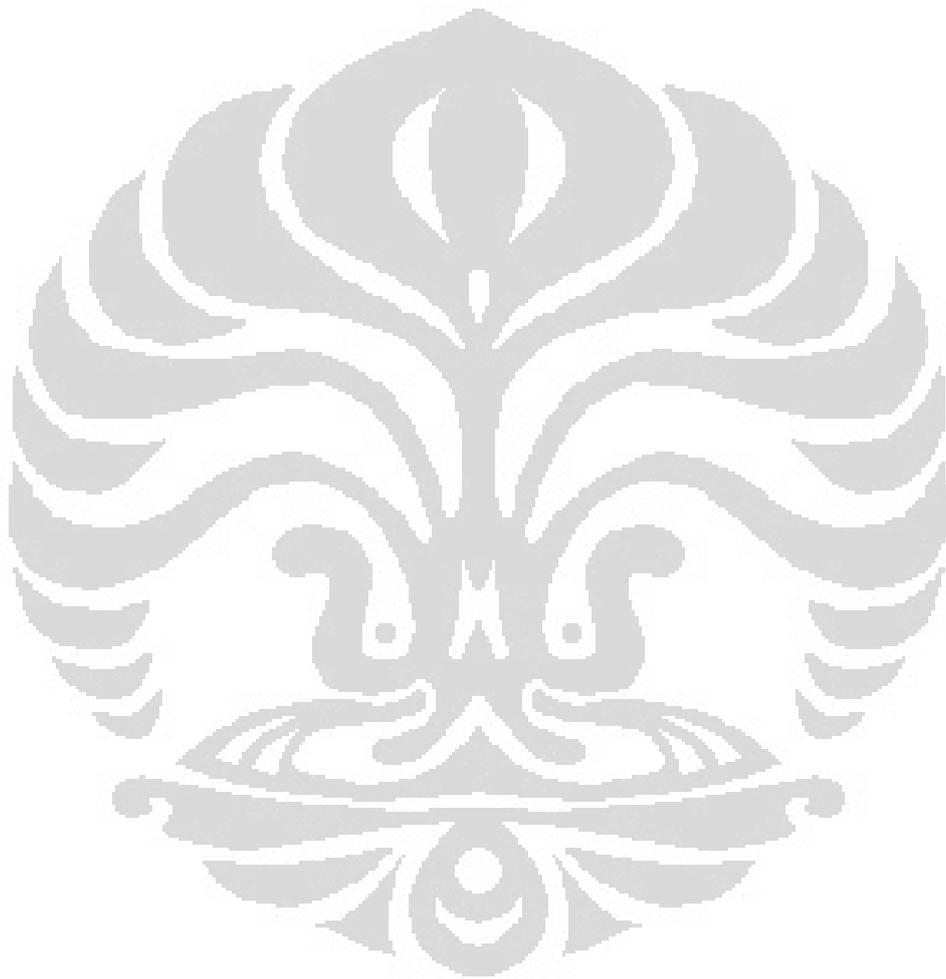
**Tabel 16**  
**Ikhtisar Kritik Metodologis Terhadap Indikator Radikalisme**

Aspek Kritik	CSRC	Lazuardi Birru	SETARA Institute
<b>Definisi Konseptual</b>	Memuat dua dimensi pembentuk konsep yakni agama dan kekerasan	Memuat dimensi sikap dan tindakan	Memuat dua dimensi yakni toleran dan intoleransi yang terdiri dari sub dimensi pasif dan aktif
<b>Definisi Operasional</b>	Tidak ada	Tidak ada	Memuat definisi sub dimensi intoleransi pasif dan aktif
<b>Indikator</b>	8 indikator yang disusun dalam bentuk persepsi	10 indikator yang disusun dalam bentuk dimensi sikap dan tindakan	6 dimensi isu yang memuat 20 indikator yang disusun dalam bentuk persepsi
<b>Skoring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai 1: setuju Islam politik</li> <li>• Nilai 2: setuju Islam kultural</li> <li>• Rentang skor dari 1 sampai 2, dimana semakin mendekati nilai satu menunjukkan persepsi Islamisme sedangkan mendekati skor 2 menunjukkan persepsi moderat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks 1-100</li> <li>• Indeks 0 berarti anti-radikalisme sempurna dan indeks 100 berarti pro-radikalisme.</li> </ul>	Tidak ada
<b>Pembobotan</b>	Dilakukan dengan menggabungkan skoring nilai rata-rata di setiap pertanyaan untuk masing-masing indikator	Dilakukan dengan menggabungkan skoring rata-rata di setiap indikator, kemudian membagi menjadi tiga rentang	Tidak ada
<b>Kategori</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Islam politik: Islamisme</li> <li>2. Islam kultural: moderat</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skor 0: Anti-radikalisme</li> <li>• 100: Pro-radikalisme</li> <li>• 0-33,3: level "aman" radikalisme, kategori rendah</li> <li>• 33,3-66,6: level "rentan" radikalisme, kategori sedang</li> <li>• 66,6-100: level "bahaya" radikalisme, kategori tinggi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intoleransi pasif</li> <li>2. Intoleransi aktif</li> </ol>

Secara umum, peneliti berpendapat bahwa ada beberapa catatan kritis yang perlu diperhatikan dalam menyusun indikator radikalisme. *Pertama*, secara konseptual definisi radikalisme harus memiliki elemen yang bersifat netral dan tidak memiliki tendensi ke salah satu agama. *Kedua*, secara operasional definisi

radikalisme juga harus mencakup dimensi operasional yang jelas untuk memudahkan merumuskan indikator yang akan dipakai. *Ketiga*, indikator yang ada hendaknya dapat menjangkau fakta subyektif dan obyektif yang menjadi parameter radikalisme. *Keempat*, pembobotan dan skoring yang dilakukan seharusnya memiliki proporsi yang seimbang antara teknik dengan instrumen yang digunakan—baik survei, wawancara, maupun FGD. *Kelima*, kategori yang dibuat pun sudah sepatutnya tidak hanya bersifat deskriptif dan eksplanatif, melainkan bersifat prediktif untuk mendukung deteksi dini radikalisme.

Oleh karena itu, berdasarkan kritik metodologis yang peneliti lakukan, maka diperlukan sebuah upaya untuk merekonstruksi kembali indikator radikalisme yang lebih memenuhi kaedah ilmiah yang ketat. Meskipun kritik metodologis yang peneliti lakukan bersifat sederhana dan prematur, namun tetap saja dapat menggambarkan betapa indikator wacana radikalisme yang dikembangkan beberapa pihak mengandung kelemahan secara akademis sehingga sulit dipertanggungjawabkan. Upaya selanjutnya yang peneliti lakukan pada bab VI tidak sampai kepada tahap mengkonstruksi dan mengelaborasi kembali indikator radikalisme yang telah dibangun sebelumnya. Sebelum menuju tahap penyusunan indikator, peneliti berpendapat ada baiknya jika dilakukan semacam pendefinisian ulang konsepsi radikalisme yang ada. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih konsepsi yang lebih banyak tidak netral. Berikutnya, perlu adanya ketentuan yang lebih spesifik didalam mengkonstruksi indikator radikalisme. Misalnya radikalisme yang didefinisikan lebih fokus pada radikalisme kelompok Islam agar maknanya juga jelas dan tidak tendensius. Kemudian, barulah dilakukan tahap untuk menyusun model dan skenario radikalisme sebagai cara deteksi dini. Tahap akhir baru dapat dikembangkan penyusunan indikator. Tesis ini penulis upayakan hanya sampai pada tahap penyusunan model dan skenario radikalisme.



## **BAB VI**

### **KONSTRUKSI MODEL & SKENARIO RADIKALISME**

Pertanyaan terakhir dari penelitian ini berupaya untuk melakukan konstruksi model dan skenario<sup>36</sup> untuk deteksi dini radikalisme berdasarkan pemetaan dan elaborasi wacana radikalisme yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Oleh karena itu, bagian ini meliputi dua pokok bahasan yaitu pertama, konstruksi model radikalisme dan kedua, skenario deteksi dini radikalisme.

#### **VI.1. Konstruksi Model Radikalisme**

Pada bagian akhir pembahasan tesis ini peneliti melakukan upaya untuk mengkonstruksi model radikalisme. Hal ini dilakukan untuk memberikan kontribusi akademis yang bersifat praksis bagi para pengambil kebijakan terutama untuk kepentingan deteksi dini radikalisme. Kebutuhan akan indikator radikalisme—lepas dari kritik teoretis dan metodologis—sebetulnya sudah banyak dibahas oleh beberapa lembaga penelitian (CSRC, Lazuardi, SETARA, Gallup Poll). Namun demikian, indikator yang ada lebih banyak berdiri pada pandangan maupun persepsi publik mengenai radikalisme atau organisasi radikal. Indikator radikalisme yang ada memiliki kelemahan dengan belum membahas indikator prediktif yang dapat digunakan untuk deteksi dini radikalisme. Misalnya, apakah rumusan khilafah Islamiyah yang didengungkan oleh HTI di berbagai forum, baik secara verbal maupun tertulis, dapat dikategorikan radikal atau tidak? Apakah ada kemungkinan organisasi semacam ini dapat bertransformasi menjadi organisasi radikal yang menggunakan kekerasan? Kelemahan dan kekurangan indikator radikalisme inilah yang hendak dikritik oleh peneliti dengan mengkonstruksi model yang bersifat prediktif.

Pada bab IV peneliti menjelaskan bagaimana setiap agen yang ada mengadopsi gagasan mengenai radikalisme dari beberapa intelektual barat. Perbedaan atau gap wacana radikalisme yang muncul pada bab IV menunjukkan

<sup>36</sup> Model analisis dan skenario yang peneliti buat dilakukan dengan mengacu pada dokumen “Analisis Sosial Politik Pembangunan Jembatan Selat Sunda” yang disusun oleh Iwan gardono Sujatmiko et.al., yang didanai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) UI, 2012.

bahwa wacana radikalisme intelektual barat lebih banyak menggunakan pendekatan yang bersifat makro (struktur) dimana penjelasan kemunculan radikalisme selalu dikaitkan dengan oposisi biner antara Islam dengan demokrasi. Gagasan ini diadopsi oleh setiap agen yang ada dengan mengembangkan gagasan wacana radikalisme yang lebih bersifat elaboratif (*morphostatis*) dimana penjelasan tentang radikalisme tidak hanya bersifat eksplanatif, tetapi dikembangkan dalam bentuk deskripsi indikator dan juga data kuantitatif. Namun demikian, gagasan utama setiap agen yang bersifat elaboratif ini tidak lepas dari simpulan utama yang menempatkan Islam sebagai artikulator yang berhadapan dengan demokrasi. Oleh karenanya, wacana radikalisme yang disimpulkan justru bersifat reproduktif (*morphostatis*) dimana Islam dan demokrasi menjadi temuan utama yang secara dominan muncul dalam setiap hasil kajian riset.

Pada bab V peneliti mencoba melakukan kritik, secara metodologis, terhadap wacana radikalisme yang dihasilkan oleh setiap agen. Hal ini peneliti lakukan mengingat perluasan struktur pengetahuan yang bersifat elaboratif oleh setiap agen perlu dilihat secara akademis dengan menggunakan kritik metodologis. Sebab, proposisi indikator yang ditawarkan oleh setiap agen secara akademis juga perlu memiliki prosedur yang ketat secara metodologis. Seringkali kita abai melihat prosedur metodologis seperti ini dan memandang hasil penelitian kuantitatif dapat diterima begitu saja tanpa dipertanyakan kembali prosedurnya. Dengan melakukan kritik secara metodologis, peneliti dapat melihat celah kekurangan dari hasil riset yang dihasilkan sehingga ketika peneliti hendak melakukan konstruksi wacana radikalisme pada tahap selanjutnya dapat bersandar pada kritik tersebut. Oleh karena itu, struktur pengetahuan tentang wacana radikalisme yang terbentuk jelas terlihat apa dan bagaimana posisi setiap agen di dalam struktur pengetahuan yang ada. Peneliti memposisikan diri sebagai salah satu agen yang turut melakukan konstruksi wacana radikalisme dengan menggunakan kritik metodologis sebagai landasan dasar awal untuk membuat model dan skenario radikalisme. Namun demikian, perlu dicatat bahwa kritik metodologis yang peneliti sampaikan merupakan bagian dari serangkaian proses menuju pembentukan indikator. Tesis ini memang belum sampai pada tahap penyusunan indikator, melainkan melakukan penyusunan model analisis dan

skenario radikalisme. Dasar pembentukan model dan skenario ini peneliti peroleh dari hasil pemetaan wacana radikalisme yang dikembangkan oleh beberapa intelektual sebagai landasan awal untuk menjelaskan apa latar belakang yang dapat menyebabkan radikalisme, terutama di Indonesia.

Sebelum dijelaskan model apa saja yang dapat digunakan sebagai variabel yang dapat menimbulkan radikalisme, peneliti akan mengulas konsepsi mengenai radikalisme beserta tumpang tindih konsepsi yang muncul. Konsepsi ini peneliti kembangkan berdasarkan pemetaan wacana radikalisme yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Perlu menjadi catatan bahwa konsepsi radikalisme yang ada telah dimaknai oleh banyak pihak sebagai bentuk konsep yang bersifat *pejorative* (merendahkan) maknanya. Padahal konsepsi radikalisme secara etimologis bersifat netral dan tidak ada tendensi menyudutkan identitas agama tertentu. Definisi radikalisme yang peneliti lakukan juga difokuskan pada definisi tentang radikalisme kelompok Islam untuk memudahkan pembentukan model dan skenario.

#### **VI.1.1. Tumpang Tindih Konsepsi Radikalisme & Tipologi Radikalisme Kelompok Islam**

Rumusan konsepsi mengenai radikalisme pada dasarnya tidak monolitik. Peneliti menganggap penting untuk melihat bahwa definisi radikalisme dengan definisi lain bisa tumpang tindih meskipun terminologi konsepnya berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada kesepakatan dalam menggunakan konsepsi radikalisme walaupun secara substansi rumusan definisinya bisa sama. Batasan definisi mengenai radikalisme yang dirumuskan oleh peneliti penting untuk dibedakan sekaligus disamakan dengan definisi terkait. Hal ini untuk menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai rumusan konsepsi radikalisme tidak serta muncul sebagai gagasan orisinal peneliti, melainkan sebagai usaha peneliti di dalam memetakan genealogi pengetahuan mengenai wacana radikalisme yang telah dikembangkan oleh berbagai pihak sebelumnya. Rumusan definisi radikalisme yang bersifat netral, memiliki dasar konseptual dan definisi operasional yang jelas, disertai dengan indikator yang akurat menjadi basis pemetaan konsepsi yang hendak dikonstruksi atau dirumuskan oleh peneliti.

Berikut ini dipaparkan beberapa konsepsi terkait radikalisme yang dikembangkan beberapa intelektual serta beberapa agen sebagai dasar pemetaan konsepsi radikalisme

Wacana radikalisme Islam (Husaini dan Hidayat 2002: 195-197 dalam Sumbulah, 2010) dalam perspektif intelektual Barat dapat dibagi menjadi dua kutub, yaitu kelompok konfrontasionis (Bernard Lewis, Gilles Kepel, & Samuel Huntington) dan kelompok akomodasionis (John L. Esposito, Noam Chomsky, & Leon T. Hadar). Kelompok konfrontasionis berkesimpulan bahwa secara intrinsik, Islam adalah agama yang anti-demokrasi, anti-Barat, memiliki sistem pemerintahan otoriter, dan fundamentalisme adalah penyakit yang membahayakan kemanusiaan. Di sisi lain kelompok intelektual akomodasionis berpandangan bahwa Islam jauh dari anti demokrasi. Oleh karena itu, penilaian bahwa umat Islam adalah monolitik merupakan sebuah kesalahan. Munculnya kelompok Islam politik yang cenderung fundamentalistis, lahir bukan karena ajaran Islam menjejakkan demikian, melainkan karena tekanan dan dominasi ekonomi-politik Barat atas dunia Islam.

Di sisi lain wacana radikalisme keagamaan oleh Kartodirdjo (1998: 38) dimaknai sebagai gerakan keagamaan yang berupaya merombak secara total suatu tatanan politik atau tatanan sosial yang ada dengan menggunakan kekerasan. Kendati ekspresi radikalisme keagamaan demikian beragam, secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah gerakan yang selalu dikaitkan dengan pertentangan secara tajam antara nilai-nilai yang dianut dan diperjuangkan oleh kelompok tertentu dengan nilai-nilai yang berlaku dan dianggap mapan. Pertentangan yang muncul seringkali menimbulkan berbagai macam bentuk resistensi seperti kekerasan fisik maupun kultural (ideologis), baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian, wacana radikalisme keagamaan lebih banyak diasosiasikan dengan gerakan keagamaan. Seolah-olah wacana radikalisme keagamaan disamakan dengan gerakan keagamaan. Wacana radikalisme keagamaan dan gerakan keagamaan memiliki kesamaan dalam hal perubahan nilai dasar dalam tatanan kehidupan masyarakat dan berbeda dalam hal penggunaan cara kekerasan untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam bentuk gerakan. Oleh karenanya,

terminologi terkait radikalisme pun memiliki nuansa variasi yang berbeda oleh beberapa tokoh.

Berbeda dengan definisi sebelumnya, Adam Schwarz (1999) menyebut dengan istilah Islam militan untuk menunjuk DDII dan sayap *mujahidnya*, KISDI, yang memiliki ciri: 1) menafsirkan hukum Islam secara kaku; 2) bersikap anti-Barat dan agama semitis; 3) kritis terhadap etnis Cina dan umat kristen yang secara ekonomi-politik relatif lebih mapan dibanding dengan kelompok Islam militan. Adapun Robert W. Hefner (2001) memakai istilah Islam antiliberal untuk menunjuk DDII dan KISDI. Hefner melihat kedua organisasi ini untuk menunjuk organisasi Islam yang secara nyata menyerang liberalisme barat. John L. Esposito (1992) menyebutnya dengan istilah revivalisme Islam atau aktivisme Islam yang memiliki akar tradisi Islam. Hal ini menunjuk pada kelompok yang mengacu pada literalis dan harapan untuk kembali pada kehidupan Islam di masa lalu. Esposito menganggap penting dibedakan pengertian revivalisme Islam dengan fundamentalisme yang dilekatkan pada agama Kristen sebagai kelompok literalis, statis, dan ekstrem. Atau lebih jauh lagi, fundamentalisme sering disamakan dengan ekstremisme, fanatisme, aktivisme politik, teroris, dan anti-Amerika. Sementara itu, Oliver Roy (1994) cenderung menafsirkan Islam politik sebagai aktivitas agama dan sekaligus sebagai ideologi politik yang secara spesifik ia sebut dengan istilah neofundamentalisme dimana pemberlakuan syariat Islam dikehendaki. Islam dalam hal ini menjadi panduan utama kehidupan umat manusia. Terakhir, William Liddle (1999) menggunakan istilah Islam skripturalis karena kelompok ini memandang teks-teks Al-Quran maupun *hadis* telah jelas dengan sendirinya (*self evidence*) dan karenanya tidak membutuhkan interpretasi dan adaptasi untuk disesuaikan dengan dinamisme lokal.

Intelektual yang memiliki definisi berbeda terkait wacana radikalisme satu sama lain memang tidak menegaskan sebuah kesepakatan apakah definisi yang mereka buat mengacu pada terminologi radikalisme yang sama. Namun demikian, peneliti melihat terdapat sebuah kesamaan ciri dari setiap rangkaian definisi yang dibuat oleh masing-masing intelektual yakni semuanya terkait dengan serangkaian aktivitas—baik dalam kelompok maupun organisasi—untuk menawarkan gagasan

Islam sebagai alternatif dari demokrasi. Untuk lebih memudahkan, berikut ikhtisar tumpang tindih konsepsi radikalisme:

**Tabel 17**  
**Ikhtisar Tumpang Tindih Konsepsi Radikalisme Oleh Beberapa Intelektual**

RADIKALISME	DEFINISI
<b>Kelompok konfrontasionis</b>	Berkesimpulan bahwa secara intrinsik, Islam adalah agama yang anti-demokrasi, anti-Barat, memiliki sistem pemerintahan otoriter, dan fundamentalisme adalah penyakit yang membahayakan kemanusiaan.
<b>Kelompok intelektual akomodasionis</b>	Berpandangan bahwa Islam jauh dari anti demokrasi. Oleh karena itu, penilaian bahwa umat Islam adalah monolitik merupakan sebuah kesalahan. Munculnya kelompok Islam politik yang cenderung fundamentalistis, lahir bukan karena ajaran Islam menjejarkan demikian, melainkan karena tekanan dan dominasi ekonomi-politik Barat atas dunia Islam.
<b>Kartodirdjo</b>	Dimaknai sebagai gerakan keagamaan yang berupaya merombak secara total suatu tatanan politik atau tatanan sosial yang ada dengan menggunakan kekerasan
<b>Adam Schward</b>	Menyebut dengan istilah Islam militan untuk menunjuk DDII dan sayap <i>mujahidnya</i> , KISDI, yang memiliki ciri: 1) menafsirkan hukum Islam secara kaku; 2) bersikap anti-Barat dan agama semitis; 3) kritis terhadap etnis Cina dan umat kristen yang secara ekonomi-politik relatif lebih mapan dibanding dengan kelompok Islam militan.
<b>Robert W. Hefner</b>	Memakai istilah Islam antiliberal untuk menunjuk DDII dan KISDI. Hefner melihat kedua organisasi ini untuk menunjuk organisasi Islam yang secara nyata menyerang liberalisme barat
<b>John L. Esposito</b>	Menyebutnya dengan istilah revivalisme Islam atau aktivisme Islam yang memiliki akar tradisi Islam. Hal ini menunjuk pada kelompok yang mengacu pada literalis dan harapan untuk kembali pada kehidupan Islam di masa lalu. Esposito menganggap penting dibedakan pengertian revivalisme Islam dengan fundamentalisme yang dilekatkan pada agama Kristen sebagai kelompok literalis, statis, dan ekstrem. Atau lebih jauh lagi, fundamentalisme sering disamakan dengan ekstremisme, fanatisme, aktivisme politik, teroris, dan anti-Amerika
<b>Oliver Roy</b>	Cenderung menafsirkan Islam politik sebagai aktivitas agama dan sekaligus sebagai ideologi politik yang secara spesifik ia sebut dengan istilah neofundamentalisme dimana pemberlakuan syariat Islam dikehendaki. Islam dalam hal ini menjadi panduan utama kehidupan umat manusia
<b>William Liddle</b>	Menggunakan istilah Islam skripturalis karena kelompok ini memandang teks-teks Al-Quran maupun <i>hadis</i> telah jelas dengan sendirinya ( <i>self evidence</i> ) dan karenanya tidak membutuhkan interpretasi dan adaptasi untuk disesuaikan dengan dinamisme lokal
<b>CSRC</b>	<b>Radikalisme:</b> merupakan sebuah pra kondisi menuju terorisme yang memiliki dua karakteristik utama yaitu penggunaan kekerasan dan bermotif agama <b>Radikalisasi:</b> proses mengadopsi sistem kepercayaan yang ekstrem, termasuk keinginan untuk menggunakan, mendukung dan memfasilitasi kekerasan sebagai sebuah metode untuk mempengaruhi perubahan masyarakat
<b>Lazuardi Birru</b>	<b>Radikalisme:</b> tindakan dan atau sikap atas faham yang tidak sejalan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa yang menjunjung tinggi toleransi dan terbuka terhadap sesama warga yang majemuk dari latar belakang primordialnya yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi, atau bertumpu pada prinsip-prinsip kemanusiaan.
<b>SETARA Institute</b>	<b>Radikalisme:</b> pandangan yang ingin melakukan perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianut. Perubahan radikal bisa dicapai melalui cara damai dan persuasif (toleransi), tetapi bisa juga dengan kekerasan (intoleransi pasif dan aktif).

Hal penting lainnya yang perlu dicatat adalah definisi radikalisme yang peneliti konstruksi tidak dibuat langsung berdasarkan indikator tertentu, tetapi peneliti membuat semacam tipologi radikalisme kelompok Islam yang kemudian di dalamnya terdapat beberapa ciri. Berikut definisi radikalisme yang dapat peneliti konstruksi:

**Radikalisme kelompok Islam** didefinisikan sebagai sebuah faham atau pandangan kelompok yang ingin melakukan perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi terhadap realitas sosial atau ideologi Islam yang dianut yang dapat ditempuh melalui cara kompromi maupun non kompromi (kekerasan).

- **Cara kompromi** adalah cara yang bisa dicapai melalui cara damai dan persuasif (toleran)
- **Non kompromi** adalah cara yang bisa dicapai dengan kekerasan (intoleransi pasif dan aktif).
  1. **Intoleransi pasif** (*passive intolerance*): menunjuk pada kombinasi gagasan fundamental, eksklusivisme, dan intoleransi yang tidak memanifestasikan menjadi kekerasan
  2. **Intoleransi aktif** (*active intolerance*): jenjang (*grade*) untuk menunjuk gagasan dan cara pandang yang intoleran menjadi kekerasan

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disusun tipologi radikalisme berdasarkan: (1) jenis tindakan (strategi dan cara) serta (2) tujuan (vertikal dan horizontal).

#### **Tipologi radikalisme kelompok Islam:**

##### **1. Tipe I: Reformis**

- a. Target: sistem hukum, pendidikan, kesejahteraan sosial
- b. Outcome: akomodasi
- c. Ciri:
  - (1) berjuang melakukan perubahan sistem sosial & politik negara
  - (2) perjuangan bersifat ideologis
  - (3) memiliki organisasi yang bersifat terbuka
  - (4) adanya kondisi deprivasi & alienasi

## 2. **Tipe II: Revolusioner**

- a. Target: negara
- b. Outcome: konfrontasi
- c. Ciri:
  - (1) berjuang untuk memperoleh kekuasaan politis
  - (2) memiliki intoleransi aktif
  - (3) memiliki organisasi yang bersifat tertutup
  - (4) menggunakan cara kekerasan

## 3. **Tipe III: Societal**

- a. Target: ekonomi, pendidikan
- b. Outcome: integrasi
- d. Ciri:
  - (1) berjuang melakukan perubahan sistem sosial dan politik masyarakat
  - (2) perjuangan bersifat pragmatis
  - (3) memiliki organisasi yang bersifat terbuka
  - (4) adanya kondisi deprivasi & alienasi

## 4. **Tipe IV: Spritual/Mental**

- a. Target: kesadaran religius
- b. Outcome: penarikan diri dari masyarakat
- c. Ciri:
  - (1) berjuang untuk memperoleh pemurnian dan kesadaran individual
  - (2) memiliki intoleransi pasif
  - (3) memiliki organisasi yang bersifat tertutup
  - (4) menggunakan cara persuasif

Berikut gambaran tipologi radikalisme kelompok Islam yang dapat diringkas melalui tabel berikut:

**Tabel 18**  
**Tipologi Radikalisme Kelompok Islam**

RADIKALISME		JENIS TINDAKAN (STRATEGI & CARA)	
		Legitimate	Illegitimate
T U J U A N	Vertikal <i>State-centric</i>	<b>TIPE I: Reformis</b>  <b>Target:</b> sistem hukum, pendidikan, kesejahteraan sosial  <b>Outcome:</b> akomodasi  <b>Ciri:</b> (1) Berjuang melakukan perubahan sistem sosial & politik negara (2) Perjuangan bersifat ideologis (3) Memiliki organisasi yang bersifat terbuka (4) Adanya kondisi deprivasi & alienasi	<b>TIPE II: Revolusioner</b>  <b>Target:</b> negara  <b>Outcome:</b> konfrontasi  <b>Ciri:</b> (1) Berjuang untuk memperoleh kekuasaan politis (2) Memiliki intoleransi aktif (3) Memiliki organisasi yang bersifat tertutup (4) Menggunakan cara kekerasan
	Horizontal <i>Society-centric</i>	<b>TIPE III: Societal</b>  <b>Target:</b> media (ekonomi), pendidikan  <b>Outcome:</b> integrasi  <b>Ciri:</b> (1) Berjuang melakukan perubahan sistem sosial dan politik masyarakat (2) Perjuangan bersifat pragmatis (3) Memiliki organisasi yang bersifat terbuka (4) Adanya kondisi deprivasi & alienasi	<b>TIPE IV: Spiritual/Mental</b>  <b>Target:</b> kesadaran religius  <b>Outcome:</b> penarikan diri dari masyarakat  <b>Ciri:</b> (1) Berjuang untuk memperoleh pemurnian dan kesadaran individual (2) Memiliki intoleransi pasif (3) Memiliki organisasi yang bersifat tertutup (4) Menggunakan cara persuasif

Sumber: tabel ini diadopsi dari tipologi gerakan sosial Islam yang dikembangkan oleh M. Hakan Yavuz (2004) dan dielaborasi kembali oleh peneliti untuk memetakan dan mengkonstruksi indikator radikalisme

Setelah peneliti mengkonstruksi tipologi radikalisme kelompok Islam, penting kiranya mengetahui bagaimana parameter tersebut dapat digunakan sebagai bentuk deteksi dini radikalisme. Sebagai sebuah tipologi, tipe I dan III relatif menjadi sebuah tipe radikalisme yang tidak menjadi kekhawatiran. Hal ini mengingat kedua tipe radikalisme ini tidak memiliki sifat yang intoleran, bahkan lebih bersifat terbuka secara organisasi. Cara yang ditempuh radikalisme tipe ini pun bersifat akomodatif dan integratif.

Yang perlu menjadi perhatian di dalam tipologi radikalisme tersebut adalah radikalisme Tipe II dan Tipe IV. Radikalisme tipe IV memiliki kecenderungan bahwa paham atau pandangan yang dikembangkan memiliki potensi untuk berkembang menjadi radikalisme Tipe II. Hal ini mengingat terdapat indikator intoleransi yang bersifat pasif di dalamnya. Selain itu terdapat strategi yang digunakan dengan cara menarik diri dari kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan eksklusivisme. Radikalisme Tipe ini juga berpotensi mempengaruhi masyarakat dengan pendekatan persuasif yang digunakan. Pemantauan dan peringatan terhadap radikalisme tipe ini perlu dilakukan untuk melihat perkembangannya agar tidak bertransformasi ke tipe IV.

Tipe radikalisme yang paling mengkhawatirkan adalah Tipe IV. Radikalisme tipe ini bisa memberikan dampak perubahan yang bersifat revolusioner di dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi dimungkinkan ditempuh melalui cara-cara kekerasan yang dapat menimbulkan korban. Hal ini mengingat radikalisme tipe ini memiliki sifat intoleransi aktif. Tindakan hukum dan pendekatan keamanan perlu dilakukan untuk menghentikan tipe radikalisme ini. Lalu, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan tipologi radikalisme kelompok Islam tersebut terbentuk? Peneliti melihat terdapat beberapa penyebab yang dapat membuat tipologi radikalisme kelompok Islam muncul ke permukaan masyarakat. Pembahasannya akan kemukakan pada bagian berikut.

#### **VI.1.2. Model Analisis Radikalisme**

Berdasarkan penjelasan di bagian latar belakang dan telaah pustaka (Bab I), terdapat lima faktor penyebab utama muncul atau tidaknya radikalisme kelompok Islam berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh beberapa intelektual:

##### **1. Negara efektif menangani kelompok Islam radikal (Mubarak 2007: viii-ix)**

Hasil riset Mubarak menunjukkan bahwa berkembangnya ekstremisme dan radikalisasi kelompok Islam Pasca-Soeharto merupakan dampak dari ketidak-efektifan kinerja pemerintahan (*ungovernability*) dalam merespon isu sensitif terutama terkait kalangan umat Islam. Kondisi ini justru membuka peluang terbentuknya kelompok-kelompok keagamaan radikal.

2. Kondisi ekonomi-politik negara stabil (Hadiz 2008)

Hasil riset Hadiz memperlihatkan bahwa warisan hubungan yang naik-turun antara negara dan Islam politik turut menentukan fluktuasi kondisi ekonomi-politik. Kondisi ekonomi-politik yang stabil lebih mudah untuk mengontrol kelompok Islam politik terutama yang bersifat radikal.

3. Masyarakat terinklusi (Fananie 2002)

Hasil riset Fananie berargumen bahwa kemunculan kelompok radikalisme keagamaan merupakan bagian dari terkesklusinya kelompok tersebut dalam kancan ekonomi dan politik di masyarakat. Aksi penyisiran tempat hiburan menjadi sebuah bentuk ketidaksetujuan kelompok tersebut untuk menunjukkan identitasnya yang teresklusi.

4. Toleransi masyarakat stabil (Nashir 2007: 614-617; Afadlal et.al. 2005: 111-112)

Hasil riset Nashir dan Afadlal et.al. berpendapat bahwa munculnya ketegangan struktural dan kultural dalam masyarakat pada masa Orde Baru menyebabkan munculnya kelompok gerakan Islam. Hal ini terkait dengan hubungan kelemahan Islam dalam politik dan peminggirannya pada masa Orde Baru dengan umat beragama lain yang memicu tindakan intoleran.

5. Media massa netral (Said 2002: vi)

Said berpendapat bahwa peran media cukup besar di dalam mewarnai wacana tentang Islam. Said berkesimpulan bahwa pengetahuan dan liputan tentang dunia Islam yang dilakukan media massa telah memberikan dominasi interpretasi yang menyudutkan Islam.

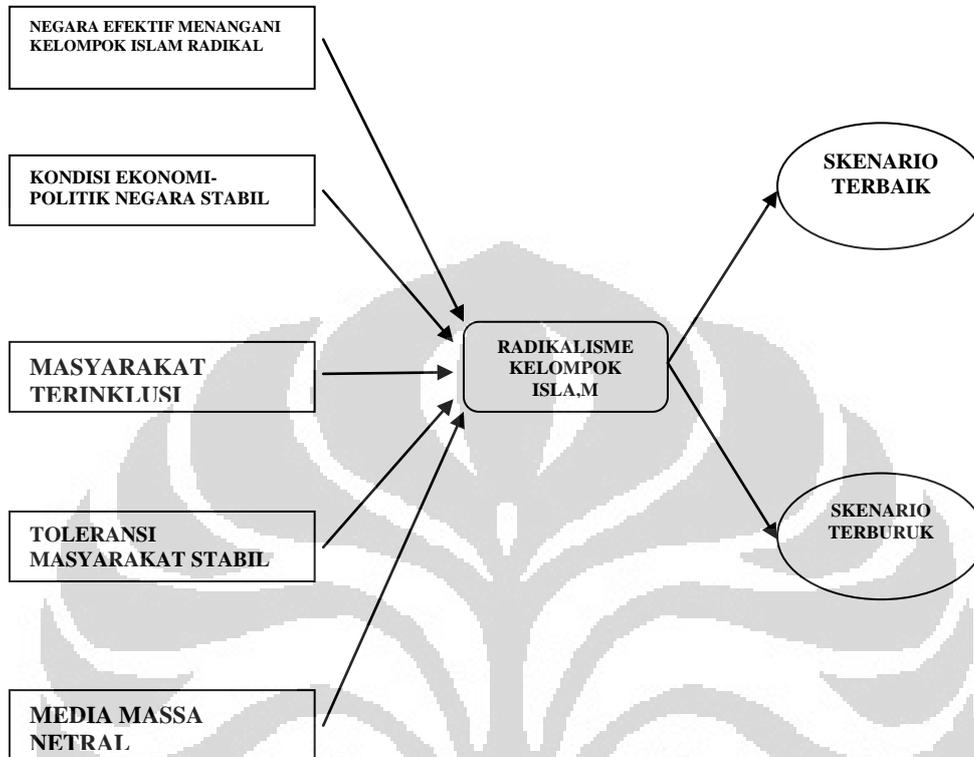
Adapun rumusan model analisis yang dapat dibuat berdasarkan lima faktor penyebab di atas adalah:

$$\mathbf{RKI = N_e + KEPN_s + M_t + TM_s + MM_n}$$

(Radikalisme Kelompok Islam) = (Negara efektif menangani kelompok Islam Radikal) + (Kondisi Ekonomi Politik Negara stabil) + (Masyarakat terinklusi) + (Toleransi Masyarakat stabil) + (Media Massa netral)

Model tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut:

**Bagan 5**  
**Model Analisis Radikalisme Kelompok Islam**



## **VI.2. Skenario Radikalisme Kelompok Islam**

Skenario kemunculan radikalisme kelompok Islam dapat mempertimbangkan beberapa hal berikut ini:

1. Negara: apakah efektif di dalam menangani kelompok Islam atau melakukan pembiaran
2. Kondisi ekonomi politik negara: apakah stabil atau mengalami fluktuasi, bahkan mengalami ketimpangan
3. Masyarakat: apakah mereka terinklusi atau terkeklusi, bahkan tereksplorasi
4. Toleransi masyarakat: apakah stabil atau intoleran
5. Media massa: apakah netral atau mendominasi wacana

Berdasarkan penjelasan oleh beberapa intelektual maka terdapat lima hal yang perlu menjadi perhatian. *Pertama*, kinerja pemerintahan tidak efektif dalam merespon isu sensitif terutama terkait kelompok Islam radikal. *Kedua*, kondisi ekonomi-politik negara bersifat fluktuatif. *Ketiga*, masyarakat terinklusi oleh

himpitan ekonomi serta politik. *Keempat*, terjadi ketegangan struktural antar umat beragama yang dapat menimbulkan konflik serta posisi umat Islam sebagai *silent majority* (mayoritas yang diam). *Kelima*, media massa mendominasi interpretasi tertentu tentang Islam.

### V.2.1. Skenario Terbaik Radikalisme Kelompok Islam

Skenario terbaik dapat dimungkinkan apabila negara i.c. pemerintah meningkatkan kinerjanya secara efektif untuk merespon isu sensitif terutama terkait kelompok Islam radikal. Salah satunya adalah melakukan tindakan tegas (bukan hanya dengan kekerasan semata) terhadap kelompok Islam radikal yang bersifat anarkis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika para anggota kelompok Islam radikal melakukan tindakan anarkis dan kekerasan, maka sudah sepantasnya negara berperan untuk menegakkan hukum dengan tegas. Bukan hanya itu, ketegasan negara juga bertujuan untuk menjamin bagi terciptanya kestabilan ekonomi-politik demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tidak tercipta kesenjangan dan ketimpangan dimana masyarakat justru terinklusi dalam kondisi ekonomi-politik yang ada. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan toleransi masyarakat yang stabil serta kondusif. Terakhir, peran media massa pun justru semakin netral dengan kondisi masyarakat yang harmonis. Kondisi inilah yang justru menekan meningkatnya radikalisme kelompok Islam. Skenario terbaik ini dapat diringkas melalui tabel berikut:

**Tabel 19**  
**Ikhtisar Skenario Terbaik**

	<b>JIKA</b>	<b>DAMPAK BAGI RADIKALISME KELOMPOK ISLAM</b>
<b>Negara</b>	Efektif dan tegas terhadap aksi anarkis dan kekerasan	Berkurangnya kelompok Islam radikal yang melakukan tindakan anarkis dan kekerasan
<b>Ekonomi-politik</b>	Stabil, sejahtera, makmur	Berkurangnya resistensi kelompok Islam radikal
<b>Masyarakat</b>	Menerima manfaat dan terinklusi	Masyarakat menolak mendukung kelompok Islam radikal
<b>Toleransi</b>	Stabil dan kondusif (toleran)	Konflik teredam dan kelompok Islam radikal sulit terbentuk
<b>Media massa</b>	Netral	Pemberitaan negatif sulit muncul mengenai kelompok Islam radikal
<b>TIPE SKENARIO</b>		<b>HARMONIS</b>

### V.2.2. Skenario Terburuk Radikalisme Kelompok Islam

Skenario terburuk dapat mencuat jika terjadi degradasi keadaan yang semakin terpuruk dan drastis. Negara melakukan pembiaran terhadap aksi anarkis dan kekerasan. Hal ini akan meningkatkan skala tindakan anarkis dan kekerasan kelompok Islam radikal serta menjamurnya kelompok yang sejenis. Dampak dari hal ini adalah semakin menurunnya kondisi ekonomi-politik negara yang justru meningkatkan resistensi kelompok Islam radikal. Oleh karena itu, masyarakat semakin tereksklusi bahkan tereksplotasi kondisi ekonomi-politik. Konflik akan muncul secara terbuka yang melibatkan banyak pihak dan bahkan menimbulkan korban. Media massa pun semakin memberikan label negatif terhadap kelompok Islam radikal dan mendominasi interpretasi wacana yang mereka bangun.

**Tabel 20**  
**Ikhtisar Skenario Terburuk**

<b>JIKA</b>		<b>DAMPAK BAGI RADIKALISME KELOMPOK ISLAM</b>
<b>Negara</b>	Melakukan pembiaran terhadap aksi anarkis dan kekerasan	Kelompok Islam radikal meningkatkan skala anarkis dan kekerasan dan menjamurnya kelompok sejenis
<b>Ekonomi-politik</b>	Menurun dan semakin parah	Kelompok Islam radikal meningkatkan resistensi
<b>Masyarakat</b>	Tereksklusi dan bahkan tereksplotasi secara ekonomi-politik	Masyarakat menjadi bagian dari kelompok Islam radikal
<b>Toleransi</b>	Intoleransi aktif	Konflik mudah dipicu dan kelompok Islam radikal mudah terbentuk
<b>Media massa</b>	Memandang negatif kelompok Islam radikal	Pemberitaan negatif muncul mengenai kelompok Islam radikal
<b>TIPE SKENARIO</b>		<b>TEROR</b>

## **BAB VII**

### **SIMPULAN**

Bagian akhir riset ini menarik beberapa simpulan yang terdiri atas ringkasan temuan, implikasi teoretis, dan implikasi praksis. Bagian implikasi praksis disajikan dalam bentuk tabel tanpa narasi untuk lebih memudahkan. Berikut pemaparan simpulan riset tesis ini.

#### **VII.1 Ringkasan Temuan**

*Pertama*, wacana radikalisme yang dikembangkan oleh berbagai agen tidak hanya mengkonstruksi pengetahuan semata, melainkan menempatkan Islam sebagai sebuah variabel yang berdiri berhadapan dengan nilai-nilai lain seperti demokrasi dan toleransi. Gagasan mengenai konstruksi wacana radikalisme—secara implisit—melekat dengan Islam dan seolah-olah hal memiliki oposisi biner dengan barat. Islam menjadi artikulator utama dalam menyumbang orientasi masyarakat yang bersifat radikal. Gagasan mengenai wacana radikalisme yang dibangun oleh ketiga agen seolah-olah mengamini gagasan Huntington (1996) tentang benturan peradaban—antara Islam dan Barat—meskipun secara implisit.

*Kedua*, wacana radikalisme mengalami proses produksi dan reproduksi pengetahuan yang satu sama lain saling mengisi. Konsepsi pengetahuan terkait gejala radikalisme yang diadopsi oleh setiap agen memungkinkan mereka untuk melakukan sebuah proses reproduksi pengetahuan mengenai wacana radikalisme. Setiap agen justru tidak sekedar melakukan upaya mereproduksi pengetahuan mengenai wacana radikalisme, melainkan melakukan elaborasi pengetahuan dengan berusaha mengkonstruksi indikator dan parameter radikalisme. Wacana radikalisme telah berkembang dari sebuah gejala yang dapat dijelaskan secara eksplanatif menuju sebuah tahap yang lebih bersifat praksis. Namun, kelemahan indikator radikalisme yang dikembangkan terletak pada sifatnya yang deskriptif dan eksplanatif bukannya prediktif.

*Ketiga*, tipologi, model analisis, dan skenario tentang radikalisme kelompok Islam menjadi alternatif pilihan bagi deteksi dini radikalisme. Skenario radikalisme kelompok Islam dapat digunakan sebagai deteksi dini radikalisme dengan pengembangan tiga tipe skenario yakni harmonis, goncang, dan teror.

## VII.2. Implikasi Teoretis

Ada tiga hal yang menjadi implikasi teoretis dari hasil riset tesis ini. Hal pertama yakni CSRC, Lazuardi Birru, dan SETARA Institute, berdasarkan kerangka analisis Foucault, merupakan institusi yang memiliki otoritas untuk melakukan produksi, reproduksi, dan kontrol atas pengetahuan mengenai wacana radikalisme. Ketiga lembaga tersebut, menurut kerangka Archer, berfungsi sebagai agen yang melakukan reproduksi (*morphostatis*) dan elaborasi (*morphogenesis*) pengetahuan yang berkesinambungan dengan gagasan mengenai wacana radikalisme yang berkembang sebelumnya. Kemudian, gagasan pengetahuan tentang Islam muncul secara implisit dan bersifat imajiner yang berposisi biner dengan barat. *Debunking motif* (Berger) dari munculnya pengetahuan mengenai wacana radikalisme yang dikembangkan oleh setiap agen tidak bisa lepas dari genealogi pengetahuan sebelumnya yang dikembangkan oleh intelektual barat. Lalu, momen pasca-Orde Baru menjadi struktur yang mengkondisikan (*structural conditioning*) munculnya gagasan mengenai radikalisme di Indonesia yang mengalami perluasan secara elaboratif (*morphogenesis*). Pasca Orde-Baru menjadi salah satu variabel waktu yang menentukan perkembangan wacana radikalisme yang dikembangkan setiap agen yang ada di Indonesia. Berikut ikhtisar implikasi teoretis yang telah diringkas.

**Tabel 21**  
**Implikasi Teoretis**

Temuan	Implikasi Teoretis
<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gagasan wacana radikalisme banyak diambil dari intelektual barat yang menempatkan Islam dengan Barat berdasarkan oposisi biner</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil riset ketiga agen dijadikan acuan bagi media massa (Kompas, Koran Tempo) dan juga beberapa forum seminar yang diadakan oleh pemerintah (BNPT) maupun NGO</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber pendanaan agen ada yang bersumber dari lembaga donor internasional, terutama di negara barat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung teori Foucault tentang arkeologi ilmu pengetahuan dan genealogi kekuasaan bahwa ilmu pengetahuan dikuasai oleh institusi yang memiliki otoritas untuk mereproduksi pengetahuan</li> <li>• Mendukung teori Berger tentang <i>debunking motif</i> bahwa dibalik wacana radikalisme yang dibangun oleh setiap agen sebetulnya terdapat struktur wacana yang lebih besar yang memiliki kepentingan dan kekuasaan tertentu</li> <li>• Menyempurnakan teori Huntington bahwa benturan tidak hanya terjadi antar peradaban, melainkan juga secara imajiner di dalam konstruksi ilmu pengetahuan</li> </ul>
<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Momen pasca-Orde Baru menjadi struktur yang mengkondisikan munculnya gagasan mengenai radikalisme di Indonesia</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interaksi dan tindakan agen memicu reaksi dengan upaya untuk mereproduksi gagasan tentang wacana radikalisme yang ada</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gagasan wacana radikalisme yang dikembangkan oleh setiap agen mengadopsi pemikiran beberapa intelektual barat yang kemudian direproduksi menjadi sebuah produksi pengetahuan yang bersifat elaboratif</li> </ul>	<p>Mendukung teori Archer mengenai model <i>morphogenesis</i> yang terdiri atas <i>structural conditioning</i>, <i>social interaction</i>, <i>structural elaboration</i></p>

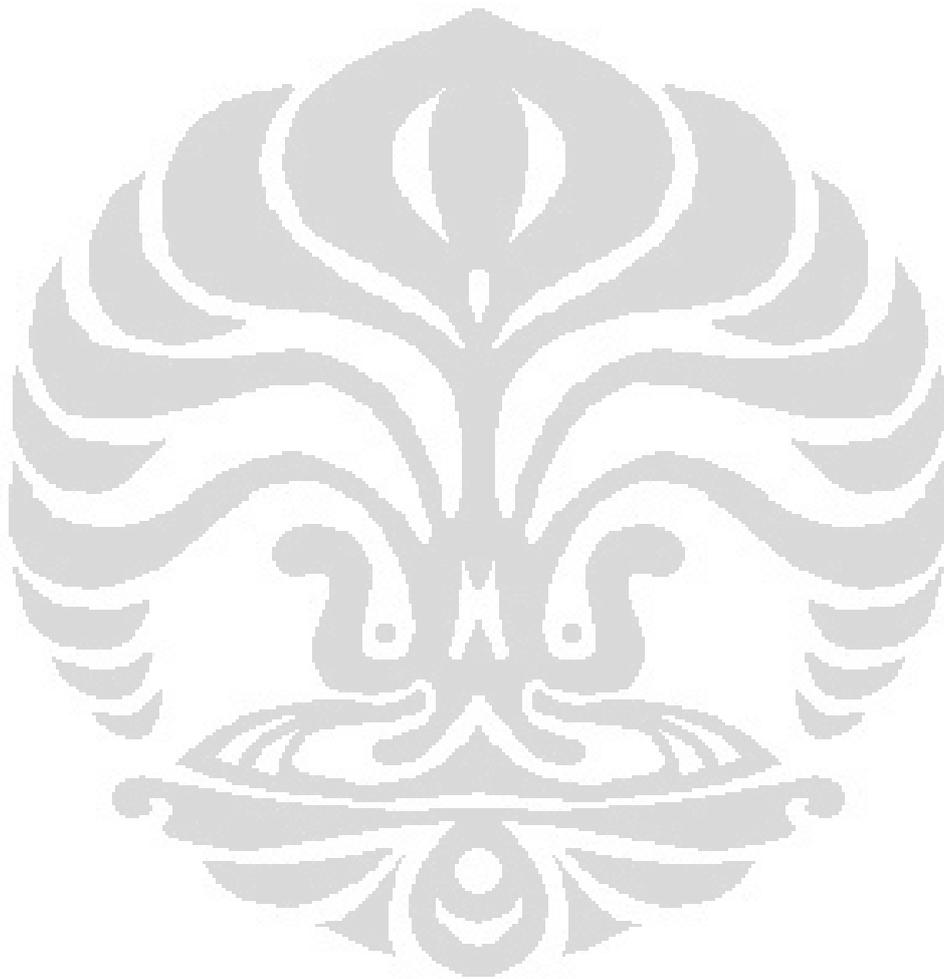
### **VII.3. Implikasi Praksis**

Terdapat dua kemungkinan skenario yang peneliti kembangkan dalam tesis ini. Pertama, tipe skenario harmonis yang menempatkan negara sebagai pihak yang secara efektif dan tegas terhadap aksi anarkisme. Selain itu negara juga dapat menjamin kestabilan kondisi ekonomi-politik di dalam masyarakat. Hal ini berdampak pada masyarakat yang semakin terinklusi dan toleran. Oleh karena itu, peran media massa pun cenderung netral. Terciptanya kondisi yang harmonis seperti ini tidak memungkinkan munculnya radikalisme terutama yang menggunakan kekerasan. Namun, masih dimungkinkan muncul radikalisme yang bersifat meningkatkan kesadaran individual untuk lebih religius (lihat tipe IV radikalisme). Kedua, tipe skenario teror dimana negara dalam posisi melakukan pembiaran terhadap aksi anarkisme dan kekerasan. Hal ini diperparah dengan kondisi ekonomi-politik negara yang semakin menurun. Kondisi ini menyebabkan masyarakat menjadi tereksklusi bahkan tereksplorasi dan menyebabkan timbulnya intoleransi yang bersifat aktif. Media massa pun akan memandang negatif terhadap kelompok Islam radikal. Skenario seperti inilah yang menyebabkan masyarakat dalam kondisi teror dimana kemunculan kelompok Islam radikal semakin masif dan menggunakan cara kekerasan.

Dua model skenario ini dapat dijadikan pijakan untuk tahapan selanjutnya dengan mengembangkan indikator radikalisme. Skenario ini juga sudah dapat digunakan secara praksis untuk melakukan deteksi dini radikalisme di dalam masyarakat. Hanya saja masing-masing faktor penyebab radikalisme perlu dilihat kondisi data real yang muncul dalam setiap periode. Dengan memasukkan data (terutama data kuantitatif) terkait faktor penyebab radikalisme, maka akan lebih mudah menentukan skenario yang mungkin muncul. Hal ini menjadi kekurangan tesis ini dengan belum memasukkan data kuantitatif faktor penyebab radikalisme. Studi serupa terkait tema radikalisme dapat mengisi kekurangan tesis ini selanjutnya.

**Tabel 22**  
**Implikasi Praksis**  
**TIPE SKENARIO**

<b>HARMONIS</b>	<b>TEROR</b>
Negara efektif dan tegas terhadap aksi anarkis dan kekerasan	Negara melakukan pembiaran terhadap aksi anarkis dan kekerasan
Ekonomi-politik stabil, sejahtera, makmur	Ekonomi-politik menurun dan semakin parah
Masyarakat menerima manfaat dan terinklusi	Masyarakat tereksklusi dan bahkan tereksplorasi secara ekonomi-politik
Toleransi stabil dan kondusif (toleran)	Intoleransi aktif
Media massa netral	Media massa memandang negatif kelompok Islam radikal



## DAFTAR PUSTAKA

- Afadlal et.al. 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Al-Makassary, Ridwan dan Ahmad Gaus AF (ed.). 2010. *Benih-Benih Islam Radikal di Masjid: Studi Kasus Jakarta dan Solo*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah.
- Al-Makassary, Ridwan, Amelia Fauzia dan Irfan Abubakar. 2011. *Masjid dan Pembangunan Perdamaian*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah.
- Archer, Margaret S. et.al (ed). 1998. *Critical Realism: Essential Reading*. London & New York: Routledge
- Archer, Margaret S., 1995. *Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach*. New York: Cambridge University Press
- . 2004. *Culture and Agency: The Place of Culture in Social Theory*. New York: Cambridge University Press.
- Babbie, Earl. 1990. *Survey Research Methods*. 2<sup>nd</sup> ed., Belmont: CA: Wadsworth.
- Bamualim, Chaider S. 2004. *Fundamentalisme Islam dan Jihad: Antara Otentisitas dan Ambiguitas*. Jakarta: PBB UIN & KAS.
- Bernard, H. Russel. 2000. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- . 2010. *The Practice of Social Research*. 12<sup>th</sup> ed., Belmont, CA: Wadsworth.
- Berger, Peter L. & Hansfried Kellner. 1981. *Sociology Reinterpreted: An Essay On Method And Vocation*. New York: Anchor Books
- Berger, Peter L. & Thomas Luckman. 2011. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Bhaskar, Roy. 1986. *A Realist Theory of Science*. Brighton: Harvester.
- . 1989. *Reclaiming Reality: A Critical Introduction to Contemporary Philosophy*. London: Verso.
- . [1979] 2005. *The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences*. First edition. London and New York: Routledge.
- . 2008. *A Realist Theory of Science*. London and New York: Routledge.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Bryman, Alan. 2004. *Social Research Methods*. Second Edition. New York: Oxford University Press.
- Cariey, Michael. 1983. *Social Measurement and Social Indicators: Issues of Policy and Theory*. London: George Allen & Unwin
- Creswell, John W., 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*; Thousand Oaks: Sage Publication.

- Esposito, John L. 1992. *The Islamic Threat: Myth or Reality*. Oxford: Oxford University Press.
- . 2002. *Unholy Wars: Terror in the Name of Islam*. New York: Oxford University Press
- Esposito, John L. & Dalia Mogahed. 2007. “Who Speaks for Islam? What A Billion Muslims Really Think”. New York: Gallup Press dalam Alison Lake. *Books In Brief*. American Muslim For Constructive Engagement (AMCE) 2008. Herndon: AMCE Book Digest Project.
- Fairclough, Norman. 1997. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London dan New York: Longman
- Foucault, Michele. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interview and Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books
- . 2004. *The Archeology of Knowledge*. London: Routledge
- Haryatmoko. 2003. “Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: landasan Teoretis Gerakan Sosial menurut Pierre Bourdieu”. *Basis*. No 11-12. Tahun ke-52. November-Desember 2003.
- Hasan, Noorhaidi dan Irfan Abubakar (ed.). 2011. *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah.
- Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos (ed.). 2010. *Wajah Para “Pembela” Islam: Radikalisme Agama dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- . 2012. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Hasani, Ismail (et.al.). 2011. *Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: SETARA Institute
- Hefner, Robert W. 2001. *Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: ISAI.
- . 2005. “Muslim Democrats and Islamist Violence In Post-Soeharto Indonesia” dalam Robert W. Hefner (ed). *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*. New Jersey: Princeton University Press
- Huntington, Samuel P. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order*. New York: Simon & Schuster
- Johnson, et.al. 2002. *The Sociology Student Writer’s Manual 3th. Ed.*, New Jersey: Prentice Hall.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Ratu Adil*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Lewis, Bernard. 2002. *What Went Wrong? The Clash Between Islam and Modernity in the Middle East*. New York: Oxford University Press.

- . 2003. *The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror*. New York: The Modern Library.
- Liddle, William. 1999. “Skripturalisme Media Da’wah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Akasi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru” dalam Mark R. Woodward (ed.). *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Misrawi, Zuhairi. 2010. *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Moleong, Lexy J., 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Karya.
- Mubarak, M. Zaki. 2007. *Genealogi Islam Radikal Di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Nashir, Haedar. 2007. *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah.
- Neuman, W. Lawrence. [1991] 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Fifth Edition, Boston: Pearson Education Inc. United States of America.
- Philips, Louise dan Marianne W. Jorgensen. 2004. *Discourse Analysis: as Theory and Method*. London: Sage Publication
- Rabasa, Angel (et.al.). 2010. *Deradicalizing Islamist Extremists*. California: RAND Corporation
- Rahmat, M. Imdadun. 2005. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ritzer, George. 2003. *Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Roy, Oliver. 1994. *The Failure of Political Islam*. London: IB Tauris.
- . 2005. *Genealogi Islam Radikal*. Yogyakarta: Genta Press
- Said, Edward W. 2002. *Covering Islam: Bias Liputan Barat atas Dunia Islam*. Yogyakarta: Ikon Teralitera
- Schward, Adam. 1999. *A Nation in Waiting: Indonesia Search for Stability*. Washington: Allen & Unwin.
- Sibeon, Roger. 2004. *Rethinking Social Theory*. Thousand Oaks: Sage Publication
- Solahudin. 2011. *NII Sampai Ji: Salafy Jihadisme Di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Sumbulah, Umi. 2010. *Islam “Radikal” dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Wood, Linda A. dan Rolf O. Kroger. 2000. *Doing Discourse Anaysis: Methods for Studying Action in Talk and Text*. Thousand Oaks: Sage Publication

Wysocki, Diane K., 2001. *Reading In Social Research Methods*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co.

Yavuz, M. Hakan. 2004. "Opportunity Space, Identity, and Islamic Meaning in Turkey" dalam Quintan Wiktorowicz (ed.). *Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

**Artikel Koran, Jurnal, Sumber Internet, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian**

Archer, Margaret S. 2010. "Routine, Reflexivity, and Realism." *Sociological Theory* 3: 272 . Diakses 28 September 2010. ProQuest Science Journals.

Alamsyah, Andi Rahman. 2007. *Bantenisasi Demokrasi: Pertarungan Simbolik Dan Kekuasaan (Studi tentang Demokratisasi, Serang, Banten, Pasca-Soeharto, 2004-2006)*. Tesis, Pascasarjana Sosiologi, Universitas Indonesia, Depok.

Chalaby, Jean K. 1996. "Beyond the Prison-House of Language: Discourse as a Sociological Concept." *The British Journal of Sociology* Vol. 47. No. 4: 684-698. Diakses 9 Desember 2011. (<http://www.jstor.org/stable/591080>)

Fealy, Greg. 2004. "Islamic Radicalism In Indonesia: The Faltering Revival?" *Southeast Asian Affairs*: 104-121, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). Diakses 15 Desember 2011 (<http://www.jstor.org/stable/27913255>).

Hadiz, Vedi R. 2008. "Menuju Suatu Pemahaman Sosiologis Terhadap Radikalisme Islam di Indonesia" (terjemahan dari "Toward a Sociological Understanding of Islamic Radicalism in Indonesia") diakses melalui <http://indoprogress.com/2008/05/07>.

<http://www.bnpt.go.id>

<http://www.esrc.or.id>

<http://www.hizbut-tahrir.or.id>

<http://www.lazuardibirru.org>

<http://www.rand.org>

Kompas. *Indeks Indonesia Mengkhawatirkan*. Kamis 6 Oktober 2011 (hlm. 2).

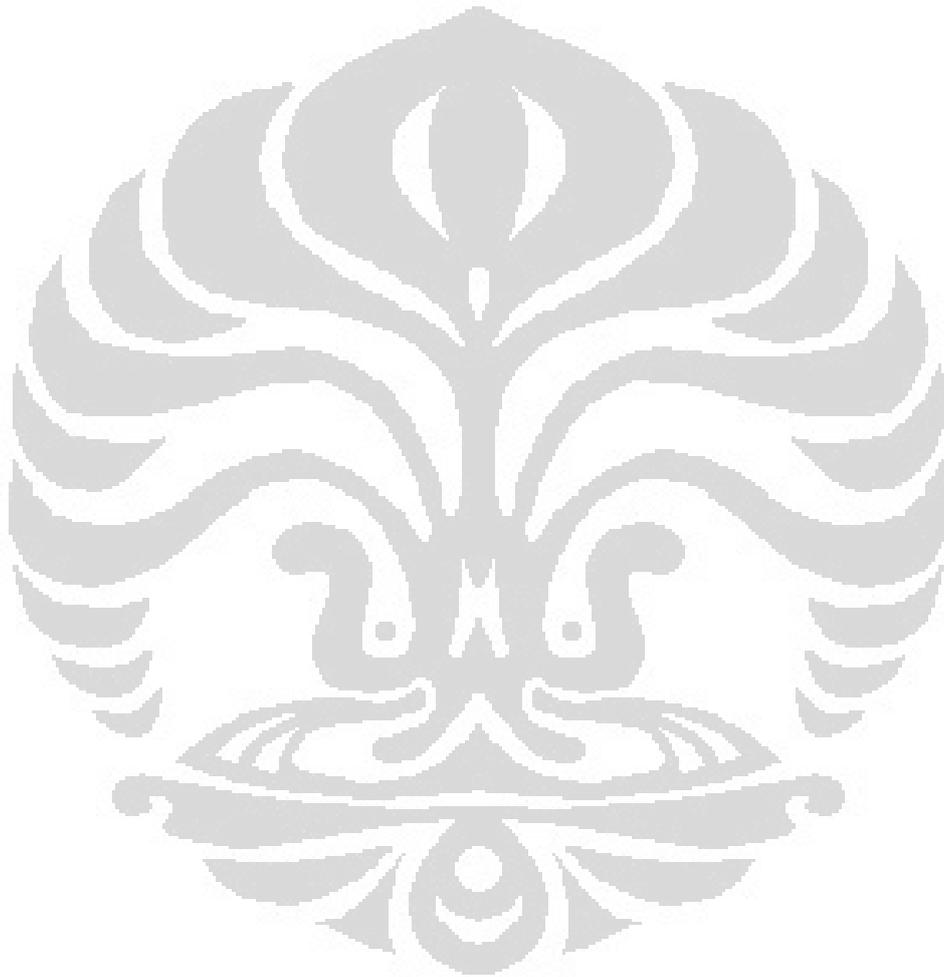
Kompas. *Masyarakat Resistan Islam Radikal*. Selasa 22 November 2011 (hlm. 4).

Kompas. *Suara Muslim Moderat Cenderung Lebih Lemah*. Selasa 25 Oktober 2011 (hlm. 2).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang*.

- Munandar, Arief. 2011. *Antara Jamaah dan partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*. Disertasi, , Pascasarjana Sosiologi, Universitas Indonesia, Depok.
- Sujatmiko, Iwan Gardono et.al., 2012. *Analisis Sosial Politik Pembangunan Jembatan Selat Sunda (Suatu Studi Awal)*. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Universitas Indonesia (UI).
- Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. 2010. "Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 14. No. 2:169-186. November 2010.



## LAMPIRAN 1

### Formulasi Pemetaan Dokumen Studi Tentang Wacana Radikalisme Oleh Berbagai Agen

KONSTRUKSI RADIKALISME	AGEN		
	INTELEKTUAL (CSRC)	PEMERINTAH (BNPT)	NGO (Lazuardi Birru, SETARA Institut)
Pertanyaan Penelitian			
Dasar Teori			
Definisi Konseptual			
Definisi Operasional			
Metode Penelitian			
Indikator			
Simpulan Riset			
Formulasi Kebijakan			
Catatan Kritis Peneliti			

### Formulasi Wawancara Dengan Agen Yang Terlibat Didalam Penyusunan Studi Tentang Wacana Radikalisme

KONSTRUKSI RADIKALISME	AGENCI		
	INTELEKTUAL (CSRC)	PEMERINTAH (BNPT)	NGO (Lazuardi Birru, SETARA Institut)
Agensi /Aktor yang terlibat			
Posisi teoretis agensi/aktor			
Gagasan/ide radikalisme yang ditawarkan setiap agensi/aktor			
Substansi perdebatan gagasan/ide radikalisme yang menonjol			
Hasil gagasan/ide radikalisme yang dipakai dalam penelitian			
Sumbangan kebijakan			
Catatan Kritis Peneliti			

**LAMPIRAN 2**  
**MATRIKS INSTRUMEN DATA SEKUNDER DAN WAWANCARA MENDALAM**  
**Formulasi Pemetaan Dokumen Studi Tentang Wacana Radikalisme Oleh Berbagai Agen**

RADIKALISME	Aspek Radikalisme Yang Dilihat	AGEN		
		INTELEKTUAL (CSRC)	PEMERINTAH (BNPT)	NGO (Lazuardi Birru, SETARA Institut)
<b>Bentuk Dokumen</b>	Buku Hasil riset Jurnal Peraturan			
<b>Metode Penelitian</b>	Kuantitatif Kualitatif Kuantitatif & Kualitatif			
<b>Dasar Teori</b>	Sosial-Humaniora (sosiologi, antropologi, filsafat, dll) Agama tertentu Ideologi tertentu			
<b>Definisi Konseptual</b>	Ada, deskripsinya... Tidak			
<b>Definisi Operasional</b>	Ada, deskripsinya... Tidak			
<b>Indikator</b>	Ada, deskripsinya... Tidak			
<b>Simpulan Riset</b>	Deskripsinya ...			
<b>Simpulan Riset</b>	Deskripsinya ...			
<b>Formulasi Kebijakan</b>	Deskripsinya ...			
<b>Catatan Kritis Peneliti</b>				

## LAMPIRAN 2

### Formulasi Wawancara Dengan Agensi Yang Terlibat Didalam Penyusunan Studi Tentang Wacana Radikalisme

RADIKALISME	Pertanyaan Wawancara Mendalam	AGENSI		
		INTELEKTUAL (CSRC)	PEMERINTAH (BNPT)	NGO (Lazuardi Birru, SETARA Institut)
<b>Agensi /Aktor yang terlibat</b>	Jelaskan latar belakang pekerjaan Anda? Akademisi Aktivis Birokrat Lainnya ... Apa dan bagaimana posisi Anda di dalam lembaga ini?			
<b>Social origin of agent/aktor</b>	Jelaskan latar belakang keluarga dan kehidupan Anda? Pendidikan Status sosial Keterlibatan di kelompok masyarakat Lainnya ...			
<b>Posisi teoretis agensi/aktor</b>	Bagaimana pengetahuan yang Anda miliki mengenai radikalisme? Apa latar belakang teoretis/konseptual mengenai radikalisme yang Anda pahami?			
<b>Gagasan/ide radikalisme yang ditawarkan setiap agensi/aktor</b>	Bagaimana pendapat Anda mengenai ide/gagasan mengenai radikalisme? Apa tolak ukur/parameter yang Anda gunakan untuk melihat radikalisme?			
<b>Substansi perdebatan gagasan/ide radikalisme yang menonjol</b>	Apa bentuk perdebatan yang menonjol di dalam memahami konsepsi mengenai radikalisme? Apa konsepsi yang memiliki nuansa paling kuat/mendominasi perdebatan mengenai radikalisme?			
<b>Hasil gagasan/ide radikalisme yang dipakai dalam penelitian</b>	Apa gagasan radikalisme yang Anda digunakan dalam penelitian/peraturan? Apa konstruksi radikalisme yang terbentuk dalam penelitian/peraturan yang ada di lembaga Anda?			
<b>Sumbangan kebijakan</b>	Apa konsepsi kebijakan terkait radikalisme yang menurut Anda paling tepat untuk konteks Indonesia?			
<b>Catatan Kritis Peneliti</b>				

### LAMPIRAN 3

#### Catatan Lapangan & Hasil Wawancara dengan Irfan Abubakar (Direktur CSRC)

tentang

“Konstruksi & Pertarungan Wacana Radikalisme di CSRC”

Ciputat, 24 Mei 2012

#### HASIL WAWANCARA

P: Pewawancara

I: Informan

[ ] = sulit terdengar secara jelas.

	KETERANGAN INFORMAN	KATEGORI
P:		
I:	Isu radikalisme Islam bisa dikaitkan dengan radikalisme itu memang sudah ada. Jadi tidak benar bahwa peristiwa pemboman WTC, kemudian serial Bom dengan jaringan Al-Qaeda. Tidak ada preseden sejarahnya. Cuma memang kajian tentang radikalisme keagamaan itu mulai berkembang pesat dan mendapat perhatian banyak kalangan termasuk juga kita ini itu jurstru setelah peristiwa WTC.	
P:	2001.	
I:	Tidak bisa dilepaskan.	
P:	Iya. Hampir semua background riset juga menyebutkan.	
I:	Tidak bisa dilepaskan dari itu dan itu pula yang membuat kita merunut ke belakang. Konteks itulah ternyata radikalisme Islam itu tidak muncul begitu saja, tapi memiliki akar historisnya. Bahkan jauh kalo bisa dirunut jauh ke belakang itu yang ada dalam sejarah Islam itu sendiri. Cuma biasanya itu jarang dikembangkan, misalnya perilaku Khawarij yang ekstrem keluar dari barisan Islam mainstream saat itu. Kita anggap sebagai bibit atau preseden sejarah bahwa radikalisme Islam itu bukanlah gejala modern semata. Yang unik di dalam modern. Tetapi di dalam sejarah sendiri memang menyediakan suatu kondisi Islam punya karakter untuk kepada mendorong radikalisme. Sikap-sikap radikal. Meskipun itu bukan satu-satunya faktor. Hal seperti itu. Nah ketika kita mencoba menjelaskan kerangka teoritik untuk melakukan penelitian tentang terorisme, gejala-gejala kekerasan atas nama agama ( <i>religious violence</i> ), konflik, kita mau gak mau ya harus membuka literatur tentang teori-teori radikalisme keagamaan, dan lain-lain.	
P:	Apa yang mainstream yang ditangkap waktu itu oleh teman-teman peneliti disini atau kalangan akademisi disini?	
I:	Pandangan kita tentang itu memang dari waktu ke waktu menemukan bentuk yang lebih solid. Yang jelas nyaris semua sepakat bahwa radikalisme itu identik dengan ada elemen kekerasannya, antara lain penggunaan bom bunuh diri yang jelas kita lihat dari kelompok radikal. Tapi kemudian kita melihat tidak semua kelompok-kelompok keislaman yang cenderung secara awam dikategorikan radikal itu kita bisa kategorikan radikal. Suatu tembok yang lebih solid, yang lebih konsisten. Misalnya apakah FPI bisa dikelompokkan dalam kategori Islam radikal apa nggak sih? Nah kalo kita melihat radikalisme semata-mata dari perspektif kekerasan ya itu masuk radikal. Cara-cara di luar hukum yang dilakukan kelompok Islam untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan kekerasan. Tetapi setelah	

	<p>kita perhatikan secara seksama lagi ada elemen yang cukup fundamental dalam radikalisme yang tidak hanya semata-mata kekerasan, tapi ada ideologi di balik itu, yaitu ideologi politik menghendaki perubahan yang radikal dengan sistem yang berlaku. Ya asumsinya kelompok yang radikal ini memandang sistem yang eksis itu rusak. Tidak bisa menjamin keadilan, karena itu mereka menganggap perubahan total. Perubahan total itu dilakukan secara revolusioner, ada elemen revolusi, ada elemen perubahan sistem yang radikal. Nah dalam konteks Islam, isu ini harus sesuai dengan Islam dalam pandangan kelompok radikal ini. jadi kita lihat bahwa sistem politik yang demokratis yang dianut oleh negara-negara yang mayoritas Islam itu sudah jauh dari semangat Islam, sudah jauh dari ajaran Islam, sudah jauh dari sistem politik Islam yang sesungguhnya. Karena itu mereka kemudian berprinsip untuk melakukan perubahan-perubahan radikal, termasuk dengan melakukan cara-cara kekerasan. jadi dua elemen itu yang kita tangkap sebagai sedikit prasyarat gerakan radikal atau prasyarat untuk menilai bahwa suatu gerakan itu radikal. Tidak cukup bahwa hanya dia melakukan kekerasan, tapi dia harus memiliki politik radikal dan melakukan cara-cara kekerasan. oleh karena itu, FPI sepanjang mereka mengakui demokrasi, NKRI, menerima Pancasila sebagai konstitusi, tidak menghendaki adanya perubahan ideologi politik yang radikal tidak bisa disebut kelompok radikal dalam kerangka seperti itu. Secara akademik kita lama-kelamaan mencoba untuk lebih cermat karena publik awam biasanya menggunakan kata itu tanpa seleksi.</p>	
<b>P:</b>	Iya. Tumpang tindih juga. Kadang-kadang gak konsisten.	
<b>I:</b>	Hukum rata saja. Tapi kita kan harus bisa mempertanggung jawabkannya karena tidak cukup konsisten untuk kita mengatakan bahwa FPI radikal lalu menempatkannya dengan MMI, misalnya, secara bersamaan dalam satu kelompok, meskipun dalam waktu tertentu mereka bisa. Artinya tidak ada definisi itu yang 'kedap air' ya. Kemungkinan saja bahwa saling beririsan satu sama lain. Karena itu misalnya kalo kita melihat apakah Hizbut Tahrir itu radikal apa nggak. Problem kan disitu lagi.	
<b>P:</b>	Betul. Saya baru mau tanya itu.	
<b>I:</b>	Ya Indonesia kalo kita melihat memiliki ideologi yang radikal. Dan ingin mengubah sistem yang berlaku sekarang dengan Khilafah Islamiyah. Jelas dari sudut ideologi itu radikal, tapi dari sudut pendekatan dia tidak radikal. Dalam artian dia jarang lah kita lihat....	
<b>P:</b>	Aksi-aksinya	
<b>I:</b>	Dari beberapa kasus di Inggris, misalnya, bahwa anak-anak muda dari Hizbut Tahrir melakukan aksi-aksi bom bunuh diri, dan lain-lain. tapi biasanya itu tidak dianggap sebagai pendekatan yang lazim dalam ...memang disitu kita bisa mengatakan bahwa radikalisme Islam itu sederhana. Dalam artian harus sampe pada tingkat yang absolut untuk menerima kekerasan dan melakukan kekerasan dan melakukan perubahan secara ideologis. Artinya kita bisa mengakui bahwa ada spektrum bahwa ada yang sangat radikal, ada yang radikal-moderat, misalnya kaya gitu. Karena kalo kita tidak melihat, misalnya, irisan atau kemungkinan bahwa kelompok-kelompok ini bisa bertemu dalam satu titik. Kalo kita bisa meletakkan Hizbut Tahrir sendiri terus kita mau dimana dia, kelompok moderat juga bukan. Jadi ada spektrum dalam melihat radikalisme Islam itu. ketimbang membuatnya menjadi sangat kaku ya bahwa perubahan radikal Islam itu cocoknya ya Al-Qaeda, Jama'ah Islamiyah. MMI, misalnya, tentu MMI masih kurang radikal dibandingkan Jama'ah Islamiyah. Tapi kita menetapkan bahwa yang dimaksud dengan aksi-aksi kekerasan itu adalah pendekatan kekerasan itu adalah penerimaan mereka terhadap pendekatan itu. jadi bukan tidak <i>necessarily</i> mereka harus melakukan kekerasan, bom bunuh diri, atau aksi serupa untuk mengatakan mereka radikal. Tapi mereka mau menerima aksi-aksi kekerasan sebagai <i>possibility</i> untuk menjalankan tujuan-tujuannya itu bisa kita kategorikan kelompok radikal. Meskipun tidak seradikal..jadi yang ekstrem dalam kelompok radikal itu ya teroris itu.	
<b>P:</b>	Istilahnya ide itu sudah mereka tangkep pun entah digunakan kapan itu sudah termasuk radikal?	

<b>I:</b>	Iya. Penerjemahan. Jadi radikalisme itu bisa kita lihat dari sejauh mana kita menerima. Karena itu kalo ada gagasan masyarakat sekalipun yang tidak terlibat dalam kelompok radikal, tapi bisa menerima aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini, kita bisa mengatakan itu bibit-bibit radikal.	
<b>P:</b>	Itu yang kalo gak salah yang pendapatnya Bang Nurhaedi di dalam tulisan itu ditekankan dia bilang jadi memang agak sulit kita mengukur penetrasi cara-cara kekerasan itu di dalam subjek manusia, karena memang belum tentu dia digunakan. Tapi ketika sudah masuk penetrasi ke dalam persepsinya dia, kemungkinan akan mengguguk itu sudah radikal. Walaupun mereka, istilahnya, tidak berafiliasi dengan	
<b>I:</b>	Iya. Jadi kita melihat persepsinya sudah masuk radikal. Artinya kan radikalisme disitu kan menjadi kelompok radikal yang memang sudah sepenuhnya masuk dalam jaringan, perjuangan, dalam aksi-aksi baik mereka sebagai ideolog maupun mereka sebagai pelaku di lapangan. Nah itu memang radikal ya. tapi memang mereka memiliki aspirasi radikal. Itu kelompok-kelompok yang mungkin saja dalam hal itu bisa saja mereka simpati dan lebih mudah untuk direkrut menjadi bagian yang inti dan aktif dari, ada yang aktif dan ada yang pasif ya. Nah di Indonesia ini dari sekitar Islam di ruang publik ini menguji sejauh mana aspirasi itu. kita kan tidak lihat kelompok-kelompoknya, tapi sejauh mana aspirasi radikal itu tumbuh dimasyarakat.	
<b>P:</b>	Apa arti angka 19 itu?	
<b>I:</b>	Angka 19 itu aspirasi radikal, karena kita ngambil indikatornya ekstrem. Dalam artian boleh jadi misalnya kalo kita menggunakannya moderat kan lebih besar lagi angkanya. Jadi membuatnya menjadi <i>mutually eksklusif</i> ya, antara yang radikal dan tidak radikal, menggunakan indikator-indikator yang ekstrem ya. Misalnya menerima kekerasan menjalankan tujuan-tujuan keislaman, satu. Kemudian menyetujui untuk perubahan ideologi pada ideologi Islam. Itu pun kita tambahi lagi supaya dia masukkan unsur [ ] karena kita tidak bisa menafikan bahwa ada perlu juga mengembangkan ideologi sosialnya. Dalam artian bagaimana mereka bisa menerima perbedaan.	
<b>P:</b>	Toleran ya.	
<b>I:</b>	Toleransi terhadap perbedaan. Itu kita ambil yang indikatornya itu penerimaan terhadap cadar. Ya kita menganggap cadar itu wajib, misalnya, itu tidak berdiri sendiri, tapi digabung dengan indikator yang lain yang buat cluster. Kita buat analisis cluster. Hingga ketemu angka 19 itu. 19,1 kalo gak salah. 19,1 itulah aspirasi radikal di Indonesia ini, kalangan muslim. Meskipun yang aktif itu sedikit di antara mereka itu Cuma 5% saja yang turun ke jalan. 5% <i>against</i> yang 19,1 ya, bukan <i>against</i> dari total <i>muslim population</i> . <i>Against</i> itu lebih kecil lagi. Bisa Cuma 1%. Jadi postur dari radikalisme Islam di level opini, di level aksi konkret itu bisa saja kita dapatkan di hasil penelitian Islam ruang publik.	
<b>P:</b>	Bagaimana hasil dari wacana ini kan berkembang secara akademis akhirnya? Pertama disini, bila disandingkan dengan, mungkin Abang tahu juga, dengan ada NGO-NGO lain yang melihat bahwa ini sebenarnya Indonesia tingkatnya rentan malah. Di Lazuardi Biru itu malah aneh, dia menyebutkan bahwa masuk yang rentan, Cuma dia pake index. Tapi kemudian saya lihat ada juga kajian yang setara dan angkanya tidak jauh berbeda tapi dia pake konsepsi yang agak berbeda dengan intoleransi. Jadi bagaimana mereka melihat penerimaan terhadap aksi-aksi radikal, terus mereka menyetujui atau tidak. Itu angkanya tidak jauh berbeda. Nah bagaimana dengan perbedaan-perbedaan ini? wacana ini kan akhirnya berkembang sangat interpretatif ya. masing-masing pihak punya cara pandang yang cukup berbeda. Nah apakah cara pandang yang cukup unik atau berbeda dari kajian CSRC ini yang melihat bahwa ini jauh lebih dari perspektifnya atau keunikannya yang dikembangkan sehingga bisa muncul?	
<b>I:</b>	Ya keunikannya kita coba lebih komperhensif melihat indikator-indikatornya dan melihat lebih ada framework-nya jelas untuk	

	<p>mengukurnya. Dan tidak mengambil satu indikator untuk kemudian dipake sebagai indikator utama. Misalnya kalo kita pake keinginan untuk menerapkan syariah Islam sebagai indikator dominan itu berbahaya, karena bisa 50% masyarakat Islam ini radikal. Karena belum tentu juga mereka yang punya aspirasi seperti itu mau menerima kekerasan. itu penting meningkatkan beberapa indikator untuk dikatakan secara bersamaan dan dibuatkan dalam analisis cluster ketimbang mengambil beberapa indikator. Tidak dengan sendirinya orang menerapkan syariah Islam itu mengubah ideologi negara atau menginginkan penggunaan kekerasan. Karena persepsi tentang penerapan syariah Islam itu juga tidak terlalu solid di masyarakat. Karena itu, peneliti perlu memahami itu. jangan membuat suatu pertanyaan yang itu kemudian menggiring orang untuk tidak punya pilihan. Artinya, orang itu kan menganggap apa sih salahnya dengan menginginkan syariah ditegakkan. Mereka juga tidak terlalu mengerti penerapan syariah Islam itu hukum Inayah. Tidak juga. Kalo kita tanya lebih jauh angkanya berubah lagi. Setelah kita melihat kelemahan-kelemahan dari pendekatan itu maka kemudian kita membuat ukuran yang mungkin mencakup berbagai kemungkinan persiapan untuk mengarah kepada suatu radikalisme yang nyata seperti yang saya katakan tadi. Artinya, untuk sampai kepada tindakan eksterm itu harus punya [ ].</p>	
<b>P:</b>	<p>Apa sumbangan kajian yang sudah berupa tatanan wacana akademik yang telah dihasilkan yang belum saya dapatkan gagasannya, bagaimana cara deteksi dininya sekarang? Baik ketika ada kelompok, gerakan, ada sekumpulan masyarakat, cara melihat bahwa masyarakat kita hati-hati nih, di kelompok yang ini bisa dikategorikan dalam semi radikal atau sangat?</p>	
<b>I:</b>	<p>Agak susah ya. misalnya seperti ini, ketika kita melihat gejala saja itu tidak bisa, ketika melihat gejala di ruang publik saja kita tidak bisa semena-mena mengatakan bahwa radikalisme Islam menguat atau melemah. Karena kelompok-kelompok dalam Islam itu menggunakan kesempatan demokrasi ini untuk menyuarakan pendapatnya di ruang publik. Demokrasi sendiri memungkinkan mereka tampil. Coba gak ada demokrasi, kan mereka ditekan, seperti di zaman Orde Baru. radikalisme waktu itu ada sebenarnya cuma tidak muncul ke permukaan karena kebijakan represi Orde Baru. tapi hari ini kita melihat bahwa kelompok-kelompok itu leluasa untuk mengemukakannya menggunakan berbagai media untuk mempengaruhi publik agar mengikuti cara pandang mereka. Nah kita meneliti sejauh mana publik meresepsi, melihat, kemudian terpengaruh. Tentu saja bukan karena semata-mata itu publik terpengaruh, tapi banyak faktor yang mempengaruhi pandangan publik. Tetapi kita ingin melihat bahwa mereka ini cukup gencar menggunakan ruang publik. Ketimbang muslim moderat, mereka lebih agresif karena muslim yang terpapar oleh kegiatan mereka cukup besar sekitar 30-40% meskipun tidak terlalu banyak mereka yang terlibat disitu. Itu menunjukkan bahwa mereka ada, tapi tidak berarti mereka mampu menguasai karena kelemahan mereka itu tidak mampu mempengaruhi media-media utama. Mereka menggunakan internet tetapi tidak terlalu berpengaruh. Kita melihat sebenarnya dengan studi yang lain tren umum dari masyarakat muslim Indonesia. ketika mereka melihat aksi-aksi FPI, terkait dengan mayoritas keagamaan di ruang publik, itu cukup banyak yang bersimpati. Tetapi aksi-aksi yang terkait dengan politik Islam itu sedikit. Yang menerima informasi itu. Dengan kata lain, kita bisa melihat sebenarnya masyarakat muslim secara mayoritas itu cenderung menerima Islam sebagai bagian dari kultur masyarakat, tetapi tidak menginginkan Islam sebagai tujuan politik. itu menunjukkan suatu indikator umum bahwa penetrasi ideologi radikal di ruang publik itu tidak mengubah karakter masyarakat muslim pada umumnya, tidak radikal. Itu bisa kita jadikan indikator sejauh mana kesuksesan kelompok radikal. Tapi untuk mengatakan tidak ada kaum radikal, mustahil. Tapi untuk melebih-lebihkannya bahwa pengaruhnya luas itu juga apa dasarnya. Jadi kontribusi penelitian itu, disatu sisi, kita melihat memang ada, tapi di sisi lain jangan terlalu berlebihan juga. Seolah-olah menakut-nakuti.</p>	
<b>P:</b>	<p>Padahal sebenarnya penetrasi tidak begitu dalam.</p>	
<b>I:</b>	<p>Tidak. Karena itu kita harus betul-betul melakukan analisis yang cermat terhadap yang inkonsistensi publik yang kelihatannya diambil kesimpulannya dini. Misalnya, 73% muslim itu simpatik terhadap aksi-aksi FPI. Ketika menolak (majalah) Playboy, FPI menolak</p>	

	<p>Miyabi, atau aksi-aksi penyanyi yang seronok. Itu tidak bisa dijadikan indikator bahwa ketika 73% masyarakat bersimpati itu tidak bisa dijadikan indikator bahwa mereka mendukung seluruh tujuan dari FPI. Tidak, karena 90% ke atas masyarakat muslim itu tidak setuju dengan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan moralitas keagamaan itu. mereka setuju dengan nilai-nilainya, paling tidak 73%. Tapi mereka menolak aksi-aksi kekerasan. apa itu artinya? Mereka memerlukan kelompok-kelompok Islam untuk selalu menyuarakan orientasi keislaman mereka. Karena mereka takut juga kalo ideologi kebudayaan pop yang berasal dari kebudayaan populer ini bisa menginvasi kultur keislaman mereka. Kekhawatiran terhadap invasi kultur barat ini tidak berarti radikal. Jangan salah. Makanya masyarakat kemudian marah kalo dituduh seperti itu. wajar karena makanya jangan serampangan juga menggunakan...oh ini masyarakat radikal karena FPI dibiarkan. Ini kalau saja negara tegas terhadap aksi-aksi mereka yang brutal dan menggunakan kekerasan, masyarakat juga akan mendukung. Ambivalensi kelompok akademik dalam melihat ini. ketidakjelasan mereka dalam melihat inkonsistensi ini itu berakibat cukup serius terhadap ketidakpastian hukum kita. Polisi gak perlu takut.</p>	
<p><b>P:</b></p>	<p>Makanya itu yang agak bingung ketika perdebatan itu agak sulit. Sekarang ketika banyak orang tidak setuju dengan aksi-aksi kekerasan FPI, tetapi orang yang setuju itu sekaligus mengamini tapi dia benar kalo misalnya, tadi seperti yang Abang bilang tidak setuju terhadap (majalah) Playboy, nah itu kan gimana kita menentukan FPI ini yang kita bilang, bukan pendapat masyarakatnya, kita kategorikan apa. Apa dia itu termasuk yang radikal atau tidak. Punya cara kekerasan, ideologinya juga. Nah tapi masyarakat di satu sisi ada yang setuju dengan isu yang diangkatnya, tapi tidak setuju dengan...</p>	
<p><b>I:</b></p>	<p>Tidak bisa kita katakan mereka radikal, karena referensi budaya itu sudah besar. Ini demokrasi. Praktek demokrasi kita sedang diuji, sedang mengalami transisi. Kelompok-kelompok akademisi dan pengambil kebijakan itu jernih melihat ini sebagai sesuatu hal yang biasa saja. Tidak usah <i>exaggerating</i> bahwa terjadi pertarungan. Dilema kalo kita mengakui FPI kita bisa hancur secara kebudayaan. Nggak. Ini harus diletakkan secara tepat oleh pengambil kebijakan. Udah hukum aja FPI jika mereka melakukan kekerasan. lama-lama kan mereka dikucilkan. Nah di sisi lain tidak harus ada kampanye. Saya kemarin diundang sama Metro TV untuk berdebat dengan pimpinan FPI. Muhsin Alatas waktu itu sama redaktur Tempo, mengenai FPI ini seperti apa seharusnya. Saya bilang apa adanya. Saya cenderung menghindari memvonis FPI. Menghindari perilaku sebagai kalangan JIL yang cenderung menjadikan FPI sebagai musuh dan tidak mencoba memahaminya. Kalo saya mencoba memahaminya. Agak bisa letak kelemahan dari FPI itu kepada orang FPI sendiri. Kita terima aja posisinya. Kan mereka menikmati kebebasan. Kalo gak ada kebebasan berpendapat, berekspresi keagamaan, gak mungkin mereka itu turun ke jalan. Menyatakan aspirasinya. Atau mengklaim bahwa mereka membela aspirasi umat Islam. Itu sah-sah saja dalam membela aspirasi. Nanti biar saja masyarakat yang menilai. Tapi persoalannya mereka gak boleh melanggar hukum. Jadi FPI ini ada pandangan bahwa mereka itu sah melakukan kekerasan karena sudah melewati prosedur. Mereka kan marah karena semata-mata melakukan kekerasan. dianggap preman dan gak punya otak. Itu mereka membela diri. Mereka mengatakan sudah melewati prosedur itu. lapor ke polisi, segala macam. Tapi masalahnya mereka ini menganggap kalo polisi atau negara tidak memenuhi tuntutan mereka, mereka berhak atau sah untuk melakukan kekerasan. Nah itu masalahnya. Saya bilang bukan hanya gak boleh secara hukum, tapi dibolehkan oleh publik sendiri. Meskipun publik setuju dengan aspirasi yang dibawa itu, tapi bukan berarti mereka setuju kalo Anda melakukan kekerasan. gak apa-apa kalo polisi misalnya pada akhirnya memutuskan keputusan yang tidak sesuai dengan aspirasi umat Islam yang dibawa oleh FPI. Itu tetap diikuti oleh masyarakat daripada FPI yang melakukan kekerasan. yang kaya gini tuh gak terlalu jelas, karena itu kemudian polisi cenderung takut untuk bersikap seolah-olah kalo bertindak tegas kepada FPI atau misalnya melindungi kelompok-kelompok yang dituduh FPI sebagai perusak Islam itu seolah-olah mereka melukai perasaan mayoritas. Padahal itu nggak. Oh mereka melindungi Irshad Manji kemarin, konsisten aja. masyarakat juga diam saja. FPI aja paling yang [ ]. Postur itu harus diketahui dengan baik oleh pengambil kebijakan. Agar tidak ragu untuk mengambil suatu tindakan.</p>	

<b>P:</b>	Nah itu saya masih kurang jelas, bagaimana kita mengaitkan wacana ini dengan kasus seperti itu dengan kondisi ekonomi politik, misalnya. Kan ada juga analisis ekonomi politik yang mengatakan bahwa kenapa mereka berperilaku seperti itu ya posisi negaranya. Karena beberapa bilang, kalo negara absen, ya sudah. Kita aja yang present disini. Kita gantikan peran itu. karena kita sudah beberapa kali kita, entah cafe atau segala macam, walaupun sebenarnya kalo dibilang apa yang dibubarkan atau dilihat isunya kadang-kadang kurang pas kalo kasus FPI cafe ini cafe itu, atau majalah ini majalah itu, tapi yang lain? nah itu kan perlu dilihat sebagai di mata ruang publik itu yang diartikan kok ini	
<b>I:</b>	Itu hal lain. Misalnya redaktur Tempo mengatakan FPI gak melarang penyanyi-penyanyi dangdut yang seronok kan sama aja. itu akan memberikan justifikasi kepada FPI untuk melakukan hal yang sama. Kita gak boleh membangun wacana itu. Wacana, misalnya, kritik kita terhadap pemerintah yang absen. Itu satu hal. Tetapi tidak membolehkan kita memberi ruang kepada kelompok-kelompok garis keras seperti FPI ini. itu kan akan menjustifikasi keberadaan mereka saja. Saya bilang ini harus bisa diselesaikan. jangan menjadi satu kerikil kita untuk membangun pembangunan. Harusnya kritik kita terhadap pemerintah itu saja. Tidak perlu mengaitkannya dengan keberadaan kelompok-kelompok ini. itu akan memberikan 'angin' kepada mereka. Mereka nanti sama-sama menyalahkan negara. sama. kecenderungan psikologis dari FPI itu bisa ketemu dengan kelompok kiri. Kalo kelompok kiri mengkritik negara, mereka ikut-ikutan mengkritik negara. padahal boleh jadi di balik layar mereka sebenarnya berkomplotan juga dengan negara, FPI itu. tapi kan kita harus tetap disiplin untuk membuat analisis, meletakkan demokrasi sebagai <i>framework</i> . Demokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, prostitusi dan lain-lain itu sebagai indikator utama.	
<b>P:</b>	Tapi apa pakemnya sekarang kalo misalnya wacana sudah berkembang bahwa banyak analisis-analisis terhadap kelompok-kelompok yang dianggap radikal misalnya. Apa pakem yang perlu dikembangkan supaya tadi, mereka tidak dianggap menjadi punya justifikasi yang dilakukan negara menjadikan peran aparat. Atau selama ini orang-orang melihat wacana di publik, terutama media, menganggap jangan-jangan FPI ini 'piaraan' juga. Kalo misalnya gak 'piaraan' kasih aja tuh Kampung Ambon FPI kalo misalnya negara lama betul. Apa pakemnya?	
<b>I:</b>	Itu dulu. Karena FPI ini bergerak dalam suatu konteks <i>mindset</i> masyarakat terhadap mayoritas ruang publik. Kalo kasus-kasus yang tidak terlihat seperti Kampung Ambon, itu publik tidak terbawa sebenarnya. Nah kelompok-kelompok garis keras ini pintar menggunakan momen atau isu, karena mereka juga kan tetap ingin eksis sebagai kelompok dengan misi tertentu. Karena itu kalo kita revisi itunya gak eksis kan. kita harus melihat juga <i>behaviour</i> dari organisasinya ini. Mereka ini kan besar oleh krisis. Oleh konflik. Kalo mereka tidak ada konflik, ya mereka tidak akan jadi seperti itu. Di LAZ aja. Lembaga Amil Zakat kan relevan kalo ada bencana alam. Jadi memang masing-masing membutuhkan konteks itu untuk eksis. Karena itu mereka harus memilih misinya. Gak mungkin melakukan semuanya. Nah moralitas keagamaan adalah satu isu utama yang ditangani oleh FPI dan itu di ruang publik. Dalam artian, semakin besar dampaknya terhadap ruang publik, maka makin menariklah isu itu untuk mereka. Kalo saya amati. Beyonce, misalnya, kan tidak seheboh Lady Gaga. Kata mereka, "wah kita kecolongan." Nggak, karena memang Beyonce tidak sekontroversial Lady Gaga. Ya kalo mereka mau konsisten kan, Beyonce sama seksinya.	
<b>P:</b>	Iya. Apa bedanya sama penyanyi dangdut yang...	
<b>I:</b>	Iya itu dia. Karena mereka memilih isu untuk menaikkan pamor mereka. Dan bukan hanya FPI. Misalnya kalo kelompok lain dipanaskan oleh rumor, oleh keberhasilan juga kelompok-kelompok garis keras konservatif untuk mengembangkan wacana provokasi, ya itu makin memberikan 'bensin' mereka untuk bergerak. Mereka yang selama ini diam-diam ada project kemudian termotivasi, ya kemudian, ya kebanyakan orang, muslim itu di bawah sadarnya mudah untuk terkooptasi. Meskipun dia juga tidak sepuritan seperti	

	yang dibayangkan ketika menolak Lady Gaga. Mungkin menghabiskan waktu untuk nonton BF, tapi ketika ada isu Lady Gaga dia mengambil posisi yang mendukung FPI kan. Itu misalnya. Itu karena dipengaruhi bawah sadarnya terprovokasi, ekspektasinya sudah melampaui urusan moral, politik, persoalan identitas. {informan menerima panggilan telepon}. Nah kita terhadap takmir mesjid yang di Jakarta, ini kan angkanya cukup besar untuk dikelola. Itu takmir mesjid. Tapi kita lihat kalo dari angkanya ya. public muslim. tentunya gak jauh.	
<b>P:</b>	Bahkan sampai Muhammadiyah membuat SK untuk mesjid-mesjid Muhammadiyah supaya gak di...	
<b>I:</b>	Ketika masuk ke wilayah-wilayah seperti ini, moralitas. Jadi yang harus ditangkap adalah antara isu politik, isu etika keagamaan. Etika keagamaan itu tentu bukan di ruang privat, yang jadi masalah yang selalu membuat orang aktivis-aktivis Islam menyatukan barisan, menganggapnya sebagai krisis, itu ketika di ruang publik, misalnya kasus perilaku seks, Lady Gaga, Miyabi, itu kan gak melakukan syuting porno kan nggak. Tapi <i>image</i> itu yang main di ruang publik, kehadiran itulah yang memberi alasan buat kelompok ini untuk eksis. Disitulah ancaman untuk melakukan kekerasan kepada negara segala macam itu dimainkan. Harusnya negara dan publik secara umum tidak termakan oleh isu-isu semacam ini. biar saja. Toh kalo diteliti lebih jauh, keputusan-keputusan pemerintah seandainya itu bertolak belakang dengan tuntutan kelompok konservatif itu tidak akan membuat apa-apa, karena publik itu sebenarnya lebih dewasa dalam memaknai itu. Asalkan negara itu dengan tepat menjelaskannya. Demokrat, misalnya, cenderung melempar tanggung jawab itu ke Ruhut. Ruhut kan emang kaya gitu. Ruhut kan mengambil keuntungan dari ketakutan politisi-politisi muslim untuk mengambil tanggung jawab ke publik dari posisi pemerintah. Ruhut kan terbiasa melawan arus. Nah hanya Ruhut yang bener waktu debat sama temen saya di TV One. Itu Ruhut bener banget omongannya. Saya perhatikan kemana politisi Demokrat yang lain, gak ada yang berani mengatakan. Karena mereka mempertimbangkan reaksi publik yang...mereka sendiri tidak tahu, tidak punya informasi yang jeli publik itu seperti apa. Nah kita CSRC ingin mengambil kebijakan politis dan lain-lain itu memahami ini dengan baik. Opini masyarakat muslim secara umum mengenai masalah ini terhadap aturan, prostitusi, demokrasi, HAM, dan juga sentimen kulturalnya itu gimana membedakannya. Itu harus tahu mereka. Ketidaktahuan inilah yang menimbulkan ketidakjelasan sikap mereka. Dikasih omongan yang kaya gini sama MUI, mereka jadi ketakutan. Karena itu dilema yang tidak perlu. Dan itu tidak akan menyalahkan MUI atau menafikan kelompok-kelompok itu. Cuma perlu negara bersikap tegas agar ini gak berulang lagi dan berulang lagi. Setting kita ini udah jelas. Kekeluargaan, demokrasi, konstitusi, HAM, semua ada di dalam setting aturan kita. Tapi kemudian orang jadi bingung antara Islam atau...	
<b>P:</b>	Padahal biasa saja ya.	
<b>I:</b>	Padahal biasa saja. Masyarakat juga udah paham. Terlalu dibesar-besarkan kemudian terbawa oleh situasi hiruk-pikuk. Kalo saja mereka tegas, kelompok-kelompok itu juga tidak akan punya nyali untuk melakukan kekerasan karena publik akan mendukung. Nah saya bilang begitu di Tempo itu dengan tegas. Nah kalo terhadap kelompok-kelompok radikal, ekstrim, nah itu belakangan mulai ada peningkatan pemahaman masyarakat. Tapi mereka mulai dengan tegas menolak. Kalo dulu kan di awal-awal beberapa politisi Islam, pemimpin Ormas masih memandang gak mungkin kelompok Islam ini melakukan itu. Gak mungkin Islam memiliki cara yang radikal. Itu karena gak tahu saja. Dengan berbagai bukti yang berulang-ulang makin mengarahkan mereka pada suatu persepsi atau konsensus yang menyatakan bahwa ini harus ditolak. Kalo negara misalnya kemudian nangkep-nangkepin teroris, menembak sampe mati, gak ada yang protes kan.	
<b>P:</b>	Betul.	
<b>I:</b>	Kalo yang ini orang masih bingung.	

<b>P:</b>	Tapi gimana misalnya dengan HTI Bang, dia kan sebenarnya cara yang ditempuh, kalo Abang melihat pendekatannya bukan dengan cara kekerasan, tapi ideologinya kan jelas dia anti, dia gak terima demokrasi, dia mengusung khilafah Islamiyah?
<b>I:</b>	Biarin aja.
<b>P:</b>	Maksudnya itu koridornya sudah pakem. Biarin. Sepanjang mereka tidak menggunakan cara itu.
<b>I:</b>	Karena kalo mereka ditekan, malah jadi alasan untuk konsolidasi.
<b>P:</b>	Itu yang jadi satu kesimpulan juga kalo gak salah. Jadi semakin kelompok-kelompok ini mengalami koersi, terutama oleh negara, justru itu malah melegitimasi mereka untuk ...
<b>I:</b>	Untuk tumbuh secara tidak sadar gitu ya. makanya ini dengan datangnya Lady Gaga ini kan tidak nyaman kelompok itu mendengar. Sebenarnya mereka menunggu datangnya Lady Gaga itu ke Indonesia, agar mereka eksis. Kira-kira kayak gitu lah. Jadi kedatangan Lady Gaga ini semacam represi moral.
<b>P:</b>	Dibikin momentum gitu ya.
<b>I:</b>	Dianggap sebagai represi moral. Kalo pemerintah misalnya setuju, akhirnya kemudian polisi memberikan izin, menekan kelompok-kelompok buat ditunggu. Konsolidasinya diperkuat, Pemerintah kafir, kampanye disana, di jaringan itu akan lebih efektif. Makanya pemerintah seharusnya tidak mendengar dulu lalu kemudian membuat keputusan yang berubah. Dari awal udah konsisten aja. Makanya indikator-indikator itu menjadi penting [ ] negara ini. Kan gak jelas. Makanya saya katakan dalam <i>press conference</i> beberapa hari yang lalu di Tempo, di Kompas, Republika juga memuat pandangan saya.
<b>P:</b>	Saya baca.
<b>I:</b>	Tidak jelas. Ambivalensi itu ada di kelompok garis keras itu diambil juga oleh negara. Kacau. Terus terang banyak orang pintar di negara ini, banyak perguruan tinggi yang ngerti, tapi kok negara ini kaya ini. Ini memalukan. UGM melarang Irshad Manji.
<b>P:</b>	Termasuk Undip juga. Jadi sampai terkooptasseoi ke tingkat intelektual itu gak ada.... kita sebenarnya punya kebebasan yang saya pikir itu agak beda.
<b>I:</b>	Makanya ini kacau, ini gak jelas. Orang-orang menjadi ketakutan gak beralasan.
<b>P:</b>	Bedanya dulu negara yang berkuasa. Dulu kajian kiri itu agak gak boleh di kalangan akademisi, sekarang kajian-kajian itu diangkat seolah-olah...tapi yang neken bukan negara nih.
<b>I:</b>	Negara kemudian gak menganggap penting, melindungi mereka, dan termakan oleh isu-isu yang sengaja di tonjolkan oleh ..Irshad mengampanyekan homoseksualitas di kalangan masyarakat muslim. Itu akan alat yang sangat ampuh untuk mengagitasi masyarakat dan polisi juga malas untuk mendalami masalah ya udah. Lagian yang lain-lain juga gak mau ikutan, karena <i>too much</i> gitu. mengambil energi mereka. Dituduh balik orang-orang mengikuti ideologinya Irshad Manji gitu. udah lah diam aja, akhirnya masing-masing mengambil keputusan yang menguntungkan. Ambil aman aja lah. Mereka ketipu sama agitasinya FPI, segala macam. Irshad Manji pertama kali datang di sini kok, diskusi. Saya yang masih [ ] menanggapi. Gak ada apa-apanya. Menurut saya sih gak berbahaya sama sekali. Gak ada hebatnya menurut saya. Biasa aja. kita udah terbiasa. Cak Nur malah lebih jelas, lebih kuat. Cuma karena isunya bukan itu di Irshad Manji itu. isunya sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Kalo Cak Nur kan mereka gak bisa mengalahkan, karena mereka coba hantam gagasan, jadi ada peluang untuk memperdebatkannya. Itu lebih <i>fair</i> . Kalo Irshad Manji ini kan tuduhannya ke <i>person</i> -nya, bukan gagasannya. Selesai.
<b>P:</b>	Udah matiin karakternya. Nah saya ada dua lagi pertanyaan. Yang pertama itu terkait, saya inget tahun lalu ketika bahas ini sama Abang tentang risetnya CSRC karena waktu itu saya mau mendapatkan tapi kebetulan ada Abang, saya bicara. Abang waktu itu cerita

	ketika riset ini mau dimulai, terdapat perdebatan sengit juga dikalangan akademisi. Nah saya pengen tahu apa sih perdebatan yang terjadi sehingga proses produksi dan reproduksi wacana itu cukup kuat dan siapa aja waktu itu? Abang bilang gitu saja inget. Itu yang cukup menarik buat saya.	
<b>I:</b>	Posisi kita itu kan lembaga riset ya di bawah rektorat UIN. Tetapi ini bukan riset murni. Ini kita menjalankan riset strategis. Disamping itu juga kita punya misi untuk menjalankan advokasi, kampanye-kampanye ke publik. Jadi antara gaya dengan penekanan pada riset yang dibuat advokasi itu kemudian menciptakan semacam dinamika dalam aktivis yang ada disini. Mereka ada yang menekankan pentingnya terma-terma itu kan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan lain-lain. Dan menganggap sebaiknya kita menempatkan diri sebagai lembaga riset yang netral dan mempertanggungjawabkan riset kita di kalangan akademis yang menggunakan standar-standar tertentu. Jadi ada, terutama kawan-kawan yang lagi semangat melakukan riset, studi lanjut atau pulang baru Ph.D atau pulang menempuh Ph.D ini mendorong supaya kita memilih istilah-istilah, terma-terma itu yang bisa kita pertanggungjawabkan secara akademis.	
<b>P:</b>	Terus posisi yang satu lagi?	
<b>I:</b>	Mereka yang memang melihat penelitian dan publikasi ini sebagai suatu strategi kampanye untuk mempengaruhi kebijakan baru opini publik. Karena itu kita harus menggunakan bahasa yang kuat yang itu mudah menggugah. Karena bahasa-bahasa akademik yang [ ] itu terlalu eksklusif.	
<b>P:</b>	Terlalu jauh juga untuk dimengerti. Terlalu jauh dicerna publik ya.	
<b>I:</b>	Kita kan membutuhkan media yang mem-blow up dan mengangkat isu ini. karena itu kita perlu membuat pernyataan-pernyataan yang kuat disitu. Ya mungkin saja <i>debatable</i> di kalangan akademik. Gak usah terlalu akademik.	
<b>P:</b>	Jalan tengahnya ada juga?	
<b>I:</b>	Jalan tengahnya ya kita harus bisa menjelaskan terma-terma itu seilmiah mungkin, tapi disini lain kita juga menyediakan ruang untuk menampilkan data-data atau kesimpulan kita itu bisa memancing diskusi atau debat. Misalnya ketika kita membuat penelitian mesjid. Itu Islamisme kita gunakan. Awalnya kita menggunakan radikalisme, tapi temen-temen tadi itu bilang bahwa istilah ini itu tidak lazim digunakan akademisi di kampus-kampus barat. Ada temen, [ berpendapat] buat apa juga. Sampe sebegitu. Kita itu mau pake Islamisme itu juga terlalu populer, terlalu dimengerti publik. Itu bisa salah paham publik terhadap hal itu. walaupun di level akademik itu biasa, tapi ya gak usah terlalu exaggerating lah. Ini sebagai suatu yang harus mutlak sekali. Ini kan kita punya tujuan. Akhirnya kita ambil jalan tengah. Kita tetap gunakan radikal, tapi Islamisme kita jelaskan untuk mengakomodasi...	
<b>P:</b>	Sampai ada di karya mesjid, saya lupa siapa yang nulis, ada ungkapan, saya lihat perdebatan wacananya. Kok gak konsisten penggunaan istilah. Kan ada yang menyandingkan dengan Islam kultural dan Islam politik dengan terakhir muncul Islamisme. Tapi akhirnya ada satu kalimat disitu yang saya garis bawah terus, ya radikalisme itu anak Islamisme.	
<b>I:</b>	Jadi kita bedakan, Islam itu gak tunggal. Itu definisi saja. Tapi diskusi dan debat yang terjadi itu sebenarnya bukan untuk menekukan gambaran bentuk kemudian menemukan suatu definisi yang ketat. Tapi menemukan bagaimana kita meletakkan riset ini. untuk konsumsi siapa, untuk perubahan apa. Ini juga menggambarkan dinamika lembaga riset di bawah perguruan tinggi yang punya orientasi perubahan. Di sisi lain, ini juga dipertanggungjawabkan secara akademik. Itu aja. dan saya sih gak peduli dan berusaha untuk menampilkan secara akademik. Kalo ada kelemahan-kelemahan sih saya gak peduli, gak ragu menampilkan itu.	
<b>P:</b>	Akademisi boleh salah. Tapi gak boleh bohong.	
<b>I:</b>	Ya itu. bahwa kita akan menampilkan data-data yang akurat itu.	

<b>P:</b>	Akademisi dikritik itu biasa.	
<b>I:</b>	Karena belum tentu yang mengkritik itu lebih benar.	
<b>P:</b>	Yang penting gak bohong.	
<b>I:</b>	Kita gak bohong. cara kita membahasakannya, itu definisi kita.	
<b>P:</b>	Pikiran orang kan berbeda.	
<b>I:</b>	Yang penting kita masuk dalam pewacanaan dan kita sukses memancing perdebatan dan mempengaruhi kebijakan.	
<b>P:</b>	Contohnya apa Bang yang suksesnya?	
<b>I:</b>	Tentu kita kan bukan advokasi kebijakan ya, tapi...	
<b>P:</b>	Siapa yang memberikan respon pertama?	
<b>I:</b>	Riset kita, saya pribadi, dan yang lain-lain dalam banyak kesempatan sering diundang untuk mengutarakan pandangan. Artinya kita diterima sebagai salah satu--- mekanisme tadi. Tapi ini untuk jelas bahwa kelompok-kelompok radikal menggunakan situasik konflik itu untuk meningkatkan penetrasi dan ekspansinya di muslim moderat sekalipun. Mereka bisa menggunakan itu untuk merangkul kekuatan-kekuatan yang sebenarnya tidak radikal, tapi karena itu bisa jadi isu bersama kan.	
<b>P:</b>	Mereka punya radio juga kan. Dakta itu kan basisnya disana juga. Syiarnya termasuk.	
<b>I:</b>	JAT kan.	
<b>P:</b>	Iya.	
<b>I:</b>	Aksi bersama itu pimpinan JAT. Dia mempengaruhi kelompok-kelompok non-radikal seperti Muhammadiyah dan NU, walaupun kemudian NU menarik diri dari aksi itu. mungkin dia udah tahu ya. itu menunjukkan bahwa kita juga hati-hati bahwa kelompok radikal menggunakan itu untuk memperlebar pengaruhnya	
<b>P:</b>	Semakin terbuka itu konfliknya itu justru	
<b>I:</b>	Mereka memang memanfaatkan konflik itu. Untuk kasus di Pandeglang, karena mereka jauh ya tidak terlalu menggunakan. Disana juga kan ada kelompok keislaman yang bisa mereka pengaruhi. Bekasi, Bogor itu kelihatan banget, terutama Bekasi.	
<b>P:</b>	Bogor basis HTI juga kan.	
<b>I:</b>	Itu kan memang bergerak, FPI, dan segala macam itu kan bisa menjadi isu bersama buat mereka. Tapi JAT ini sumber dayanya lebih radikal dari kelompok yang ada. tapi mereka bisa mengambil peran disitu. Negara tidak tahu. Karena itu muncul isu-isu mereka demo, itu berkembang isunya. Bekasi Kota Syuhada, itu kan berkembang isunya. Jadi itu tadi saya bilang tadi. relevannya selalu kalo ada konflik. Kalo gak ya...	
<b>P:</b>	Saya kadang-kadang dengerin Dakta gitu ya. Ada yang berita pagi. Suka ada yang telepon, ya silahkan ada kejadian apa, kalo ada masalah-masalah di masyarakat. Ya itu tolong ya, di jalan apa gitu ya, prostitusinya itu, kalo perlu kirim FPI. Jadi sudah seperti itu masyarakat terpengaruhnya. Ada lagi kejadian begini-begini, ada yang jual minuman keras, dan lain-lain. jadi konteksnya gini, kalo perlu FPI atau siapa samperin aja kesana itu sudah polisi. Jadi sudah sampai kesitu menggunakan forum radio. Wah ini Dakta keras juga. Jadi masyarakat pun telepon. Jadi pengaruhnya sampai penetrasinya wah. Saya awan ya menangkan informasi semacam itu.	
<b>I:</b>	Ya artinya tentu kita melihat gejala itu apakah mewakili secara umum atau gimana. Saya kira masyarakat memiliki aspirasi seperti itu dan mewujudkannya. Sementara sistem tidak bisa memenuhi itu ya, masyarakat menggunakan media itu lalu menganggap bahwa ini sah-sah saja. Itu kan memang kesalahpahaman yang memang mungkin muncul dari orang-orang tertentu terus tumbuh kalo tidak ada	

	<p>sikap tegas dari negara yang mengatakan mereka sebenarnya harus didikte sama apa. Apakah didikte sama tekanan atau didikte aturan. Nah selama ini kan tidak jelas. Kadang-kadang mereka pakai aturan. Lihat situasi. Kalo tekanannya kuat, mereka bisa ke kiri, ngadep ke kanan. Pas kasus FPI mereka berani, misalnya, untuk menghukum Habib Rizieq masuk penjara. Itu satu poin sebenarnya dan tidak ada yang protes. Biasa aja. itu menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat cukup dewasa bahwa ada hal-hal seperti itu dia menikmati kebebasannya berbicara ya it's ok. Tapi ketika itu ditindaklanjuti dengan aksi-aksi, pemerintah tegas saja. Gak bisa menggunakan alasan keresahan itu. Nah hari ini memang keresahan itu sering dipakai oleh pemerintah, oleh polisi dibawah ketidakprofesionalannya. Ini masyarakat resah, ya sudah bubarin saja. Gawat. Itu masalah profesionalisme polisi. Itu masalah lain lagi. Tapi untuk ususan FPI ini harus jelas. Kelompok akademik, NGO-NGO <i>human rights, democracy</i>, tokoh-tokoh agama yang moderat itu harus jelas ngomong begini loh. Lain halnya aspirasi mereka terhadap..itu lain lagi. Kaya Hasyim Muzadi itu komentarnya, menurut saya, buruk sekali. Dia malah mengkritik para aktivis HAM yang membela Irshad Manji, penampilan Lady Gaga. Ini menganggap orang-orang gak konsisten. Coba kalo memang benar-benar membela HAM harusnya mereka berteriak pelanggaran HAM oleh Israel. Nah retorika seperti ini mengacaukan masalah yang sebenarnya. Ini dibawa kesana. Itu modelnya. Argumentasi yang saya rasa kelompok representatif itu berargumen itu tidak jelas.</p>	
<b>P:</b>	Jadinya kita juga diambang apa...gak ada hubungannya. Glokal, global.	
<b>I:</b>	Iya. Itu kan seolah-olah dia tidak mau juga dikatakan anti-HAM. Ini masalah konsistensi. Bahwa aktivis-aktivis HAM disini itu kan masing-masing memiliki prioritas. Bukan berarti mereka mengatakan Israel itu melanggar HAM. Itu lain lagi. Yang terjadi kan orang-orang itu udah membuat posisinya masing-masing. Saya kira tantangan buat kita ke depan itu sebenarnya kita itu belum sampe pada konsensus pada platform. Kita gak punya konsensus menghadapi hal-hal seperti ini kemudian menjadi terbelah. Terlebah itu masalah. Dan yang lebih parah ketika kampus sudah tidak lagi menjaga kebebasan akademisnya.	
<b>P:</b>	Itu yang disayangkan sih sebenarnya.	
<b>P:</b>	Gawat itu. Nah mungkin ini terakhir Bang. Saya kan gak tahu visi-misi CSRC itu secara umum apa ya. mungkin kalo bisa saya dapat gambaran, bagaimana meletakkan riset ini, yang mulai dari meletakkan Islam di ruang publik, mesjid, dua riset itu meletakkan dalam koridor visi-misinya CSRC itu dimana?	
<b>I:</b>	Ya kita ini memandang bahwa kita ini kan murid-muridnya Nur Cholis Madjid ya. sangat dipengaruhi oleh cara pandang Cak Nur yang mencoba membangun integrasi antara keislaman, kebangsaan, itu ya kita sebagai lembaga riset di bawah UIN itu kan peran daripada universitas Islam untuk mengetahui tentang cara pandang perspektif keislaman masyarakat, bukan harusnya yang diperankan oleh agama. Yang konteks kehidupan sosial dan politik. kita mendukung demokrasi dan ideologi bangsa. Dan ingin melihat bahwa masyarakat muslim sebagai mayoritas itu menjadi contoh yang baik, bukan jadi <i>problem</i> , terhadap pembangunan kebangsaan. Pembangunan politik. dan karenanya visi terhadap yang sosial, itu sebenarnya visi kedepannya CSRC ini dalam melakukan riset, kegiatan-kegiatan advokasi, dan lain-lain. karena itu ideologi keagamaan dan lain-lain itu kita cegah. Dan itu tidak semata-mata lahir dari suatu taktik belaka, karena kedaan konteks menuntut kita untuk mengubah pemahaman keagamaan kita yang berakar kuat pada nasionalisme, pada kebebasan humanisme, revolusi Islam itu sendiri sebagai penyebar kedamaian. Jadi kita harus melihat bagaimana identitas itu ditempatkan dalam konteks kebangsaan, relasi umat Islam dengan umat-umat lain, dalam kerja sama internasional dalam konteks global. Kedepannya kita berharap Indonesia, Islam ini bisa memainkan peran yang strategis ya. Karena Islam Indonesia ini masih dianggap pinggiran dalam kancah Islam global, baik dalam pandangan masyarakat Islam Timur Tengah, Arab, maupun dalam pandangan negara-negara barat. Mereka lebih melihat Islam itu di Timur Tengah. Padahal Islam Indonesia itu mayoritas terbesar di	

	dunia dan juga punya karakter yang sangat siap untuk menjalin kerja sama, dialog perabadan dengan negara-negara barat tanpa ada perasaan bahwa kita ini punya psikologi rendah diri, kita ini mengekor barat. Kita menciptakan suatu kepercayaan diri yang tangguh dari kalangan muslim dengan akar tradisi lainnya mereka bisa berkembang bersama dengan masyarakat global untuk memajukan kehidupan. Kaya gitulah pandangan kita. Nah kita melihat berbagai masalah dengan konteks itu.	
<b>P:</b>	Itu yang saya baru pahami ketika baca risetnya. Memang gagasan-gagasan humanisme itu yang melekat. Pantas posisinya pun akhirnya dalam konteks tertentu dia bisa jadi sepakat dengan radikalisme dalam hal tertentu yang membiarkan, tapi di dalam hal yang lain. Kita tidak bisa berepresi bikin HTI, bikin..	
<b>I:</b>	Kebijakan publik keagamaan dan [ ] adala hal yang wajar saja yang sah dalam demokrasi ini bedanya dengan NGO-NGO reguler. Karena kita diskusi tentang publik keagamaan, mereka udah bilang sebaiknya tidak ada kebijakan publik keagamaan. Nah kita bilang bahwa bukan kita sekedar punya sentimen keislaman saja, tapi cara pandangan Anda ini ahistoris. Karena di negara-negara lain pun dengan <i>arrangement</i> yang beda-beda, agama tetap memainkan peran ruang publik. Nah kita memang punya sejarah lebih, konteks historis kita yang memang memainkan adanya negosiasi, kontekstual dalam kekuatan masyarakat. Kita gak boleh lupa itu. Jadi dalam diskusi-diskusi ktia dengan mereka itu kelihatan perbedaan yang tajam, tapi itu sendiri memberikan kesempatan untuk mereka memahami. Itu juga peran kita. Kita disini itu memediasi, memfasilitasi kelompok-kelompok Islam yang kerja sendirian, yang punya impian sendirian, NGO sekuler yang itu juga ada di kotak yang berbeda. Mereka duduk bareng kemudian mereka bisa saling paham bahwa sebenarnya kita punya tujuan yang sama. Cuma kadang kita risih. Mencurigai satu sama lain peran kita. Kita memainkan peran-peran yang tidak langsung dengan kelompok-kelompok garis keras, tapi misalnya Dompot Dhuafa, aktivis seperti itu, memiliki dunianya sendiri. NGO-NGO ada yang kiri, ada yang ini, itu kan menganggap aneh, padahal mereka bekerja untuk masyarakat. Nah disini mereka bisa ketemu. Karena kita punya pengalaman berdialog dengan cara pandang yang berbeda itu. Di dalam diri kita sendiri sudah selesai. Kenapa kemudian kita berhasil memfasilitasi mereka. Kita juga mendidik para guru, para ustadz pesantren sudah di 17 kota tentang HAM. Judulnya itu <i>training</i> Agama dan HAM. Itu juga menarik bagaimana kita memainkan peran menjembatani antara HAM yang cenderung dianggap <i>western</i> kepada <i>core</i> daripada masyarakat Islam, yaitu di pesantren. Mereka kan merasa mereka berada dalam paling intinya masyarakat Islam dalam melanjutkan tradisi Islam, budayanya, norma-normanya. Terus mereka kita ajak berdiskusikan HAM. Itu seru banget. Nah kita adalah bagian dari mereka. [ ] pesantren. Tidak susah bagi kita mengkomunikasikan. Tapi kita sudah mengalami dialog yang cukup intens dengan Barat, yang pada umumnya juga temen-temen alumni Barat. Kombinasi itu yang membuat kita memainkan peran yang lebih mudah. Kalo mereka bangun ayat, kita lebih banyak lagi ayatnya. Jadi ini unik sebenarnya. saya mau menuliskan sesuatu untuk pengalaman ini yang kita <i>share</i> misalnya dengan temen-temen Ma'arif Institute. Kalo Setara kan dia Hendar di situ. Itu gak biasa dia pengaruhi. Kalo di Maarif atau Wahid itu dia kan ada kombinasi itu berlangsung. Ini menarik sebenarnya kalo diteliti bagaimana gerakan post-Cak Nur, Istilahnya itu post-Islamis, dia itu merujuk kepada PKS. Pasca Islamis. Kalo kita ini kan bukan post-islamist. Kalo kita kan dari awal modernis-posmodernis, kemudian masuk ke dalam aksi-aksi yang lebih lanjut terhadap strategi-strategi lebih lanjut. itu belum ditulis ya.	
<b>P:</b>	Ok Bang. Seneng saya ditemenin diskusi. Boleh berdiskusi lain waktu? Di luar inilah.	

**Catatan Lapangan & Hasil Wawancara dengan Bonar Tigor Naipospos (Direktur SETARA Inst.)  
tentang  
“Konstruksi & Pertarungan Wacana Radikalisme di SETARA Institute”  
Bendungan Hilir, 28 Mei 2012**

**HASIL WAWANCARA**

P: Pewawancara

I: Informan

[ ] = sulit terdengar secara jelas.

	KETERANGAN INFORMAN	KATEGORI
<b>P:</b>		
<b>I:</b>	[ ] bijak, tapi juga ramah. [ ]. Semuanya agama [ ] perdamaian. Tapi di sisi lain ternyata setiap agama karena [ ] pemegang monopoli kebenaran, tiba-tiba di sisi lain dia cenderung negasi juga kepada yang berbeda. Karena itulah menurut kami intoleransi itu bisa bermata dua. Kalo toleransi sejati adalah toleransi yang kemudian memang bisa menerima orang yang berbeda ideologi apa adanya tanpa menyalahkan ataupun membenarkan. Itu prinsipnya. Itu saja. Apa adanya. Karena toh pada akhirnya jelas Yang Maha Kuasa menentukan kan. karena kita punya prinsip kalo Yang Maha Kuasa itu yang menciptakan, pada akhirnya semua diri itu akan bertanggung jawab pada-Nya. Dialah yang kemudian menentukan nasib akhirnya. Itu prinsip kita. Jadi itu pilihan dari itu toleransi sejati. Jadi kalo toleransi sejati gak perlu mempertanyakan, gak perlu mengiyakan juga.	
<b>P:</b>	Kalo yang Abang sebut tadi intoleransi bermata dua itu gimana, Bang?	
<b>I:</b>	Intoleransi bermata dua itu makanya kita selalu bilang ada intoleransi pasif, ada intoleransi aktif. Yang bisa dilakukan, ini juga respon kedua terhadap dunia luar, karena dia punya kepercayaan fundamental, setiap orang bisa saja jadi fundamentalis, jadi fanatik. Itu hak dia. Tetapi sepanjang dia kemudian tidak mengekspresikan dan mengganggu orang lain, oleh karena itu, kita percaya bahwa memang yang paling baik adalah toleransi utuh tadi. tapi kemudian kita tidak bisa menyangkal bahwa yang paling memungkinkan adalah intoleransi pasif. Karena itulah yang menjadi peran budaya, peran nilai-nilai sosial, dan peran negara minimal membuat orang itu pada posisi intoleransi pasif. Itu konsep kita.	
<b>P:</b>	Tapi sebelum gagasan itu muncul, pasti ada proses terutama temuan-temuan di Setara ini, bagaimana ketika memunculkan konsep-konsep ini, sehingga yang muncul akhirnya disepakati...	
<b>I:</b>	Ya itu sebenarnya kita melihat perdebatan itu apa benar ini masyarakat Indonesia ini toleran. Pertanyaan utamanya itu, karena hampir semua buku-buku, apalagi kalo pengarang-pengarang Indonesia kan selalu mengatakan bahwa Indonesia ini ramah, sangat toleran, moderat, tetapi kan kita juga melihat begitu banyak kekerasan sebetulnya dalam masyarakat Indonesia. Bukan hanya kekerasan berdasarkan agama, tetapi kekerasan politik dan itu sejak jaman Amangkurat I lah. Awalnya kekerasan di Indonesia ini bisa...setiap pergantian rezim sejak Amangkurat I sampai lahir Soeharto itu kan [ ], namun paling besar memang tahun '65. Artinya, selalu ada sedikit perpecahan. Dan peran agama dalam setiap kekerasan itu selalu ada. selalu ada. '65 itu bisa dikatakan	

	terlibat juga, karena agama memberikan legitimasi kepada pelaku pembantaian bahwa orang komunis bisa dibantai karena dia atheis, tidak beragama. Baik dari Islam maupun Katolik itu memberikan justifikasi.	
<b>P:</b>	Kyai-kyai memerintahkan santri-santrinya untuk ikut membantu membantai PKI.	
<b>I:</b>	Memang. Kalo begitu apakah agama di Indonesia ini seperti yang ideal disaksikan. Kan tidak. Ada kontradiksi-kontradiksi. Tetapi juga dipihak lain juga kita bisa melihat agama mempunyai peran yang positif kan. jadi kita coba menafsirkan membuat konstruksi seperti itu. intoleransi itu pada dasarnya setiap orang mempunyai kecenderungan intoleransi.	
<b>P:</b>	Namun bersifat pasif ya.	
<b>I:</b>	Jadi sifatnya pasif karena ada tekanan sosial, struktur sosial yang membatasi dia sehingga dia tidak menyalurkan secara aktif intoleransi itu. dari situ bisa kita bilang bahwa nilai budaya, nilai-nilai sosial yang berkembang, hukum, negara, itu menjadi penting peran negara dalam hal ini. intoleransi yang sudah ada kemudian dipacu lagi dengan pikiran-pikiran yang semakin puritan. Kita anggaphlah pikiran Salafi itu puritan. Jadi pikiran-pikiran yang coba memurnikan ajaran Islam, kembali ke masa nabi, itu tanpa melihat konteksnya. Melihat kultur lokal, itu akan menambah lagi pemikiran yang menjadi lebih keras lagi. Apalagi kalo kemudian sudah dicampur menjadi sebuah organisasi. Itulah kemudian yang disebut radikalisme. Radikalisme menurut kita adalah titik-titik persinggungan terakhir sebelum meloncat ke terorisme. Karena terorisme kan kemudian harus ada banyak <i>environment</i> lagi kan. Ada <i>social</i> [ ] lain hingga kenapa dia memutuskan untuk meloncat kesitu. Tidak ada orang yang sekedar intoleransi loncatannya langsung menjadi terorisme [ ]. Selalu kita lihat pengalaman mereka yang kemudian memilih jalan jihad itu adalah karena memang awalnya adalah kemudian dari kelompok fanatisme dengan radikal dulu. Gak pernah kemudian dari intoleran aktif loncat langsung kesitu. Jadi itu kaya <i>spare of terrorism</i> .	
<b>P:</b>	Bisa gak dikatakan kalo itu dari intoleransi sampai menuju terorisme, itu kalo bahasa metodologisnya itu, ini skalanya adalah ordinal, meningkat. Jadi sebenarnya dia bisa meningkat terus. Jadi yang atas bisa ke bawah, tapi yang di bawah bisa ke atas. Atau gimana?	
<b>I:</b>	Bisa. Memang kalo dikuantifikasi memang maunya interval, ordinal, atau linier.	
<b>P:</b>	Kalo dalam memposisikan secara konsep yang saya tidak bisa mendapat gambaran ketika...	
<b>I:</b>	Makanya kita gak membangun sebuah indikator-indikator dalam bentuk survei ya. Jadi kalo Anda lihat kita membuat sebuah konstruksi sosial saja. Kita belum sempat menuangkan gagasan itu dalam satu bentuk kuantitatif. Tapi bisa saja itu terbukti. Karena itu harus diuji kepada kelompok-kelompok yang radikal.	
<b>P:</b>	Tapi bisa gak Bang kalo yang pengen banget saya tanya mengenai Perwajahan Islam itu, walaupun Cuma setengah jam, bisa gak dari hasil penelitian yang sudah dilakukan Setara ini ada semacam gagasan awal untuk sejenis deteksi dini. Misalnya, apap bahasanya Abang tadi bilangya secara kontekstual, bisa gak ada satu kelompok ni, misalnya FPI. Nah kalo FPI ini dalam rentang yang tadi, itu kita masuknya kemana. Kalo HTI itu masuknya kemana, kalo MMI, JI, Laskar Misbah. Nah itu bisa gagasan awal ini dari intoleransi dari awal itu sehingga kita bisa tahu.	
<b>I:</b>	Mestinya bisa ya. Kalo penelitian ini kan terprovokasi dan memancing orang untuk mencatat lebih jauh. Dengan empat tahapan tadi. sebetulnya juga kemudian tujuan kita lebih memberikan <i>warning</i> [ ] yang melihat bahwa ada potensi dan kemungkinan semacam itu. Buku kedua ini kan juga ada isyarat semacam itu juga bisa menuju kepada tahan lebih jauh [ ] yang tadinya bergabung dengan kelompok radikal, kemudian akhirnya bertransformasi menjadi jihadis. Ada juga dua kelompok yang tadinya [ ] radikalisme kemudian menjadi jihadis. Individu itu kita lihat. Tapi memang kemudian tidak <i>automatically</i> semua begitu.	

	<p>Tergantung <i>Social response</i>-nya, berinteraksi dengan siapa. Kan itu yang belum kita lihat. Makanya sulit memang mengatakan itu akan pasti begitu. Itu kan jadinya <i>case by case</i>. Kasus individual yang tidak bisa digeneralisir. Secara sosiologis itu pasti ditolak. Kalo sosiologis kan pasti, ajeg ya. siapa yang kecenderungan terbesar lah itu kemudian jadi berbasis teori. Kalo kita secara teoritis memang bisa dikatakan bahwa teori kita masih sangat lemah. Tetapi saya katakan bahwa kenapa kita melakukan begini karena perkembangan dalam kelompok itu sendiri. Sekarang ini kan hidup beberapa generasi yang memang karena peran Aceh Besar. [ ] tapi mereka juga secara usia sudah mulai menyingkir, muncul generasi baru dari Ambon dan Poso. Memiliki pengalaman tempur di Filipina. Generasi ketiga dia generasi yang lebih baru ada yang membom dengan isu sendiri. [ ] tapi prinsipnya semua itu adalah tidak terlalu mempunyai ikatan dengan generasi satu dan generasi dua. Yang muncul generasi baru...</p>	
<b>P:</b>	Dan ideologinya pun variasinya sudah lain.	
<b>I:</b>	<p>Tapi generasi yang terakhir ini akhirnya mencari atau merekrut orang dari kelompok radikal. Karena memang mereka mengalami kesulitan support uang, teknologi, <i>equipment</i> senjata, karena itu mereka harus mengembangkan jalan dan yang paling mungkin mereka bisa lakukan mendekati kelompok radikal. Karena kalo mereka mendekati kelompok yang lain, reaksi pertama adalah penolakan kan, <i>rejecting</i>. Kalo kelompok radikal pemikirannya pada tingkat tertentu kan punya kemiripan. Makanya kita juga bahas disini apa sih sebetulnya [ ] yang dikembangkan di kelompok radikal. Kan ada semacam bagan gitu ya. kita melihat tidak terlalu berbeda secara pemikiran, karena yang satu melihat tidak segan-segan melakukan kekerasan, yang satu lagi adalah kekerasan bukan jalan, tapi kalo terpaksa bisa juga. Dan yang satu tidak segan-segan mengorbankan nyawanya, (sementara) yang satu lagi tidak akan mengorbankan nyawanya. Jadi totalitasnya kan berbeda. Tapi kalo di diskursus sosialnya kita masih lihat secara gampangya tidak jauh berbeda. Itu yang coba kita kembangkan. Memang masih bentuk provokasi lah.</p>	
<b>P:</b>	<p>Bagaimana letak studi ini di dalam visi-misi apa yang mau disampaikan Setara sebagai sebuah lembaga? Posisinya dimana? Kenapa isu ini kok akhirnya masuk juga? Lazuardi juga saya tanya kenapa masuk isu ini? ketika saya ketemu Bang Irfan pertanyaan saya juga sama, jadi apa kompatibilitasnya dengan visi-misi yang dimiliki?</p>	
<b>I:</b>	<p>Memang awalnya kita melihat kebebasan beragama itu HAM. Jadi itu awal kita. Karena kita ingin supaya, karena kalo masalah kebebasan beragama kemudian didekati dengan penafsiran-penafsiran kognitif. Jadi kalo misalnya yang Anda lakukan adalah [ ] atau kelompok-kelompok NU atau kelompok Muhammadiyah lainnya menghadapi kelompok fundamentalis ini kan kemudian saling pasang ayat, [ ] ini bingung. Ya lama-lama kan akhirnya begitu-begitu saja yang dilakukan. Yang tidak memaksa negara untuk tanggap. Tapi kalo kita memakai HAM, bahasa universal karena memang semua negara harus {informan menerima panggilan telepon}. Jadi kalo dengan menggunakan pendekatan hak azasi kan kita tidak terjebak dalam pendekatan spiritualis. Kemudian dengan pendekatan hak azasi, karena Indonesia [ ] dia punya kewajiban-kewajiban sendiri. Jadi lebih mudah untuk memaksa perintah negara atau kita untuk bertindak kalau dengan HAM. Itu pilihan kita. Itu awalnya. Jadi streak karena kita memang lebih banyak sebagai [ ] lah ya. Tapi 2007-2009 kita kan selalu melihat bahwa hampir dalam setiap kejadian atau insiden yang kita sebut sebagai intoleransi, pelakunya kan tetap kelompok-kelompok radikal. Dan [ ] ini kan hanya mencatat saja apa sih penangkalnya? Gimana peristiwanya? Paling data-data penyeimbang di satu hal, kenapa sih. Kemudian tidak mencoba mencari penjelasan kenapa kelompok-kelompok radikal itu menggunakan isu ini. Apa sih kepentingan mereka. Ekonominya ada 1 atau 2. Tapi kan tidak semua itu. kedua, kenapa Jawa Barat selalu menjadi raing tertinggi dalam tingkat pelanggaran.</p>	
<b>P:</b>	Pelanggaran HAM ya?	
<b>I:</b>	Iya. Jadi awalnya kenapa kemudian kita ingin mengetahui siapa pelakunya, sebuah <i>political-social mapping</i> sebenarnya terhadap	

	<p>pelaku-pelaku pelanggaran. Jadi Buku “Perwajahan Islam Indonesia” itu dilatarbelakangi semacam itu. Kemudian membangun sebuah konsep tadi. kita kan harus kompak. Ini kunci kita. Jadi kita di sini juga dalam soal metodologi sosial, satu, kita juga harus menggunakan metode-metode akademis. Artinya kita kan bukan seperti sekolah. Riset kita adalah riset untuk advokasi. Bukan semata-mata riset untuk kemudian <i>social explanation</i>. Ada [ ] lebih jauh. Kemudian riset kita adalah mendidik kritis masyarakat dan mem-<i>provoce</i> masyarakat untuk kemudian bagaimana terlibat dalam pemecahan sosial, <i>problem solving</i>. Karena itu memang harus ada sebuah keinginan provokatif untuk membuat masyarakat terbeliak matanya karena Indonesia ini juga masyarakat yang cenderung juga tidak melek atau tidak terganggu kalo tidak ada rangsangan yang lebih kuat. terkait juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang memang sedikit provokatif. Makanya kita bangun pendapat-pendapat yang kontroversial dan untungnya karena bukan sebuah universitas. Sebuah lembaga riset yang dibawah universitas, di penelitian kita murni, jadi tidak harus mem-<i>push</i> beban seperti yang ada di universitas. Dan disini sebetulnya pemikirannya relatif sama, karena latar belakangnya sebagai aktivis. Perdebatan-perdebatan itu tidak seperti lembaga-lembaga penelitian di kampus yang penuh dengan konsep-konsep. Tapi di kita lebih pada apa yang bisa kita lakukan. Karena itu, riset untuk advokasi.</p>	
<b>P:</b>	<p>Nah terus yang saya coba lihat juga tujuannya kan untuk mem-<i>provoce</i>, mendidik masyarakat juga. Tapi kedepan apa langkah-langkah, kalo Setara sekarang sudah menghasilkan ini, advokasi ke tingkat negara maupun ke masyarakat, bentuk apa yang sevisi dengan apa yang dilakukan oleh Setara?</p>	
<b>I:</b>	<p>Kalo ke masyarakat, pertama, menyebarkanluaskan hasil ini. kita lihat melalui website, semua orang bisa men-<i>download</i>. Itu yang termudah kan. kedua, kepada penerbitan buku. Sebagian kita kirim ke [ ], kepada insitutsi strategis atau individu-individu yang kita duga mempunyai pengaruh, kecil ataupun besar, terhadap pengambil keputusan. Kalo institusi strategis tentu saja, universitas, penelitian, pemerintah, NGO, lembaga-lembaga lainnya. Karena kebiasaan ini kan jadi kita bahasakan. Kalo individu-individu, tentu saja intelektual-intelektual, akademisi, itu kita kirim kepada mereka. Tapi juga kepada masyarakat supaya mereka mengetahui. Selalu yang paling bagus adalah menguji sejauh mana masyarakat itu berminat adalah melalui toko buku. Karena memang itu bukti ujian terbesar, itu market (pasar). Orang mau membeli berarti orang itu memang tertarik. Harus kita uji. Kalau kita beli saja, itu tidak ada jaminan.</p>	
<b>P:</b>	<p>Seperti sia-sia kadang-kadang. Jadi gak ada tanggung jawab untuk membaca.</p>	
<b>I:</b>	<p>Yang kedua memang dalam hal itu melalui aksi monitoring, kita mencoba audiensi juga dengan DPR, dengan teman-teman yang [ ] gagasan. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Mediasi. Jadi kita coba lah yang menggunakan...coba dilihat. Itu langkah yang kita lakukan setelah ini. menjadi sebuah produk ya.</p>	
<b>P:</b>	<p>Terus kalo saya lihat kan. pertama itu survei di Jabodetabek. Kemudian yang ini tambah provinsi Jawa Tengah, sama Yogya. Ini kan gak sedikit biayanya. Nah itu bagaimana dengan pendanaan atau mungkin sifatnya gimana? Karena buat saya itu survei cukup besar. Dana itu gak Cuma 1-2 juta.</p>	
<b>I:</b>	<p>Memang kebetulan dalam hal ini ada sebuah lembaga yang tertarik, kemudian dia men-<i>support</i>. Dan lembaga ini harus menghabiskan budget dia. Karena itu dia support penelitian kita ini, buku ini yang pertama. Plus yang [ ] jadi 3. [ ] jadi ya kita terbantu lah. Karena tidak gampang. Lain dengan misalnya kalo ke kelompok Irfan itu kan universitas ya. kalo bikin sebuah riset kan gampang. Dia sebuah lembaga di bawah universitas. Untuk dapat <i>support</i>, gampang. Kalo Lazuardi Biru itu gampang karena punya relasi dengan BNPT. Gampang kan dapet support dan dana. BNPT kan dananya luar biasa. Kalo kita memang kita harus mempresentasikan dan meyakinkan bahwa ini ada manfaatnya. Kebetulan orang itu liat setuju. Jadi tidak gampang untuk proyek</p>	

	ini. hanya monitoring laporan tahunan, itu sih kerjaan NGO, biasa.	
<b>P:</b>	Sehari-hari.	
<b>I:</b>	Tapi kalo ini..	
<b>P:</b>	Dalam atau luar negeri Bang lembaganya ?	
<b>I:</b>	Duitnya sih luar ya. Tapi lembaganya sih disini. Sebenarnya lembaga ini memberikan bantuan juga kepada lembaganya Irfan juga.	
<b>P:</b>	Yang apa?	
<b>I:</b>	Bukan. Yang terakhir, yang Mesjid itu. Sebetulnya lembaga itu tidak bergerak dalam bidang ini sebetulnya. Lembaga itu memang harus selesai kontraknya. Jadi daripada duitnya daripada harus dikembalikan, lebih baik dihabiskan. Sebetulnya itu tujuan pusat ya, dia dipakai untuk lebih bermanfaat. Itu yang mereka <i>support</i> .	
<b>P:</b>	Nah kemudian kalo boleh tahu apa latar belakang di Setara ini, kalo dilihat dari background, selain aktivis? Secara keilmuan, yang lebih dominan. Misalnya, apakah kebanyakan aktivis, tapi tadinya semuanya anak hukum atau anak FE.	
<b>I:</b>	Latar belakangnya macem-macem. Hukum, politik, tapi kebanyakan anak sosial ya. beragam lah. Tapi sebenarnya untuk ini kan ada ketertarikan lebih luas. Yang pertama, kenapa sih ada di Jawa Barat, tingkat pelanggaran kok tertinggi. Juga kenapa sih kelompok intoleran, kelompok radikalnya mengambil isu-isu soal kehidupan beragama. Kenapa mereka lebih [ ] sebagai isu antara.	
<b>P:</b>	Itu juga kalo yang gak salah saya waktu ketemu Mba Dyah itu yang menarik itu kenapa Jawa Barat termasuk yang tinggi. Index kerentanan radikalismenya cukup tinggi. kalo saya sih menganalisis, <i>background</i> sejarahnya kan ada. <i>background</i> sejarah pemberontakan DI ada disitu udah lama mengakar. Bahkan sempet dijadiin daerah operasi dan rekam jejaknya termasuk sekarang itu masih. Makanya Jawa Barat dan Banten itu termasuk salah satu...	
<b>I:</b>	Iya, betul. Karena kita bertanya pada banyak orang juga. Kalo kita tanya mengapa di Jawa Barat. Lama-lama kita. Toh kita hanya sekedar me[ ] saja. Pelanggaran HAM. [ ] presentase, [ ] dan kemudian timbulnya selalu kepada negara. Apa yang harus dilakukan oleh negara, [ ]. Akhirnya hanya itu saja. Pasti akan diulang-ulang. Makanya agak membosankan. Itu saja. Karena kalo negara sekedar melakukan tugas <i>generic</i> -nya. Tapi kan ditantang [ ] akhirnya kenapa sih Jawa Barat. Karena sampai tahun 2009 selalu Jawa Barat. Kalo begitu orang bertanya kenapa. Apa karena Jawa Barat mungkin dulu ada DI/TII.	
<b>P:</b>	Kalo lihat historis sih kompatibel ya.	
<b>I:</b>	seakan-akan iya.	
<b>P:</b>	seakan-akan cocok ya.	
<b>I:</b>	Belum tentu juga. Kenapa gak Bekasi	
<b>P:</b>	Yang basisnya dulu bukan disitu.	
<b>I:</b>	Kalo dulu kan di Garut. Di Malangbong ya. kenapa gak disitu. Pertanyaan berikutnya adalah kalo misalnya gereja. Pada jaman DI/TII hanya satu saja gereja yang pernah diledakkan.	
<b>P:</b>	Selebihnya gak ada.	
<b>I:</b>	Selebihnya gak ada, kenapa? Karena gak ada Islam, pada waktu jaman Soekarno itu adalah mereka kalo mereka bisa memperjuangkan negara Islam, kelompok mayoritas pasti akan terlindungi. [ ] tapi pasti mereka akan dilindungi. Tapi mereka gak melihat kepada kelompok yang non-Islam itu sebagai musuh. Tapi kemudian kalo sebagai warga negara tidak memenuhi	

	peraturan-peraturannya, dia akan mendapatkan sanksi. Tapi ini gak ada [ ], gak peduli. Dan belum [ ], Islam ini masih Islam seperti [ ]..	
<b>P:</b>	Tradisional.	
<b>I:</b>	Tapi yang berkembang disini kan jadi lain. Campurannya udah macam-macam.	
<b>P:</b>	Terakhir nih Bang. Kan tadi Abang bilang bahwa hasil ini salah satu tujuannya ntar masalah provokasi, bagaimana sekarang tanggapannya setelah di- <i>provoce</i> hasil ini, setelah diaudiensi segala macam.	
<b>I:</b>	Banyak.	
<b>P:</b>	Apa yang direspon, misalnya?	
<b>I:</b>	Yang menarik sebetulnya kalo Islam [ ] bahwa ini.	
<b>P:</b>	Siapa yang menghubungi kesini atau pernah...	
<b>I:</b>	Kita baca aja [ ] atau [ ] bilang ini riset pesanan, riset <i>bodong</i> . Pokoknya macam-macam lah. Ada juga yang bilang kebanyakan metodologinya. Ya seperti perdebatan lebih banyak pada metodologis. Karena mereka punya prinsip bahwa metodologinya salah pasti hasilnya juga salah. Bagi kita ini realitas sosial itu bisa didekati dengan apapun. Dan metodologi itu bukan suatu determinan. Pendekatan metodologi itu mulai dari kuantitatif, kualitatif, <i>grounded research</i> , sampai ke fenomenologi dan sebagainya, antropologi, indeep, <i>social participatory</i> itu bukan jamannya lagi buat kita lah. Bukan orang yang 'genit-genit' secara akademis.	
<b>P:</b>	Kebutuhan praktisnya jauh lebih besar ya?	
<b>I:</b>	Ya itu. riset buat advokasi. Tujuan kita bukan lagi bagian ini lah. Kita paham semua. Kita tahu semua. Pernah tahu semua. Tapi karena kita sebuah NGO, kita membutuhkan sesuatu yang lebih jelas pilihan metodologi kita, walaupun metodologi kita punya kelemahan. Tapi berhubung kita melakukan sesuatu. Itu yang kita lihat. Cuma ada kritiknya metodologi itu. kalo kampus kan begitu.	
<b>I:</b>	Itu yang kita lihat. Yang istilahnya sebagai ketakutan juga. Tidak terlalu akademis. Akibatnya gak mulai-mulai.	
<b>P:</b>	Ini saya Cuma mau jelaskan bahwa wacana ini di luar itu sudah mengalami transformasi, <i>either</i> gagasan radikalisme itu tidak secara konseptual. Tetapi secara konseptual sudah menjadi tolak ukur, parameter. Terlepas dari kelemahan metodologisnya, buat saya itu adalah sebuah keberanian. Istilahnya kalo dalam bahasa akademis itu akademisi boleh salah, tapi gak boleh bohong. Itu aja prinsipnya. Nanti kita gak bohong. Hakikat ilmu pengetahuan kan...	
<b>I:</b>	Kita tidak ada beban itu. Kita gak peduli..kita ingin tahu kepana begini. Bisa kita jadikan bahan untuk advokasi. Itu saja. Tapi tentu saja harus berdasar.	
<b>P:</b>	Minimal yang standar.	
<b>I:</b>	Tapi untuk melakukan purity.	
<b>I:</b>	Kalo kita sih melihat masukan secara terbuka.	
<b>I:</b>	Di kampus?	

**Catatan Lapangan & Hasil Wawancara dengan Dyah Madya Ruth (Direktur Lazuardi Birru)**  
**tentang**  
**“Konstruksi & Pertarungan Wacana Radikalisme di Lazuardi Birru”**  
 Tebet, 25 Mei 2012

**HASIL WAWANCARA**

P: Pewawancara

I: Informan

[ ] = sulit terdengar secara jelas.

	KETERANGAN INFORMAN	KATEGORI
<b>P:</b>		
<b>I:</b>	Sesimpel itu kemudian lebih ke fasilitator. Lebih ke pemuda. [ ] intinya sebenarnya itu. jadi kalo jaman dulu agak pergerakan pelajar [ ] sekarang kan gak ada.	
<b>P:</b>	Ada itu.	
<b>I:</b>	ada tapi gak jalan. Tapi untuk seperti itu juga kita berat. [ ] jadi yang kita lakukan adalah kita bikin <i>virtual community</i> . Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Kita ketemu dimana, bahkan sebenarnya kita gak ketemu. Hanya lewat facebook, lewat media-media.	
<b>P:</b>	Pokoknya gak ada alamat kantornya. Itu yang coba saya tanya. Lacak kemana-mana. Terus?	
<b>I:</b>	Sesederhana itu. karena memang untuk [ ] memahami ini apa dan mau melakukan apa itu butuh kerja keras. Nah dari hal-hal FGD-FGD kita ambil satu kesimpulan bahasan kita selama ini fokus kepada “anak muda dan kekerasan”. Kenapa mereka melakukan kekerasan yang selama ini kita lihat tawuran. Tapi ternyata setelah itu fasenya berbeda lagi. Nah sekarang, kalo bahasa seriusnya “Radikalisme”. Itu yang kemudian coba kita teliti, apa sih ini. karena saya juga awam dengan masalah-masalah seperti itu. awalnya kita juga gak tahu mau ngapain. Dengan segala keterbatasan kita, SDM, kemudian beberapa advokasi dan lain-lain. Jadi kita berusaha memetakan itu tadi. sebenarnya apa radikalisme itu, kemudian apa yang kita bisa lakukan dengan keterbatasan kita sekarang. Itu yang akan kita lakukan. Nah untuk itu kan kita membutuhkan waktu. Kita harus melihat dulu ini [ ] karena penelitian itu cukup [ ] karena FGD-FGD itu, misalnya kaya kualitatif, apa sih? Ya itu memang sarana yang kita punya untuk melihat potret mereka. Mereka mau apa. Seperti bikin komik. Ini sebenarnya <i>request</i> dari mereka. “Lu jangan kasih gua buku penelitian dong, gua juga pengen baca”. “Oh, ya udah lo maunya apa?”. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Jadi kita coba mentransformasikan suatu yang sifatnya agak berat [ ] dengan anak S1 yang sifatnya berat ya. Yang anak-anak banget.	
<b>P:</b>	Saya juga kadang jadi bingung kita melihat. Saya pikir-pikir kenapa kok gak... gimana?	
<b>I:</b>	Kadang saya juga [ ] dengan hasil-hasil yang didapat. Kita sebenarnya gak mau publikasikan, karena kita mau memang hanya untuk, lucu-lucu doang. Hanya untuk tahu aja orang maunya apa. Tapi kadang-kadang kita juga dibuat terkejut. [ ] Jadi [ ] publik tentu tahu.	

	Sampai tahu juga, tapi kita lebih berpikir stakeholder yang perlu dikasih tahu. Karena sebetulnya masalah ini kan bukan masalah ya Lazuardi itu kan bukan civil society, karena hanya kecil sekali. Tidak ada dampak yang signifikan banget yang kita lakukan.	
<b>P:</b>	Tapi di ruang publik iya Mba. Maksudnya di media cukup berpengaruh. Tapi gak apa-apa. Terus?	
<b>I:</b>	Jadi kalo [ ] gak sengaja kita tarik [ ] ya biasanya kita <i>share</i> ke publik atau <i>stakeholder</i> karena untuk kebijakan, seperti itu. Tapi kadang-kadang tidak semua hal menarik untuk mereka. Tidak semua hal juga mereka <i>concern</i> terhadap itu. Intinya sih biasanya aja saya bilang.	
<b>P:</b>	Dari hasil FGD-FGD itu kan kemudian yang kapan titiknya ketemu sehingga bikin survey di beberapa kota, antara 9-10.	
<b>I:</b>	Survey itu sebenarnya nasional.	
<b>P:</b>	Itu serius ya?	
<b>I:</b>	Serius. Cuma dari beberapa tahun 2010 itu [ ] cukup menarik karena cuma menarik persepsi publik aja. Pendapat mereka tentang radikalisme dan [ ]. Nah ternyata dari hasil itu bertepatan lagi, kedua [ ] ternyata [ ]. Dari situ kemudian kita pengen tahu lagi apa [ ]. Jadi kalo dibilang tidak sempurna atau berantakan, nggak. Karena masih jauh. Masih dalam bentuk [ ]. Jadi dari yang 2010 ke 2011 itu jumlahnya juga berubah lagi. [ ] dalam arti ada teori yang [ ]. Jadi nggak ada yang stagnan. Semuanya memang berubah. Kita sudah mencari bentuk, sebenarnya <i>treatment</i> apa sih yang bagus. Ada yang menarik di 2010 sehingga kita yang pengen sesuatu [ ]. Itu dibawah [ ]. Itu juga menarik fenomenanya untuk kita [ ]. Kenapa untuk sosiodemografi mereka [ ] rendah. [ ] dimana aja sih. Supaya maksudnya kita mau dimana nih kerjanya. Kan gak mungkin se-Indonesia kita [ ]. Jadi di 2011 kita coba [ ].	
<b>P:</b>	Itu yang kedua berarti ya?	
<b>I:</b>	Itu yang kedua. Di 2011 dulu itu ada hal instrumen yang kita sempurnakan. Kemudian yang kedua, ada beberapa daerah yang terbagi kuantitatif hampir samar-samar. Karena datanya juga gak terlalu banyak. kemudian mengukur sampel. [ ] jadi kita bikin nasional lagi + over sampel di 9 wilayah. Dari hasil 2010 itu terlihat sesuatu. [ ].	
<b>P:</b>	2010 itu berapa provinsi?	
<b>I:</b>	30. tapi secara nasional kan potret. [ ] tapi potret dari masing-masing daerah kan.	
<b>P:</b>	Modalnya gede juga ya?	
<b>I:</b>	Lumayan.	
<b>P:</b>	Itu dari mana?	
<b>I:</b>	Untungnya kita banyak yang bantu. [ ] banyak pihak yang [ ]. Karena kita juga komunikasinya lebih ke [ ]. Ada sesuatu juga yang kita inginkan [ ].	
<b>P:</b>	Berarti bukan kuesioner sifatnya ya?	
<b>I:</b>	Ada juga institusional. Tergantung. Karena kita tidak bisa. Jadi sifatnya ya kusioner aja. Kadang-kadang orang banyak mimpi yang gak terwujud. Kita gak ya bisa. Yang sempet-sempet [ ] juga. Itu hal-hal yang [ ]. Masalah itu akan terwujud lagi yang <i>Wallahu'alam</i> juga. Dari dulu kita sebenarnya kita [ ] jadi sebisa-bisanya. Tapi untuk penelitian kita [ ] kita juga sempet di- <i>support</i> [ ]. Kemudian nah dari 2011 itu banyak..sebenarnya kalo mau ngeliat kan itu juga keterbatasan kita. Di 2010 itu sebenarnya yang [ ] banyak. ada beberapa. Tapi kita gak bisa [ ] dengan sampel kita ambil [ ] 9.	
<b>P:</b>	2011 ya?	
<b>I:</b>	[ ] dari itu sebenarnya 16 wilayah. Tapi terus akhirnya kita ambil 9 dengan segala keterbatasan. Kita coba potret Jawa dan Sumatera.	

	Jadi untuk yang daerah-daerah lain. pengennya sih Wilayah Timur, tapi gak tahu [ ]. Dari 9 itu memang posisinya beda-beda. Hasilnya menarik. Yang [ ] dalam arti penanganan mereka sama rata [ ]. Kasusnya beda, pelakunya beda. Mereka punya kepentingan yang beda, sampai konteks politiknya pun beda.	
<b>P:</b>	Walaupun dari 9 wilayah, 2 provinsi yang rentan itu menurut saya punya latar belakang sejarah pemberontakan DI/TII dan GAM.	
<b>I:</b>	Iya. Kalo kita lihat dari yang 9 itu kan paling tidak secara kuantitatif [ ] itu sama skornya. Basisnya juga. Kita lihat kok bisa begini. Nah itu tadi. ada kemungkinan dengan latar belakang historis antara Banten dan Jawa Barat, yang sebenarnya Banten juga dulu pecahan Jawa Barat. Jadi secara <i>based area</i> banyak kesamaan historis itu banyak kesamaan. Jadi gak aneh kemudian sama [ ].	
<b>P:</b>	Intelejen juga udah mikir kesitu. Terus?	
<b>I:</b>	Kemudian [ ] jadi kita harus membuktikan secara [ ]. Apa lagi yang menarik ini ya. memang beberapa indikator 2010 dan 2011 tadi saya bilang kan ada penyempurnaan. Bedanya di 2011 itu kita masukkan tentang psikologis mereka. Jadi kita percaya dari hasil yang 2010 itu [ ] seseorang untuk bertindak apa itu bukan semata-mata faktor dari luar, tapi juga ada pengaruh internal. Makanya di 2011 kita coba masukkan aspek [ ] tentang mereka. Secara personal. Tahun 2011 kita [ ]. Bagaimana mereka [ ] mereka. Karena mereka tidak nyaman dengan lingkungan [ ]. Kemudian mereka tidak [ ] membuat mereka terancam. Lebih ke <i>feeling as human life</i> aja. Itu yang di 2011 [ ]. Karena [ ] Indonesia rata-rata tidak percaya diri. Kemudian efeknya menjadi mudah terbawa. Sebenarnya kalo mereka percaya diri [ ] <i>aware</i> dengan apa yang [ ]. <i>Speech</i> [ ] kenapa orang psikologis gak [ ] karena [ ] kondisi masyarakat Indonesia tidak sehat. Kalo kita lihat dari yang [ ] tidak terlalu tangguh untuk menghadapi ancaman-ancaman yang sifatnya dari luar. Karena memang secara psikologis ada hal-hal yang tidak membuat mereka yakin. Nah faktor keyakinan itu juga berpengaruh dengan pemerintah. Kekuatan pemerintah itu tadi. perspektif lebih tentang kebijakan-kebijakan belakangan ini [ ] tidak terlalu banyak. [ ] faktor lain yang kemudian menjadi [ ]. Sehingga semakin gak pede. "Ini gua mau ngapain?". Gamang istilahnya. Masyarakat lebih [ ]. Jadi ajakan-ajakan yang kemudian sifatnya [ ] ya itu akan lebih meyakinkan mereka. Gak heran kalo sekarang [ ] kemudian mereka juga semakin [ ] radikalisme <i>personal touch</i> -nya [ ]. Jadi kalo dilihat yang mereka lakukan gimana [ ] kecil, dengan segala bentuk macam namanya, tapi intinya <i>personal touch</i> yang [ ] juga gitu sehingga ya gampang [ ] itu yang tidak diharapkan dari awal. [ ] kita masih mencoba me [ ] beberapa	
<b>P:</b>	Tapi kalo dari Lazuardi sebagai komunitas, apapun bentuknya, sifatnya, karakteristiknya, apa yang bisa masuk kesesuaian. Orang kan berkumpul [karena] punya visi [dan] misi yang sama. nah apakah di kepemudaan itu saja atau memang? Di kepemudaan itu aja <i>concern</i> -nya?	
<b>I:</b>	Kita [ ]. Jadi kita fokus kita memang. Kalo Mas Sakti lihat gak ada yang tua-tua disitu. Anak-anak muda semua. [ ] sebetulnya gak bisa sesederhana itu bersosialisasi, Cuma mungkin yang sevisi dengan [ ] yang tidak ingin [ ] sesederhana itu kemudian. Maka beberapa pihak melihat [ ] kekerasan itu Cuma contoh. Kalo sekarang tidak [ ] mereka jadi setara sejak '98 sampai sekarang. Itu yang terjadi. [ ] itu pasti sudah jadi mainannya [ ]. Jadi kita gak sempat muncul sudah ke bawah, itu yang bisa sekali [ ]. Sejak '98 sampai sekarang itu kan jarang yah. Sudah nggak aneh lagi orang melakukan kekerasan dengan segala manifestasinya.	
<b>P:</b>	Karena ruang politiknya terbuka.	
<b>I:</b>	Nah, terbuka. Iklimnya memang beda.	
<b>P:</b>	Itu yang saya sebut momen sejarah, akhirnya penting juga. Maksudnya, rezim sih.	
<b>I:</b>	Iya. [ ] memang [ ] karena keterbukaan itu tadi semua jadi kita gampang. Secara kasat mata juga bisa kita lihat. Sederhana banget. Di antara kita ada pelatihan jurnalistik. Itu gampang banget orang tua dilempar [ ] dikumpulin pake [ ] dengan tukang parkir tua. Itu kan	

	gampang banget [ ]. saya bilang [ ]. Itu satu hal yang sepele hanya karena masalah sampai [ ] kesini. [ ]. Dan mencapai sesuatu yang salah ya kalo menurut saya kok begitu mudah orang melakukan kekerasan fisik tanpa berpikir lagi itu apa.	
<b>P:</b>	Kaya gak ada aturan ya? anomali	
<b>I:</b>	Tapi yang terpenting [ ] sebenarnya itu yang menjadi <i>core</i> bagi Lazuardi. Sesederhana itu, kita gak mau [ ] bakalan seserem ini sebetulnya. Cuma akhirnya ...	
<b>P:</b>	Sayanya yang bikin serius	
<b>I:</b>	[ ] kita juga, apa sih?. Ya penasaran aja sih sebetulnya.	
<b>I:</b>	Itu yang kemudian kita [ ] sometimes gak ada gunanya itu di-share ke publik. Ini loh kalo kita dapet hasil-hasil survei [ ]. Hal pertama yang kita lakukan adalah [ ] ini loh Lazuardi [ ] kita kan Cuma membantu [ ]. Tapi mereka punya cara yang baik. [ ]	
<b>P:</b>	Mau ya?	
<b>I:</b>	Tapi sebenarnya [ ] di atasnya begini, tapi di bawahnya.	
<b>I:</b>	Itu yang coba kita tekankan [ ]. Kemarin saya baru [ ]. Ya gitu. menurut saya solusinya itu. [ ] tapi ini juga gak boleh lembek. Gak bisa lembek.	
<b>P:</b>	Tegas, bukan keras. Kalo maen bola itu tegas, bukan kasar.	
<b>I:</b>	Lu gak boleh diemin. Akan semakin kacau. Ini yang coba sekarang di [ ]. Gak ada gunanya juga sih penelitian di-share ke publik. Memang untuk kajian akademik sangat besar manfaatnya.	
<b>P:</b>	Ada forumnya sendiri.	
<b>I:</b>	Ada forumnya sendiri. [ ]	
<b>P:</b>	Tapi kenapa alasa Lazuardi, bukan mempublikasi, istilahnya memberikan ke publik waktu itu? yang kedua terutama. Yang pertama kan nggak.	
<b>I:</b>	Karena kita memberikan positive site. Jadi dari apa yang dikerjakan ini bukan tidak ada hasil.	
<b>P:</b>	Walaupun yang 2010 gak dikasih ke publik kan?	
<b>I:</b>	Tapi ternyata pas kita tes di 2011, ada penurunan. Kita kan gak mau ngasih tahu yang sifat negatifnya dari Lazuardi ya.	
<b>P:</b>	Iyalah. Takutnya malah justru takut	
<b>I:</b>	Di 2011, turun ya. walaupun gak signifikan juga turunnya.	
<b>P:</b>	Tapi kan masih rentan	
<b>I:</b>	Tapi itu bagus untuk [ ] kalo ini masih rentan. Tapi dengan, bisa dilihat kok, mulai dari 2009 ke 2010-2011 dan sebelumnya itu wacana orang-orang tentang radikalisme jauh lebih [ ].	
<b>P:</b>	Wacananya kan?	
<b>I:</b>	Iya. [ ] tapi prevention-nya juga sudah mulai ada. orang sudah mulai aware [ ]. Di satu sisi memang orang lebih aware dengan masalah itu, tapi di sisi lain juga ada hal-hal yang dilakukan di masa-masa itu. Nah itu yang kita mau ambil [ ]. Ternyata walaupun rame, walaupun masih rentan. Kondisinya masih belum bagus, tapi dengan sedikit komunikasi publik tentang deradikalisasi atau [ ] ternyata mereka bisa menurunkan. Masyarakat jadi bisa lebih [ ]. Bagaimana kalo lu [ ] itu. sebenarnya itu yang [ ]. Beneran deh. Lu gak serius aja temen-temen lu [ ]. Coba lebih serius lagi [ ]. Kemarin kita di 2011.	
<b>P:</b>	Yang saya heran itu yah.	

<b>I:</b>	2011 kesini memang mulai lah mereka melakukan sesuatu. Wapres kemarin ngomong soal mesjid radikal. Hati-hati yang [ ]. [ ] tapi maksud saya masalah-masalah seperti itu mereka sudah tahu.	
<b>P:</b>	Bukan karena dibisikin orang UIN itu.	
<b>I:</b>	Jadi ya, at least, mereka jadi lebih tahu. Kaya kemarin kita ketemu, waktu rapat itu, [ ] gak tahu persoalannya sama sekali. [ ] di sekolah, di kampus, dia bener-bener gak tahu. [ ] saya dulu ikut LBH.	

